



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH
(L K P j)**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2009**

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2010**

KATA PENGANTAR

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berkewajiban untuk melaporkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan yang dimaksud dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPj) kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

LKPj Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang disampaikan dalam kesempatan ini adalah informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2009, yang sekaligus juga sebagai tahun keempat untuk implementasi Visi Bupati Kotawaringin Barat periode 2005-2010 yakni “KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DAERAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DENGAN MASYARAKATNYA YANG MAJU, AMAN, TERTIB, DAMAI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN “. dengan Misi sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan daerah dengan mengedepankan stabilitas politik, supremasi hukum, demokratisasi, keadilan dan akuntabilitas.
2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang berkeadilan, serta berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, mandiri, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara demokratis, transparan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan skala prioritas secara demokratis, adil dan merata sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
5. Melakukan pelayanan publik secara bertanggung jawab dan benar untuk terselenggaranya proses pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Visi dan Misi tersebut yang merupakan mandat dari seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat tentunya harus dilaporkan serta dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya, oleh karena itu LKPj disusun selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik terhadap pelaksanaan Pemerintah Daerah juga sekaligus untuk memenuhi kewajiban administratif Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Pangkalan Bun, April 2010

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si

BAPPEDA KAB. KOTAWARINGIN BARAT	
JABATAN	PARAF
1. WABUP	
2. SEKDA	
3. KEPALA	
4. SEKRETARIS	
5. KEPALA BIDANG	
6. KASUBID	

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Gambaran Umum Daerah	1
1. Kondisi Geografis Daerah	1
2. Gambaran Umum Demografis	4
3. Kondisi Ekonomi.....	6
a. Potensi Unggulan Daerah	6
b. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB.....	19
BAB II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH	21
A. Visi dan Misi	21
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	22
C. Prioritas Daerah	26
BAB III. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	29
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.....	29
1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	29
2. Target dan Realisasi Pendapatan	31
3. Permasalahan Dan Solusi	34
B. Pengelolaan Belanja Daerah.	36
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	36
2. Target dan Realisasi Belanja	37
C. Pengelolaan Pembiayaan.	38
1. Penerimaan Pembiayaan	38
2. Pengeluaran Pembiayaan	38

BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39
A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan	39
A. 1. Program dan Kegiatan	39
1.1. Bidang Pendidikan	39
1.2. Bidang Kesehatan	43
1.3. Bidang Lingkungan Hidup	50
1.4. Bidang Pekerjaan Umum	53
1.5. Bidang Penataan Ruang	56
1.6. Bidang Perencanaan Pembangunan	57
1.7. Bidang Perumahan.....	60
1.8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	61
1.9. Bidang Penanaman Modal.....	62
1.10. Bidang Koperasi, UMKM dan Pasar.....	62
1.11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	65
1.12. Bidang Ketenagakerjaan.....	67
1.13. Bidang Ketahanan Pangan.....	69
1.14. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	71
1.15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	73
1.16. Bidang Perhubungan.....	74
1.17. Bidang Komunikasi dan informatika	76
1.18. Bidang Pertanahan	77
1.19. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Luar Negeri	77
1.20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi.....	82
1.21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	99
1.22. Bidang Sosial	101
1.23. Bidang Kebudayaan	104
1.24. Bidang Statistik.....	105
1.25. Bidang Kearsipan	106
1.26. Bidang Perpustakaan	108

a. 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
2.1 Bidang Pendidikan	109
2.2. Bidang Kesehatan	112
2.3. Bidang Lingkungan Hidup	123
2.4. Bidang Pekerjaan Umum	125
2.5. Bidang Penataan Ruang	129
2.6. Bidang Perencanaan Pembangunan	130
2.7. Bidang Perumahan.....	134
2.8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	134
2.9. Bidang Penanaman Modal.....	135
2.10 Bidang Koperasi, UMKM dan Pasar.....	136
2.11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	139
2.12 Bidang Ketenagakerjaan.....	141
2.13 Bidang Ketahanan Pangan.....	142
2.14 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	144
2.15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	146
2.16. Bidang Perhubungan.....	147
2.17 Bidang Komunikasi dan informatika	148
2.18 Bidang Pertanahan	148
2.19. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Luar Negeri	149
2.20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi.....	154
2.21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	172
2.22. Bidang Sosial	175
2.23. Bidang Kebudayaan	176
2.24. Bidang Statistik.....	177
2.25 Bidang Kearsipan	178
2.26 Bidang Perpustakaan	179
A.3. Permasalahan dan Solusi	180
3.1 Bidang Pendidikan	180
3.2. Bidang Kesehatan	181
3.3. Bidang Lingkungan Hidup	195
3.4. Bidang Pekerjaan Umum	195
3.5. Bidang Penataan Ruang	198

3.6. Bidang Perencanaan Pembangunan	199
3.7. Bidang Perumahan.....	199
3.8. Bidang Kepemudaan dan Olahraga.....	199
3.9. Bidang Penanaman Modal.....	199
3.10 Bidang Koperasi, UMKM dan Pasar.....	200
3.11. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil	202
3.12 Bidang Ketenagakerjaan.....	203
3.13 Bidang Ketahanan Pangan.....	203
3.14 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	205
3.15. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	205
3.16. Bidang Perhubungan.....	206
3.17 Bidang Komunikasi dan informatika	207
3.18 Bidang Pertanahan	207
3.19. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Politik Luar Negeri	207
3.20. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Sandi.....	208
3.21. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	209
3.22. Bidang Sosial	210
3.23. Bidang Kebudayaan	210
3.24. Bidang Statistik.....	211
3.25 Bidang Kearsipan	211
3.26 Bidang Perpustakaan	211
B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan	212
1. Program dan Kegiatan	212
1.1. Bidang Perikanan dan Kelautan	212
1.2. Bidang Pertanian dan Peternakan	214
1.3. Bidang Perkebunan	216
1.4. Bidang Kehutanan	220
1.5. Bidang energi dan sumber daya mineral	222
1.6. Bidang Pariwisata.....	222
1.7 Bidang Perdagangan.....	225
1.8. Bidang Industri	226
1.9 Bidang Ketransmigrasian	228

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	
2.1. Bidang Perikanan dan Kelautan	228
2.2. Bidang Pertanian dan Peternakan	232
2.3. Bidang Perkebunan	233
2.4. Bidang Kehutanan	236
2.5. Bidang energi dan sumber daya mineral	238
2.6. Bidang Pariwisata.....	239
2.7. Bidang Perdagangan.....	244
2.8. Bidang Industri	246
2.9. Bidang Ketransmigrasian	247
3. Permasalahan dan Solusi	248
3.1. Bidang Perikanan dan Kelautan	248
3.2. Bidang Pertanian dan Peternakan	249
3.3. Bidang Perkebunan	251
3.4. Bidang Kehutanan	251
3.5. Bidang energi dan sumber daya mineral	253
3.6. Bidang Pariwisata.....	253
3.7. Bidang Perdagangan.....	255
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	257
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	257
1. Dinas Pertanian dan Peternakan.....	257
1.1. Dasar Hukum	257
1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	258
1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan	258
1.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	259
1.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran	261
1.6. Permasalahan Dan Solusi	262
2. Dinas Perikanan dan Kelautan	263
2.1. Dasar Hukum	263
2.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	264
2.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan	264
2.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	265
2.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran	267

2.6. Permasalahan Dan Solusi	268
3. Dinas Perikanan dan Kelautan	269
3.1. Dasar Hukum	269
3.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	269
3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan	279
3.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	270
3.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran	271
3.6. Permasalahan Dan Solusi	272
4. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	272
4.1. Dasar Hukum	272
4.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	273
4.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan	273
4.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	275
4.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran	277
4.6. Permasalahan Dan Solusi	300
5. Bidang Ketahanan Pangan	300
5.1. Dasar Hukum	300
5.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	300
5.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan	300
5.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	301
5.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran	303
5.6. Permasalahan Dan Solusi	304
6. Bidang Koperasi,UMKM dan Pasar	304
6.1. Dasar Hukum	305
6.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	305
6.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan	305
6.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	305
6.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran	306
6.6. Permasalahan Dan Solusi	306

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan kepada desa.....	307
1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	307
1.1. Dasar Hukum	307
1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	307
1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan	308
1.4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya	310
1.5. Sumber Dan Jumlah Anggaran	311
2. Bidang Tata Pemerintahan.....	319

BAB VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah	323
1. Bidang Statistik.....	323
1.1 Kebijakan dan Kegiatan	323
1.1.1. Kebijakan.....	323
1.1.2 Kegiatan yang dilaksanakan.....	323
1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	324
1.3. Permasalahan Dan Solusi	326
2. Bidang Keamanan	323
2.1 Kebijakan dan Kegiatan Kerjasama dengan aparat Keamanan terkait (Polres,Kodim,Lanud,Kompi dan POM.....	327
1.1.1. Kebijakan.....	327
1.1.2 Kegiatan yang dilaksanakan.....	327
2.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	327
2.3. Permasalahan Dan Solusi	328
B. Pembinaan Batas Wilayah (Perbaikan)	328
1. Kebijakan dan Kegiatan	328
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	330
3. Permasalahan Dan Solusi	330
C. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	332
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya	332
2. Status Bencana	332
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran	332
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana	333
5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi	334

D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	333
1. Gangguan Yang Terjadi	333
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum	334
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan	334
4. Sumber dan Jumlah Anggaran	334
5. Penanggulangan Dan Kendalanya	334
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan	335
 BAB VII PENUTUP	 336

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - undang (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9 tambahan lembaran Negara No. 72 Tahun 1959).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran RI Nomor 4355).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2237), Sebagaimana telah beberapa kali diubah sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penambahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844).

Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah.

a. Luas Wilayah dan Letak Geografi

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km² terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai.

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1.1. sebagai berikut :

Tabel 1.1.1.
Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase Luas Terhadap Kabupaten
1. Arut Selatan	2.400	22,31
2. Kumai	2.921	27,15
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32
4. Arut Utara	2.685	24,96
5. Pangkalan Lada	229	3,08
6. Pangkalan Banteng	1.306	10,21
KOTAWARINGIN BARAT	10.759	100

Sumber data : Kobar dalam angka Tahun 2009

Letak Geografis Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

b. Topografi

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari:

-) Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.
-) Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.
-) Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial/Organosal banyak mengandung air.

c. Geomorfologi

Keadaan geomorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 1.1.2. sebagai berikut :

Tabel 1.1.2.
Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Tinggi dari Permukaan Laut (Meter)	Kemiringin (%)
1. Arut Selatan	0 – 500	0 – 40
2. Kumai	0 – 500	0 – 40
3. Kotawaringin Lama	7 – 100	0 – 2 dan 15 – 40
4. Arut Utara	25 – (>500)	2 – (>40)
5. Pangkalan Lada	0 – 500	0 – 40
6. Pangkalan Banteng	0 – 500	0 – 40

Sumber Data : BPS Kobar Tahun 2009

d. Iklim

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0 °C – 33,8 °C dan suhu minimum antara 21,3 °C – 23,4 °C, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

e. Sungai

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya, dimana nama - nama sungai di Kotawaringin Barat terdapat pada tabel 1.1.3. berikut ini:

Tabel. 1.1.3.
Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang
Yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedalaman (M)	Lebar (M)
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber data : BPS Kobar Tahun 2009

f. Jenis Lahan, Penggunaan Lahan, dan Luas Lahan

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah setempat dalam pengembangan pembangunan kawasan tersebut seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Adapun jenis tanah/lahan yang terdapat di wilayah Kecamatan Kumai meliputi : lotosal, kompleks podsolik merah kuning – podsol, laterik, alluvial, regosol podsol, organosal serta danau atau rawa - rawa.

Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang. Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Penggunaan tanah/lahan dapat pula digunakan sebagai bahan untuk melihat tingkat kerusakan lingkungan. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat penggunaan tanah/lahan masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan tanah/lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, lading/tegalan, kebun campur, permukiman dan lain - lain.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Kependudukan

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Sampai dengan akhir Desember 2009 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 258.767 jiwa dengan rincian sebagaimana tabel 1.2.1. berikut::

Tabel 1.2.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Arut Selatan	53.472	52.715	106.187
2.	K u m a i	25.625	23.043	48.668
3.	Kotawaringin Lama	11.467	9.897	21.364
4.	Arut Utara	8.676	6.841	15.517
5.	Pangkalan Lada	16.799	14.840	31.639
6.	Pangkalan Banteng	20.121	15.271	35.392
Jumlah		136.160	122.607	258.767

Sumber Data : BPS Kobar Tahun 2009

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut diatas pertambahan penduduk biasanya terpusat pada sentra - sentra tertentu seperti: tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya. Jumlah penduduk serta kepadatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 1.2.2. dan tabel 1.2.3.:

Tabel 1.2.2.
Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Sex Ratio
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Arut Selatan	28.710	53.472	52.715	106.187	101,44
2.	K u m a i	10.975	25.625	23.043	48.668	111,21
3.	Kotawaringin Lama	5.902	11.467	9.897	21.364	115,86
4.	Arut Utara	4.122	8.676	6.841	15.517	126,82
5.	Pangkalan Lada	8.303	16.799	14.840	31.639	113,20
6.	Pangkalan Banteng	9.495	20.121	15.271	35.392	131,76
Tahun 2009		67.507	136.160	122.607	258.767	111,05
Tahun 2008		58.553	119.440	107.943	227.383	110,65

Sumber data : BPS Kobar Tahun 2009

Tabel 1.2.3.
Kepadatan Penduduk Km² dan Rata-rata Penduduk per Rumah Tangga

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Rata - rata	
			Kepadatan Penduduk (Jw/Km ²)	Penduduk per Rumah Tangga
1.	Arut Selatan	2.400	44	4
2.	K u m a i	2.921	17	4
3.	Kotawaringin Lama	1.218	18	4
4.	Arut Utara	2.685	6	4
5.	Pangkalan Lada	229	138	4
6.	Pangkalan Banteng	1.306	27	4
Tahun 2009		10.759	24	4
Tahun 2008		10.759	21	4

Sumber data : BPS Kobar Tahun 2009

b. Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Kotawaringin Barat lapangan pekerjaan formal yang tersedia belum mampu menyerap sepenuhnya tenaga kerja yang ada, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia masih didominasi dalam bidang informal seperti nelayan, petani, penambang tradisional dan sebagainya. Jumlah pencari kerja, lowongan dan penempatan tenaga kerja menurut tingkat pendidikan adalah sebagaimana tertera pada tabel 1.2.4. :

Tabel 1.2.4.
Jumlah Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja menurut tingkat pendidikan di Kab. Kotawaringin Barat

Tingkatan Pendidikan	Pencaker		Lowongan		Penempatan	
	L	P	L	P	L	P
SD	38	1	6	-	5	-
TTSD	122	-	74	-	62	-
SLTP	90	10	123	1	118	1
SLTA	797	554	11	3	11	2
Sarmud / D.I / D.II	91	188	10	10	10	10
D.III	171	262	145	87	173	159
Sarjana / S-1	479	479	244	245	197	150
Pasca Sarjana / S-2	2	4	-	-	-	-
Tahun 2009	1.790	1.498	613	346	576	322
Tahun 2008	1.787	1.016	516	120	478	83

Sumber Data : Dinas Nakertrans Kobar Tahun 2009.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

1. Pertanian

Usaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Kotawaringin Barat hanya sebagian kecil yang mungkin berorientasi pasar, karena sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Produksi tanaman pangan secara keseluruhan cenderung menurun seperti padi ladang. Namun Komoditi yang meningkat dalam empat tahun terakhir adalah padi sawah dan sayuran.

Peningkatan komoditi tersebut diduga banyaknya kebutuhan akan konsumsi di daerah seiring dengan sulitnya kebutuhan pangan di dalam negeri. Pengembangan usaha pertanian perlu terus ditingkatkan untuk mencapai Swasembada Pangan.

Pada dasarnya pembangunan sub-sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani khususnya peran serta masyarakat pada umumnya melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pertanian. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya melalui perluasan areal pertanian sehingga produksi beras dapat ditingkatkan kualitasnya. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan pengolahan pasca panen dan sistem pemasarannya.

Selain itu diversifikasi kualitas padi dan palawija perlu dilakukan guna diperoleh produksi beras dan palawija yang diharapkan termasuk diversifikasi tanaman pangan yang sedang dikembangkan. Untuk itu perlu juga dilakukan peningkatan sistem irigasi, sehingga pengamanan produksi pertanian melalui pengendalian organisme pengganggu tanaman, antisipasi kekeringan dan banjir dapat dilakukan dengan baik.

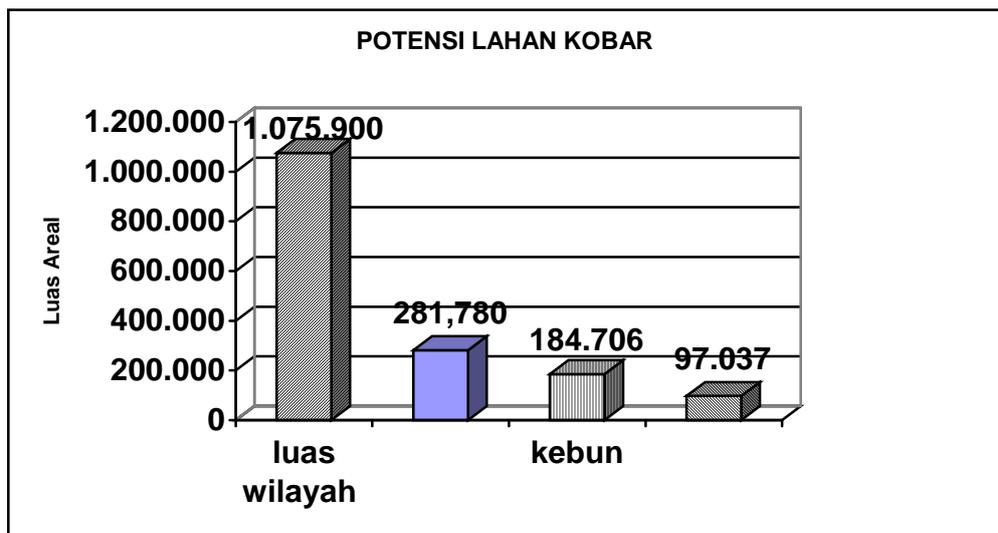
Selain faktor fisik di atas, faktor sumber daya manusia juga perlu dikembangkan agar peningkatan peran dan fungsi lembaga penyuluh pertanian tidak hanya berjumlah sedikit tetapi juga perlu peningkatan jumlah dan kualitasnya. Untuk pasar ekspor, sektor ini masih belum dapat memenuhi keinginan nilai ekspor yang dibutuhkan, sehingga ruang lingkup pemasarannya hanya sebatas perdagangan regional saja.

2. Perkebunan

Total potensi lahan perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat seluas 1.075.90 Ha, Cadangan Lahan Perkebunan seluas 281.780 Ha, telah dibuka untuk Perkebunan 184.706,93 Ha dan Sisa lahan Perkebunan seluas 97.037,07 Ha, dapat dilihat pada Grafik 1. sebagai berikut::

Grafik 1.

Potensi Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat

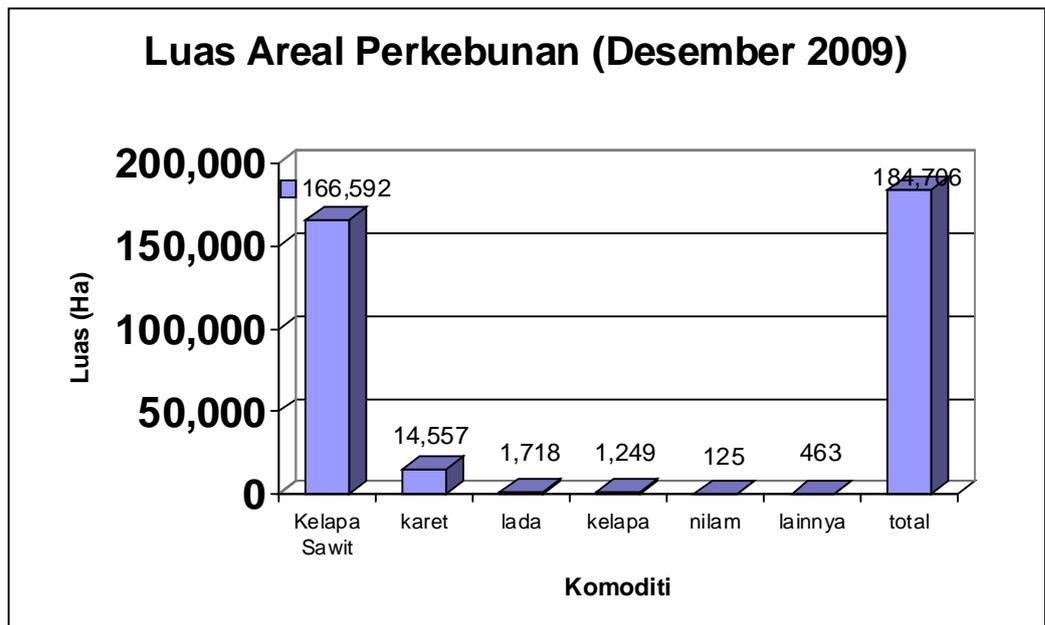


Sumber Data : Dinas Perkebunan Kobar Tahun 2009

Ada 3 (tiga) komoditi utama yang telah dikembangkan dan telah mengarahkan kepada kegiatan usaha Agribisnis oleh petani pekebun maupun oleh Perusahaan Perkebunan seperti: Kelapa Sawit, Karet, Lada dan lainnya.

Komoditi yang dominan meliputi: (1) Kelapa Sawit seluas 166.952 Ha (90,19 %), (2) Karet seluas 14.557,50 Ha (7,88 %), (3) Kelapa Dalam seluas 1.249,72 (0,68 %), (4) Lada seluas 1.718,70 Ha (0,93 %), (6) Nilam seluas 125 Ha (0.07 %), dan (7) Komoditi lainnya seluas 463,75 Ha (0,25 %), selanjutnya dapat dilihat pada Grafik 2 berikut ini.

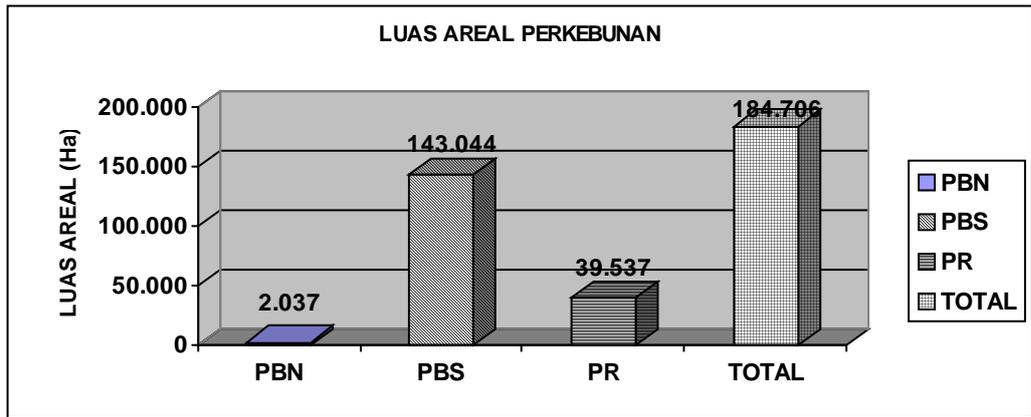
Grafik 2.
Luas Areal Komoditi Perkebunan sampai dengan Desember 2009.



Sumber Data : Dinas Perkebunan Kobar Tahun 2009

Seiring dengan banyak minat investor perkebunan berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat maka luas areal kebun Perusahaan lebih besar dari luas kebun Rakyat. Luas kebun Perusahaan Besar Negara (PTPN XIII) sebesar 2.037 Ha (1,11 %) dan luas kebun Perusahaan Besar Swasta sebesar 143.044 Ha (77,50 %). Sedangkan Kebun Rakyat seluas 39.537 Ha (21,42 %). selanjutnya dapat dilihat pada Grafik 3 berikut ini.

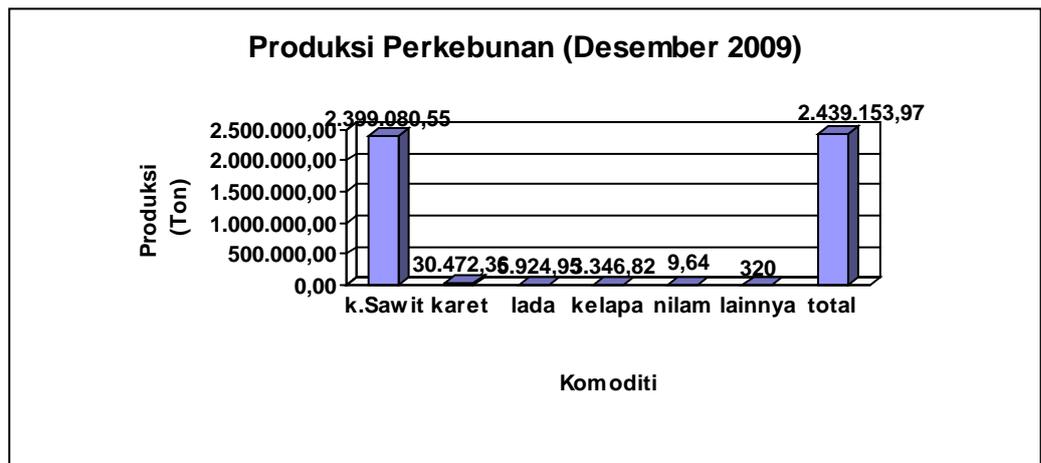
Grafik 3.
Luas Areal Perkebunan di Kab. Kotawaringin Barat s/d Desember 2009



Sumber Data : Dinas Perkebunan Kobar Tahun 2009

Total produksi komoditi perkebunan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat (sampai Desember 2009) sebesar 2.439.153,97 ton. Komoditi yang dominan meliputi: (1) Kelapa Sawit (TBS) sebesar 2.399.080,55 ton (98,36 %), (2) Karet kering sebesar 30.372,36 ton (1,25 %), (3) Lada butiran kering sebesar 5.924,95 ton (0,24 %), (4) Kelapa sebesar 3.346,82 ton (0,14 %), (5) Nilam (brangkas) 9,64 ton (0,001 %), dan Komoditi lainnya sebesar 319,65 ton (0,01 %). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Grafik 4.

Grafik 4.
Total Produksi Komoditi Perkebunan

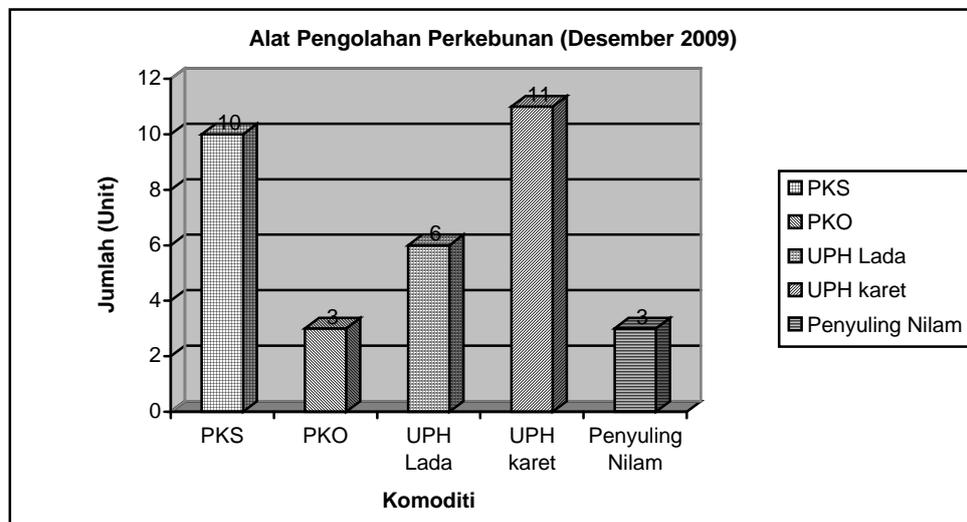


Sumber Data : Dinas Perkebunan Kobar Tahun 2009

Sampai bulan Desember 2009 telah dibangun dan operasional Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang yang menghasil CPO (*Crude Palm Oil*) atau minyak mentah Kelapa Sawit sebanyak 10 unit, Pabrik Pengolahan Minyak Goreng 1 unit, Pabrik PKO (*Palm Kernel Oil*) atau Minyak Inti Kelapa Sawit sebanyak 3 (tiga) unit, Pengolahan Hasil Lada sebanyak 6 (enam) unit, dan Pengolahan Hasil Karet sebanyak 11 (sebelas) unit sedangkan Penyulingan Minyak Nilam sebanyak 3 (tiga) unit.

Grafik 5.

Jumlah Unit Pengolahan Komoditi Perkebunan



Sumber Data : Dinas Perkebunan Kobar Tahun 2009

Pengembangan perkebunan dengan menggunakan tanaman tahunan yang berupa pohon, merupakan teknologi yang kompatibel dengan persyaratan ekologis, dapat memberikan fungsi hutan yang berbeda dengan hutan produksi. Pengembangan perkebunan pada dasarnya berupa membangun suasana harmonis antara unsur - unsur ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, sehingga nantinya bisa menjadi kawasan industri masyarakat perkebunan (Kimbun).

Dalam konteks ini termasuk didalamnya adalah pengembangan kebun sebagai sumber pangan dalam arti luas. Upaya untuk mendorong pengembangan perkebunan di daerah, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para investor untuk menanamkan investasinya di daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 26 Tahun 2007 tentang Ijin Usaha Perkebunan.

Langkah yang ditempuh pemerintah untuk memacu usaha disektor perkebunan, khususnya kelapa sawit telah dapat meningkatkan produktivitas yang mampu menembus pasar dalam negeri maupun ekspor dalam bentuk *Crude Palm Oil (CPO)*, *Palm Kernel Expeller Faq*, *RPB Palm Stearin*, *RPB Palm Olein*, *Palm Fatty Acid Distillate*, *Crude Palm Kernel Oil*, dengan jumlah nilai ekspor pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.3.1, Sedangkan untuk jenis komoditas lainnya masih meliputi perdagangan regional.

Tabel 1.3.1.
Volume Ekspor Komoditas Kelapa Sawit dengan Turunannya

Komoditas	Produk	Volume Ekspor		Nilai Ekspor	
		(dalam MT)		(dalam USD)	
		2008	2009	2008	2009
Kelapa Sawit	-Crude Palm Oil (CPO)	84.364,787	300.353,564	65.652.567,81	172.694.796,39
	-RBD Palm Stearin	28.741,971	84.524,193	24.418.521,83	43.746.381,50
	-RBD Palm Olein	7.461.014,060	9.949,778	259.846,78	5.020.260,95
	-Palm Fatty Acid Distillate	7.911.722,960	8.204,728	13.446.612,58	2.986.536,83
	-Crude Palm Kernel Oil (CPKO)	9.094.420,760	17.069,384	259.816,78	9.177.097,51
	-Palm Kernel Expeller Faq	-	3.300,000	-	157.000,00
	Jumlah	24.580.264,538	423.401,647	104.037.365,780	233.782.073,18

Sumber Data : Disbun, Disperindag Kobar Tahun 2009

3. Kehutanan

Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Barat di Sub Sektor Kehutanan sangat besar, namun demikian kelestarian kawasan hutan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di alam sangat perlu diperhatikan. Selama enam tahun kebelakang, sub sektor kehutanan menjadi primadona Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan semakin berkurangnya kawasan hutan serta untuk menjaga kelestariannya diiringi dengan semakin gencarnya upaya penerbitan *illegal logging*, maka sub sektor kehutanan secara perlahan telah digantikan posisinya oleh sub sektor perkebunan.

Sampai dengan tahun 2009 luas kawasan hutan di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut fungsinya adalah sebagaimana tabel 1.3.2 berikut .

Tabel 1.3.2
Luas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

No	Fungsi Kawasan	Luas (Ha)	Prosentase (%)
I	Kawasan Lindung	265.990,74	24,72
	~Hutan Lindung (HL)	8.676,33	0,81
	~Hutan Nasional (TN)	208.506,12	19,38
	~Hutan Wisata (HW)	15.900,40	1,48
	~Suaka Margasatwa (SM)	32.907,89	3,06
II	Kawasan Budidaya	809.909.26	75,28
	~Hutan Produksi Terbatas (HPT)	83.352,48	7,75
	~Hutan Produksi Tetap (HP)	215.554,24	20,03
	~KPP / KPPL	473.076,98	43,97
	~Areal Transmigrasi (TI)	18.330,34	1,70
	~Rencana Areal Transmigrasi	10.310,81	0,96
	~Kawasan Khusus	142,29	0,01
	~Danau dan Sungai	9.142,12	0,85
	Total	1.075.900	100

Sumber Data : Bappeda Kab. Kobar Tahun 2009

Untuk jumlah produksi hasil hutan sektor kehutanan terhadap Komoditas jenis kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.3.3. :

Tabel 1.3.3.
Jumlah Produksi Hasil Hutan Sektor Kehutanan

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam M ³)	
	2008	2009
Kayu Meranti	99,675,78	123.613,97
Kayu Rimba Campuran	6.763,95	8.433,22
Kayu Indah	562,75	712,81
Jumlah	107.002,48	132.760,00

Sumber Data : Dinas Kehutanan Kobar Tahun 2009

Untuk jumlah produksi hasil hutan bukan kayu sektor kehutanan terhadap Komoditas jenis kayu di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.3.4. :

Tabel 1.3.4.
Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Sektor Kehutanan

Komoditas (Kelompok)	Jumlah Produksi (dalam Ton)
	Tahun 2009
Rotan	900,74
Jelutung	125,66
Kulit Kayu	6,42

Sumber Data : Dinas Kehutanan Kobar Tahun 2009

4. Perikanan

Produksi ikan di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama ini masih bertumpu pada usaha penangkapan ikan, baik pada perairan umum (sungai, danau, rawa). Peningkatan produksi ikan perairan umum tersebut diduga berhubungan dengan permintaan pasar yang meningkat dan sumberdaya perairan umum yang potensial, maka perlu adanya peningkatan dan revitalisasi pembangunan perikanan yang baik selain peningkatan, pengembangan sarana-prasarana produksi perikanan dan kelautan.

Dilain sisi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih tertinggal perlu dilakukan, terutama di kawasan perairan umum dan pantai. Hal tersebut dilakukan guna adanya peningkatan hasil usaha dan pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Selain hal tersebut diatas, maka perlu juga dilakukan perlindungan dan pengembangan reservasi ikan (sungai).

Dalam perdagangan skala besar, sektor ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan nilai ekspor. Padahal dilihat dari potensi yang ada, sektor ini memiliki potensi yang besar dalam menunjang pemasukan devisa negara terutama dari perikanan laut.

Adapun jumlah produksi sektor perikanan di Kabupten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.3.5. :

Tabel 1.3.5.
Jumlah Produksi Sektor Perikanan

Komoditas	Produk	Jumlah Produksi (dalam Ton)	
		2008	2009
Perairan Laut	Perikanan Tangkap	7.848,30	8.014,92
Perairan Umum	Perikanan Tangkap	1.196,50	1.040,06
Budidaya Perikanan Darat	Perikanan Budidaya	760,84	864,42
- Tambak Air Payau	PerikananTambak	390,52	396,12
- Kolam Air Tawar/Sawah	Perikanan Kolam	21,00	45,58
- Keramba	Perikanan Keramba	349,32	422,72
Budidaya Perikanan Laut	Perikanan Budidaya	25,00	30,00

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Kobar Tahun 2009

5. Peternakan

Dari data yang ada diketahui, produksi daging sapi potong pada tahun 2009 sebesar 508,24 ton dan produksi daging unggas di tahun 2009 sebesar 915,98 ton.

Produksi daging kambing/domba tahun 2009 sebesar 48,62 ton mengalami kenaikan dibanding tahun 2008 sebesar 27,87 ton, begitu pula produksi daging babi terjadi kenaikan dimana pada tahun 2008 sebesar 44,23 ton sedangkan tahun 2009 sebesar 88,62 ton. Untuk meningkatkan produksi daging yang lebih berkualitas baik, maka perlu diperhatikan pengembangan budidaya peternakan sapi yang terencana dan baik. Selain itu pengembangan budidaya peternakan ternak besar dan kecil perlu dilakukan guna menunjang produksi daging dalam kapasitas yang mencukupi.

Perlu juga diperhatikan peningkatan populasi dan produksi peternakan tersebut agar tidak hanya memenuhi konsumsi lokal saja tetapi juga dapat meluas hingga pasar ekspor maka perlu pengembangan sistem pemasaran dengan mengefektifkan pasar ternak, tempat pemotongan hewan dan pengamanan produksi ternak dengan menekan angka kematian ternak.

Jumlah produksi daging pada Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.3.6. sebagai berikut :

Tabel 1.3.6.
Jumlah Produksi Daging (dalam Ton)

Kecamatan	Sapi Potong	Kambing / Domba	Babi	Unggas
1. Kotawaringin Lama	12,99	0,87	14,22	51,45
2. Arut Selatan	388,09	1,00	10,45	212,54
3. Kumai	45,26	44,49	0	317,11
4. Arut Utara	9,00	0	23,54	9,61
5. Pangkalan Lada	38,99	0,70	0	204,06
6. Pangkalan Banteng	13,91	1,56	41,41	121,21
Tahun 2009	508,24	48,62	89,62	915,98

Sumber Data : Distanak Kobar Tahun 2009

Secara umum untuk produksi telur rata-rata terjadi peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009 kecuali ayam ras petelur tidak ada produksinya. Untuk Kecamatan Kumai merupakan peringkat tertinggi dalam produksi telur ayam buras, sedangkan kecamatan Arut Selatan tertinggi dalam produksi telur itik.

Jumlah produksi telur pada Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 1.3.7. sebagai berikut :

Tabel 1.3.7.
Jumlah Produksi Telur (dalam Ton)

Kecamatan	Ayam Buras	Itik	Jumlah
1. Kotawaringin Lama	10,72	11,61	22,33
2. Arut Selatan	15,15	77,15	92,30
3. Kumai	15,30	55,78	71,08
4. Arut Utara	2,85	6,20	9,05
5. Pangkalan Lada	83,05	48,41	131,46
6. Pangkalan Banteng	11,43	23,12	34,55
Tahun 2009	138,51	222,26	360,77
Tahun 2008	110,34	115,00	225,34

Sumber Data : Distanak Kobar Tahun 2009

Populasi ternak terjadi peningkatan, dimana jumlah populasi ternak dapat dilihat pada tabel 1.3.8.

Tabel 1.3.8.
Populasi Ternak (dalam ekor)

Kecamatan	Sapi Potong	Kambing / Domba	Babi
1. Kotawaringin Lama	686	365	577
2. Arut Selatan	2.525	427	424
3. Kumai	2.390	63	0
4. Arut Utara	422	0	955
5. Pangkalan Lada	2.059	298	0
6. Pangkalan Banteng	735	661	1.680
Tahun 2009	8.817	1.814	3.636
Tahun 2008	5.651	1.608	2.927

Sumber Data : Distanak Kobar Tahun 2009

Populasi unggas untuk Kabupaten Kotawaringin Barat rata-rata mengalami kenaikan dari tahun 2008 ke tahun 2009, terkecuali pada populasi kelinci mengalami penurunan pada tahun 2009. Jumlah populasi unggas dan kelinci dapat dilihat pada tabel 1.3.9. berikut ini :

Tabel 1.3.9.
Populasi Unggas dan Kelinci (dalam ekor)

Kecamatan	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik	Kelinci
1. Kotawaringin Lama	17.472	5.915	1.776	0
2. Arut Selatan	24.711	33.220	11.799	0
3. Kumai	24.952	52.486	8.531	73
4. Arut Utara	4.631	500	950	0
5. Pangkalan Lada	135.413	10.767	7404	267
6. Pangkalan Banteng	18.656	18.297	3535	0
Tahun 2009	225.835	121.185	33.395	340
Tahun 2008	198.330	110.644	29.834	421

Sumber Data : Distanak Kobar Tahun 2009

6. Perindustrian

Sektor perindustrian yang perlu dilakukan adalah pengembangan dan revitalisasi industri kecil, rumah tangga, menengah dan besar. Usaha-usaha yang perlu dilakukan tidak hanya sampai disitu saja tetapi juga penyiapan sumber daya manusia, untuk kebutuhan industri termasuk keterampilan pelaku industri tersebut dalam pengelolaan dan aspek teknis industri yang digeluti.

Hasil hutan yang melimpah, perlu diupayakan peningkatan produksinya dalam bentuk barang jadi yang dapat dijual, sehingga industri pengolahan hasil hutan dapat menjadi primadona yang menarik baik bagi usaha wisata maupun perdagangan pada umumnya. Selain industri hasil hutan, industri hasil pertanian, perikanan dan perkebunan juga perlu dikembangkan menjadi produk yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun regional.

Secara umum kondisi industri di Kabupaten Kotawaringin Barat belum berkembang secara optimal. Kecilnya peranan sektor industri ini dimungkinkan oleh sedikitnya jumlah usaha industri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Disamping itu, industri yang ada pada umumnya merupakan industri dengan skala kecil. Hanya beberapa industri yang berskala menengah ke atas seperti industri kayu lapis dan kelapa sawit.

Sektor industri komoditas kayu pada tahun 2009 mengalami penurunan, dimana pemasukan yang diterima dari hasil ekspor kayu lapis berupa plywood yang nilainya pada tahun 2008 mencapai 77.149.437,05 USD, terjadi penurunan ditahun 2009 dengan nilai ekspor sebesar 76.549.748,1 USD, dimana jumlah produksi pada tahun 2008 sebesar 150.968,2858 M³ dan pada tahun 2009 sebesar 186.476,6075 M³.

Sedangkan pada produk moulding nilai ekspor tahun 2008 mencapai 8.820.607,75 USD, kemudian terjadi penurunan di tahun 2009 menjadi sebesar 3.683.977,77 USD dengan jumlah produksi untuk tahun 2008 sebesar 17.045,1252 M³ dan tahun 2009 jumlah produksi sebesar 7.452,7866 M³.

Masalah lain yang dihadapi dalam pengembangan industri berskala kecil di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah kurangnya bantuan modal kerja dan peralatan yang dimiliki, disamping kurangnya sarana dan prasarana perhubungan sehingga mempersulit pemasaran produk industri.

Jumlah produk kayu olahan sektor perindustrian yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti tertuang pada tabel 1.3.10. :

Tabel 1.3.10.
Jumlah Produksi Sektor Perindustrian

Komoditas	Produk	Jumlah Produksi (dalam M ³)		Nilai Ekspor (dalam USD)	
		2008	2009	2008	2009
Kayu	Plywood	150.968,2858	186.476,6075	77.149.437,05	76.549.748,41
	Moulding	17.045,1252	7.452,7866	8.820.607,75	3.683.977,77

Sumber data : Disperindag Kobar Tahun 2009

7. Pertambangan

Dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat yang sudah dimanfaatkan adalah bahan galian B seperti emas terdapat di Kecamatan Arut Utara Desa Sambu, Kecubung di Kecamatan Arut Utara Desa Pangkut dan Gandis. Kaolin di Kecamatan Kumai Desa Keraya dan Kubu. Tambang galian C seperti pasir kwarsa , tanah liat dan batu belah terdapat diseluruh Kecamatan .

Selain pemanfaatan hasil galian yang ada, perlu juga dilakukan penelitian dan eksplorasi potensi sumber daya tambang untuk mengetahui kandungan mineral dan jenis tambang yang ada di daerah.

Pada perdagangan ekspor, sektor ini telah menyumbangkan kontribusi dengan nilai ekspor sampai tahun 2009 mencapai Rp. 59.190.725.000,- dengan total volume ekspor sebesar 118.590 MT, yang meliputi *zircon sand* (pasir sirkon), *lump ore zinc* (logam dasar), *iron ore* (biji besi) serta *ilmenite* yang merupakan hasil produk sampingan dari proses pemurnian zircon seperti terlihat pada tabel 1.3.11.

Tabel 1.3.11.
Volume dan Nilai Ekspor Sektor Pertambangan

Komoditas	Produksi (Ton)		Volume Ekspor (MT)		Nilai Ekspor (dalam Ribuan Rp)	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009
) Zircon Sand	11.762	12.590	11.762	12.590	1.764.300	1.888.575
) Lump Ore Zink	-	53.788	-	53.788	-	40.724.808
) Iron Ore	-	50.284	-	50.284	-	16.480.942
) Ilmenite	-	1.928	-	1.928	-	96.400
Jumlah	11.762	118.590	11.762	118.590	1.764.300	59.190.725

Sumber Data : Bagian Perekonomian dan SDA SETDA Kobar Tahun 2009

8. Pariwisata

Bila diperhatikan dari posisinya Kabupaten Kotawaringin Barat berada di ujung sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah, memiliki garis pantai dan hutan beragam dari yang mencirikan mangrove sampai ke bagian interiornya yang merupakan hutan tropis basah yang ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon langka dan tidak terdapat di belahan dunia lainnya seperti ulin dan kayu nyatu.

Taman Nasional Tanjung Puting yang terkenal dengan flora dan satwa langkanya seperti Bekantan dan Orang Utan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Tidak hanya itu saja, panorama alam yang begitu indah untuk dinikmati oleh wisatawan melalui sungai yang mengalir di dalam kawasan taman tersebut menjadikan kawasan ini semakin eksotis.

Secara umum potensi kepariwisataan di Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak hanya memiliki potensi alam seperti hutan alami dan pantai, tetapi juga wisata kebudayaan berupa rumah betang, acara ritual dan tarian-tarian daerah lainnya.

Nama-nama objek wisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 1.3.12. sebagai berikut :

Tabel 1.3.12.
Nama-Nama Objek Wisata di Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Taman Nasional Tanjung Puting	Kec. Kumai
2.	Pantai Tanjung Keluang	Kec. Kumai
3.	Pantai Bugamraya	Kec. Kumai
4.	Keraton Kotawaringin	Kec. Kotawaringin Lama
5.	Masjid Kyai Gede	Kec. Kotawaringin Lama
6.	Keraton Kuning	Kec. Arut Selatan
7.	Suaka Margasatwa Lamandau	Kec. Arut Selatan

Sumber Data : Dinas Parnasibud Kobar Tahun 2009

b. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah produk nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi, jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga, lembaga swasta, konsumsi pemerintah, dan perubahan ekspor netto dari satu daerah.

Untuk angka PDRB dapat terlihat seberapa besar kegiatan perekonomian yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) di Kabupaten Kotawaringin Barat dan pertumbuhan dari kegiatan perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti terdapat pada tabel 1.3.13.

Tabel 1.3.13.
PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008-2009
Atas Dasar Harga Berlaku
(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	Tahun			
		2008		2009	
		Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan %	Nilai (Juta Rupiah)	Pertumbuhan %
1.	Pertanian	1,030,923.01	2.29	1,080,967.83	4.85
2.	Pertambangan dan Penggalian	31,535.00	9.33	33,351.45	5.76
3.	Industri Pengolahan	341,105.36	8.54	371,648.13	8.95
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	7,626.45	14.93	8,445.12	10.73
5.	Bangunan	78,246.01	7.14	83,960.21	7.30
6.	Perdagangan, Restoran dan Hotel	366,048.09	8.22	397,643.25	8.63
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	191,977.72	22.99	201,807.15	5.12
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	70,796.83	23.57	75,107.81	6.09
9.	Jasa - Jasa	177,233.13	8.03	190,459.30	7.46
	Total	2,295,491.60	6.95	2,443,390	6.44

Sumber data : BPS Kobar Tahun 2009

Dari Tabel tersebut, kontribusi sektor Pertanian, Perdagangan, Restoran dan Hotel, Industri pengolahan, Pengangkutan dan Komunikasi merupakan sektor yang mempunyai peranan terbesar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 tetap dapat tumbuh sebesar 6,44 % dimana tingkat pertumbuhan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 5,48% maupun Pertumbuhan Ekonomi Nasional sebesar 4,55 %.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2005-2010, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mencanangkan *VISI* yakni “KOTAWARINGIN BARAT SEBAGAI DAERAH PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DENGAN MASYARAKATNYA YANG MAJU, AMAN, TERTIB, DAMAI, SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN “, dengan *MISI* sebagai berikut :

1. Melanjutkan dan menyempurnakan pembangunan daerah dengan mengedepankan stabilitas politik, supremasi hukum, demokratisasi, keadilan dan akuntabilitas.
2. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada mekanisme pasar yang berkeadilan, serta berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, mandiri, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
3. Mengembangkan dan melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara demokratis, transparan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyusun dan melaksanakan program pembangunan berdasarkan skala prioritas secara demokratis, adil dan merata sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
5. Melakukan pelayanan publik secara bertanggung jawab dan benar untuk terselenggaranya proses pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.

Visi – Misi Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini merupakan mandat dari seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2005 – 2010 yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2006.

B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Strategi dan Arah Kebijakan Daerah lima tahun kedepan mencakup beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Geografis dan Lingkungan

1.1 Geografis : diarahkan kepada :

- a. Mewujudkan suatu tata ruang kabupaten yang dapat dikembangkan dengan daerah wilayah pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah yang mengacu pada kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan industri, kawasan pemukiman.
- b. Memelihara keseimbangan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan pemukiman.
- c. Ketegasan dan ketepatan serta akurasi tentang tata batas antar kabupaten pemakaran.
- d. Mempertahankan kualitas dan kuantitas air, kelestarian fungsi pantai, sungai danau/rawa.

1.2 Lingkungan : diarahkan kepada :

- a. Menjamin pelaksanaan pembangunan disegala bidang tetap lestari lingkungan.
- b. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang lingkungan yang lestari.
- c. Membatasi pembukaan perkebunan dan pendirian industri yang tidak ramah lingkungan.
- d. Melakukan reboisasi dan rehabilitasi hutan.
- e. Memperluas kawasan lindung

2. Aspek Perekonomian Daerah

2.1 Perekonomian

- a. Membangun dan mengembangkan sistem perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.
- b. Menjamin laju pertumbuhan dan pengembangan antar sektor lapangan usaha yang seimbang dengan fokus pembangunan memacu pertumbuhan pada sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.

- c. Memacu pembangun industri yang sesuai dengan potensi daerah dan berorientasi pada pasar.
- d. Mengarahkan dan memotivasi lembaga keuangan dan perbankan sebagai sarana mobilisasi tabungan dan investasi bagi masyarakat.
- e. Mendorong peningkatkan produktifitas masyarakat dan daerah dalam rangka pengembangan seluruh sektor dengan fokus pada sektor perdagangan sehingga tercipta volume kegiatan ekspor meningkat

2.2 Keuangan Daerah

- a. Peningkatan PAD melalui peningkatan volume kegiatan/ produktifitas masyarakat
- b. Dalam rangka peningkatan keuangan daerah dapat membangun dan mengembangkan berbagai perusahaan daerah yang bergerak bidang perkebunan dan industri.
- c. Mengupayakan peluang sumber pendanaan pembangunan selain APBD dalam rangka peningkatan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik.

3. Aspek Kesejahteraan dan Sosial Budaya

3.1 Penduduk dan Ketenagakerjaan

- a. Penduduk
 - 1) Menjamin keseimbangan distribusi, pertumbuhan dan kepadatan penduduk antar Desa, Kecamatan dan Kabupaten demi terciptanya kehidupan sejahtera yang berkeadilan sosial.
 - 2) Memperkecil angka pengangguran dan membuka pemerataan kesempatan kerja bagi penduduk.
 - 3) Mengurangi tingkat kemiskinan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dengan upaya meningkatkan pendapatan perkapita dan status sosial kehidupan penduduk.
- b. Ketenagakerjaan
 - 1) Membangun jaringan tenaga kerja di luar Kab. Kobar dalam rangka penyaluran/pemberdayaan tenaga kerja di daerah.
 - 2) Membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.

3.2 Pendidikan

- a. Menjamin keberlanjutan penyelenggaraan dan pemerataan pendidikan bagi masyarakat mulai dari tingkat TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
- b. Penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menjamin peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga guru.
- d. Meningkatkan alokasi dana bidang pendidikan dan pengajaran.

3.3 Pemuda dan Olah Raga

- a. Mendorong kreativitas dan aspirasi para pemuda dan olahragawan sehingga sehingga berprestasi.
- b. Membina dan mengembangkan para olahragawan yang berprestasi untuk menjadi fasilitator olahraga dan seni demi menjamin kualitas dan kuantitas keberlanjutan kegiatan kepemudaan dan olah raga.
- c. Mengalokasikan anggaran kepemudaan dan olah raga sesuai dengan kemampuan APBD demi menjamin kualitas dan kuantitas keberlanjutan kegiatan kepemudaan dan olah raga.

3.4 Kesehatan

- a. Menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat hingga menjangkau ketinggian pelayanan yang dapat memuaskan semua pihak (para pasien yang dilayani).
- b. Memotivasi, mengembangkan dan mencari sistem pelayanan kesehatan yang baru agar lebih baik dari tahun-tahun yang telah dilewati.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk aneka jenis obat-obatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

3.5 Pemukiman

- a. Menyediakan cadangan lokasi untuk kawasan pemukiman dan perumahan penduduk sampai ke daerah kecamatan dan pedesaan yang seimbang dengan azas pemanfaatan ruang, sehingga terbentuk perkampungan pemukiman penduduk yang indah dan lestari.

- b. Peningkatan kualitas hidup dalam hal pembangunan, pengembangan perumahan serta pemukiman kepada penduduk sampai ke daerah pedesaan.
- c. Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk memiliki perumahan dan pemukiman sesuai dengan kemampuan masyarakat masing-masing melalui fasilitas kredit dari lembaga keuangan dan perbankan yang ada di daerah.

3.6 Budaya dan Pariwisata

- a. Menjamin terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya lokal sebagai ciri khas pengembangan dan eksistensi budaya bangsa yang menjadi perilaku manusia dan masyarakat dalam segenap aspek kehidupan.
- b. Peningkatkan dan pengembangan pembangunan pariwisata sebagai sumber pendapatan daerah.
- c. Peningkatan kualitas: pelayanan, fasilitas, fungsi obyek-obyek wisata yang telah ada di daerah.
- d. Memposisikan fungsi kedadangan atau lembaga adat di daerah.

4. Fisik Prasarana dan Sarana

- a. Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa penambahan pembangunan fisik prasarana dan sarana (infrastruktur) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa.
- b. Pemeliharaan kualitas fisik prasarana dan sarana yang telah ada.
- c. Melanjutkan pembangunan fisik prasarana dan sarana yang telah direncanakan.

5. Bidang Agama

- a. Menjamin suasana hidup kerukunan umat beragama.
- b. Pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam rangka menjamin suasana kerukunan inter dan antar umat beragama
- c. Pembinaan dan pengembangan terhadap lembaga keagamaan.
- d. Penyediaan alokasi dana pada APBD dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana ibadah serta fasilitas pendidikan agama.

6. Bidang Politik
 - a. Menjamin tumbuh dan berkembangnya suasana kehidupan berdemokrasi sebagai pondasi pembangunan politik di daerah.
 - b. Memotivasi penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat luas guna pengoptimalisasi pemberdayaan SDM daerah dalam pengisian infra dan supra struktur politik di daerah.
 - c. Menjalani fungsi pemerintahan yang baik tetap menjaga penegakan netralitas dalam menjamin tumbuh dan berkembangnya kehidupan berdemokrasi.

7. Hukum dan Perundang-Undangan
 - a. Menjamin penegakan penyelenggaraan supremasi hukum di daerah.
 - b. Memberi kesempatan yang luas dan memotivasi serta mengembangkan aspirasi masyarakat tentang berbagai kendala, kelemahan atas penyelenggaraan hukum dan perundang-undangan yang berlaku yang dianggap tidak adil.
 - c. Pendidikan kritis tentang kesadaran hukum bagi masyarakat.

8. Pemerintahan Umum
 - a. Menjamin intensitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
 - b. Menempatkan aparatur pemerintah pada fungsi organisasi sesuai dengan bidang dan keahliannya.
 - c. Membentuk sistem pelayanan yang efektif dan efisien.
 - d. Penyusunan perencanaan berbasis masyarakat
 - e. Membangun sikap mental berkeadilan dan peduli sosial bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai pengampu pelayanan kepada masyarakat.

C. Prioritas Daerah :

1. Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanggulangan kemiskinan antara lain melalui program dan kegiatan akses masyarakat miskin atas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, jaminan sosial, penanggulangan masalah kekurangan gizi dan perluasan kesempatan berusaha

2. Mengatasi Kesenjangan

Sasaran yang ingin dicapai dalam mengatasi kesenjangan, yaitu tersebarnya kegiatan fisik dan ekonomi secara terpilih serta penguatan pada kelompok sasaran yang relatif lemah

3. Meningkatkan Kualitas SDM

Sasaran yang diharapkan dalam mengatasi kualitas SDM adalah meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kesejahteraan sosial

4. Meningkatkan Ketahanan Pangan

Sasaran yang diharapkan pada skala prioritas ini adalah :

- a. Terjadinya peningkatan produksi pangan, pengembangan sumber daya hutan dan perkebunan
- b. Terkendalinya harga pasca produksi

5. Membaiknya struktur perekonomian daerah.

Sasaran yang ingin dicapai pada skala prioritas ini adalah :

- a. Terciptanya koperasi, usaha kecil dan menengah, industri kecil dan menengah yang mampu berkembang dan berdaya guna.
- b. Terciptanya industri, usaha perdagangan, lembaga kredit mikro dan investasi daerah yang berkembang dan berdaya guna
- c. Bertambah dan berkembangnya obyek pariwisata sehingga diharapkan kunjungan wisata meningkat.
- d. Terdapatnya sarana dan suasana perijinan yang mengedepankan pelayanan prima.

6. Membaiknya infrastruktur yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah pertumbuhan baru serta membaiknya fasilitas umum.

Sasaran yang ingin dicapai pada skala prioritas ini adalah :

- a. Terbangunnya infrastruktur secara bertahap sesuai prioritas.
- b. Terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun sehingga mampu memperpanjang usia pemanfaatannya.
- c. Adanya peningkatan infrastruktur terhadap fasilitas yang telah ada.
- d. Terkendalinya pemanfaatan ruang.

7. Membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai pada skala prioritas ini adalah :

- a. Adanya perbaikan mutu lingkungan
- b. Terpantau dan terkendalinya sumber pencemar
- c. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.

8. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah

Sasaran yang ingin dicapai pada skala prioritas ini adalah :

- a. Semakin meningkatnya kesejahteraan pegawai negeri sipil
- b. Adanya peningkatan kinerja seiring dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan PNS.
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
- d. Meningkatnya upaya pemberantasan KKN, transparansi dan akuntabilitas.

BAB III**KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH****A. Pengelolaan Pendapatan Daerah.****1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.**

Kebijakan umum Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat disusun sebagai upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kabupaten Kotawaringin Barat. Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai tersebut dapat direduksi secara lebih khusus dibidang pendapatan Visinya adalah terwujudnya peningkatan Pendapatan Daerah untuk mendukung pembangunan daerah, sedangkan Misinya adalah meningkatkan sumber Pendapatan Daerah berbasis potensi lokal, mewujudkan kualitas pengelolaan Pendapatan Daerah dan melakukan pelayanan publik dibidang Pendapatan Daerah secara transparan dan akuntabel, serta tujuannya adalah menyediakan dana bagi pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan mampu meningkatkan pendapatan baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun melalui Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dengan upaya-upaya peningkatan melalui :

- a. Peningkatan volume kegiatan / produktivitas masyarakat,
- b. Membangun dan mengembangkan berbagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa.
- c. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- d. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pemungutan,
- e. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan asset daerah,
- f. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme aparatur dan lain-lain.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 25 Pendapatan Daerah dikelompokkan atas 3 (tiga) kelompok :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pendapatan Daerah terdiri dari atas 3 (tiga) bagian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah.

Perkiraan Pendapatan Asli Daerah diupayakan menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, juga Peraturan Pemerintah yang mengikuti perubahan atas Undang-Undang tersebut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah.

Upaya-upaya peningkatan penerimaan daerah baik berupa Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah hendaknya tidak menambah beban masyarakat dan menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pilihan yang terbaik adalah melakukan menyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pemungutan, memperkecil jumlah tunggakan, dan menegakkan sanksi hukum bagi para penghindar pajak.

PAD merupakan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli dan hasil usaha daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok akun ini dirinci lagi berdasarkan sumber, yaitu :

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

b. Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi.

Dana Perimbangan dari Pusat dan Provinsi merupakan pendapatan yang berasal dari sumber pengalokasian dana dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, penganggaran dan perimbangan selain bertujuan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga mengurangi atau memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, antar Pusat dan Daerah, serta untuk mendanai pelaksanaan kegiatan khusus yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab pusat kepada daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah terdiri dari :

- a. Dana Bagi Hasil
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- b. Dana Alokasi Umum

- c. Dana Alokasi Khusus, dapat diklasifikasikan :
1. Dana Reboisasi
 2. Dana Kesehatan
 3. Dana Pendidikan
 4. Dana Bidang Infrastruktur
 5. Dana Perikanan dan Kelautan
 6. Dana Pertanian
 7. Dana Lingkungan

c. *Pendapatan Lain-Lain yang Sah.*

Lain-lain Pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber selain dari PAD, Dana Perimbangan dari Pusat dan Dana Perimbangan dari Provinsi.

2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.

Dari Anggaran Pendapatan setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp.569.909.191.037,00 maka telah terrealisasi sebesar Rp.567.162.976.255,88 atau 99,52%. Secara umum pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah telah berhasil baik, Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 111,84% dan Lain-lain pendapatan yang sah terrealisasi sebesar 114,87%. Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Bukan Pajak hanya terrealisasi 55,36% dan Transfer dari Pemerintah Provinsi terrealisasi sebesar 76,28% sebagaimana tergambar pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1: Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009.

URAIAN KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
Pendapatan Asli Daerah	31,680,032,900.00	35,429,548,643.88	3,749,515,743.88	111.84
a. Pajak Daerah	4,470,000,000.00	4,852,483,256.00	382,483,256.00	108.56
b. Retribusi Daerah	17,365,032,900.00	20,142,469,795.20	2,777,436,895.20	115.99
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	3,200,000,000.00	3,204,652,289.07	4,652,289.07	100.15
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	6,645,000,000.00	7,229,943,303.61	584,943,303.61	108.80
Pendapatan Transfer	526,473,978,137.00	518,230,639,252.00	-8,243,338,885.00	98.43
Dana Perimbangan dari Pusat	483,772,292,110.00	476,697,131,751.00	-7,075,160,359.00	98.54
a. Bagi Hasil Pajak	28,559,978,110.00	31,960,664,637.00	3,400,686,527.00	111.91
b. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23,467,410,000.00	12,991,563,114.00	-10,475,846,886.00	55.36
c. Dana Alokasi Umum (DAU)	368,740,904,000.00	368,740,904,000.00	0.00	100.00
d. Dana Alokasi Khusus (DAK)	63,004,000,000.00	63,004,000,000.00	0.00	100.00
Transfer dari Pusat lainnya	13,940,285,000.00	19,595,210,000.00	5,654,925,000.00	140.57
- Dana Penyesuaian	13,940,285,000.00	19,595,210,000.00	5,654,925,000.00	140.57
Transfer Pemerintah Provinsi	28,761,401,027.00	21,938,297,501.00	-6,823,103,526.00	76.28
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28,761,401,027.00	21,938,297,501.00	-6,823,103,526.00	76.28
Pendapatan Lain-lain yang Sah	11,755,180,000.00	13,502,788,360.00	1,747,608,360.00	114.87
- Pendapatan hibah	11,505,180,000.00	13,252,788,360.00	1,747,608,360.00	115.19
- Bantuan Keuangan dari Propinsi	250,000,000.00	250,000,000.00	0.00	100.00
- Pendapatan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	569,909,191,037.00	567,162,976,255.88	-2,746,214,781.12	99.52

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kobar Tahun 2009

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2009 sebesar Rp. Rp. 35.429.548.643,88 atau 111,84 % dari target sebesar Rp. 31.680.032.900,00 Adapun Realisasi Pendapatan Asli Daerah tersebut terbagi atas :

1) *Pajak Daerah.*

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 4.852.483.256,00 atau 108,56 % dari target sebesar Rp. 4.470.000.000 dari 6 (Enam) jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- a. Pajak Hotel realisasi penerimaan sebesar Rp. 320.341.613,00 atau 106,78 % dari target sebesar Rp. 300.000.000,00
- b. Pajak Restoran realisasi penerimaan sebesar Rp. 309.033.043,00 atau 77,26 % dari target sebesar Rp. 400.000.000,00
- c. Pajak Hiburan realisasi penerimaan sebesar Rp. 66.750.000,00 atau 148,33 % dari target sebesar Rp. 45.000.000,00
- d. Pajak Reklame realisasi penerimaan sebesar Rp. 438.303.443,00 atau 73,05 % dari target sebesar Rp. 600.000.000,00

- e. Pajak Penerangan Jalan realisasi sebesar Rp. 2.242.610.685,00 atau 106,79 % dari target sebesar Rp. 2.100.000.000,00
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gol. C realisasi penerimaan sebesar Rp. 1.475.444.472,00 atau 143,95 % dari target sebesar Rp. 1.025.000.000,00

2) *Retribusi Daerah.*

Realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah sebesar Rp. 20.142.469.795,20 atau 115,99 % dari target sebesar Rp. 17.365.032.900,00

3) *Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan.*

Realisasi Pendapatan dari Pos ini adalah sebesar Rp. 3.204.652.289,07 atau 100,15 % dari target sebesar Rp. 3.200.000.000,00

4) *Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.*

Realisasi penerimaan dari pos ini pada Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 7.229.943.303,61 atau 108,80 % dari target sebesar Rp. 6.645.000.000,00

b. Pendapatan Transfer

1. *Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan.*

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Transfer Pusat Dana Perimbangan pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 518.230.639.252,00 atau 98,43 % dari target sebesar Rp. 526.473.978.137,00

Adapun realisasi untuk masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

1.1 *Bagi Hasil Pajak*

Realisasi untuk pos ini adalah sebesar Rp. 31.960.664.637,00 atau 111,91 % dari target sebesar Rp. 28.559.978.110,00

1.2 *Bagi Hasil Sumber Daya Alam*

Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 12.991.563.114,00 atau 55,36 % dari target sebesar Rp. 23.467.410.000,00

1.3 *Dana Alokasi Umum (DAU)*

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp. 368.740.904.000,00 atau 100 % dari target sebesar Rp. 368.740.904.000,00

1.4 *Dana Alokasi Khusus (DAK)*

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sebesar Rp. 63.004.000.000,00 atau 100 % dari target sebesar Rp. 63.004.000.000,00

1.5 *Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya.*

Realisasi transfer dana lainnya dari Pemerintah Pusat berasal dari dana penyesuaian sebesar Rp. 19.595.210.000,00 atau 140,57 % dari target sebesar Rp. 13.940.285.000,00

2. *Transfer dari Pemerintah Propinsi.*

Realisasi transfer dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk Bagi Hasil Pajak adalah sebesar Rp. 21.938.297.501,00 atau 76,28 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 28.761.401.027,00

c. *Pendapatan Lain-lain yang Sah.*

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Lain-lain yang Sah adalah sebesar Rp. 13.502.788.360,00. atau 114,87 % dari target sebesar Rp. 11.755.180.000,00. yang bersumber dari :

1. Pendapatan Hibah yang realisasinya sebesar Rp. 13.252.788.360,00 atau 115,19 % dari target sebesar Rp. 11.505.180.000,00 dan
2. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 250.000.000,00

3. Permasalahan dan Solusi

Dari kondisi umum Pendapatan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel 1 di atas secara keseluruhan dapat dijelaskan berbagai permasalahan yang didapati dari sumber-sumber Pendapatan antara lain adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah samapai dengan per 31 Desember 2009 secara keseluruhan belum mencapai target, yang dikarenakan realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi tidak mencapai target yang dianggarkan, diantaranya adalah realisasi dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dan Pendapatan bagi hasil pajak Propinsi.

Sedangkan realisasi dari komponen – komponen lainnya relatif telah mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dan dicermati dari 4 (empat) komponen PAD seperti tergambar pada tabel 1 di atas yang secara komponen dapat dijelaskan sebagai berikut :

a.1. Pajak Daerah.

Target penerimaan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2009 adalah Rp. 4.470.000.000,00 dengan realisasi sebesar 108,56 % atau Rp. 4.852.483.256,00 Komponen yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

a.1.1. Pajak Pajak Restoran.

Realisasi penerimaan Pajak Restoran pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 309.033.043,00 77,26 % dari target sebesar Rp. 400.000.000,00 hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran wajib dan subyek pajak restoran tentang Pajak Restoran.

a.1.2 Pajak Reklame.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame pada tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 438.303.443,00 atau 73,05 % dari target sebesar Rp. 600.000.000,00 hal ini terjadi karena perusahaan yang memanfaatkan tempat reklame mengurangi pemakaian iklan dengan pamflet yang besar.

a.2. Retribusi Daerah.

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2009 mencapai Rp. 20.142.469.795,20 atau 115,99 % dari target sebesar Rp. 17.365.032.900,00 Adapun beberapa jenis retribusi yang realisasinya tidak mencapai target antara lain adalah :

a.2.1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte.

Realisasi Pendapatan dari retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akte adalah sebesar Rp. 571.900.000,00 atau 65,25 % dari target Rp. 876.498.000,00 karena target pembuatan KTP pada warga Kotawaringin Barat yang wajib mempunyai KTP telah terpenuhi sehingga realisasi lainnya adalah dari penduduk pendatang yang secara sah pindah menjadi penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat disamping juga dari pembuatan Akte.

a.2.2. Retribusi Pelayanan kepelabuhan.

Realisasi pendapatan dari Retribusi pelayanan kepelabuhan adalah sebesar Rp. 93.522.000,00 atau 89,65 % dari target Rp. 104.320.000,00 hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran Wajib Retribusi dari penerima pelayanan pelabuhan penyeberangan.

Berdasarkan rincian uraian tersebut di atas permasalahan yang mendasar adalah pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini disebabkan :

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku yang mengatur tentang pemungutan penerimaan Daerah, baik yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Daerah, maupun Pajak Propinsi dan Pajak Pemerintah Pusat.
2. Masih perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur dalam perencanaan / penetapan target pendapatan.

Solusi dimasa yang akan datang yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi peraturan di bidang pendapatan daerah yang berlaku di Wilayah kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pelatihan bagi aparatur dalam bidang perencanaan pendapatan.

B. Pengelolaan Belanja Daerah.

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan Anggaran Tahun 2009 diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan dan belanja dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas guna mewujudkan sasaran program-program pembangunan daerah. Kebijakan Anggaran Tahun 2009, khususnya pada pengeluaran pemerintah diharapkan dapat mendukung keairahan perekonomian daerah serta menguatkan kegiatan investasi masyarakat dan swasta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah diharapkan meningkatkan pendapatan baik dari pendapatan asli daerah maupun melalui dana perimbangan.

Upaya peningkatannya melalui :

- a. Peningkatan PAD melalui peningkatan volume kegiatan / Produktifitas masyarakat.
- b. Dalam rangka peningkatan keuangan daerah dapat membangun dan mengembangkan berbagai perusahaan daerah yang bergerak di bidang perkebunan dan jasa.
- c. Mengupayakan peluang sumber pendanaan pembangunan selain APBD dalam rangka peningkatan pendapatan baik melalui intensifikasi ataupun ekstensifikasi.
- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- e. Pengembangan kerjasama baik dalam hal upaya peningkatan pendapatan maupun pengelolaan asset daerah.
- f. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, peningkatan profesionalisme pegawai dan lain-lain.

1.1. Penerimaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp128.900.860.727,30 atau 96,77 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 133.206.700.896,30 yang merupakan penerimaan dari SILPA tahun sebelumnya sebesar Rp. 126.524.259.696,30 Penerimaan kembali dana bergulir sebesar Rp. 23.345.000,00 dan Penerimaan kembali Pinjaman Daerah sebesar Rp. 2.353.256.031,00

1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa.

Orientasi penyusunan APBD Tahun 2009 diutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat, tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Dana yang disediakan dalam APBD 2009 harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu perencanaan yang ditetapkan, berorientasi kinerja yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

2. Target dan Realisasi Belanja

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 602.284.689.574,50 atau 90,49 % dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 665.615.234.950,00 yang terdiri dari realisasi belanja operasi sebesar Rp. 380.475.487.691,50 atau 89,31 % dari target sebesar Rp. 426.034.056.925,00 realisasi belanja modal sebesar Rp. 198.796.731.740,00 atau 92,11 % dari target sebesar Rp. 215.834.895.775,00 dan realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp. 566.665.000,00 atau 56,67 % dari target sebesar Rp. 1.000.000.000,00 serta realisasi belanja transfer sebesar Rp. 22.445.805.143,00 atau 98,68 % dari target sebesar Rp. 22.746.282.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2: Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009.

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2009	%
1	2	3	4
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	227,427,253,197.00	206,942,488,425.50	90.99
Belanja Barang	173,460,381,681.00	152,081,175,008.00	87.67
Belanja Bunga	-		
Belanja Subsidi	300,000,000.00		0.00
Belanja Hibah	10,956,380,000.00	9,925,385,000.00	90.59
Belanja Bantuan Sosial	13,890,042,047.00	11,526,439,258.00	82.98
Jumlah Belanja Operasi	426,034,056,925.00	380,475,487,691.50	89.31

BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	3,891,578,780.00	294,995,000.00	7.58
Belanja Peralatan dan Mesin	22,165,909,625.00	20,927,862,985.00	94.41
Belanja Gedung dan Bangunan	43,619,544,060.00	33,949,539,106.00	77.83
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	143,718,113,310.00	141,290,339,949.00	98.31
Belanja Aset tetap Lainnya	2,319,200,000.00	2,223,589,700.00	95.88
Belanja Aset Lainnya	120,550,000.00	110,405,000.00	91.58
Jumlah Belanja Modal	215,834,895,775.00	198,796,731,740.00	92.11
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	566,665,000.00	56.67
Jumlah Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	566,665,000.00	56.67
TRANSFER			
Belanja Tranfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Desa	22,746,282,250.00	22,445,805,143.00	98.68
Jumlah Belanja Transfer	22,746,282,250.00	22,445,805,143.00	98.68
JUMLAH BELANJA	665,615,234,950.00	602,284,689,574.50	90.49

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kobar Tahun 2009

C. Pengelolaan Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar Rp128.900.860.727,30 atau 96,77 % dari target yang dianggarkan sebesar Rp. 133.206.700.896,30 yang terdiri dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 126.524.259.696,30
- b. Realisasi penerimaan kembali dana bergulir sebesar Rp. 23.345.000,00
- c. Realisasi Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp. 2.353.256.031,00

2. Pengeluaran Pembiayaan.

Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.13.133.000.000,00 atau 61,80 % dari target sebesar Rp. 21.250.000.000,00

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana amanat PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat bagian 2 pasal 3, menyatakan bahwa, urusan wajib yang diselenggarakan oleh daerah terdiri dari 26 bidang urusan sebagai berikut;

A.1. Program dan Kegiatan

1.1. Bidang Pendidikan

Reformasi pemerintah yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran penyelenggaraan pemerintah dari paradigma sentralisasi kearah desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata pada daerah. Pemberian otonomi ini dimaksud untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat sehingga memberikan peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri.

Disadari bahwa pembangunan pendidikan bukanlah urusan yang sederhana, melainkan yang menyangkut berbagai pihak, berbagai aspek dan dimensi dengan sifatnya yang sangat dinamis, kompleks, dalam dan luas, serta memerlukan waktu panjang untuk mengatur tingkat keberhasilannya.

Berkenan dengan itu diharapkan disentralisasi pendidikan dilakukan secara hati-hati dan bertahap. Karena hal itu menyangkut upaya penanganan profesionalisasi dan mutu pendidikan, menjamin anggaran yang memadai untuk pendidikan dan keberpihakan pengambilan keputusan daerah khususnya kepada bidang pendidikan. Sebagai tindak lanjut berjalannya pelaksanaan otonomi daerah secara menyeluruh, maka perlu kiranya dibangun jejaring kerjasama yang lebih kokoh, lebih teratur antara pejabat dibidang pendidikan dengan instansi pemerintah daerah lainnya dan masyarakat, agar dapat mempermudah

pencarian jalan keluar terhadap berbagai persoalan pendidikan secara bersama-sama, utamanya dibidang pendidikan dasar dan menengah.

Keberhasilan daerah melaksanakan kewenangannya dalam pendidikan di daerah sangat tergantung pada kemampuan perencanaan kebijakan dalam pendidikan yang disiapkan oleh daerah itu sendiri, sehingga pada akhirnya daerah mempunyai pedoman dalam mengelola kewenangannya mulai dari pendanaan, perizinan, perencanaan, proses dan evaluasi sesuai standar, norma dan kebijakan dari pemerintah daerah masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan berbagai langkah dan tindakan agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan secara dinamis dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, berbagai langkah dan tindakan yang akan diambil perlu dituangkan dalam suatu program kerja yang mempunyai integritas yang tinggi, dengan mengedepankan skala prioritas dan tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran di bidang pendidikan.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kotawaringin Barat No.25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 Seri D) dan Surat Keputusan Bupati nomor 22 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan lokasi sebagai berikut :

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas/ Badan yang telah disepakati berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas/Badan, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan penjelasan seperti terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bldang Pendidikan

Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4.
Disdikpora			
Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan	Pendidikan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Pendidikan Mutu			

Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4.
dan Relevansi Pendidikan			4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan bahan logistik kantor 14. Penyediaan makanan dan minuman 15. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
		2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16. Pembangunan rumah dinas 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
		3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	19. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 20. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan laporan keuangan semesteran 23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
		5. Program Pendidikan Anak Usia Dini	24. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
	Pendidikan Dasar	6. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	25. Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 26. Penambahan ruang kelas sekolah 27. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 28. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 29. Pengadaan mebeluer sekolah 30. Pengadaan alat rumah tangga sekolah 31. Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 32. Rehabilitasi sedang/berat bangunan

Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4.
			sekolah 33. Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah 34. Membina SMP Terbuka 35. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SM 36. Penyelenggaraan Paket A Setara SD 37. Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 38. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 39. Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
	Pendidikan Menengah.	7. Program Pendidikan Menengah	40. Pembangunan gedung sekolah 41. Penambahan ruang kelas sekolah 42. Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain) 43. Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 44. Pembangunan perpustakaan sekolah 45. Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya 46. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 47. Pengadaan mebeluer sekolah 48. Pengadaan alat rumah tangga sekolah 49. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 50. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 51. Penyelenggraan paket C setara SMU 52. Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri
	Pendidikan Non Formal dan In Formal	8. Program Pendidikan Non Formal	53. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 54. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
	Pendidikan Kedinasan	9. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	55. Pembinaan kelompok kerja guru (KKG) 56. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 57. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 58. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4.
	Pendidikan Lainnya	10.	59. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 60. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 61. Pembinaan dewan pendidikan 62. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

1.2. Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan telah menggariskan tujuan diselenggarakan pembangunan kesehatan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dari tujuan nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang semakin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sejalan dengan visi pembangunan kesehatan secara nasional Indonesia Sehat 2010, visi pembangunan kesehatan di kabupaten Kotawaringin Barat yang telah ditetapkan adalah “Kabupaten Kotawaringin Barat Sehat Tahun 2010”. Untuk mencapai visi tersebut telah ditempuh melalui pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Renstra Dinas Kesehatan 2006-2010 dimuat perencanaan kurun waktu 5 tahun yang bertujuan menguraikan langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan program pembangunan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat nomor tahun 2008 Bab IV pasal 5 dan 6 bahwa Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan

- perundang-undangan yang berlaku dalam kelompok pengendalian masalah kesehatan, pelayanan kesehatan, pengembangan SDM kesehatan, serta jaminan dan sarana kesehatan ;
2. Koordinasi penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan ;
 3. Pelaksanaan pengendalian dan pencegahan penyakit, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa (KLB) serta pembinaan penyehatan lingkungan ;
 4. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus ;
 5. Pembinaan dan pengawasan kefarmasian, makanan dan minuman serta pengobatan tradisional ;
 6. Pemberian registrasi, sertifikasi, lisensi dan akreditasi terhadap tenaga kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi ;
 7. Pembinaan, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya kesehatan, teknologi kesehatan dan gizi ;
 8. Pembinaan promosi kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat (JPKM), kesehatan keluarga dan gizi ;
 9. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan,
 10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
 11. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu Perda Kobar No. 11 tahun 2006 tentang RPJMD tahun 2006-2010 dan untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Kesehatan telah disepakati dan berdasarkan Prioritas

Pembangunan Daerah pada Dinas Kesehatan dilaksanakan melalui program dan kegiatan.

Urusan Wajib Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang diwujudkan dalam 16 (enam belas) program dan 51 (lima puluh satu) kegiatan, dan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imannudin dengan 10 (sepuluh) program dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Kesehatan Daerah				
	Kesehatan		1. Pelayanan Administasi perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	12. Pembangunan rumah dinas 13. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 14. Pengadaan peralatan gedung kantor 15. Pengadaan mebeleur 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 18. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
			3. Peningkatan Disiplin Aparatur	19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			4. Fasilitasi Pindah / purna tugas PNS	20. Pemulangan pegawai yang pensiun
			5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			6. Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	22. Penyusunan laporan capain kinerja dann ikhtisar relisasi kinerja SKPD 23. Penyusunan laporan keuangan semesteran 24. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
		1. Obat dan Perbekalan Kesehatan	7. Obat dan Perbekalan Kesehatan	25. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 26. Peningkatan pemerataan obat & perbekalan kesehatan
		2 Pelayan Kesehatan Masyarakat	8. Upaya Kesehatan Masyarakat	27. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya 28. Peningkatan kesehatan masyarakat 29. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 30. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
			9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	31. Pengembangan media promosi dan informasi hidup sehat 32. Penyuluhan Masyarakat pola hidup sehat 33. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
			10. Perbaikan Gizi Masyarakat	34. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 35. Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
			11. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	36. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
			12. Pencegahan dan Penanggulangan	37. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			Penyakit Menular	38. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 39. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 40. Peningkatan Imunisasi 41. Peningkatan surveillence epideminologi dan penaggulangan wabah
			13. Standarisasi Pelayanan Kesehatan	42. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 43. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 44. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
			14. Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu jaringannya	45. Pengadaaan puskesmas keliling 46. Pengadaaan sarana dan prasarana posyandu 47. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 48. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu
			15. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	49. Penyuluhan kesehatan anak balita
			16. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	50. Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah				
			1. Program Pelayanan Administrasi	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13. Pembangunan rumah dinas 14. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 15. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 16. Pengadaan peralatan gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	21. Pemulangan pegawai yang pensiun
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24. Penyusunan laporan keuangan semesteran 25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehata	26. Penyusunan standar kesehatan
			8. Program pengadaan,	27. Pembangunan rumah sakit 28. Pengadaan alat-alat rumah sakit

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	29. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 30. Pengadaan mebeleur rumah sakit 31. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 32. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 33. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
			9. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	34. Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit 35. Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik 36. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) 37. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU 38. Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi 39. Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi 40. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen 41. Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit 42. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 43. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 44. Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah 45. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit 46. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
			10. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	47. kemitraan pengolahan limbah rumah sakit 48. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 49. kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

1.3. Bidang lingkungan hidup

Gerakan lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dimulai sejak dibentuknya Lembaga atau Badan yang disebut dengan Badan Lingkungan Hidup dengan singkatan BLH yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 7 Tahun 1999 tanggal 20 Pebruari 1999 tentang Organisasi BLH Kabupaten Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandai dengan pelantikan para pejabat struktural Eselon II, III dan IV pada bulan Juli 2008, selanjutnya melaksanakan tugas pokok sebagai lembaga yang melaksanakan kewenangan sebagai urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dengan fungsi pengendalian dampak lingkungan, pengawasan terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh pemanfaatan sumber daya alam, penerapan dan penyuluhan lingkungan, dengan melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Badan Lingkungan Hidup, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Penanganan Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 36 (tiga puluh enam) kegiatan dan Dinas Pekerjaan Umum dengan 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan dengan penjelasan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Badan Lingkungan Hidup				
1.	Peningkatan Kelembagaan dan akses Informasi/ Inventarisasi data Lingkungan Hidup	Administrasi, pengawasan, pemeriksaan, operasi atau dukungan untuk pengelolaan limbah, Polusi dan kegiatan yg lain ;	1.Program Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Peningkatan Analisis Pencegahan dampak Lingkungan Hidup	Hibah pinjaman atau subsidi utk mendukung operasi, konstruksi, pemeliharaan ataupun peningkatan sistem pengelolaan limbah & sistem konservasi sumber daya alam.	2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	15. Pembangunan Gedung kantor 16. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			3. Prog. Peningkatan disiplin Aparatur	18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Prog. Fasilitas pindah/purna tugas PNS	19. Pemulangan pegawai yang pensiun
			5. Program peningkatan Kapasitas sumber Daya. Aparatur	20. Bimbingan teknik dan pelatihan
			6. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD. 22. Penyusunan laporan keuangan semesteran.

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
	Peningkatan Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	.	7. Pengendalian Pencemaraan dan perusakan Lingkungan Hidup	23. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 24. Penanganan Kasus Perusakan dan Pencemaran Lingkungan 25. Pengkajian dampak lingkungan 26. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan 27. Koordinasi penyusunan AMDAL 28. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 29. Monitoring dan Pelaporan .
	Peningkatan pelestarian dan pemulihan lingkungan hidup.		8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	30. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 31. Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan
			9. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	32. Pengembangan data dan informasi lingkungan
		Untuk menganalisis tentang pencemaran lingkungan hidup, baik pencemaran limbah padat dan limbah cair Untuk mengetahui besaran kadar/ dampak yang ditimbulkan.	10. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	33. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 34. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 35. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran
			11. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	36. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Dinas Pekerjaan Umum				
			1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			2. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	3. Penataan RTH 4. Pemeliharaan RTH

1.4. Bidang pekerjaan umum;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja melaksanakan Urusan Desentralisasi sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas/Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 17 (tujuh belas) program dan 51 (Lima Puluh Satu) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Pekerjaan Umum				
1	Peningkatan pembangunan prasarana perhubungan darat dan perhubungan laut terutama infrastruktur (jalan darat dan dermaga / pelabuhan laut) untuk mempercepat tingkat mobilitas sosial.	1. Fungsi Ekonomi ~Subfungsi Pengairan ~Subfungsi Transportasi 2. Fungsi Lingkungan Hidup ~Subfungsi Perlindungan Lingkungan Hidup lainnya. 3. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. ~Subfungsi Penyediaan Air Minum ~Subfungsi Perumahan dan Permukiman Lainnya	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat-menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
2	Peningkatan pembangunan sektor pertanian dalam arti luas, dengan sasaran utama perkebunan rakyat dalam rangka menunjang ekspor komoditi non migas			

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
3	Peningkatan pembangunan sektor perdagangan dan industri yang mengolah hasil pertanian, kehutanan dan pertambangan.			6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan ATK 8. Penyediaan barang cetakan & penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4	Peningkatan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.			11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan Makanan dan minuman 14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5	Peningkatan pembangunan di sektor keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.			15. Pembangunan Gedung Kantor 16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 17. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19. Peleliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
6	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang dpt menjamin peningkatan dan disparitas pendapatan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah dan menengah.		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 21. Pengadaan pakaian dinas 22. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24. Penyusunan laporan keuangan semesteran 25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			6. Pembangunan Jalan dan Jembatan	26. Pembangunan jalan 27. Pembangunan jembatan
			7. Pembangunan Sal. Drainase / Gorong-gorong	28. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
			8. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	29. Pembangunan Turap / Talud / Bronjong
			9. Rehabilitasi / pemeliharaan Jln dan Jembatan	30. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 31. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
			10. Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan	32. Penyusunan sistem informasi/data base jalan 33. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan
			11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	34. Pengadaan alat-alat berat 35. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 36. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 37. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan
			12. Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	38. Pembangunan pintu air 39. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 40. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi sal. Sungai 41. Optimalisasi fungsijaringan irigasi yang telah dibangun 42. Pemberdayaan Petani Pemakai Air
			13. Penyediaan & pengolahan air Baku	43. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
			14. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	44. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 45. Pengembangan distribusi air minum

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			15. Pengendalian Banjir	46. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 47. Pembangunan tanggul pemecah ombak
			16. Program pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	48. Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
			17. Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	49. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 50. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 51. Rehabilitasi/pemeliharaan jln & jembatan perdesaan

1.5. Bidang penataan ruang;

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dimana dalam hal Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 adalah di arahkan pada Revisi RTRWP Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pengadaan Dokumen Master Plan Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bidang Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 ditangani oleh 2 (dua) SKPD, yaitu Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Penataan Ruang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Bappeda				
	Konsistensi Fungsi Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengendalian dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah	Pembangunan daerah. Administrasi dan operasi dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.	1. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Dinas Pekerjaan Umum				
			2. Program Perencanaan Tata Ruang	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan

1.6. Bidang perencanaan pembangunan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam hal Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang pada Tahun Anggaran 2009 mengelola 13 (dua belas) program dan 43 (empat puluh tiga) kegiatan, yang diarahkan untuk Menunjang Pembangunan Daerah, sedangkan Sekretariat Daerah mengelola 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Pembangunan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Bappeda				
	Konsistensi Fungsi Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan Pengendalian dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.	<u>Pembangunan daerah.</u> Administrasi dan operasi dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.	1. Pelayanan Administrasi Kantor	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik. 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan. 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor. 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 11. Penyediaan Peralatan rumah Tangga 12. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan. 13. Penyediaan Makan dan minum. 14. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah.
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15. Pembangunan Gedung Kantor 16. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional. 17. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. 18. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 19. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas. 20. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				21. Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor.
			3. Peningkatan Disiplin Aparatur	23. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.
			4. Fasilitas Pindah / Purna Tugas PNS	24. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
			5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	25. Bimtek Implementasi Peraturan Per- undang- undangan.
			6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	26. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. 27. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran. 28. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
			7. Pengembangan Data Informasi.	29. Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan Dok. Perencanaan
			8. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	30. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh.
			9. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	31. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana. 32. Bimtek Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
			10. Perencanaan Pembangunan Daerah	33. Penyusunan Rancangan RKPD. 34. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				35. Penetapan RKPD. 36. Koordinasi Penyusunan LKPD / LPPD. 37. Koordinasi Penyusunan LKPJ. 38. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
			11. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	39. Koordinasi Perencanaan Pembangunan-an Bidang Ekonomi.
			12. Perencanaan Sosial Budaya	40. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya. 41. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
			13. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.	42. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
Sekretariat Daerah				
			1. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 2. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanian
			2. Program perencanaan pembangunan daerah	3. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah 4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

1.7. Bidang perumahan;

Bidang perumahan diselenggarakan melalui Dinas Pekerjaan Umum Daerah dan Sekretariat Daerah dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Perumahan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program	Kegiatan
1	2	3	4
Dinas Pekerjaan Umum			
	Membaiknya infrastruktur yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah pertumbuhan baru serta membaiknya fasilitas umum	Program pengelolaan areal pemakaman	1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman
Sekretariat Daerah			
	Membaiknya infrastruktur yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah pertumbuhan baru serta membaiknya fasilitas umum	Program pengelolaan areal pemakaman	2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

1.8. Bidang kepemudaan dan olahraga;

Program pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga pada tahun 2009, dilaksanakan melalui 3 program sebagaimana tabel berikut;

Tabel 4.8. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan dan olah raga

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah				
	Meningkatkan Kualitas SDM	Kepemudaan dan Olah Raga	1. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	1. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
	Terpeliharanya infrastruktur yang telah dibangun sehingga mampu memperpanjang usia pemanfaatannya		2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	2. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 3. Penyelenggaraan kompetisi olahraga

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	4. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 5. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

Bidang penanaman modal;

Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan oleh dua lembaga yakni perencanaan penanaman modal oleh Bappeda dan promosi investasi oleh Disperindag. Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2009 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Penanaman Modal

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Bappeda				
	Membaiknya struktur perekonomian daerah		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
Disperindag				
			Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	2. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA 3. Penyelenggaraan pameran investasi

Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang kelembagaan, Struktur Organisasi, tugas

pokok dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D), dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang kelembagaan, Struktur Organisasi, tugas pokok dan tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah berubah menjadi Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar, dimana selanjutnya melaksanakan Urusan wajib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas/Badan yang telah disepakati dan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar, dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Dinas Koperasi, Pembinaan Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 melaksanakan 9 (sembilan) Program dan 37 (Tiga Puluh Tujuh) kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Koperasi dan UKM				
	Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan memberikan akses yang besar terutama permodalan, peluang pasar dengan persaingan yang sehat dan penyediaan fasilitas untuk pengembangan usaha Koperasi dan UMKM	Fungsi : - Ekonomi Sub Fungsi : Perumusan kebijakan teknis dibidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar.	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7. Penyediaan jasa kebersihan kantor 8. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9. Penyediaan alat tulis kantor

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				10. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13. Penyediaan peralatan rumah tangga 14. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15. Penyediaan makanan dan minuman 16. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
	Mengoptimalkan peran Pemerintah Daerah dalam rangka memperlancar mekanisme pasar secara efektif dan efisien.	Pembentukan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar yang terdiri dalam kelompok bidang Koperasi, bidang Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pasar.	2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18. Pengadaan mebeleur 19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24. Penyusunan laporan keuangan semesteran 25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	26. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 27. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
		Melaksanakan Pendidikan dan Latihan pada pengurus dan anggota Koperasi dalam rangka meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.	7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	28. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi 29. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
		Melaksanakan tugas umum dan ketatausahaan dibidang Koperasi, UMKM dan Pasar.	8. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	30. Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan dan Pengendalian terhadap Koperasi, UMKM dan Pasar diwilayahnya	9. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	31. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian 32. Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 33. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 34. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 35. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 36. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi 37. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Bidang kependudukan dan catatan sipil;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
		Melaksanakan pelatihan bagi petugas Operator.	3. Program peningkatan disiplin Aparatur	14. Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya.
		Melaksanakan tugas umum dan ke Tatatausahaan dibidang adm. kependudukan	4. Program peningkatan ka pasitas sumber daya aparatur	15. Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan.
			5. Program Pen. Pengembangan sistim Pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	16. Lap. Capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD 17. Penyusunan laporan keuangan Semester. 18. Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun.
			6. Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Capil	19. Pembangunan Pengoperasian SIAK secara terpadu 20. Implentasi Sistem Adiminstrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan) 21. Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan 22. Pengembangan Data Base kependudukan 23. Sosialisasi Kebijakan kependudukan.

Bidang ketenagakerjaan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2000 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23 seri D). Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Wajib sesuai Tupoksi sebagai berikut :

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan program dan kegiatan dengan penjelasan rincian terdapat pada table 4.12 sebagai berikut :

Tabel 4.12 Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Nakertrans				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15. Pengadaan mebeleur 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20. Penyusunan laporan keuangan semesteran 21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Pelayanan bidang Ketenagakerjaan	Ekonomi Tenaga Kerja	6. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	22. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 23. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK
			7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	24. Penyiapan tenaga kerja siap pakai 25. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
			8. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	26. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 27. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Bidang ketahanan pangan;

Penyelenggaraan Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat ditangani oleh Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pada tahun anggaran 2009 melaksanakan 9 (sembilan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan, dengan penjelasan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.13 :
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Kantor KP2KP				
1.	Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meliputi padi, palawija, sayuran dan buah-buahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.	Ekonomi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja 6. Penyediaan ATK 7. Penyediaan cetakan dan pengadaan 8. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan Makanan dan minuman 13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
			3. Peningkatan Disiplin Aparatur	18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Fasilitas Pindah / Purna Tugas	19. Pemulangan PNS yang pensiun

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan	21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
		~Peningkatan Ketahanan Pangan	7. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan	22. Penyusunan data base potensi produk pangan
			8. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan	23. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan 24. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian / perkebunan 25. Penyuluh dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan
		~Pengembangan Agribisnis	9 Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	26. Penyusunan data base potensi produk pangan

Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 11 (sebelas) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan dengan penjelasan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.14 Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB				
	Meningkatkan Kualitas SDM		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja. 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen Listrik 10. Penyediaan peralatan & Perlengkapan Kantor. 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Bahan bacaan 13. Penyediaan Makan dan Minuman 14. Rapat-rapat konsultasi luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20. Penyusunan laporan keuangan semesteran 21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

			6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	22. Fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 23. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak
			7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	24. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 25. Fasilitas upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
			8. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	26. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 27. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera
			9. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	28. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagai unsur teknis di Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sebagai Penyelenggara Urusan Wajib di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 2 (dua) Program dan 3 (tiga) kegiatan dengan penjelasan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.15 Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB				
	Meningkatkan Kualitas SDM		1.Program pelayanan kontrasepsi 2.Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	1.Pelayanan konseling KB 2.Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 3.Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Bidang perhubungan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandai dengan pelantikan para pejabat struktural Eselon II, III dan IV pada bulan Juli 2008, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat berubah menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melaksanakan Urusan Wajib sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Untuk merealisasikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah maupun Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, pada tahun anggaran 2009 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai satu-satunya SKPD penyelenggara urusan wajib di bidang perhubungan melaksanakan 10 (sepuluh) program yang dijabarkan menjadi 30 (tiga puluh) kegiatan, dengan penjelasan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.16
Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Perhubungan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Perhubungan Kominfo				
	Pembangunan Infrastruktur Perhubungan	Perhubungan Perhubungan Darat / LLAJ dan LLASDP	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15. Pengadaan mebeleur 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	<ol style="list-style-type: none"> 20. Pemulangan pegawai yang pensiun
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 21. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

			6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 23.Penyusunan laporan keuangan semesteran 24.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			7. Program pembangunan & rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana & fasilitas LLASDP	25.Kegiatan pembangunan Dermaga/Gedung Kantor LLASDP
			8. Program peningkatan pelayanan angkutan	26.Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 27.Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
			9. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	28.Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas
			10. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	29.Kegiatan pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 30.Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Bidang komunikasi dan informatika;

Penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kominfo dan Bagian Humas Sekretariat Daerah yang diimplementasikan melalui 2 program dan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut;

Tabel 4.17

Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Komunikasi dan Informatika

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah				
			1.Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
Dinas Perhubungan Kominfo				
			2.Program kerjasama informasi dan media massa	2.Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 3.Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Bidang pertanahan;

Penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pada tahun 2009 dilaksanakan melalui program penataan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah.

Tabel 4.18 Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Pertanahan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah				
	Memelihara keseimbangan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan pemukiman		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kegiatan penanggulangan dan pencegahan bencana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

Namun demikian dalam impementasinya penyelenggaraan urusan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri selain dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat juga diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diwujudkan melalui program - program dan kegiatan - kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 4.19 Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan
Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Badan Kesbangpolinmas				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 16. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 21. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	22. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	23. Pemulangan pegawai yang pensiun
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26. Penyusunan laporan keuangan semesteran 27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			7. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	28. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 29. Pembangunan pos jaga/ ronda 30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
			8. Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	31. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
			9. Program pengembangan wawasan kebangsaan	32. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
			10. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	33. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 34. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
			11. Program pendidikan politik masyarakat	35. Penyuluhan kepada masyarakat 36. Koordinasi forum-forum diskusi politik 37. Penyusunan data base partai politik 38. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
			12. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	39. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Kantor Satpol PP				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan bahan logistik kantor 14. Penyediaan makanan dan minuman 15. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16. Pengadaan mebeleur 17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 19. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 20. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 22. Pengadaan pakaian kerja lapangan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	23. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25. Penyusunan laporan keuangan semesteran 26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	27. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat
			7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	28. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 29. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 30. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan
			8. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	31. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 32. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 33. Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme 34. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Sekretariat Daerah				
	Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Fungsi : Meningkatkan SDM dalam hal politik masyarakat Sub Fungsi : Pengetahuan politik masyarakat meningkat	1. Program pendidikan politik masyarakat	1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.20. Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

Penyelenggaraan Urusan Wajib dibidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian dilaksanakan oleh beberapa satuan kerja perangkat daerah, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.20 : Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 5. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7. Penyediaan jasa administrasi keuangan 8. Penyediaan jasa kebersihan kantor 9. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10. Penyediaan alat tulis kantor 11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14. Penyediaan peralatan rumah tangga 15. Penyediaan makanan dan minuman 16. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	17.Pembangunan gedung kantor 18.Pengadaan kendaraan dinas/operasional 19.Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 20.Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Komunikasi 21.Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 22.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 23.Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 24.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 25.Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	26.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 27.Pengadaan pakaian kerja lapangan 28.Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	29.Pemulangan pegawai yang pensiun
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	30.Pendidikan dan pelatihan formal
			6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 32.Penyusunan laporan keuangan semesteran 33.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			7. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	34.Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 35.Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 36.Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				37. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
			8. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	38. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 39. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa 40. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa
			9. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	41. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
			10. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	42. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 43. Publikasi peraturan perundang-undangan 44. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
Sekretariat DPRD				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 6. Penyediaan jasa administrasi keuangan 7. Penyediaan jasa kebersihan kantor 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				12.Penyediaan peralatan rumah tangga 13.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 14.Penyediaan makanan dan minuman 15.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	16.Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 17.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18.Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 19.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21.Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 22.Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	23.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24.Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26.Penyusunan laporan keuangan semesteran 27.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	28.Pembahasan rancangan peraturan daerah 29.Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 30.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 31.Rapat-rapat paripurna 32.Kegiatan Reses 33.Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				34. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15. Pembangunan gedung kantor 16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 21. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan	23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24.Penyusunan laporan keuangan semesteran 25.Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 26.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	27.Penyusunan analisa standar belanja 28.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 29.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 30.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 31.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 32.Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 33.Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 34.Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 35.Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 36.Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 37.Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah
Badan Kepegawaian Daerah				
	Administrasi Umum Pemerintahan	Pelayanan Umum	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15. Pengadaan mebeleur 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 19. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	21. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 23. Penyusunan laporan keuangan semesteran 24. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	25. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 26. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah
			7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 2. Seleksi penerimaan calon PNS 3. Penempatan PNS

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				<ul style="list-style-type: none"> 4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 5. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 6. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 9. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN
Inspektorat Kabupaten				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> 14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	18. Pemulangan pegawai yang pensiun
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20. Penyusunan laporan keuangan semesteran 21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	22. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 23. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 24. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
			7. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	25. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 15. Pengadaan peralatan gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	17. Pendidikan dan pelatihan formal 18. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20. Penyusunan laporan keuangan semesteran 21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kecamatan Arut Selatan				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 6. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 8. Penyediaan alat tulis kantor 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				12. Penyediaan peralatan rumah tangga 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15. Pembangunan gedung kantor 16. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 19. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 20. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	22. Pemandahan tugas PNS
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	23. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 24. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26. Penyusunan laporan keuangan semesteran 27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	28. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Kecamatan Arut Utara				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kanto 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13. Pembangunan rumah dinas 14. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 16. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	21. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 22. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24. Penyusunan laporan keuangan semesteran 25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Kecamatan Kumai				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 16. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	18. Pemulangan pegawai yang pensiun 19. Pemindahan tugas PNS
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 21. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	22. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 23. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa
Kecamatan Kotawaringin Lama				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14. Pembangunan rumah jabatan 15. Pembangunan rumah dinas 16. Pembangunan gedung kantor 17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	22. Pemulangan pegawai yang pensiun 23. Pemindahan tugas PNS
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	24. Pendidikan dan pelatihan formal 25. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
			6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	26. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 27. Penyusunan laporan keuangan semesteran 28. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	29. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Kecamatan Pangkalan Lada				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15. Pembangunan rumah dinas 16. Pembangunan gedung kantor 17. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 18. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 19. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 20. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	22. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	23. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 24. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26. Penyusunan laporan keuangan semesteran 27. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	28. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa
Kecamatan Pangkalan Banteng				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor

No	Prioritas Pembangunan	Fungsi/ Sub fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan makanan dan mi 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	14. Pembangunan rumah dinas 15. Pembangunan gedung kantor 16. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 17. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 18. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 20. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	22. Pendidikan dan pelatihan formal 23. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25. Penyusunan laporan keuangan semesteran 26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	27. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

1.21. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2008 tentang Organisasi Daerah dan Lembaga teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan wajib di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaannya sebagai lembaga terkait Sekretariat Daerah juga melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Organisasi yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), dan Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2009 melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.21 Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	Administrasi Umum Pemerintahan	Pegembangan dan pelaporan.	1.Pelayanan Administrasi Kantor	1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber-daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor. 6. Penyediaan alat tulis kantor. 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				<p>8. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor.</p> <p>9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.</p> <p>10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan-perundang-undangan.</p> <p>11. Penyediaan makanan dan minuman.</p> <p>12. Rapat-rapat koordinasi keluar daerah</p>
			2. Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	<p>13. Pembangunan gedung Kantor.</p> <p>14. Pengadaan Peralatan gedung kantor</p> <p>15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor</p> <p>16. Pemeliharaan rutin gedung kantor.</p> <p>17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional.</p> <p>18. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.</p>
			3. Peningkatan Disiplin Aparatur	19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-Undang-Undangan
			5. Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja	<p>21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD.</p> <p>22. Penyusunan laporan keuangan semesteran</p> <p>23. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.</p>

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
2.	Penguatan Kelembagaan & Organisasi Masyarakat.	Pembinaan ketahanan masyarakat desa / kelurahan.	6.Peningkatan keberdayaan Masyarakat Desa.	24. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.
3.	Penerapan teknologi tepat guna pedesaan.	Pemukiman& pemanfaatan sumber daya alam		25. penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Tenaga teknis dan masyarakat.
4.	Pemberdayaan masyarakat pedesaan & perkotaan.	Pendayagunaan teknologi tepat guna.		26. Penyelenggaraan Desiminas informasi bagi masyarakat desa.
5.	Pendekatan lintas sektor dan program.			
6.	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat	usaha ekonomi desa	7.Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	27. Fasilitas Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan 28. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
7.	Pengembangan inspirasi & Partisipatif masyarakat		8.Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	29. Pembinaan Kelompok masy. Pembangunan Desa 30. Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 31. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Sekretariat Daerah				
			1.Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa

1.22. Bidang sosial;

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai penyelenggara urusan wajib di bidang social pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Dari program dan kegiatan tersebut terdapat 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan yang sifatnya sama dengan seluruh SKPD, sedangkan 4 (empat) dan 6 (kegiatan) merupakan pelaksanaan

prioritas pembangunan daerah berupa pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan ketersediaan keuangan daerah. Program dan kegiatan prioritas tersebut dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel : 4.22. sebagai berikut :

Tabel 4.22 Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Sosial

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Sosial				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	15. Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional 16. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				18. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	20. Pemulangan pegawai yang pensiun
			5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	21. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 23. Penyusunan laporan keuangan semesteran 24. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
	Mengatasi kemiskinan dan pengangguran	Pelayanan dan Perlindungan Sosial	7. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	26. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
			8. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	27. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 28. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
			9. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	29. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	30. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 31. Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial
Sekretariat Daerah				
			1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

1.23. Bidang kebudayaan;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai dua unsur satuan kerja teknis dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan program-program dan kegiatan, yang ditetapkan berdasarkan strategi demi terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pembangunan yang prioritas di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan untuk urusan wajib yaitu bidang kebudayaan yang diimplementasikan melalui 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel 4.23 dibawah ini :

Tabel 4.23.

Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Disbudpar				
1	Peningkatan pembangunan sektor budaya	Kebudayaan Pengembangan Kebudayaan	1.Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno 2. Pendukungan Pengelolan Museum dan Taman Budaya di Daerah 3. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam
2			2.Pengelolaan Keragaman Budaya	4. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 5. Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1.24. Bidang statistik;

Urusan statistik daerah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dikoordinir oleh Bappeda melalui program Pengembangan Data dan Informasi yang diwujudkan dalam Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.

Tabel 4.24. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Statistik

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Bappeda				
	Konsistensi Fungsi Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan Pengendalian dalam sistem penyelenggaraan pemerintah daerah.	<u>Pembangunan daerah.</u> Administrasi dan operasi dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.	Pengembangan Data Informasi.	Penyusunan dan Pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan Dok. Perencanaan

1.25. Bidang kearsipan;

Bidang kearsipan dilaksanakan melalui 8 program dan 27 kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas administrasi, pelestarian dan pelayanan informasi sebagai berikut;

Tabel 4.25. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Kearsipan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah				
			1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				perlengkapan kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	12. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 13. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 14. Pengadaan mebeleur 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 17. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	18. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	19. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21. Penyusunan laporan keuangan semesteran 22. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	23. Pengumpulan data 24. Pengklasifikasikan dat 25. Penyusunan sistem katalog data
			7. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	26. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
			8. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	27. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

1.26. Bidang perpustakaan

Urusan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah melalui program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan;

Tabel 4.26. Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Bidang Perpustakaan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah				
			1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemasarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca 3. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat 4. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah 5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 6. Pengklasifikasian Bahan Pustaka 7. Penyusunan Sistem Katalogisasi

A.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

2.1. Bidang Pendidikan

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Pendidikan dan Olah Raga			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	1. Pelayanan Surat menyurat Kantor Disdikpora	87,42 %
	2. Penyed. Jasa Kom Sumber daya air dan listrik	2. Kantor Disdikpora Kab. Kobar	81,00 %
	3 Penyed. Jasa Administrasi keuangan	3. Kantor Disdikpora Kab. Kobar	96,93 %
	4 Penyed. Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas	4. Kantor Disdikpora Kab. Kobar	80,21 %
	5 Penyediaan jasa kebersihan Kantor	5 Kantor Disdikpora Kab. Kobar	83,15 %
	6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6 Peralatan kerja kantor Disdikpora Kabupaten Ktw. Barat	87,52 %
	7 Penyediaan alat tulis Kantor	7 Kantor Disdikpora Kab. Kobar	99,06 %
	8 Penyed. Barang cetakan dan pengadaan	8 Kantor Disdikpora Kab. Kobar	96,71 %
	9 Penyediaan Komponen Inst.listrik/penerangan Bangunan Kantor	9 Kantor Disdikpora Kab. Kobar	93,41 %
	10 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	10 Peralatan dan perlengkapan kantor	96,47 %
	11 Penyediaan peralatan rumah tangga	11 Kantor dan seluruh sekolah	100 %
	12 penyed. Bahan bacaan dan perat. Perundang-undangan	12 Perundang-undangan yang terbaru	100 %
	13 Penyediaan Bahan logistic	13 Semua sekolah Negeri se Kobar	94,83 %
	14 penyediaan Makanan dan minuman	14 Semua pegawai di lingk. Disdikpora	87,99 %
	15 Rapat-rapat Koordinasi keluar daerah	15 Rapat2 Koordinasi keluar daerah	79,51 %
2	Program peningkatan sarana Prasarana Aparatur		
	16. Pembangunan Rumah Dinas	16.Pemb. Rumah Dinas kepala Cabang	91,04 %
	17. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor	17.Kantor Disdikpora kab. Ktw. Barat	99,07 %
	18. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/Operasional.	18.Kendaraan operasional Kantor	99,07 %
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	19. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	19.Seluruh pegawai dan guru-guru di lingkungan Dikpora	46,26 %
	20. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20.Pegawai Disdikpora Kobar	33,70 %

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
4	Prog.Peningkat. Pengemb. Sistem pelap capaian kinerja dan keuangan 21. Penyusunan lap capaian kinerja 22. Penyusunan lap Keuangan semesteran 23. Penyus. Lap. Keuangan Akhir tahun	21. Laporan Capaian Kinerja Disdikpora Kobar 22. Laporan keuangan semesteran Disdikpora 23. Lap. Keuangan akhit tahun Disdikpora	100 % 84,70 % 100 %
5	Program Pendidikan Anak usia Dini 24. Pengadaan alat praktek peraga siswa	24. Penambahan alat praktek peraga sekolah.	99,60 %
6	Prog. Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun 25.Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, Guru, penjaga sekolah 26.Penambahan ruang kelas sekolah 27.Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 28.Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 29.Pengadaan meubeler sekolah 30.Pengadaan Alat rumah tangga sekolah 31.Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas belajar 32 Rahab sedang berat bangunan sekolah 33.Rehab sedang berat perpustakaan sekolah 34.Membina SMP terbuka 35.Penyed. Bantuan Op. Sekolah (BOS) jejang SD/ MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren salafiyah SD dan SMP 36.Penyelenggaraan Paket A setara SD 37.Penyel. Paket B setara SMP 38.Pembinaan Minat bakat dan kreatifitas siswa 39.Penyebaranluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	25. Rumah dinas kepala Sekolah 26. Penambahan ruang kelas sekolah 27. Pembuatan pagar sekolah 28. Penambahan alat praktek peraga siswa 29. Penambahan meubeler sekolah 30. Menambah alat rumah tangga sekolah 31. Pemeliharaan ruang kelas 32. Rehab bangunan sekolah 33. Rehab bangunan perpustakaan sekolah 34. Membina SMP terbuka 35. Menyalurkan BOS pada jenjang SD/MI dan SMP/ Mts 36.Menyelenggarakan Paket A 37.Menyelenggarakan Paket B 38. Membina minat bakat dan kreativitas siswa 39. Penyebaranluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan	99,08 % 98,32 % 99,52 % 98,96 % 99,32 % 95,40 % 100 % 99,88 % 99,49 % 58,57 % 98,30 % 69,87 % 78,53 % 62,59 % 99,00 %
7	Program Pendidikan Menengah 40. Pembangunan Gedung Sekolah 41. Penambahan ruang kelas sekolah 42. Pembangunan Lab desain ruang pratikum sekolah, Lab bahasa,komputer,IPA IPS dan lain-lain 43. Pembangunan taman, lapangan upacara dan Fasilitas parkir 44. Pembangunan Perpustakaan sekolah 45. Pembangunan Jaringan listrik sekolah dan perlengkapannya	40.Pembangunan gedung sekolah 41. Menambah ruang kelas sekolah 42. Menambah Lab bhs, IPA,IPS dan komputer 43. Pembangunan taman lap. Dan fasilitas parkir 44.Menambah perpustakaan sekolah 45. Menambah jaringan listrik sekolah	100 % 99,33 % 100 % 99,12 100 % 99,60 %

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	46. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	46. Menambah alat praktek dan peraga	99,62 %
	47. Pengadaan meubeler sekolah	47. Memenuhi Meubeler sekolah	99,96 %
	48. Pengadaan alat rumah tangga sekolah	48. Memenuhi alat rumah tangga sekolah	66,64 %
	49. Rehab sedang berat bangunan sekolah	49. Pemeliharaan Bangunan sekolah	99,21 %
	50. Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	50. Bantuan sekolah model	88,23 %
	51. Penyelenggaraan paket C setara SMU	51. Penyelenggaraan paket C setara SMU	71,28 %
	52. Peningkatan kerjasama dengan dunia Usaha	52. Melaksanakan praktek bagi siswa SMK	89,50 %
8	Program pendidikan Non Formal		
	53. Pengembangan Pendd Kecakapan hidup	53. Membentuk pasukan Paskibra	69,48 %
	54. Penyediaan sarana dan prasana pendidikan Non Formal	54. Pengadaan alat-alat olah raga	95,87 %
9	Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik		
	56. Pembinaan kelompok kerja Guru	56. Membina KKG bagi jenjang SMA	100 %
	57. Pendidikan lanjutan bagi pendidik unt memenuhi Standar kualifikasi	57. Melaksanakan sertifikasi guru	100 %
	58. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidikan.	58. Pelatihan bagi guru yang belum memenuhi standar S1	100 %
	59. Pengembangan system penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	59. Pemberian penghargaan terhadap guru yang berkualitas	100%
10	Program Manajemen Pelayanan pendidikan		
	59. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang	59. Melaksanakan lap dan eval hasil kinerja (LAKIP)	34,03 %
	60. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	60. Kerjasama dengan secara kelembagaan	100 %
	61. Pembinaan dewan pendidikan	62. Membina dan kerjasama dengan dewan pendidikan	57,28 %
	62. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	62. Membuat jaringan sistem Informasi manajemen pendidikan	70,19 %

2.2. Bidang Kesehatan

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di bidang kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Program danKegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
Dinas Kesehatan Daerah				
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			92,78
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggara kegiatan surat menyurat pengiriman surat dan penerimaan surat dari dan keluar dinas kesehatan	Kegiatan surat menyurat berjalan lancar.100%	90,98
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air listrik selama 1 tahun	Kegiatan kantor terfasilitasi telepon listrik air lancar	74,92
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pengelolaan keuangan dengan honor yang sesuai tugas dan fungsinya adminstrasi keuangan selama 12 bulan	Terselenggaranya Pengelolaan keuangan dengan baik	95,35
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksana pemeliharaan kebersihan kerapian kantor	Terjaganya kerbersihan kantor	93,14
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan kerja	Peralatan kerja terpelihara dan berfungsi dengan baik	100,00
	6. Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan atk selama 1 tahun	ATK kantor terpenuhi sesuai kebutuhan	100,00
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pengadaan pencetakan dan penggandaan untuk kebutuhan kantor	Cetak dan pengadaan terpenuhi sesuai kebutuhan	100,00
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya pengganti alat listrik yang rusak dan pemasangan jaringan listrik untuk pustu	Terpeliharanya jaringan listrik dilingkungan kantor	39,69
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya printer, mesin fax komputer untuk kelengkapan kantor	99,46

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
2.	10. Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minum pegawai dinas kesehatan	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minum pegawai selama jam kerja	98,01
	11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kegiatan kegiatan luar daerah seperti rapat pertemuan dapat berjalan dengan baik.	99.64
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			98.39
	12. Pembangunan rumah dinas	Terlaksananya pembangunan rumah dinas di Puskesmas dan jaringannya	Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas medis maupun paramedis di Puskesmas dan jaringannya sebanyak 90%	98,43
	13. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaran dinas roda 2 untuk petugas pustu dan bidan desa	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional petugas puskesmas, pustu dan Poskesdes	93,33
	14. Pengadaan peralatan gedung kantoran	Terlaksananya pengadaan pendingin ruangan untuk aula dan istalasi farmasi	Terpenuhinya kebutuhan peralatan pendingin untuk pemeliharaan gudang obat, aula dan labkesda	98,18
	15. Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeleur untuk Puskesmas Pustu dan Poskesdes	Terpenuhinya fasilitas mebeleur pegawai di Puskesmas dan jaringannya	99.63
	16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas untuk penunjang kegiatan kantor	Kendaraan dinas operasional dapat berfungsi dengan baik.	96,34
3.	17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dengan baik selama 1 tahun	Gedung kantor terpelihara dengan baik selama 1 tahun	100.00
	18. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya rehab rumah dinas medis dan paramedis	Rumah dinas medis dan paramedis layak untuk ditempati	99.50
3.	Program peningkatan disiplin aparatur			99.00
	19. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai untuk 82 orang	Meningkatnya disiplin pegawai dilingkungan dinas kesehatan	99,00

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 20. Pemulangan pegawai yang pensiun	Terlaksananya pemulangan pegawai yang pensiun ke tempat asal	Penghargaan terhadap pegawai pensiun	100,00 100,00
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 21. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Diklat bagi tenaga kediklatan, tenaga fungsional, organisasi keprofesian	Meningkatnya wawasan, kapasitas peserta diklat dalam meningkatkan kapasitas manajemen dan teknis pada bidangnya	85,32 85,32
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 22. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 23. Penyusunan laporan keuangan semesteran 24. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyampaian laporan lakip Terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran Terlaksananya penyusunan laporan akhir tahun	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Tersedianya laporan semester keuangan Tersedianya laporan akhir tahun keuangan	98,27 97,40 100,00 97,40
7.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 25. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 26. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Terlaksananya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Terlaksananya pendistribusian obat ke Puskesmas dan jaringannya	diperpenuhinya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan penunjang pelayanan di Puskesmas dan Jaringannya 90% Obat selalu tersedia di Puskesmas dan jaringannya	99,50 99,56 69,13
8.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat			93,05
	27. Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Terlaksananya pendataan atau validasi data gakin, terlaksananya pendataan kasus katarak	Meningkatnya pelayanan kesehatan buat gakin	91,63
	28. Peningkatan kesehatan masyarakat	Pimpinan Puskesmas, seluruh penduduk kobar, seluruh tenaga kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang memadai	87,82

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
	29. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Ibu hamil, WUS, Nifas neonatus dan tenaga kesehatan	Meningkatnya kualitas pelayanan kebidanan yang ditangani tenaga yang berkopeten dan cakupan K4 dan penanganan bumil resiko tinggi	91,09
	30. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Puskesmas dan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas	Tersedianya biaya operasional dan pemeliharaan untuk 15 Puskesmas 76 Pustu dan 51 Poskesdes.	96,83
9.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat			90.52
	31. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Terlaksananya pengadaan sarana peraga untuk diklat atau penyuluhan phantom kebidanan	Meningkatnya kualitas diklat kebidanan dan penyuluhan kesehatan ibu dan pertolongan persalinan Nakes yang aman dan berkualitas	97,63
	32. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Terlaksananya pelatihan tokoh masyarakat dalam promosi kesehatan, pembinaan kapasitas kader, tenaga penyuluh, tenaga penggerak desa siaga dan perencanaan evaluasi program	Meningkatnya perilaku PHBS masyarakat, melalui pemberdayaan, peningkatan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan desa siaga	74.61
	33. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	Terlaksananya upaya peningkatan SDM Kesehatan dan penunjang (kader) dalam bentuk pembinaan SDM Kes di unit pelayanan didesa, jambore kader kesehatan, kemitraan LSM dan organisasi profesi	Bersinerginya upaya peningkatan SDM Penyuluh, kader dan peranan kemitraan dalam meningkatkan kualitas penyuluhan kesehatan.	93,40
10.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat			94,39
	34. Pemberian tambahan makanan dan vitamin	Terlaksananya pengadaan makanan pendamping ASI bayi/balita 6 s.d 24 bulan untuk keluarga miskin	Meningkatnya status gizi masyarakat	95.40
	35. Pengurangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	Terlaksananya pemberian Vit A, Fe bumil dan zat gizi mikro lainnya	Meningkatnya status gizi masyarakat	87,24

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
11.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat 36. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Terlaksananya pemantauan air bersih, Jamban keluarga, rumah sehat, Tempat tempat umum dan tempat pengolahan makanan	Menurunnya angka kesakitan yang disebabkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan	73,26 73,26
12.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 37. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 38. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 39. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 40. Peningkatan Imunisasi 41. Peningkatan surveillence epideminologi dan penanggulangan wabah	Terlaksananya pengendalian nyamuk aedes aegypti penular penyakit DBD Tersedianya kebutuhan bahan dan alat penunjang kegiatan pengendalian Demam berdarah Terlaksananya pengendalian penyakit menular dimasyarakat Terlaksananya imunisasi Bayi, Balita, anak, ibu hamil dan ibu nifas. Petugas survailans kabupaten, Puskesmas tim KLB/Bencana dan masyarakat rawan KLB	Menurunnya insiden rate dari penyakit DBD Terpenuhinya kebutuhan alat dan pengendalian demam berdarah Menurunnya angka kesakitan dan kematian yang disebabkan oleh penyakit menular Menurun angka kekitaan dan kematian disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Tersedianya data informasi sebagai dasar pengendalian faktor resiko dan sumber penyakit yang menimbulkan wabah	91,43 97,35 99,03 94,04 73,41 83,42
13.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 42. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 43. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 44. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya pembuatan profil dinas kesehatan, Puskesmas dan jaringannya Terlaksananya manajemen mutu pelayanan kesehatan Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi program kesehatan	Tersedia informasi data yang akurat untuk pengambilan keputusan dalam pembautan program kesehatan Tersedianya standar mutu pelayanan kesehatan Termonitornya kegiatan pengendalian program di dinas Kesehatan	93,98 91,08 94,51 94,68
14.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya			92,74

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
	45. Pengadaan puskesmas keliling	Terlaksananya pengadaan mobil Pusling untuk Puskesmas	Meningkatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dengan tersedianya mobil pusling	97,40
	46. Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	Terlaksananya pengadaan sarana peralatan penyuluhan, antropometri, meubelair untuk Posyandu didesa PM2L	Meningkatnya kualitas layanan dan penyuluhan dengan dimilikinya sarana tersebut.	98,77
	47. Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas	Terlaksananya pembangunan, peningkatan Pustu menjadi Puskesmas atau pembangunan baru puskesmas induk	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dimasyarakat	86,65
	48. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Cakupan sarana pelayanan kesehatan puskesmas dan jaringannya	Meningkatnya sarana dan prasarana fisik Puskesmas dan jaringannya 90% kondisi baik	92,91
15.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita			96,95
	49. Penyuluhan kesehatan anak balita	Cakupan pelayanan kesehatan anak balita, Anak balita umur 0 s.d 59 bulan dan petugas kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan anak balita, meningkatkan deteksi tumbuh kembang balita oleh petugas terlatih,	96,95
16.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia			99,52
	50. Pelayanan pemeliharaan kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan terhadap lansia, kelompok lansia, posbindu lansia	Meningkatnya pelayanan pemeliharaan kesehatan lasia dan pra lansia	99,52
Rumah Sakit Umum Daerah				
1.	Program Pelayanan Administrasi			97,09
	1. Penyediaan jasa surat menyurat			84,09
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			93,19
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			98,85
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan			93,61

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor			97,37
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja			98,06
	7. Penyediaan alat tulis kantor			99,58
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			93,86
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			99,54
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			99,60
	11. Penyediaan makanan dan minuman			99,49
	12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			94,93
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			98,36
	13. Pembangunan rumah dinas			99,03
	14. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			99,20
	15. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas			99,48
	16. Pengadaan peralatan gedung kantor			94,44
	17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			100,00
	18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			99,91
	19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor			99,86
3.	Program peningkatan disiplin aparatur			99,91
	20. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			99,91

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 21. Pemulangan pegawai yang pensiun			0
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 22. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			85,11 85,11
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24. Penyusunan laporan keuangan semesteran 25. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			99,13 99,40 99,00 99,00
7.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehata 26. Penyusunan standar kesehatan			99,98 99,98
8.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 27. Pembangunan rumah sakit 28. Pengadaan alat-alat rumah sakit 29. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 30. Pengadaan mebeleur rumah sakit 31. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 32. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit			91,84 85,44 93,55 99,92 98,99 99,57 99,08

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
	33. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit			91,34
9.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata			99,38
	34. Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit			100,00
	35. Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik			98,90
	36. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)			100,00
	37. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU			100,00
	38. Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi			99,72
	39. Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi			100,00
	40. Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen			100,00
	41. Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit			99,56
	42. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit			100,00
	43. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit			100,00
	44. Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah			98,78
	45. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit			100,00

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4	5
	46. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit			99,60
10.	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan			98,52
	47. kemitraan pengolahan limbah rumah sakit			99,50
	48. kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis			0,00
	49. kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu			98,85

Berdasarkan Kewenangan Wajib dan SPM di Kabupaten Kotawaringin Barat Belum semua mencapai target dan kendala yang dihadapi adalah penetapan sasaran yang belum akurat sehingga angka proyeksi sasaran sangat jauh dengan keadaan sasaran dilapangan. Capaian dan Kinerja SPM dapat dilihat dalam lampiran Capaian SPM Tahun 2009.

Dari 18 indikator ada 9 indikator yang tidak mencapai target atau sebesar 50% indikator spm tidak tercapai di banding tahun 2008 hanya 7 indikator tidak mencapai target yang diharapkan atau (38,8%) tidak mencapai target.

CAPAIAN INDIKATOR SPM

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2009

NO	INDIKATOR SPM	ANGKA ABSOLUT		HASIL	TARGET/ SASARAN SETAHUN
		PEMBILANG	PENYEBUT		
1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	5789	6006	96.39	90
2	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	974	1193	81.64	72
3	Cakupan persalinan oleh bidan atau Nakes yg memiliki kompeten kebidanan	4853	5816	83.44	88

NO	INDIKATOR SPM	ANGKA ABSOLUT		HASIL	TARGET/ SASARAN
		PEMBILANG	PENYEBUT		SETAHUN
4	Cakupan Pelayanan Nifas	4624	5816	79.50	85
5	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	922	1159	79.55	74
6	Cakupan kunjungan bayi	4001	4675	85.58	85
7	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	66	89	74.16	100
8	Cakupan pelayanan anak Balita	15242	20645	73.83	85
9	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan pada keluarga miskin	3457	3457	100.00	100
10	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	7	7	100.00	100
11	Cakupan penjangkaran siswa SD dan setingkat	3320	15106	21.98	90
12	Cakupan peserta KB Aktif	6561	6944	94.48	68
13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit				
	a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	0	0	100.00	100
	b. Penemuan penderita pnemonia Balita	84	206	40.78	10
	c. Penemuan pasien baru TB BTA +	105	445	23.60	60
	d. Penderita DBD yang ditangani	455	455	100.00	100
	e. Penemuan penderita diare	8214	6721	122.21	90
14	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	23479	43417	54.08	20
15	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	1092	43417	2.52	3
16	Cakupan pelayanan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kabupaten/kota	1	1	100	64
17	Cakupan Desa/Kelurahan mengalamim KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	34	39	87.18	100
18	Cakupan Desa Siaga Aktif	35	89	39.33	80

2.3. Bidang lingkungan hidup

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
Badan Lingkungan Hidup			
1.	Pelayanan Adm Perkantoran		
	1.Penyediaan jasa surat menyurat	-Terkirimnya surat-menyurat	-
	2.Penyed.jasa komunikasi,SDA/listrik	-Pembayaran Rek.Listrik dll	68,00
	3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan operasional	-Terpenuhinya Keleng.srt Ijin kend.	93,83
	4.Penyed iaan Jasa Administrasi keuangan	-Tersedianya Honorarium,Materai dll	99,49
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	-Tersedianya peralatan bhn kebersihan	99,69
	6.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-Terpebuhinya servis komputer dll	100
	7.Penyedian alat tulis kantor.	-Kegiatan Adm Kantor terlak.dg baik	100
	8.Penyediaan barang cetakan & penggandaan.	-Terlaksananya cetak,fotocopy dll	100
	9.Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	-Terpenuhinya penerangan kantor	100
	10.Penyed peralt & perkpan kantor	-Bertambahnya Peralatan Kantor	100
	11.Penyediaan peralatan rumah tg, kantor	-Tersedianya peralatan Rumah tangga	100
	12.Penyediaan . Bahan bacaan & per-UU	-Tersedianya bahan Perpust.kantor	8,57
	13.Penyed.makanan/minuman	-Terlaksananya makan minum pegawai	100
	14.Rapat2 koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-Terlaksananya rapat,konsultasi dan Koordinasi keluar daerah	100
2.	Peningkatan sarana prasarana Aparatur		
	1.Pembangunan gedung Kantor	-Tersedianya tmpt parkir dan rmh jaga	100
	2.Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	-Terpenuhinya pemeliharaan gedung	100
	3.Pengadaan Perlengkapan gedung kantor.	- Tersedianya AC Laboratorium	100
3.	Peningkatan disiplin aparatur		
	1.Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	- Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai	100
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		
	1.Pemulangan pegawai yang pensiun	- Terlaksananya pemberian bantuan kesejahteraan pegawai pension	100
5.	Pengikatan kapasitas SD.Aparatur		
	1.Bimbingan teknis dan pelatihan	- Profesionalisasi pegawai dalam menangani lingkungan hidup	100
6.	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja		
	1.Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	-Terlaksananya laporan semesteran	100
	2.Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	-Terlaksananya laporan akhir tahun	100

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
7.	Pengendalian pencemaran & perusakan L.H. 1.Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura 2.Penanganan kasus Perusakan Lingkungan 3. Pengkajian dampak lingkungan 4. Peningkatan Pengelo. lingkungan pertambangan 5. Koordinasi Penyusunan AMDAL 6. Peningk. peranserta masya dlm pengedl L.H. 7. Monitoring, evaluasi & pelaporan	- Terlaksananya kota bersih dan ramah lingk - Perubahan positif terhadap lingkungan - Berkurangnya pencemaran lingk. - Berkurangnya limbah sungai - Terlaksananya dokumen amdal - Masya pengelola lingkungan. -Terpenuhinya data lengkap.	100 100 100 100 100 100 100
8.	Perlindungan & Konservasi SDA. 1. Konservasi SD.Air & pengedl. kerusakan sumber sumber air. 2. Koordnasi Pengdl.Kebakaran hutan	-Terjaganya kualitas air sungai - Terkendalinya dampak lingkungan	100 100
9	Peningkt kualitas & akses informasi SD Alam & L.H. 1. Pengembangan data & informasi Lingkungan	-Pengumpulan data-data lingkungan	100
10.	Peningkatan Pengendalian Polusi 1.Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri 2.Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 3.Penyuluhan dan pengendl polusi & pencemaran	-Sumber informasi Kementrian lingkungan dan daerah -Pangkalan Bun dan sekitarnya -Terhadap industri besar/kecil di Kab.Kobar	100 100 100
11.	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.Penyusunan kebijakan norma,standar prosedur manual pengelolaan RTH. 2.Penyusunan Analisis data/info pengelolaan RTH	- Masyarakat & masyarakat usaha industri	100 100
Dinas Pekerjaan Umum			
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Terlaksananya penyediaan prasarana dan sarana pengolahan sampah Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasana dan sarana persampahan	100 100
2.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 3. Penataan RTH	Terlaksananya pemeliharaan terhadap planson median jalan, lampu hias, pengecatan kerb jalan, rehab taman, pemeliharaan bunga dan pengadaan tanaman	100

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
	4. Pemeliharaan RTH	Terbangunnya Taman, Bundaran, Pintu Gerbang/Tugu Masuk, Penataan kawasan bundaran dan taman Istana Kuning, taman PKK, parit, proteksi, jalan paving stone dan bronjong	100

2.4. Bidang pekerjaan umum;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Pekerjaan Umum			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Penyediaan jasa surat-menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat 250 surat	100
	2. Penyediaan jasa komuni-kasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kelancaran kerja dan kenyamanan kerja	100
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan	100
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pengurusan perpanjangan ijin kendaraan	100
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercapainya tertib administrasi keuangan	100
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat & nyaman	100
	7. Penyediaan ATK	Terwujudnya tertib administrasi	100
	8. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terlaksananya cetak blanko dan foto copy.	100
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100
	10. Penyediaan peralatom dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kantor	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	11. Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja utk mempertahankan manfaat dan fungsi	100
	12. Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah & buku perundang-undangan	100
	13. Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	100
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan hubungan kerja dan menambah pengetahuan	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	1. Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan gedung gudang arsip	100
	2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas dan kendaraan operasional kebersihan	100
	3. Pengadaan mebeuler	Tersedianya mebeuler kantor	100
	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	100
	5. Peleliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100
III	Peningkatan Disiplin Aparatur		
	1. Pengadaan pakaian dinas	Terlaksananya pengadaan pakaian seragam kerja	100
	2. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Terlaksananya pengadaan Mesin/Kartu Absensi	100
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan / pemahaman peraturan perundang-undangan, kursus-kursus & bimbingan teknis	100
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya laporan keuangan semesteran	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	100
VI	Pembangunan Jalan dan Jembatan		
	1. Pembangunan jalan	Terlaksananya pembangun-an jalan kabupaten	100
	2. Pembangunan jembatan	Pembangunan jembatan kabupaten dan AMP	100
VII	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong		
	1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Tersedianya saluran air kotor	100
VIII	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		
	1. Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Tertanganinya erosi tebing/ bantaran sungai buun, sungai arut dan sungai lamandau serta tebing candi Kumai	100
IX	Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		
	1. Rehabilitasi/pemeliharaan jln	Terlaksananya pemeliharaan periodik dan rutin jln kabupaten.	100
	2. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jembatan	100
X	Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan		
	1. Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Terlaksananya inspeksi dan tersusunnya data base jalan dan foto udara	100
	2. Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Terlaksananya inspeksi dan tersusunnya data base jembatan	100
XI	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		
	1. Pengadaan alat-alat berat	Terlaksananya pengadaan alat berat	100
	2. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terlaksananya pengadaan alat ukur dan bahan laboratorium	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Terlaksananya pemeliharaan alat berat	100
	4. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Terlaksananya pemeliharaan alat ukur dan bahan laboratorium	100
XII	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya		
	1. Pembangunan pintu air	Tersedianya talang air, pintu air dan bangunan pelengkap irigasi	100
	2. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terlaksananya rehabilitasi dan operasional dan pemeliharaan saluran irigasi primer, kolektor dan sekunder	100
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	Terlaksananya pembangunan normalisasi sungai	100
	4. Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Terlaksananya penyuluhan kepada kelompok tani pemakai air	100
	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya tertip administrasi pelaporan	100
XIV	Penyediaan dan Pengolahan Air Baku		
	1. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Terlaksananya pembangunan tanggul saluran, jalan dan jembatan kayu ulin untuk layanan pertanian	100
XV	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
	1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya penanganan prasarana air limbah dan air bersih perdesaan	100
	2. Pengembangan distribusi air minum	Terlaksananya pembangunan jaringan air bersih/air minum Pangkalan Bun dan Kumai	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
XVI	Pengendalian Banjir		
	1. Pengembangan pengelolaan daerah rawa dalam rangka pengendali banjir	Terbangunnya pengembangan daerah rawa dalam rangka pengendalian banjir di wilayah bagian timur dan bagian tengah kota Pangkalan Bun	100
	2. Pembangunan tanggul pemecah ombak	Mengurangi tingkat erosi dan abrasi air laut di kawasan Kubu, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Keraya serta mengamankan kawasan obyek wisata dan tumbuhnya tanaman bakau	100
XV	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		
	1. Perencanaan Pengembangan infrastruktur	Terlaksananya penyusunan data base kecipta karya	100
XVII	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan		
	1. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksananya pembangunan jalan perdesaan/kelurahan	100
	2. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Terlaksananya pembangunan sarana air bersih	100
	3. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan/kelurahan	100

2.5. Bidang penataan ruang;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
Bappeda			
1.	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya koordinasi dan data Penataan Ruang Pengembangan Wilayah Kabupaten	100

Dinas Pekerjaan Umum			
2.	Perencanaan Tata Ruang - Penyusunan Rencana Teknis Tata Ruang	Terlaksananya Rencana Teknis Tata Ruang	100

2.6. Bidang perencanaan pembangunan;

Realisasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 87,71 % dengan rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut:

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Bappeda			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Penyediaan jasa surat-menyurat	Terlaksananya pengiriman surat menyurat	100
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya kelancaran kerja dan kenyamanan kerja	69,03
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan kantor	86,43
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pengurusan perpanjangan ijin kendaraan	16,56
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya tertib administrasi keuangan	92,40
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja untuk mempertahankan manfaat dan fungsi	100
	7. Penyediaan ATK	Terwujudnya tertib administrasi	100
	8. Penyediaan barang cetakan & penggandaan	Terlaksananya cetak blanko dan foto copy.	100
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,55
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	11. Penyediaan peralatan rumah tangga	Terlaksananya perbaikan peralatan kerja utk mempertahankan manfaat dan fungsi	100
	12. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar, majalah & buku perundang-undangan	-
	13. Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman pegawai	85,62
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan hubungan kerja dan menambah pengetahuan	93,60
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	1. Pembangunan Gedung Kantor	Terlaksananya pembangunan ruang makan aula bappeda	77,63
	2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas Kepala Bappeda	100
	3. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	100
	4. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	-
	5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	-
	6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas	100
	7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	100
	8. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	100
III	Peningkatan Disiplin Aparatur		
	1. Pengadaan pakaian dinas	Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapangan	88,89
IV	Fasilitas Pindah Tugas/Purna Tugas PNS		

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	1. Pemulangan pegawai yang pensiun	Terlaksananya pemberian bantuan pegawai yang pindah tugas/pensiun	-
V	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya peningkatan / pemahaman peraturan perundang-undangan, kursus-kursus & bimbingan teknis	70,87
VI	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terlaksananya laporan keuangan semesteran Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun	100 100 100
VII	Pengembangan Data Informasi 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersedianya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	100
VIII	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 2. Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya studi banding ke luar daerah Terlaksananya bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	58,77 100
IX	Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Penyusunan Rancangan RKPD 2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 3. Penetapan RKPD 4. Koordinasi Penyusunan LKPD	Terlaksananya penyusunan Rancangan RKPD Terselenggaranya Musrenbang RKPD Tersedianya dokumen RKPD Terlaksananya penyusunan LKPD (namun tidak dilaksanakan karena	100 100 100 -

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	5. Koordinasi Penyusunan LKPJ	terjadi duplikasi dengan Bagian Tata Pemerintahan Setda) Terlaksananya penyusunan LKPJ	100
	6. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan pembangunan daerah	85,20
X	Perencanaan Pembangunan Ekonomi		
	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi.	59,94
XI	Perencanaan Sosial Budaya		
	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan bidang Sosbud	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Sosbud	92,45
	2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monev dan pelaporan kegiatan dibidang sosbud	81,39
XII	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		
	1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	70,12
Sekretariat Daerah			
I	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan		
	1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	Dicapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa	45,50
	2. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan		5,85
II	Program perencanaan pembangunan daerah		
	1. Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Tersedianya Buku LPPD Tahun 2009 dan CD LPPD Tahun 2009	58,33
	2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah		29,90

2.7. Bidang perumahan;

Dalam Tahun Anggaran 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
Dinas Pekerjaan Umum			
	Program pengelolaan areal pemakaman 1. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	Tersedianya TPU bagi masing-masing agama (Islam, kristen, katolik, hindu dan budha) dalam 1 kawasan	96,98
Sekretariat Daerah			
	Program pengelolaan areal pemakaman 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Pembuatan Gazebo/Tempat Istirahat Makam Pendiri Kobar 1 buah. Paving Pintu Masuk Makam Pendiri Kobar 140 m ² .	99,33

2.8. Bidang kepemudaan dan olahraga;

Dalam Tahun Anggaran 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
Sekretariat Daerah			
	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 1. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Terlaksananya Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda. Jumlah 1000 orang	89,20 82,90
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. 1. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terlaksananya Pembinaan terhadap Generasi Muda di Bidang Olahraga. Jumlah 25	95,50 98,98

	2.Penyelenggaraan kompetisi olahraga	cabang. Terlaksananya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga (Marching Band).	91,51
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		99,24
	1.Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Siring dan Pagar Sampuraga 250 m ² . Pintu gerbang dan nama stadion Sampuraga 1 paket. Pemasangan paving halaman stadion sampuraga 750 m ² . Rehab bangunan LPTP di Stadion Sampuraga 1 paket.	100
	2.Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya Pemeliharaan Stadion Sampuraga	97,28

2.9. Bidang penanaman modal;

Dalam Tahun Anggaran 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
Bappeda			
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1.Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal		70,12
Disperindag			
	2. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA		100
	3. Penyelenggaraan pameran investasi		100

2.10. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tk. Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Koperasi UKM dan Pasar			
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran		96,96
	- Penyediaan jasa surat menyurat.	- Terlaksananya jasa surat menyurat.	81,25
	- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	- Terpenuhinya keb. Telp. Air dan listrik.	88,42
	- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	- Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	100
	- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	- Terlaksananya jasa jaminan barang milik daerah.	100
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional.	- Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.	100
	- Penyediaan Jasa administrasi keuangan .	- Terlaksananya Jasa administrasi keuangan .	100
	- Penyediaan jasa kebersihan kantor.	- Terlaksananya jasa kebersihan kantor.	93,34
	- Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja.	- Terlaksananya jasa perbaikan dan peralatan kerja.	94,00
	- Penyediaan Alat tulis kantor.	- Tercapainya Alat tulis kantor.	100
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.	- Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan.	100
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	- Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	86,54
	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	- Terlaksananya Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	100

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tk. Capaian (%)
1	2	3	4
	- Penyediaan peralatan rumah tangga.	- Terlaksananya Penyediaan peralatan rumah tangga.	96,60
	- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	- Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	100
	- Penyediaan makanan dan minuman.	- Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman.	95,72
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	- Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.	100
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.		100
	- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	- Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	100
	- Pengadaan Meubeleir.	- Terlaksananya Pengadaan Meubeleir.	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	- Terpelihara rutin/berkala gedung kantor.	100
	- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	- Terpelihara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	100
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		100
	- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Terlaksananya Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100
4.	Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur		82,18
	- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	- Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	82,18
5.	Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100
	- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	- Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	100

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tk. Capaian (%)
1	2	3	4
	- Penyusunan laporan keuangan semesteran.	- Terlaksananya Penyusunan laporan keuangan semesteran.	100
	- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan	100
6.	Program penciptaan iklim UKM yang kondusif.		100
	- Sosialisasi kebijakan tentang UKM.	- Terlaksananya Sosialisasi kebijakan tentang UKM.	100
	- Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM.	- Terlaksananya Perencanaan, koordinasi dan pengembangan UKM.	100
7.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM		100
	- Fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi.	- Terlaksananya pengembangan sarana promosi hasil produksi.	100
	- Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	- Terlaksananya Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan.	100
8.	Program Pengembangan system pendukung usaha bagi UMKM.		54,22
	- Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.	- Terlaksananya Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM.	54,22
	-		
9.	Program Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi		83,11
	- Peningkatan sarana dan prasaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian.	- Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasaran pendidikan dan pelatihan perkoperasian.	100
	- Peningkatan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.	- Terlaksananta Peningkatan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.	96,59
	- Sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman perkoperasian.	- Terlaksananya Sosialisasi prinsip- prinsip pemahaman perkoperasian.	99,85
	- Pembinaan, pengawasan dan	- Terlaksananya Pembinaan,	39,43

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tk. Capaian (%)
1	2	3	4
	penghargaan koperasi berprestasi.	pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi.	
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.	- Terlaksananya Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi.	77,29
	- Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.	- Terlaksananya Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.	80,13
	- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	- Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	83,46
10.	Program Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		100
	- Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk.	- Terlaksananya Pengembangan pasar dan distribusi/ produk..	100
11.	Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan asongan		94,28
	- Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima dan asongan.	- Terlaksananya Penyuluhan peningkatan disiplin pedagan kaki lima dan asongan.	100
	- Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.	- Terlaksananya Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.	57,18

2.11. Bidang kependudukan dan catatan sipil;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tk. Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil			
I	Program Pelayanan Adm.Perkantoran.		
	1.Penyediaan Jasa surat menyurat	-Terlaksananya jasa surat menyurat	87,22
	2.Penyediaan Jasa Komunikasi,sum ber daya air dan listrik.	-Terpenuhinya telepon dan air.	43,07

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tk. Capaian (%)
1	2	3	4
	3.Penyediaan Jasa adm.Keuangan	-Terlaksananya jasa adm. Keuangan	98,32
	4.Penyediaan jasa kebersihan Kantor.	-Terlaksananya jasa kebersihan kantor.	89,77
	5.Penyediaan Alat Tulis Kantor	-Tercapainya alat tulis kantor	100
	6.Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	-Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	98,49
	7.Penyediaan Komponen Intalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	-Terlaksananya penyediaan komponen Instalasi listrk/penerangan bangunan Kantor.	100
	8.Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	-Terlaksananya jasa peralatan dan Perlengkapan kantor.	92,96
	9.Penyediaan peralatan rumah tangga.	-Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah tangga.	60,91
	10.Penyediaan makanan dan minuman.	-Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman.	98,92
	11.Rapat-rapat dan koordinasi ke Luar daerah	-Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	99,98
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.		
	12.Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	-Terpeliharanya perawatan gedung Kantor	55,71
	13.Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-Terpeliharanya perawatan kendaraan dinas.	85,38
III	Program peningkatan disiplin Aparatur		
	14.Pengadaan pakaian dinas beserta Perlengkapannya.	-Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	100
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
	15.Bimbingan teknis implementasi Perundang-undangan.	-Terlaksananya bimbingan teknis Impelementasi perundang-undangan	0,00
V	Program Pen.Pengemb.sistim Pel.capaian kinerja dan keuangan.		
	16.Lap.Capaian kinerja dan iktisar Realisasi kinerja SKPD	-Terlaksananya penyusunan laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD.	99,60
	17.Penyusunan laporan keuangan Semester.	-Terlaksananya penyusunan laporan Keuangan semester.	99,60
	18.Penyusunan laporan keuangan Akhir tahun.	-Terlaksananya penyusunan laporan Keuangan akhir tahun.	99,60

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tk. Capaian (%)
1	2	3	4
VI	Program Penataan Administrasi Kependudukan		
	19. Pembangunan , Pengoperasian Siak secara terpadu.	-Tercapainya Pelayanan Siak yang Prima.	88,70 %
	20. Implementasi Sistem Adm Kependudukan (membangun UP dating dan Pemeliharaan)	-Terwujudnya Kelancaran pengoperasian SIAK yang bermutu.	36,66 %
	21. Pelatihan tenaga pengelola SIAK	-Terlaksananya pelatihan bagi petugas Operator SIAK.	100 %
	22. Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	-Ketersediaan Data untuk penyusunan laporan informasi Kependudukan	76,13%
	23. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	-Tercapainya Kesadaran Penduduk untuk melaksanakan tertib Administrasi Kependudukan	99,81 %

2.12. Bidang ketenagakerjaan;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Disnakertrans			
1.	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pendidikan & Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja. - Pelatihan Satpam 1 pkt 36 org. - Pelatihan Menjahit (Tk. Lanjutan) 1 pkt 16 org - Pelatihan Meubel Rotan Ins. 1 pkt 16 org - Pelatihan Anyaman Rotan 1 pkt 16 org - Pelatihan Tata Rias 2 pkt 40 org - Pelatihan Teknisi Computer 1 pkt 16 org. - Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana Loka Latihan Kerja.	100
2.	Peningkatan Kesempatan Kerja	- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja. - Penyiapan Tenaga Kerja siap pakai.	100
3.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	- Penyuluhan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama di 5 perusahaan - Pemetaan status kerawanan pada 150 perusahaan yang tersebar di 6(enam) Kecamatan	100

4.	Transmigrasi Lokal	Penyelesaian kasus kecelakaan kerja (perhitungan ulang JKK) sebanyak 98 kasus - Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di 5 perusahaan - Sosialisasi pelaksanaan peraturan Jamsostek di 5 perusahaan - Peyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan 30 kali - Koordinasi implementasi penghapusan pekerjaan terburuk untuk anak di 20 perusahaan - Pemilihan tenaga kerja wanita terbaik untuk tingkat Kabupaten provinsi dan di 3 perusahaan - Pemberian kesejahteraan tenaga kerja melalui Jamsostek sejumlah 3.780 peserta - Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di 5 perusahaan - Verifikasidan aktualisasi keanggotaan SP/SB di 5 perusahaan - Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Pasar Tradisional sebanyak 1 kali - Rapat/Sidang Dewan Pengupahan Kabupaten sebanyak 3 kali - Penyelesaian kasus PHK sebanyak 19 kasus - Pengadaan Hand Tractor 5 unit	100
----	--------------------	--	-----

2.13. Bidang ketahanan pangan;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
Kantor KP2KP			
I.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Terlaksananya pengiriman surat menyurat	100
	2. Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	2. Terlaksananya kelancaran kerja dan kenyamanan kerja	100
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan	3. Tercapainya tertib administrasi keuangan	100
	4. Penyediaan jasa kebersihan kantor	4. Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman	100
	5. Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	5. Terlaksanya perbaikan peralatan kerja	100
	6. Penyediaan ATK	6. Terwujudnya tertib administrasi	100

	<p>7. Penyediaan cetakan dan pengadaan</p> <p>8. Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor</p> <p>9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>10. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor</p> <p>11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>12. Penyediaan Makanan dan minuman</p> <p>13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah</p>	<p>7. Terlaksananya cetak blanko dan foto copy</p> <p>8. Terlaksananya kelancaran kerja dan kenyamanan kerja</p> <p>9. Tersedianya peralatan kantor</p> <p>10. Tersedianya peralatan kantor</p> <p>11. Tersedianya surat kabar, majalah dan buku perundang-undangan</p> <p>12. Tersedianya makanan dan minuman pegawai</p> <p>13. Peningkatan hubungan kerja dan menambah pengetahuan</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
II.	<p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p>1. Pengadaan kendaraan dinas /Operasional</p> <p>2. Pemeliharaan rutin / berkala gedungKantor</p> <p>3. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional</p> <p>4. Pemeliharaan perlengkapan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor</p>	<p>14. Tersedianya kendaraan dinas</p> <p>15. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor</p> <p>16. Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>17. Terlaksananya pemeliharaan perlengkapanrutin/berkala</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p>
III.	<p>Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <p>1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</p>	<p>18. Tersedianya pakaian dinas aparatur KPPKP beserta perlengkapannya</p>	<p>100</p>
IV.	<p>Fasilitas Pindah / Purna Tugas</p> <p>1. Pemulangan PNS yang pensiun</p>	<p>19. Terlaksanya bantuan kesejahteraan PNS yang pensiun</p>	<p>100</p>
V.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p> <p>1. Bintek implementasi Per Undang-undangan</p>	<p>20. Terlaksananya peningkatan/ pemahaman peraturan perundang-undangan, kursus-kursus dan bimbingan teknis</p>	<p>93</p>
VI.	<p>Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Keuangan</p> <p>1. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</p>	<p>21. Terlaksanya penyusunan Laporan Keuangan Semesteran</p>	<p>100</p>

VII.	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan 1. Penyusunan data base potensi produk pangan	22. Tersedianya data base potensi produk pangan	100
VIII.	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan 1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian / perkebunan 3. Penyuluh dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	23. Terlaksananya penilaian kapasitas tenaga penyuluh pertanian / perkebunan 24. Terlaksananya peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian / perkebunan 25. Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan	90,98 88,15 100
IX.	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	26. Terlaksananya penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan mengenai dampak perusakan hutan	92

2.14. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Penyelenggaraan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh organisasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan capaian sebagai berikut;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB			
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat. 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	- Tersedianya Jasa surat menyurat - Tersedia jasa komunikasi sumber daya air dan listrik - Tersedianya data sura-surat ijin roda 2 dan 4 - Tersedianya jasa adm kantor - Tersedianya js kebersihan kantor - Mesin Tik, AC, Computer, mesi potong rumput	89,19 1,50 90,00 60,07 84,73 96,45 67,72

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen Listrik 10. Penyediaan peralatan & Perlengkapan Kantor. 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Bahan bacaan 13. Penyediaan Makan dan Minuman 14. Rapat-rapat konsultasi luar daerah	- Tersedianya ATK - Cetak, fotocopy dan penjilidan - Tersedianya komponen listrik - Terpenuhinya kelengkapan peralatan kantor - Tersedianya peralatan rumah tangga kantor - Tersedianya bahan bacaan & Perpu - Terpenuhinya snack dan minuman - Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	99,99 99,80 65,00 99,50 85,00 100 87,50 94,37
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya pagar halaman kantor - Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	90,42 100 89,56
3.	Program peningkatan disiplin aparatur 17. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Tersedianya pakaian kerja pegawai	100 100
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 18. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya bimbingan teknis Impelementasi perundang-undangan	100 100
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20. Penyusunan laporan keuangan semesteran 21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	- Terlaksananya penyusunan laporan Capaian kinerja dan iktisar realisasi Kinerja SKPD. - Terlaksananya penyusunan laporan Keuangan semester. - Terlaksananya penyusunan laporan Keuangan akhir tahun	90,00 90,00 - 90,00
6.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 22. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 23. Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	- Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) - Tersedianya peta Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	100 100 100

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
7.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 24. Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 25. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	- Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) - Tersedianya peta Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	88,34 100 78,25
8.	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 26. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 27. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	- Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) - Tersedianya peta Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	100 100 100
9.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak 28. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	- Terwujudnya lembaga berbasis gender yang tangguh dan mandiri	93,27 93,27

2.15. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

Penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilaksanakan oleh organisasi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan capaian sebagai berikut;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Realisasi (%)
1	2	3	4
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB			
1.	Program pelayanan kontrasepsi 1. Pelayanan konseling KB 2. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	- Terlaksananya kondeling KB bagi masyarakat - Terlaksananya kegiatan pemasangan kontrasepsi	93,98 100 89,12
2.	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 3. Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	- Terlaksananya Penyuluhan tentang Penanggulangan Narkoba, PMS dan HIV/AIDS	80,96 80,96

2.16. Bidang perhubungan;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Proritas di Bidang perhubungan adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Perhubungan			
I.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya penataan halaman/ lingkungan gedung kantor dinas (perencanaan dan pengawasan, pembuatan jalan lingkungan kantor dinas)	99,14
II.	Program pembangunan & rehabilitasi/pemeliharaan prasarana & fasilitas LLASDP 1. Kegiatan pembangunan Dermaga/Gedung Kantor LLASDP	Terlaksananya pembangunan dan rehab/pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLASDP	99,15
III.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1. Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terlaksananya kesadaran masyarakat menggunakan angkutan - perjalanan dinas dalam daerah - kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	97,19
	2. Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (pembangunan halte)	98,90
IV.	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 1. Kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat, sungai dan marka	99,69
V.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1. Kegiatan pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pembangunan balai pengujian	99,40

		Terlaksananya pembayaran honor panitia pelaksanaan kegiatan	100
		Terlaksananya belanja alat tulis kantor (ATK)	86,93
		Terlaksananya cetak dan penjilitan dan penggandaan	100
	2. Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksananya pengadaan alat-alat bengkel kendaraan bermotor	99,2

Tingkat pencapaian program dan kegiatan rata-rata tahun anggaran 2009 tersebut sebesar 97,83%.

2.17. Bidang komunikasi dan informatika;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Proritas di Bidang komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Sekretariat Daerah			
1.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	Meningkatnya pengetahuan kehumasan dan pengoperasian alat studio	85,43
2.	Program kerjasama informasi dan media massa 2. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Meningkatnya publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintah daerah	94,79
	3. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan	Meningkatnya penyebaran informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat luas	61,16

2.18. Bidang pertanian;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Proritas di Bidang pertanian adalah sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Sekretariat Daerah			
1.	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terpenuhinya tanah untuk pembangunan, perluasan dan keperluan Pemkab lainnya	31,99

2.19. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Realisasi %
1	2	3	4
Badan Kesbangpolinmas			
I	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Tersedianya kendaraan dinas /operasional Tersedianya alat perlengkapan kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Dinas Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas aparatur Bappeda Terawatnya peralatan gedung kantor Terlaksananya rehab bangunan kantor	86,75 93,33 98,84 0,00 43,80 77,46 91,07 94,65
II	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Pembangunan pos jaga/ ronda 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan		71,52 71,46 70,43 99,80

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Realisasi %
1	2	3	4
III	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kerja sama Aparat Keamanan se Kabupaten Kotawaringin Barat	100
			100
IV	Program pengembangan wawasan kebangsaan 2. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama		94,96
			94,96
V	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 1. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 2. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan P4GN dalam rangka mewujudkan Ktw.Barat bebas dari Narkoba. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya praktek prostitusi.	86,48
			82,39
			94,13
VI	Program Pendidikan politik Masyarakat 1. Penyuluhan kepada masyarakat di 6 (enam) kecamatan se Kab. Ktw. Barat 2. Koordinasi Forum Diskusi Politik 3. Penyusunan Data Base Partai Politik 4. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Penyuluhan kepada Tokoh Masyarakat dan Ormas di 6 (enam) kecamatan se Kab. Ktw. Barat. Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan LSM se Kab. Ktw. Barat Partai Politik, Organisasi Masyarakat dan LSM se Kab. Ktw. Barat Partai Politik, Ormas, LSM, Sembako, Penduduk dan Pemilu Legislatif serta Pilpres Tahun 2009 di Kab. Ktw. Barat	93,38
			88,47
			100,00
			100,00
			99,80
VII	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1. Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana secara terpadu terutama dalam kegiatan pencegahan	86,70
			86,70

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Realisasi %
1	2	3	4
Kantor Satpol PP			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketersediaan anggaran operasional kantor selama 1 Tahun	87,48
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya surat menurut kedinasan dalam 1 tahun	0,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas jasa komunikasi, air dan listrik, jasa pengumuman lelang dan lancarnya operasional kantor dalam 1 tahun	52,65
	3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Tersedianya jaminan asuransi anggota Satpol PP untuk menjamin resiko Pelaksanaan tugas untuk 47 anggota Satpol PP	5,88
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jasa service 4 (empat) mobil dinas dan 4 (empat) motor dinas serta belanja STNK 3 mobil dinas dan 4 motor dinas	70,05
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Ketersediaan jasa administrasi keuangan Kantor Satpol PP dan Optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan dalam 1 tahun	99,31
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Efektifitas dan efisiensi penggunaan peralatan kerja -Service komputer 5 unit	100,00
	7. Penyediaan alat tulis kantor	-Pembelian cartidge Pistol Gas 6 buah Efisiensi penggunaan ATK dalam mendukung Efektifitas kerja dalam 1 tahun	100,00
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Anggaran Tertibnya pelayanan administrasi perkantoran : amplop, spanduk, tanda pengenal anggota dan kartu tanda anggota sebanyak 100 orang, biaya pengurusan ijin senjata tajam untuk 47 orang dan biaya perpanjangan surat ijin pistol gas untuk 6 orang	99,12
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya lampu untuk penerangan kantor dalam 1 Tahun	100,00
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersedianya peralatan dan perlengkapan kantor guna mendukung pelaksanaan kerja personil (100%) pengadaan: - 60m2 tralis kantor, - 2 buah kalkulator besar, - 42 m2 gordena, 1 unit AC, - - 2 unit kipas angin - 1 unit kamera digital, - 1 unit proyektor infocus, - 1 unit wireless amplifier, - 17 unit spray gas air mata, 6 buah senter kejut dalmas	99,43

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Realisasi %
1	2	3	4
	11. Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan akan perlatan rumah tangga dan tenaga cleaning service Kantor Satpol PP	99,37
	12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan akan perlatan rumah tangga dan tenaga cleaning service Kantor Satpol PP	97,50
	13. Penyediaan bahan logistik kantor	Pengadaan buku peraturan Perundang-undangan sebanyak 5 buah, 100%	100,00
	14. Penyediaan makanan dan minuman	Jmlah bahan logistik kantor dalam 1 tahun Tersedianya kebutuhan makan dan minum harian anggota Satpol PP 100 orang dalam 1 tahun	94,40
	15. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kemampuan mengikuti kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan diluar daerah dalam 1 tahun	84,15
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		95,60
	16. Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur Kantor A.I : - 2 buah lemari arsip 2 pintu - 5 buah kursi panjang kayu, - 1 buah rak tv	95,95
	17. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Perawatan secara berkala kendaraan dinas dan terpenuhinya BBM dan pelumas Kendaraan Dinas Operasional selama 1 Tahun	99,78
	18. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terjaganya kondisi mebeleur Kantor Satpol PP Al. 5 unit lemari arsip, 5 unit filling kabinet, 25 buah meja kerja, 10 meja rapat, 25 kursi kerja	78,57
	19. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Pemeliharaan kontruksi gedung kantor dengan pengecatan pagar	58,39
	20. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Penggantian ban Truk Angkutan Personil, ban mobil patroli dan operasional serta penggantian ban motor patroli	97,62
III	Program peningkatan disiplin aparatur		100
	21. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Keseragaman Pemakaian Pakaian dan atribut Anggota Satpol PP Kobar Sesuai Peraturan Mendagri No 35 Tahun 2005 antara lain 100 stel pakaian dinas harian (100%)	100
	22. Pengadaan pakaian kerja lapangan	Keseragaman Pemakaian Pakaian dan atribut Pakaian Dinas Lapangan Anggota Satpol PP Kobar Sesuai Peraturan Mendagri No 35 Tahun 2005 antara lain 47 stel pakaian dinas lapangan, 25 stel pakaian silat (bela diri) (100%)	100

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Realisasi %
1	2	3	4
IV	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 23. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan pemahaman Anggota Satpol PP terhadap materi perundang-undangan dan materi hukum Al. Biaya : - diklat/pelatihan pemerintah (4 Orang) -pelatihan dan diklat PPNS (3 orang) - Ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah (3 orang)	72,86 72,86
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25. Penyusunan laporan keuangan semesteran 26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemenuhan standar pelaporan SKPD Menurut Peraturan yang berlaku untuk tahun Anggaran 2009 (tersusunnya LAKIP 2009) Laporan Keuangan semesteran Satpol PP untuk tahun Anggaran 2009 Laporan keuangan akhir tahun anggaran dapat disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah untuk tahun Anggaran 2009	99,61 99,50 99,45 99,90
VI	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 27. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Terbentuknya kelompok masyarakat sadar lingkungan di 6 kecamatan	81,48 81,48
VII	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 28. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 29. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 30. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	Terpantaunya kegiatan Polisi Pamong Praja Kab. Kotawaringin Barat dengan terbayarnya insentif/honorarium petugas jaga Rujab Bupati Kobar dan insentif bulanan anggota untuk 100 orang serta honorarium tenaga kontrak (BANPOL PP) Pelatihan peningkatan kapasitas anggota dalam tehnik pencegahan kejahatan dengan latihan beladiri Terlaksananya kegiatan pelatihan dan kerjasama dengan Polres Kobar untuk tahun 2009 sebanyak 2 kali	98,38 99,03 89,77 81,11
VIII	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 31. Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Semakin menurunnya pelaku tindak pidana ringan (tipiring) pelanggaran Perda no.13/2006 tentang larangan minuman beralkohol di Kobar- Terlaksananya penyuluhan sosialisasi Perda no. 13/2006	99,84 99,78

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	Realisasi %
1	2	3	4
	32. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	kepada masyarakat dan pelajar - Terlaksananya kegiatan operasi dan penertiban pelanggaran Perda 13/2006, sebanyak ± 72 kasus disidangkan dipengadilan Diharapkan menurunnya praktik prostitusi liar dan kegiatan penyuluhan serta operasi penertiban praktik prostitusi ilegal	100,00
	33. Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	Terciptanya keamanan dan ketertiban umum dan terlaksananya kegiatan penyuluhan serta operasi penertiban premanisme	100,00
	34. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Evektifitas dan efesiensi operasi pemberantasan Penyakit masyarakat dan terlaksananya monitoring ketentraman dan ketertiban umum di wilayah hukum Kobar	99,49
Sekretariat Daerah			
I	Program pendidikan politik masyarakat		12,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya desk Pemilu & Terkirimnya laporan Desk Pemilu Pusat	12,00

2.20. Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Sekretariat Daerah			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,42
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	- Semua instansi terkait	22,60
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, SDA & listrik utk Setda dan rujab pimpinan 12 bulan	94,93
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya jasa peralatan & perlengkapan kantor setda selama 1 tahun	71,51
	4. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan	- Terjaminnya kesehatan KDH,	0,00
	5. kesehatan PNS	Wakil KDH kobar selama 1 thn	

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	6. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	- Terjaminnya barang –barang aset milik daerah	59,41
	7. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional aparatur setda	53,93
	8. Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Tersedianya jasa administrasi keuangan pada kantor setda	98,44
	9. Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Terciptanya kebersihan pada kantor Setda Kab.Ktw. Barat	98,33
	10. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- Tersedianya peralatan kerja kantor setda Kab. Ktw. Barat	85,69
	11. Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya ATK selama 1 tahun	67,53
	12. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 th	92,31
	13. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik pada rujab dan setda selama 1 thn	95,29
	14. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 thn	88,24
	15. Penyediaan peralatan rumah tangga	- Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	62,69
	16. Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman selama 1 thn	79,37
	17. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	99,81
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana		86,96
	1. Pembangunan gedung kantor	- Tersedianya bangunan kantor	89,39
	2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya kendaraan dinas operasional	98,53
	3. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	- Tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas	87,65
	4. Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Komunikasi	- Tersedianya perlengkapan kantor dan sarana komunikasi	92,00
	5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	- Terpeliharanya rujab dan mushola rujab Bupati	90,47
	6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpelihara dan terawatnya gedung kantor	90,21
	7. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	- Tersedianya bahan bakar minyak dan terpeliharnya mobil jabatan/operasional	65,87
	8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya BBM dan terawatnya kendaraan dinas/operasional	67,46
	9. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	- Terlaksananya rehab gedung bangunan kantor	95,14
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		91,54
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	89,78
	2. Pengadaan pakaian kerja lapangan	- Tersedianya pakaian kerja satuan pemadam kebakaran	99,44

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Tersedianya pakaian adat	92,31
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Pemulangan pegawai yang pensiun	Terpenuhinya fasilitas pemulangan pegawai yang pensiun	0
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kemampuan SDM aparatur	76,71 76,71
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan keuangan semesteran 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-Tersusunnya laporan keuangan semesteran -Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang akurat	66,02 98,06 100
7.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 1. Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri 3. Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 4. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	- Terkendalinya pelaksanaan kebijakan KDH/Wakil KDH - Terlayannya kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri - Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala/ wakil kepala daerah - Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	83,25 77,68 87,74 73,18 73,01
8.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa 3. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Tersusunnya Perda/Perbup. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Prosentasi Peningkatan SDM Pemdes & Pilkades Meningkatnya kehidupan berdemokrasi masyarakat desa dan pembelajaran politik masyarakat desa	52,18 65,76 85,06 23,11
9.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		92,78

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terwujudnya Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang baik	92,78
10.	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		84,10
	1. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	- Terlaksananya kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Rapat-Rapat pembahasan permasalahan Bidang Hukum	70,87
	2. Publikasi peraturan perundang-undangan	- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.	86,72
	3. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	- Tersedianya Perda yang dapat menciptakan rasa keadilan.	82,98
Sekretariat DPRD			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		83,59
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	- Semua instansi terkait	0,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi, SDA & listrik utk Setwan	79,61
	3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	- Terjaminnya kesehatan unsur DPRD kobar selama 1 thn	79,28
	4. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	- Terjaminnya barang –barang aset milik Setwan	100,00
	5. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional aparatur setwan	26,85
	6. Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Tersedianya jasa administrasi keuangan pada kantor setda	80,81
	7. Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Terciptanya kebersihan pada kantor Setda Kab.Ktw. Barat	99,49
	8. Penyediaan alat tulis kantor	- Tersedianya ATK selama 1 tahun	94,78
	9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya barang cetak dan penggandaan selama 1 th	80,14
	10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Tersedianya komponen instalasi listrik pada rujab dan setwan selama 1 thn	80,00
	11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor setwan selama 1 tahun	90,03
	12. Penyediaan peralatan rumah tangga	- Tersedianya peralatan kebersihan kantor setwan Kab. Ktw. Barat	63,37
	13. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	96,70
	14. Penyediaan makanan dan minuman	- Tersedianya makanan dan minuman selama 1 thn	84,53

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	15. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka koordinasi dan konsultasi	91,81
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		64,61 99,76 43,38 82,77 84,99 58,30 50,00 96,99
3.	Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		51,48 51,48
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		71,92 71,92
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		0 0 0 0
6.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1. Pembahasan rancangan peraturan daerah 2. Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama 3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4. Rapat-rapat paripurna 5. Kegiatan Reses 6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD		65,40 72,60 59,20 99,07 99,94 40,09 32,10 68,01

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13. Penyediaan makanan dan minuman 14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		86,01 14,41 79,07 52,57 85,33 98,05 87,6 94,52 86,31 96,18 96,71 100,00 15,15 74,19 97,26
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		95,06 98,40 92,40 14,96 92,98 78,41
3.	Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		90,31 90,72 89,98
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		48,39 48,39
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan		24,39 0,00

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran		25,55
	3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran		0,00
	4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		0,00
6.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah		78,52
	1. Penyusunan analisa standar belanja		98,00
	2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD		88,79
	3. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD		42,83
	4. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD		59,16
	5. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD		88,53
	6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		72,54
	7. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		87,90
	8. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah		97,92
	9. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		72,73
	10. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah		45,60
	11. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah		85,84
Badan Kepegawaian Daerah			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		91,24
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	- Pelayanan administrasi surat menyurat	11,70
		- Jasa Perkantoran	67,81
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Pemegang hak pakai kendaraan dinas / operasional	92,14
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian	92,22
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Pelaksanaan kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian	88,19
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	- Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peralatan kerja	93,51

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	7. Penyediaan alat tulis kantor	- Sekretariat, dan Bidang dilingkungan Badan Kepeg.	100,00
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja dan Pegawai Badan Kepeg.	94,97
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- PNS dilingkungan Badan Kepegawaian	100,00
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Badan / Dinas / Unit Satuan kerja dan PNS dilingkungan Badan Kepegawaian	97,15
	11. Penyediaan peralatan rumah tangga	- PNS dilingkungan Badan Kepeg.	100,00
	12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Kab. Ktw. Barat	99,60
	13. Penyediaan makanan dan minuman	- Pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Kab. Kobar	73,99
	14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- BKN, BKPP Provinsi, Bandiklat, MENPAN dan Badan / Dinas / Unit Satuan Kerja terkait	97,58
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		92,08
	1. Pengadaan mebeleur	Staf dilingkungan Badan Kepegawaian	98,63
	2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin gedung kantor	97,52
	3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	PNS lingkup BKD	79,93
	4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur kabtor	100,00
	5. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Untuk Penyelenggaraan Diklat, Rapat / Pertemuan Rutin	97,90
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		97,36
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Kab. Ktw. Barat	97,36
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		61,32
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan	Pegawai dilingkungan Badan Kepegawaian Kab. Ktw. Barat	61,32
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		88,16
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kegiatan program kerja dalam 1 tahun anggaran	100,00
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kegiatan dilingkungan Badan Kepegawaian	90,00
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan kegiatan pelaporan keuangan akhir tahun dalam 1 tahun anggaran	74,50

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
6.	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 2. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	PNS yang potensial dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	94,99 97,37 94,20
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 2. Seleksi penerimaan calon PNS 3. Penempatan PNS 4. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 5. Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 6. Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 7. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 8. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 9. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	Badan / Dinas / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat Terpenuhinya formasi PNS pada Satuan Unit Kerja Terwujudnya susunan dan jumlah PNS yang diperlukan satuan unit kerja Pelayanan terhadap penyelesaian Administrasi Kepegawaian Badan / Dinas / Unit Satuan Kerja dilingkungan Pemkab.Kotawaringin Barat dan Sekretariat / Bidang dilingkungan Badan Kepegawaian PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat PNS dan Pelajar lulusan SLTA sederajat	71,44 43,84 66,79 94,81 63,99 88,62 58,4 40,78 86,76 61,12
Inspektorat Kabupaten			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		98,11 96,71 87,10 90,92 99,78 99,66 99,61 99,95 99,78 99,40 98,42

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100,00 99,68 99,97
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		99,94 99,87 100,00 99,78
3.	Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100 100
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 1. Pemulangan pegawai yang pensiun		99,93 99,93
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		95,60 94,30 98,20 94,30
6.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 3. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan		98,94 99,54 93,58 99,92
7.	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 1. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		56,10 56,10
Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		93,03
	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber		100,00 45,13

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan rumah tangga 11. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		98,75 100,00 100,00 87,50 100,00 96,19 100,00 100,00 100,00 90,21 99,69
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan peralatan gedung kantor		98,00 97,99 98,01
3.	Program peningkatan disiplin 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100 100
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		76,21 83,75 51,68
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		0 0 0 0
Kecamatan Arut Selatan			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		78,92
	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		77,17 49,31

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		40,62
	4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		93,26
	5. Penyediaan jasa administrasi keuangan		92,75
	6. Penyediaan jasa kebersihan kantor		90,80
	7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		66,32
	8. Penyediaan alat tulis kantor		62,26
	9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		72,44
	10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100,00
	11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		99,76
	12. Penyediaan peralatan rumah tangga		100,0
	13. Penyediaan makanan dan minuman		83,45
	14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		58,45
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		93,76
	1. Pembangunan gedung kantor		97,82
	2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional		99,68
	3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100,00
	4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		60,83
	5. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		100,00
	6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		90,89
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		97,44
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		97,44
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		0
	1. Pemindahan tugas PNS		0
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		85,83
	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan		92,68
	2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		64,26
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		31,77
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan		0,00

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran		95,32
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		0,00
7.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100
	1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		100
Kecamatan Arut Utara			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		54,29
	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		21,82
	2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		86,76
	3. Penyediaan jasa administrasi keuangan		16,19
	4. Penyediaan jasa kebersihan kanto		24,65
	5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		0,00
	6. Penyediaan alat tulis kantor		25,00
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		21,49
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		35,09
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		98,27
	10. Penyediaan peralatan rumah tangga		42,48
	11. Penyediaan makanan dan minuman		30,77
	12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		58,42
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		77,91
	1. Pembangunan rumah dinas		90,63
	2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional		99,99
	3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		15,31
	4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		12,18
	5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		19,47
	6. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		25,00
	7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		25,00
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		100
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		59,29 70,44 0
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		0 0 0 0
Kecamatan Kumai			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		75,85 79,80 48,39 55,75 72,37 71,00 70,92 97,44 75,13 61,53 90,80 85,71 78,14
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		98,61 100,00 96,49 65,09 98,89
3.	Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta		99,59 99,58

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	perlengkapannya		
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS 1. Pemulangan pegawai yang pensiun 2. Pemindahan tugas PNS		59,30 83,60 0,00
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		7,21 4,21 14,28
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa 2. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa		95,36 64,44 100,00
Kecamatan Kotawaringin Lama			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan peralatan rumah tangga 12. Penyediaan makanan dan minuman 13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		73,97 100,00 61,50 46,40 60,71 72,82 100,00 69,15 79,26 20,72 97,25 45,40 92,84 71,01
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pembangunan rumah jabatan 2. Pembangunan rumah dinas 3. Pembangunan gedung kantor 4. Pengadaan perlengkapan gedung		97,58 97,60 98,78 97,99 99,67

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	kantor		
	5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		99,46
	6. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		69,76
	7. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		98,65
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		99,66
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		99,66
4.	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS		28,71
	1. Pemulangan pegawai yang pensiun		40,20
	2. Pemindahan tugas PNS		0,00
5.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		98,25
	1. Pendidikan dan pelatihan formal		96,30
	2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan		98,88
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		0,00
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0,00
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran		0,00
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		0,00
7.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		100
	1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		100
Kecamatan Pangkalan Lada			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		96,65
	1. Penyediaan jasa surat menyurat		100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		88,14
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		92,92
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan		99,55
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor		97,34
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		76,53
	7. Penyediaan alat tulis kantor		100,00

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100,00
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100,00
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		99,79
	11. Penyediaan peralatan rumah tangga		98,34
	12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		75,00
	13. Penyediaan makanan dan minuman		97,09
	14. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		90,75
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		96,44
	1. Pembangunan rumah dinas		95,12
	2. Pembangunan gedung kantor		99,57
	3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor		99,83
	4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		99,98
	5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		64,25
	6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		74,13
	7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		97,74
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		99,88
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		99,88
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		94,70
	1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan		99,92
	2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		76,24
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		66,56
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0,00
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran		100,00
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		99,70
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa		95,50
	1. Evaluasi rancangan peraturan desa		95,50

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	tentang APB Desa		
Kecamatan Pangkalan Banteng			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		84,48
	1. Penyediaan jasa surat menyurat		100,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		82,18
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion		33,64
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan		96,75
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor		98,00
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		11,20
	7. Penyediaan alat tulis kantor		99,19
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		75,
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		71,14
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		85,79
	11. Penyediaan peralatan rumah tangga		34,15
	12. Penyediaan makanan dan mi		59,81
	13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		99,96
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		99,39
	1. Pembangunan rumah dinas		99,72
	2. Pembangunan gedung kantor		99,62
	3. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas		94,44
	4. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan		87,74
	5. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas		76,39
	6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		87,84
	7. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		98,12
3.	Program peningkatan disiplin aparatur		100
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		80,75
	1. Pendidikan dan pelatihan formal		99,10
	2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan		74,27

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		32,23 39,40 39,40 17,90
6.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1. Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa		100,00 100,00

2.21. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Sekretariat Daerah			
1.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa 2. Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa		79,29 63,56 90,20
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
1.	Pelayanan Administrasi Kantor Kegiatan : -Penyediaan jasa surat menyurat. -Penyediaan jasa komunikasi, sumber-daya air dan listrik. -Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. -Penyediaan jasa administrasi keuangan -Penyediaan jasa kebersihan kantor.	-Tersampainya prosentase jasa surat menyurat untuk kepentingan tugas. -Tercapainya kebutuhan dinas. -Tercapainya kelancaran perijinan kendaraan dinas. -Tertib administrasi -Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih. -Terpenuhinya kebutuhan ATK.	100 48,56 91,88 98,91 76,17 99,91

	<ul style="list-style-type: none"> -Penyediaan alat tulis kantor. -Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. -Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. -Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. -Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. -Penyediaan makanan dan minuman. -Rapat- rapat koordinasi keluar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> -Terpenuhinya bahan cetakan untuk kebutuhan kantor -Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik -Terpenuhi kebutuhan perlengkapan kantor. -Meningkatnya pengetahuan sebagai acuan dalam tugas. -Tercapainya kebutuhan makan minum PNS. -Terlaksananya kegiatan rapat dan koordinasi perjalanan luar daerah. 	<p>98,42</p> <p>99,71</p> <p>92,94</p> <p>0</p> <p>87,42</p> <p>96,83</p>
2.	<p>Peningkatan sarana dan prasarana.</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pembangunan gedung Kantor. -Pengadaan Peralatan gedung kantor -Pengadaan perlengkapan gedung kantor -Pemeliharaan rutin gedung kantor. -Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional. -Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tercapainya pembangunan gedung kantor. -Terpenuhinya Peralatan gedung kantor -Tercapainya perlengkapan gedung kantor. -Tercapainya pemeliharaan gedung kantor. -Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional -Terpeliharanya peralatan kantor. 	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>72,82</p>
3.	<p>Peningkatan Disiplin aparatur</p> <p>Kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tersedianya pakaian sipil harian dinas 	<p>99,58</p>
4.	<p>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> -Peningkatan potensi pegawai. 	<p>50,65</p>
5.	<p>Peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan Keuangan.</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD. -Penyusunan laporan keuangan semesteran -Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> -Tercapainya laporan kinerja dinas . -Terlaksananya laporan semesteran. -Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun. 	<p>98,50</p> <p>98,50</p> <p>0</p>
6.	<p>Peningkatan keberdayaan Masyarakat Ds.</p> <p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> -Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat Pedesaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan gotong royong, bhakti sosial di masing-masing Desa/ Kelurahan adalah musyawarah perencanaan pembangunan pedesaan yang sedang dilaksanakan pada tahun berjalan yang pada prinsipnya kegiatan tersebut adalah oleh, dari dan utk masyarakat 	<p>89,09</p>

	<p>- Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Masyarakat.</p> <p>- Penyelenggaraan Desiminasi informasi bagi Masyarakat Desa.</p>	<p>- Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Unit Pengelola Sarana dan Kelompok Pengelola Sarana Air Bersih di 6 Kec.</p> <p>- Pengenalan produk batu kecubung pada gelar TTG IX tahun 2007 Manado Sulawesi Utara.</p>	<p>100</p> <p>77,23</p>
7.	<p>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</p> <p>Kegiatan :</p> <p>- Fasilitas Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pdesaan</p> <p>Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.</p>	<p>- Masyarakat/pelaku PNPM-PPK masing-masing kecamatan yaitu Kecamatan arsel, Kumai, Aruta dan Kolam mendapat dukungan dana sebesar 450.000.000 pd masing-masing kec. Tersebut.</p> <p>- Termonitoringnya penyaluran raskin dan terbinaanya usaha ekonomi mikro masyarakat pedesaan 6 kecamatan.</p>	<p>99,58</p> <p>83,60</p>
8.	<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</p> <p>Kegiatan :</p> <p>- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa</p> <p>- Pemberian Stimulan Pembangunan Desa</p>	<p>- Sasaran pencapaian desa program PM2L adalah: Desa Sebuai, Umpang dan gadis.</p> <p>- Sasaran pencapaian peningkatan SDM pada desa PM2L adalah: Pembekalan aparatur desa BPD, kelembagaan desa dan SM2L pd desa sebuai, Umpang dan gadis sebanyak 55 orang.</p> <p>- Sasaran pencapaian kegiatan Evaluasi dan penilaian pelaksanaan PM2L adalah: Kategori Desa adalah: 3 Desa, Kategori Kecamatan adalah: 3 Desa, Kategori SM2L adalah: 3 Desa dan Kategori SKPD adalah: 3 SKPD.</p> <p>- Sasaran pencapaian pembangunan serana umum adalah: 2 unit MCK utk Desa Sebuai, 1 Unit gedung posyandu utk desa Umpang dan 1 Unit gedung posyandu utk Desa gadis.</p> <p>- Murid SD/MI/ponpes, dimana yang menerima dana kudapan : 14.550 orang, jumlah pemberian kudapan dalam 1 tahun : 36 kali dan indek pemberian 1 kali kudapan : Rp.1000/murid</p> <p>- Juara lomba desa tk. Kabupaten adalah: ~ Juara tingkat Desa : juara I Desa Sido Mulyo Kec.P.Banteng, Juara II Desa Pangkalan Dewa Kec.P.Lada, juara III Desa Natai Baru Kec.Arut Selatan.</p>	<p>85,34</p> <p>80,57</p>

	-Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	~ Juara tingkat Kelurahan : juara I kelurahan Mendawai Kec.Arut Selatan, juara II Kelurahan Kumai Hulu Kec.Kumai, juara III kelurahan Ktw. Lama Kec. Kolam. ~ Juara lomba Desa/Kelurahan tingkat propinsi adalah desa Sidu Mulyo Kec. P. Bateng juara I.	0
		-Terlaksananya pembinaan dan Monitoring dana bergulir program PPK di Kec. Kumai, P.Lada dan P. Bateng.	

2.22. Bidang sosial;

Dalam tahun 2009 tingkat pencapaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Sasaran kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Sosial			
1.	Program : Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin	670 KK Keluarga Miskin	100
2.	Program : Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial - Peningkatan kulaitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS - Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.	- 20 tempat tidur - 1 unit tower air - Korban bencana, ketunaan sosial dan anggota tagana	100 100 100
3.	Program : Pembinaan Para penyandang cacat dan trauma Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	14 Penyandang cacat	100
4.	Program : Pemberdayaan Kelembagaan kesejahteraan sosial - Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial - Pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan, Kejuangan dan Kejuangan dan kesetiakawanan sosial	- 262 Penduduk meninggal yang ber-KTP Nasional. - Para veteran, pendiri Kobar dan generasi muda	100 100

Sekretariat Daerah			
1.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		99,26
	1. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	- Terbantunya Masyarakat yang Mendapat Musibah dan kesejahteraan Penghulu	99,26

2.23. Bidang kebudayaan;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Disbudpar			
1.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		
	a. Kegiatan Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka termasuk Naskah Kuno	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Silsilah Kerajaan Kutaringin - Lanjutan Pembangunan Balai Pehadiran Istana Kuning P. Bun - Pembuatan Pintu Rumah Bosar Istana Al Nursari di Ktw. Lama - Perencanaan Teknis - Pengawasan Teknis - Pengadaan Kereta Kencana Kesultanan Kutaringin 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100 100 100 100 100
	b. Kegiatan Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Balai Budaya Diparsenibud di P. Bun - Perencanaan Teknis - Pengawasan Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> 0 100 0
	c. Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Profile Pariwisata Kobar - Pembuatan Dokumenter Wisata Bahari Gosong Senggora 	<ul style="list-style-type: none"> 100 100

2.25. Bidang kearsipan;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		90,43 91,58 45,68 95,21 88,54 100,00 100,00 91,18 100,00 100,00 78,24 99,37
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3. Pengadaan mebeleur 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		99,26 99,56 100,00 99,31 98,96 90,30 99,67
3.	Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		86,66 86,66
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		55,10 55,10
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		99,53

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		99,60
	2. Penyusunan laporan keuangan semesteran		99,60
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		99,40
6.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan		96,91
	1. Pengumpulan data		99,18
	2. Pengklasifikasikan dat		90,99
	3. Penyusunan sistem katalog data		99,65
7.	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah		99,93
	1. Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip		99,93
8.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		95,03
	1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta		95,03

2.26. Bidang perpustakaan

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah			
1.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		97,68
	1. Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar		99,57
	2. Pengembangan Minat dan Budaya Baca		92,24
	3. Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat		97,18
	4. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah		97,97
	5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		93,07
	6. Pengklasifikasian Bahan Pustaka		98,87
	7. Penyusunan Sistem Katalogisasi		98,41

A.3. Permasalahan dan Solusi.

3.1. Bidang Pendidikan

Jika diperhatikan, sekalipun terjadi penurunan angka kelulusan pada tahun 2009, namun prestasi siswa di berbagai kegiatan lomba akademik dan keolahragaan di tingkat propinsi masih cukup mengembirakan. Sebagai indikator keberhasilan dari beberapa kegiatan yang diikuti oleh pelajar yang dikirim untuk mewakili Kab. Kobar selama tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Olimpiade Sain Nasional (OSN) Tingkat SD
 -) Juara I Matematika Tingkat Propinsi
 -) Juara I IPA tingkat Propinsi
2. Lomba Bidang Studi tingkat SD
 -) Juara I Kerajinan Tangan Tingkat Propinsi
3. Olimpiade Sain Nasional (OSN) Tingkat SMP/Mts
 -) Juara I Biologi tingkat Propinsi
 -) Juara I Fisika tingkat Propinsi
 -) Juara II Story Telling Tingkat Propinsi
4. Olimpiade Olah Raga Siswa nasional (OOSN) Tingkat SMP
 -) Juara I Catur tingkat Propinsi
 -) Juara II Sepak Takraw tingkat Propinsi
5. Olimpiade Sain Nasional (OSN) dan OOSN tingkat SMA/MA
 -) Juara I Fisika tingkat Propinsi
 -) Juara I Karate tingkat Propinsi
 -) Juara I Silat tingkat Propinsi
 -) Juara II Silat tingkat Propinsi
 -) Juara II tenes meja Tingkat propinsi
 -) Juara III lari 100 meter tingkat Propinsi
 -) Juara III Lomba lompat jauh putri tingkat propinsi
6. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tingkat SMK
 -) Juara III Pemasaran tingkat Propinsi
 -) Juara I Administrasi perkantoran
 -) Juara II Usaha jasa Pariwisata
 -) Juara II Autocad tingkat Propinsi
 -) Juara II Plumbing tingkat Propinsi
 -) Juara II Brick Laying tingkat Propinsi
 -) Juara II Wall and Floor Tilling tingkat Propinsi
 -) Juara II Instalasi listrik tingkat Propinsi
 -) Juara III Budi daya tanaman tingkat Propinsi
 -) Juara I Budi daya perikanan tingkat Propinsi
 -) Juara II Debat bahasa Inggris tingkat propinsi

-) Juara II debat bahasa Inggris tingkat propinsi
 -) Juara II Debat bahasa Inggris tingkat Ppropinsi
 -) Juara III Debat bahasa Inggris (BEST Speaker)
7. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tingkat SMP
-) Juara I catur Tingkat Propinsi
 -) Juara II Sepak Takraw tingkat Propinsi

3.2. Bidang Kesehatan

Permasalahan

1. Masih adanya program yang belum mencapai standar pelayanan minimal dari 18 indikator SPM separuhnya belum mencapai target, dengan 5 indikator masih terjadi kesenjangan lebih dari 10 %.
2. Penetapan sasaran didasarkan atas proyeksi penduduk sehingga terjadi kesenjangan antara penetapan sasaran dan kenyataan di lapangan yang berdampak pada perhitungan pencapaian indikator SPM.
3. Permasalahan distribusi keterbatasan pengadaan tenaga kesehatan strategis terkait dengan jenis pelayanan yang harus diberikan seperti pelayanan ibu hamil, ibu nifas, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan lainnya.
4. Masih rendahnya kemampuan anggaran pengadaan obat Kabupaten berdasarkan standar per kapita 1 US\$ maupun dari item yang harus dipenuhi hanya sebanyak 91 item (62%) dari 145 item standar.
5. Masih Rendahnya Kemampuan Labkesda Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal pelayanan baru mencapai 75,96% item dari standar, sedangkan pada ketersediaan reagen baru mencapai 21,69% jika dibandingkan ketentuan yang berlaku.
6. Penegakan diagnosa penyakit malaria berdasarkan hasil laboratorium belum maksimal, mengakibatkan sebagian besar pengobatan malaria didasarkan pada gejala klinis yang ada, serta

upaya penanggulangan belum maksimal dikarenakan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

7. Tinggi angka kesakitan DBD, diantaranya disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam gerakan pemberantasan sarang nyamuk dan penaburan bubuk larvasida, mengakibatkan masih tingginya kasus penyakit DBD dan kurang dukungan lintas sektoral dan program.
8. Masih ditemukannya beberapa puskesmas menggunakan antibiotik pada beberapa kasus diare dengan indikasi tanpa dehidrasi maupun dehidrasi ringan / sedang.
9. Penemuan penderita TBC di puskesmas masih rendah, dikarenakan ketatnya penegakan diagnosa klinis (suspek) dan belum berjalan dengan baik survei kontak.

HAMBATAN

Dalam pelaksanaan program-program pelayanan kesehatan kepada masyarakat dirasakan masih adanya hambatan secara ekstern diantaranya sebagai berikut :

1. Proses pengadaan tenaga yang masih ditentukan oleh pusat sehingga penuhi kuota tenaga kesehatan tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan kurangnya minat pendaftar di desa yang terpencil.
2. Masih belum memadainya upaya promosi kesehatan yang berdampak pada kurangnya akses informasi pengetahuan kesehatan sehingga kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap program kesehatan juga sangat berpengaruh terhadap pencapaian target program kesehatan. Tidak tercapainya target cakupan imunisasi (UCI) di wilayah tertentu, cakupan pelayanan KIA dan cakupan perbaikan gizi masyarakat serta terjadinya kematian pada penderita DBD atau penyakit menular lainnya antara lain disebabkan karena pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap program kesehatan masih kurang.
3. Kerjasama lintas program dan lintas sektor belum maksimal.
4. Kondisi alam dengan struktur tanah berawa menjadikan hambatan masyarakat untuk mendapatkan sumber air bersih serta mempengaruhi

angka cakupan SPAL yang dapat menurunkan kualitas lingkungan pemukiman penduduk.

5. Terbatasnya alokasi anggaran khususnya pembiayaan program sehingga belum maksimal penyelenggaraan dan pengembangan program-program kesehatan di masyarakat. Terutama dalam penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) diperlukan dana siaga yang setiap saat dapat dipergunakan, mengingat KLB tidak dapat diperkirakan secara tepat.

Penata usahaan keuangan belum sepenuhnya sesuai penyerapannya dengan kebutuhan di lapangan.

Solusi

1. Melakukan pendekatan pemecahan masalah dalam pencapaian indicator SPM melalui upaya peningkatan kapasitas manajemen data program, validasi data sasaran program, dan upaya eskalasi cakupan program pada tingkat kesenjangan diatas 10 % dari target.
2. Melaksanakan advokasi pembiayaan pengadaan obat berdasarkan analisis kebutuhan standar Depkes untuk mendapatkan tambahan alokasi kepada pihak pengambil kebijakan anggaran guna menjamin pelayanan kesehatan yang sesuai standar .
3. Merencanakan /menyusun upaya peningkatan kapasitas laboratorium sebagai penunjang diagnose penyakit baik pada level pelayanan dasar di puskesmas, Pustu maupun di UPT laboratorium Kesehatan Daerah
4. Peningkatan Kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan dengan mengadakan pelatihan magang atau kursus sebagai upaya peningkatan capaian program sesuai standar tatalaksana pengendalian penyakit .
5. Meningkatkan promosi Kesehatan untuk merubah perilaku kesehatan menjadi masyarakat yang sadar dan mandiri dalam mengenali, mengatasi permasalahan yang muncul dalam keluarga dan masyarakat.

Hal – hal lain yang perlu dilaporkan

Derajat kesehatan merupakan indikator hasil akhir yang ingin dicapai dalam Indeks Kabupaten Sehat. Terdiri dari tiga indikator utama, yaitu : 1. Indikator mortalitas (kematian), 2. Indikator morbiditas (kesakitan) dan 3 Indikator Status gizi

1. INDIKATOR MORTALITAS (KEMATIAN)

Indikator angka kematian bayi, balita dan ibu dianggap sensitif untuk menggambarkan tingkat derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah. Oleh karena itu, sasaran utama upaya kesehatan diarahkan pada upaya penurunan angka ketiga indikator tersebut.

Di tingkat kabupaten, angka indikator tersebut sulit didapat secara akurat. Sistem pencatatan dan pelaporan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, survei-survei yang telah ada selama ini digunakan untuk kepentingan angka nasional/ provinsi. Namun demikian, data/informasi kematian di unit pelayanan rumah sakit dapat dimanfaatkan untuk mengetahui gambaran penyakit penyebab kematian.

a. Angka Kematian Bayi (AKB).

Angka Kematian Bayi (AKB) diakui sebagai indikator paling sensitive diantara kematian lainnya dan lazim digunakan untuk menggambarkan status derajat kesehatan masyarakat. AKB dapat digunakan untuk menilai ketersediaan, pemamfaatan dan keefektifan program pelayanan kesehatan masyarakat khususnya upaya pelayanan kesehatan bayi/perinatal disamping itu AKB juga mempunyai asosiasi dengan angka GNP per kapita, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga. Indikator ini juga merupakan indikator yang terbaik untuk pembangunan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2009 kematian perinatal sejumlah 75 kasus baik yang di Rumah Sakit maupun di Laporan Puskesmas. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2008 yaitu 79 kasus. Beberapa penyebab antara lain IUFD, Asfiksia, BBLR dengan system dan mekanisme rujukan dan

ketepatan penanganan kasus komplikasi maka kematian neonatus dapat ditekan semaksimal mungkin.

Berdasarkan cacatan sarana pelayanan kesehatan, setidaknya terjadi 83 kasus kematian bayi ditahun 2009. Dengan demikian angka kematian bayi sebesar 15,63 per 1000 kelahiran hidup di banding tahun 2008 terjadi penurunan 2,73 per 1000 kelahiran hidup. AKI juga masih sangat jauh dibawah angka nasional sebesar 26/1000 kelahiran hidup

b. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita (0-4) menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan khususnya anak dan factor lingkungan yang mempengaruhi terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan. Indikator ini juga menggambarkan tingkat kesejahteraan social dalam arti besar dan tingkat kemiskinan penduduk. Untuk tahun 2009 hanya di temukan 90 kematian balita. Angka ini didapat dari PWS Puskesmas dan data dari rumah sakit. Di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Angka kematian balita di sebesar 5.20 per 1000 pada tahun 2009, meskipun belum menggambarkan kondisi riil karena belum berjalannya system pelaporan kematian Balita dengan baik, disamping itu angka ini hanya yang terdata di unit pelayanan kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Barat. Secara umum belum bisa menggambar AKABA tingkat Kabupaten.

Angka kematian balita tahun 2009 mengalami penurunan dibanding tahun 2008 sebesar 0.82 per 1000 Kelahiran Hidup

c. Angka kematian IBU (AKI)

Angka kematian ibu berguna untuk mengembangkan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan ibu hamil dan membuat kehamilan yang aman bebas risiko tinggi (Making Pregnancy Safer), disamping itu juga dapat dilihat cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan, penyiapan rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, menyiapkan keluarga dan suami.

Angka Kematian Ibu juga berguna untuk menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil. Ibu melahirkan dan ibu nifas.

Angka kematian Ibu tahun 2009 terjadi 1 kasus di wilayah Puskesmas Kumai, di sebabkan pendarahan pada proses persalinan.

Angka kematian Ibu sebesar 18.83 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2009 mengalami penurunan dibanding tahun 2008 sebesar 54.04 per 100.000 kelahiran hidup atau menurun sebesar 35.21 per 100.000 kelahiran hidup. AKI ini juga masih jauh dibawah angka nasional yaitu sebesar 226/100.000 kelahiran hidup

2. INDIKATOR MORBIDITAS (KESAKITAN)

Selain angka kematian, angka kesekitan juga menggambarkan situasi derajat kesehatan masyarakat. Morbiditas penyakit tertentu terutama terkait komitmen global dan nasional telah menjadi sorotan dan menjadi indikator penting untuk menilai kemajuan status kesehatan masyarakat suatu wilayah/daerah.

Untuk mendapatkan gambaran umum suatu pola penyakit utama di masyarakat dapat dilihat dilihat dari pola kasus penyakit terbanyak ditangani di Puskesmas dan jaringannya.

Pola 10 penyakit terbanyak di Puskesmas pada tahun 2008. Infeksi saluran pernafasan bagian atas akut (ISPA) dapat dipastikan sebagai urutan pertama setiap tahunnya. Jumlah kasusnya sangat menonjol dari penyakit lainnya. Peringkat kedua dan ketiga ditempati penyakit malaria dan diare. Sedangkan tahun 2009 penyakit infeksi saluran pernapasan atas aku (ISPA) masih peringkat pertama diikuti oleh penyakit sistem otot dan jaringan di peringkat kedua dan diikuti oleh penyakit Diare ditempat ketiga.

POLA 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN PUSKESMAS DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2009

No	Jenis Penyakit	Kunjungan	%
1	ISPA	45.122	29,74
2	Penyakit sistem otot dan jaringan termasuk	8.185	5,39

	reumatik		
3	Diare	8.134	5,36
4	Hipertensi	8.094	5,33
5	Malaria Klinis	7.117	4,69
6	Pulpa dan Jaringan Periperikal	6.276	4,13
7	Kulit alergi	5.750	3,79
8	Malaria dengan periksa Lab	5.170	3,40
9	Gangguan gigi dan jaringan penyangga lainnya	3.388	2,23
10	Penyakit kulit infeksi	3.269	2,15

Disamping melihat pola 10 penyakit terbanyak dapat juga dilihat beberapa Indikator morbiditas diantaranya indikator angka kesakitan malaria, angka kesembuhan penderita TB Paru BTA+, prevalensi HIV, angka AFP pada anak usia < 15 tahun angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, Filariasis

a. Angka Kesakitan Malaria.

Penemuan penderita malaria di Puskesmas secara pasif yaitu berdasarkan kunjungan penderita ke sarana kesehatan (puskesmas, pustu dan polindes) dengan cakupan penemuan selama tahun 2009 sebanyak 8,287 penderita lebih banyak dibandingkan pada tahun 2008 sebanyak 6299 penderita, dengan angka AMI 34,92 permil lebih tinggi dari tahun 2008 yaitu AMI 27,72 per mil Dari kasus klinis yang dilakukan pemeriksaan laboratorium sebanyak 4,202 kasus yang positif sebanyak 2,515 kasus (SPR 55,45 %).

Tatalaksana pengobatan secara klinis sebanyak 4796 kasus lebih banyak dari tahun 2008 yaitu 3790 kasus dan secara radikal sebanyak 2486 kasus pada tahun 2008 sebanyak 2374 kasus. Jenis obat paling banyak digunakan yaitu klorokuin, primakuin, SF. kina dan amoqdiakuin..

Dari 2515 kasus malaria berdasarkan pemeriksaan laboratorium, malaria Vivax sebanyak 2468 kasus (98%) dan malaria Falciparum sebanyak 29 kasus (2 %).

Cakupan malaria klinis (AMI 34,92 Per Mil / *Medium Incidence Area* (MIA)) lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2008 sebesar 27,72 Per Mil, angka ini menggambarkan bahwa terjadi peningkatan kasus malaria di Kab. Ktw. Barat pada tahun 2009.

Dari jumlah malaria klinis terjadi peningkatan dengan penegakan diagnosa laboratorium dan Rapid Diagnostic Test (RDT), hal ini disebabkan pada tahun 2009 pemeriksaan penunjang di Puskesmas dan Pustu yang belum tersedia laboratorium atau tenaga analis dilengkapi dengan RDT malaria. Malaria vivaks 98% dan malaria palcifarum 2 % hampir sama dengan kasus pada tahun 2008. Pengobatan klinis 60% lebih besar dilakukan di Puskesmas dibandingkan dengan pengobatan radikal 40%). Penegakan diagonas klinis atau kualitas pemeriksaan belum baik tergambar pada angka *slide parasite rate* (SPR) sebesar 55,45 hampir sama dengan tahaun 2008 54,42 %. Jenis obat yang digunakan adalah obat program yaitu jenis klorokuin, primakuin, SF, kina dan beberapa kasus malaria falciparum menggunakan obat artesunat.

Kasus tertinggi terjadi di wilayah kerja Puskesmas Arut Selatan dan Puskesmas karang Mulya dan terendah di Puskesmas Teluk Bogam.

b. Angka Kesembuhan Penderita TB Paru (+)

Cakupan unit pelayanan program TB Paru dengan strategi DOTS telah dilaksanakan di 14 puskesmas, cakupan penduduk terlayani yaitu 100 % dari jumlah penduduk pada tahun 2009.

Cakupan penemuan suspek sebanyak 776 suspek dari angka perkiraan sebesar 4,982 suspek dengan target penemuan sebanyak 3,487 suspek. Cakupan penemuan dan pengobatan penderita penyakit TBC tahun 2009 kasus baru (BTA+) sebanyak 107 orang dari perkiraan penemuan BTA Positif sebanyak 349 penderita (30,6 %), BTA Neg Ro positif sebanyak 74 orang, tidak ditemukan kasus Extra Paru. Konversi sebanyak 68 orang (93 %), tidak konversi 1 orang.

Penderita sembuh yang diobati pada tahun 2008 sebanyak 92 orang (92%) dari jumlah penderita yang diobati sebanyak 100 penderita.

Kasus tahun 2009 belum dapat dilaporkan masih dalam masa pengobatan.

Cakupan penemuan suspek TBC masih rendah dari angka perkiraan penemuan suspek (15,58%), beberapa kemungkinan disebabkan karena sangat ketat petugas di puskesmas dalam menetapkan suspek TBC berdasarkan tanda-tanda klinis, kurangnya survai kontak apabila ditemukan penderita TBC anak, kurangnya penyuluhan (Passive Promotive Case Feending), akibatnya angka cakupan penemuan kasus baru (BTA +) juga rendah sebanyak 107 kasus dari yang ditargetkan sekita 450 kasus

c. Pengendalian dan Pemberantasan HIV / AIDS

Kegiatan tahun 2009 hanya pada pemeriksaan darah (sero survei) bagi kelompok resiko tinggi pada prostitusi dan penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Di Kabupaten Kotawaringin Barat di periksa tempat tempat resiko tinggi diantaranya Dukuh Mola jumlah sample 136, Amin Jaya jumlah sample 36 dan Lembaga Pemasyarakatan jumlah sample 241 dari ketiga tempat tersebut tidak ada ditemukan HIV positif.

d. Pencegahan dan Pemberantasan penyakit DBD

Kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD meliputi penemuan penderita dan pengobatan, pemberantasan vektor dan pemantauan jentik berkala (PJB), pemberantasan jentik dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN). Sepanjang tahun 2009 penderita DBD sebanyak 455 kasus tersebar di 14 puskesmas dengan Incidence Rate (IR) 199/100.000 penduduk dengan CFR sebesar 0,65%., terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2008 (220 kasus). Kasus tertinggi di wilayah Puskesmas Madurejo sebanyak 177 kasus (IR 516/100.000 penduduk) dan kasus terendah di wilayah Puskesmas Ktw. Lama IR 6/100.000 penduduk (1 kasus). Puncak kasus terjadi pada bulan Nopember 2009. Pemberantasan vektor dilakukan dengan penyemprotan secara fokus dan massal pada lokasi kasus DBD, diantara 455 kasus yang dilaporkan, berdasarkan hasil penyelidikan

epidemiologi sebanyak 110 kasus yang dilakukan penyemprotan secara fokus dan penyemprotan massal 2 siklus di wilayah kota Pangkalan Bun dan sekitarnya sepanjang tahun 2009. Pemberantasan jentik dilakukan dengan penaburan larvasida pada tempat-tempat penampungan air oleh masyarakat yang dibagikan secara gratis oleh puskesmas. Sepanjang tahun 2009 telah dibagikan larvasida sebanyak lebih kurang 600 kg. Upaya lain adalah dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) melalui kegiatan 3M (menutup, menguras dan menutup) secara berkala dipadukan dengan gerakan jum,at bersih. Berdasarkan penyebaran kasus DBD pada tahun 2009 diantara 84 kelurahan/desa ada beberapa kelurahan / desa terjadi perubahan klasifikasi endemis, sporadis dan potensial serta bebas DBD. Sebanyak 14 wilayah endemis, sebanyak 25 wilayah sporadis, sebanyak 21 wilayah potensial dan sebanyak 24 wilayah dinyatakan bebas DBD. Upaya pencegahan melalui penaburan larvasida (bubuk abate 1 %) dan kegiatan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

e. Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Diare

Jumlah perkiraan penderita diare pada tahun 2009 sebanyak 96,021 penderita, dengan angka cakupan program sebesar 7%, sehingga target penemuan penderita diare tahun 2009 sebanyak 6,841 penderita dari jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 237,242 jiwa. Cakupan pelayanan merupakan jumlah penderita diare yang menggunakan pelayanan di puskesmas dan jaringannya. Angka cakupan pelayanan penderita diare sebanyak 8,214 penderita (120 %) dari target yang ditetapkan, hasil ini meningkat dari tahun 2008 (93,82 %). Berdasarkan tingkat dehidrasi, tanpa dehidrasi sebanyak 7623 penderita, dehidrasi ringan/ sedang sebanyak 580 penderita dan dehidrasi berat sebanyak 11 penderita. Penanganan penderita diare yang diharapkan adalah dengan mengganti cairan tubuh penderita yang hilang melalui pemberian oralit, infuse dan antibiotik pada kasus tertentu. Sebanyak 6623 penderita mendapatkan oralit (80,63%) dari jumlah cakupan penemuan, hasil ini sama dengan tahun 2008 sebesar

80,19 %. Jumlah pemakaian oralit sebanyak 36782 bungkus, dengan rata-rata pemakaian 5,5 bungkus/penderita , sama dengan tahun 2008 yaitu 5, 2 bks / penderita. Penderita dengan pemberian cairan / infus sebanyak 429 penderita (5,2 %), lebih tinggi dari tahun 2008 sebesar 3,5 % dari jumlah penderita diare. Penanganan penderita diare pada beberapa kasus dengan etiologi tertentu diberikan obat antibiotika, dengan jumlah pemakaian 11,378 tablet, lebih banyak dari tahun 2008 yaitu 6393 tablet. Tidak ditemukan kasus diare meninggal di wilayah kerja puskesmas, CFR = 0 %.

f. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Kaki Gajah

Sasaran penduduk minum obat sebanyak 199,587 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 237,242 jiwa tersebar di 14 Puskesmas, 6 Kecamatan, 84 Kelurahan/Desa.

Penduduk minum obat sebanyak 185,043 jiwa, dengan cakupan penduduk minum sebesar 92,71 %, lebih tinggi dari tahun 2008 sebesar 91,16 %. Berdasarkan jumlah penduduk sebesar 80,0 %, lebih rendah dari tahun 2008 sebesar 82,63 %, dan cakupan geografis sebesar 100 %. Jumlah pemakain Obat Dietly Carbamazine Citrate (DEC) 100 mg sebanyak 491,675 tablet, Albendazol 400 mg 187,440 tablet dan Paracetamol 500 mg sebanyak 164,333 tablet. Reaksi samping dari pengobatan antara lain mual, pusing, muntah, sakit kepala, demam, mencret, pegal-pegal, gatal-gatal, mulas, bisulan, keluar cacing, sakit otot dan tulang serta batuk-batuk, penanganan pasien dilakukan di puskesmas secara rawat jalan, tidak ditemukan reaksi berat pengobatan.

3. STATUS GIZI

a. Balita Dengan Gizi Buruk

Mengacu Definisi Operasional (DO) gizi buruk pada buku "Indonesia Sehat 2010 dan pedoman penetapan indikator propinsi sehat dan kabupaten/kota sehat" bahwa balita dengan gizi buruk adalah balita yang mempunyai berat badan dibawah garis merah pada Kartu Menuju

Sehat (KMS). Balita dengan berat badan berada di bawah garis merah pada KMS disimbolkan dengan kode BGM. Persentase rata-rata BGM/D kabupaten per bulan secara umum mencapai 3 %, sudah mampu memenuhi harapan target sebesar maksimal 5 %. Jika dilihat per puskesmas cakupan berkisar antara 1 s.d 14 %. Kisaran ini menunjukkan perbedaan yang sangat jauh antar puskesmas. Cakupan terendah (1%) ditemukan di wilayah Puskesmas Madurejo, Natai Palingkau dan Kumai. Cakupan tertinggi (14 %) ditemukan di wilayah Puskesmas Arut Utara. Puskesmas lain dengan persentase BGM 5 % atau lebih selain Arut Utara adalah Kotawaringin Lama (9 %), Mendawai (6%), Teluk Bogam (6 %) dan Sungai Rangit (5 %). Angka 14 % yang ditemukan di Arut Utara dan 9 % di Kotawaringin Lama sangat tinggi bila dibandingkan dengan angka di wilayah puskesmas lain di Kabupaten Kotawaringin Barat, walaupun masih cukup rendah bila dibandingkan target gizi kurang nasional sebesar kurang dari 20 %. Permasalahan yang muncul adalah besarnya potensi gizi kurang termasuk gizi buruk di wilayah Puskesmas Arut Utara dan Kotawaringin Lama

4. JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM)

a. Program Jamkesmas

Program Jamkesmas merupakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang ditujukan untuk keluarga miskin dimana anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, untuk Kabupaten Kotawaringin Barat Jumlah sasaran jamkesmas sebesar 43.417 orang tahun 2009 sebanyak 23.479 (54%) orang telah menggunakan jamkesmas untuk pelayanan dasar di Puskesmas dan jaringannya dan sebanyak 1.092 diantaranya dirujuk ke unit pelayanan yang lebih tinggi.

b. Program Jaminan Kesehatan Dasar Penduduk

Disamping Jamkesmas yang didanai oleh pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menjamin penduduknya yang tidak punya jaminan pelayanan kesehatan dengan diluncurkannya program Jamkesdasduk dimana semua penduduk

Kabuapten Kotawaringin barat yang tidak punya jaminan Kesehatan akan dijamin mendapat pelayanan kesehatan dasar gratis.

Dilihat dari data kunjungan pasien JAMKESDASDUK dari

- Volume Rawat Jalan ditargetkan 100.000 kunjungan diperoleh total kunjungan sebesar 98.573 kunjungan dari bulan pebruari sampai november, sehingga target yang dicapai 98,6%.
- Volume Tindakan yang ditargetkan 2.000 kasus diperoleh total kasus sebesar 12.179 kasus dari bulan pebruari sampai november, target yang dicapai melebihi volume yang telah ditargetkan.
- Volume Rawat Inap yang ditargetkan 5.000 hari rawat diperoleh total hari rawat 4.020 hari rawat dari bulan pebruari sampai november, target yang dicapai 80,4%.
- Volume Persalinan yang ditargetkan 1.000 kunjungan/hari rawat diperoleh total 1.233 kunjungan/hari rawat dari bulan pebruari sampai november, target yang dicapai melebihi volume yang telah ditargetkan.

5. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

Program Promosi Kesehatan pada tahun 2009 diarahkan untuk meningkatkan angka penggerakkan peran masyarakat melalui kegiatan kan desa siaga aktif Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Desa Siaga di seluruh wilayah puskesmas . Berdasarkan hasil survei pemetaan PHBS pada tatanan keluarga diperoleh angka rata-rata capaian sebesar 60,1 %. Indikator yang masih relatif rendah adalah capaian ASI eksklusif dan Perilaku merokok di dalam rumah masing-masing 35,8 % dan 39,9 %. Sebagai Upaya inti promosi kesehatan penggerakkan PHBS juga diarahkan pada konsep Penggerakan Desa bebas jentik untuk mencegah penyebaran penyakit, DBD, Malaria, Chikungunya dan Kaki Gajah dengan fokus pemantauan di masing-masing wilayah RT di setiap desa. Pengembangan Program promosi Kesehatan didasarkan pada upaya mengapresiasi Pedoman Promosi

Kesehatan di daerah sebagaimana termuat dalam SK Menkes No: 114/Menkes/SK/2009.

Model pengembangan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan fokus pada akselerasi pencapaian desa siaga aktif dengan indikator utama pelayanan kesehatan dasar di Poskesdes , struktur pengurus desa siaga telah ada yang didukung dengan aktifnya forum desa, serta kader aktif di desa serta telah dilaksanakan kegiatan Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sebagai dasar perencanaan kegiatan dan prioritas kegiatan desa siaga. Cakupan desa siaga aktif tahun 2009 mencapai 35 desa dari 89 Desa yang ada (39,7 %). Secara bertahap pada tahun 2010 akan ditargetkan mencapai 80 % dan tahun 2011 semua desa /kelurahan di kabupaten Kotawaringin Barat 100 % telah mencapai Desa Siaga. Untuk mewujudkan harapan ini akan disinergikan dengan sumberdaya di desa dan stimulasi dana dari program pengembangan desa siaga termasuk optimalisasi dana bantuan sosial program seratus hari Departemen Kesehatan yang diluncurkan untuk pengembangan desa siaga. Penguatan Desa Siga menjadi prioritas konsep pemberdayaan Masyarakat sesuai Surat Keputusan menteri Kesehatan RI. Nomor 546/Menkes/SK/VIII/2009 tentang Pedoman Pengembangan Desa Siaga. Sinergi PHBS dan Desa siaga diharapkan menjadi model yang saling mendukung untuk meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat , mulai dari tahap perencanaan, penggerakan serta evaluasinya di bawah bimbingan petugas fasilitator bidan desa yang hingga akhir tahun 2009 telah mengikuti Pelatihan Bidan Poskesdes fasilitator Pengembangan desa siaga sebanyak 83 Petugas dari 88(94 %) desa yang ada.

Cakupan Strata Posyandu sampai dengan tahun 2009 dari 158 buah posyandu telah dicapai strata sbb :

- | | |
|---------------------|----------------------|
| a. Posyandu Pratama | : 60 buah (37,9 %) |
| b. Posyandu Madya | :47 buah (29,7 %) |
| c. Posyandu Purnama | :20 buah (12,6 %) |
| d. Mandiri | :31 buah (19,6 %) |

Jumlah kader diposyandu tahun 2009 sebanyak 790 orang, sedangkan yang aktif 745 kader (94,3%). Upaya peningkatan cakupan Posyandu mandiri akan disenirginakan dengan agenda kegiatan Pokjnal Posyandu sebagaimana telah dituangkan kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat edaran Nomor: 411.2/1656/bpmdes/2009 mengenai Rencana aksi Pokjnal posyandu di seluruh kabupaten dan peningkatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat dengan memprioritaskan koordinasi lintas sektor terkait.

3.3. Bidang lingkungan hidup

Permasalahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan Tupoksi dan kebijakan pada Tahun 2009 adalah :

- Sumber daya Aparatur, Jabatan yang kosong dan kekurangan staf.

Solusinya :

- Perlu meningkatkan SDA, melalui Diklat baik teknis maupun non teknis
- Perlu penambahan staf, untuk kasubid dan Kabag yang tidak memiliki staf dalam membantu tugas dinas sehari-hari.

Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan :

Kabupaten Kotawaringin Barat menerima Piagam dan Penghargaan Adipura klasifikasi kota kecil Tingkat Nasional selama 3 kali, itu semua berkat kerja keras semua pihak, masyarakat Kotawaringin Barat dalam memperoleh penghargaan Adipura tersebut.

3.4. Bidang pekerjaan umum;

Hambatan-hambatan dan kendala yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2009 secara keseluruhan baik untuk kegiatan

rutin maupun pembangunan dan secara langsung/tidak langsung mempengaruhi kinerja dan capaian indikator kinerja adalah antara lain :

- Masih kurangnya tenaga terampil di bidang keahlian khusus terhadap kinerja masing-masing.
- Masih terbatasnya sarana (alat bantu) kerja dalam mendukung pelaksanaan konstruksi
- Bencana alam, berupa tingginya curah hujan dan terjadinya banjir (naiknya muka air sungai)
- Naiknya harga bahan bangunan akibat *multiplier effect* dari kenaikan/kelangkaan harga bahan bakar minyak (BBM).
- Terbatasnya dana pemerintah sehingga kegiatan pembangunan belum dapat merata.

Solusi.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun anggaran 2008, maka perlu

- Mengirimkan/mengikutsertakan staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat guna mengikuti pendidikan dan pelatihan (kursus).
- Menambah dan mengadakan sarana (alat kerja) pendukung yang masih kurang dan saat ini dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan konstruksi.
- Melakukan penyesuaian harga untuk kegiatan konstruksi.
- Mencari tambahan dana guna menunjang keterbatasan dana alokasi pemerintah dengan melakukan sinergi dengan pemerintah propinsi dan pusat.

Kebijakan/Strategi dari Dinas

Untuk mewujudkan Kabupaten Kotawaringin Barat yang maju, aman, tertib, damai, sejahtera, demokratis dan berkeadilan, maka penyelenggaraan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan penataan ruang dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan yang dituangkan dalam kebijakan, program dan kegiatan.

Wujud infrastruktur pekerjaan umum sendiri, yang merupakan bangunan fisik untuk kepentingan umum dan keselamatan umum seperti irigasi, jalan, jembatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bangunan pelengkap kegiatan permukiman lainnya, merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik.

Pembangunan yang merupakan proses perubahan secara terus-menerus dan berkelanjutan dari kondisi tidak ada menjadi ada dan dari kondisi kurang baik menjadi lebih baik, sehingga terjadi keseimbangan lingkungan baru. Dengan demikian pembangunan infrastruktur pekerjaan umum perlu selalu dikaitkan dengan daya dukung lingkungan baru tersebut, agar lingkungan sebagai ruang hidup manusia tidak terdegradasi sebagai akibat daya dukung lingkungan yang terlampaui yang dapat menyebabkan bencana antara lain banjir, longsor, dan penurunan kuantitas dan kualitas air dan udara.

Untuk itu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum disamping mempertimbangkan pilar ekonomi juga pilar sosial budaya dan lingkungan sebagai satu kesatuan agar berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur pekerjaan umum menuntut pemenuhan berbagai kapabilitas atau keserasian penanganan antara eksekutif, legislatif dan masyarakat secara umum dalam partisipasinya pada penyelenggaraan pembangunan, penggunaan dan pengawasan. Dalam hal ini pendekatan dengan berbasis penataan ruang dan pembangunan berwawasan lingkungan dinilai sanggup memenuhi berbagai tuntutan kapabilitas tersebut.

Kebutuhan artikulasi masyarakat dalam sistem pembangunan infrastruktur yang tepat bagi masing-masing wilayah harus didukung dengan potensi yang dimiliki wilayahnya, sehingga diperlukan pendekatan pembangunan infrastruktur yang komprehensif dibagi menjadi beberapa kategori prioritas yaitu kawasan lahan produktif, kawasan rawan bencana, kawasan perbatasan, daerah terisolir dan kawasan yang sedang berkembang.

Untuk mempercepat proses pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat, strategi yang lebih utama yang harus

diterapkan adalah dengan menciptakan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah propinsi dan pusat, sehingga proses perencanaan, pendanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat berlangsung secara terfokus dan terarah.

Dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah, bahwa penambahan pembangunan fisik prasarana dan sarana (infrastruktur) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, industri, perdagangan dan jasa. Selain itu, pemeliharaan kualitas dan kelanjutan pembangunan fisik infrastruktur yang telah direncanakan juga tetap mengacu kepada prinsip untuk mendukung kegiatan tersebut di atas.

3.5. Bidang penataan ruang;

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2008 dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Kurangnya tenaga terampil bidang keahlian khusus, seperti ahli GIS, ahli peta dan ahli program komputer.
2. Terbatasnya sarana (alat bantu) kerja elektronik, komputer server dan note book.

b. Solusi

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengirimkan atau mengikutsertakan staf Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.
2. Menambah atau mengadakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
3. Mencari terobosan penggalan dana baik bersumber dari APBN maupun Bantuan Luar Negeri (block grant) guna menunjang keterbatasan dana alokasi dari pemerintah daerah.

3.6. Bidang perencanaan pembangunan;

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

1. Kurangnya tenaga terampil bidang keahlian khusus, seperti ahli menghitung PDRB, ahli peta dan ahli program computer, ahli penelitian.
2. Terbatasnya sarana (alat bantu) kerja elektronik, komputer server dan note book.
3. Terbatasnya dana operasional perencanaan dan pengendalian pembangunan.
4. Lemahnya koordinasi horizontal dan pembiasaan mekanisme perencanaan akibat kegiatan mendadak dan terjadinya koordinasi vertikal yang mengabaikan koordinasi horizontal.

b. Solusi

Solusi yang telah dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Mengirimkan atau mengikutsertakan staf Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat pada pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis.
2. Menambah atau mengadakan sarana pendukung yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.
3. Mencari terobosan penggalan dana baik bersumber dari APBN maupun Bantuan Luar Negeri (block grant) guna menunjang keterbatasan dana alokasi dari pemerintah daerah.
4. Penataan koordinasi horizontal dalam perencanaan pembangunan daerah.

- 3.7. Bidang perumahan;
- 3.8. Bidang kepemudaan dan olahraga;
- 3.9. Bidang penanaman modal;

3.10. Bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;

Permasalahan Intern

1. Jumlah kendaraan Dinas roda 2 untuk operasional kegiatan masih belum memadai.
2. Sarana kerja bagi karyawan karena penggabungan Dinas masih belum memadai..
3. Jumlah tenaga yang terampil dalam pengelolaan keuangan masih belum memadai.
4. Kurangnya jumlah karyawan sehingga beberapa orang merangkap tugas (petugas pungut / Satpam dan lain lain).
5. Terbatasnya dana pembinaan dan pemeliharaan Pasar.
6. Terbatasnya tawaran tawaran kursus / Diklat yang dilaksanakan Pemerintah.

Permasalahan Extern

1. Masih banyaknya Pengurus dan Pengawas yang belum mampu membuat Pembukuan dan Laporan Pertanggung Jawaban kepada anggotanya.
2. Belum adanya pabrik mini atau kapasitas besar Pabrik CPO yang dimiliki koperasi untuk menampung dan mengolah TBS Pabrik CPO milik anggota diluar plasma.
3. Masih kurangnya permodalan bagi KUKM untuk pengembangan usaha.
4. Masih kurangnya kepercayaan kepada koperasi sebagai distributor/agen bahan pokok dan saprodi.
5. Sarana dan Prasarana yang dimiliki KUKM masih kurang dalam mendukung kenyamanan dan kelancaran tugas koperasi.
6. Masih kurang layak nya penggajian Pengurus dan Pengawas.
7. Kurangnya kepercayaan perbankan dalam penyaluran dan bagi koperasi.
8. Terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan tentang pengembangan UKM.
9. Terbatasnya pemasaran hasil Usaha Koperasi dan Mikro.

10. Rendahnya kesadaran pedagang pasar & PKL tentang ketertiban, kebersihan.
11. Rendahnya kesadaran pedagang & PKL untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Hukum (Perijinan).
12. Pengembangan KUKM masih sulit akibat belum keseriusan Pengurus. (Kerja sambilan).
13. Sulitnya barang daerah menjadi komoditi unggulan karena masih banyak barang jadi, bukan sifatnya olahan.
14. Kesulitan pensertifikatan tanah karena BPN Propinsi masih menunggu pengesahan RTWP.
15. Pembangunan Pasar di Kecamatan Arut tidak dapat dilaksanakan karena diklaim oleh masyarakat.

a. Solusi Mengatasi Permasalahan

- Mengikut sertakan aparatur Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar mengikuti Diklat, Seminar, di Daerah maupun Luar Daerah dalam peningkatan sumber Daya Manusia.
- Mengusulkan penambahan kegiatan pelatihan Sosialisasi, Temu Usaha, Penyuluhan kepada gerakan Koperasi, UMKM
- Meningkatkan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM melalui pendekatan sentra usaha yang dikelola masyarakat atau kelompok-kelompok uasah produktif.
- Mendorong dan memotivasi gerakan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam pemupukan permodalan dan memfasilitasi Koperasi dan UMKM mengakses permodalan dari lembaga-lembaga keuangan Perbankan dan BUMN / BUMS.
- Memberdayakan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi agar lebih efisien produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha seluas-luasnya dengan dukungan permodalan yang memadai.
- Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan persaingan sehat dan kemitraan saling menguntungkan.

- Bekerjasama dengan pihak lembaga keuangan mencari solusi mempermudah persyaratan mendapatkan akses permodalan bagi Pengusaha Kecil.
- Sertifikasi tanah bagi pengusaha kecil untuk agunan.
- Melakukan beberapa perbaikan dan peningkatan jumlah Pasar, Los dan Bak.
- Melakukan pembinaan melalui penyuluhan bagi pedagang dan PKL.

3.11. Bidang kependudukan dan catatan sipil;

Permasalahan

1. Kinerja operasional dan pelayanan oleh pejabat eselon III/IV kurang maksimal karena keterbatasan sarana pendukung khususnya terbatasnya fasilitas kendaraan dinas operasional.
2. Belum meratanya kemampuan aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang diemban.
3. Kurangnya jumlah tenaga pelaksana guna mendukung pelaksanaan tupoksi sehingga beberapa pejabat terpaksa merangkap tugas sebagai pelaksana.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melengkapi dirinya dengan dokumen administrasi kependudukan nasional (KTP, KK, Akta Capil, Akta Perkawinan dan Akta Cerai).
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan mutasi penduduk sehingga database kependudukan kurang akurat.
6. Pelayanan SIAK belum dapat terlaksana karena belum on line.

Solusi

1. Pengusulan pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Mengikut sertakan aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengikuti Diklat, Seminar, di Daerah maupun Luar Daerah dalam upaya peningkatan kemampuan SDM Aparatur.
3. Pengusulan penambahan tenaga pelaksana.
4. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta mengintensifkan layanan administrasi kependudukan

5. Melaksanakan Coklit (pencocokan dan penelitian) data kependudukan ke desa-desa sekaligus melakukan sosialisasi administrasi kependudukan.
6. Melakukan berbagai upaya dalam rangka percepatan penerapan pelayanan SIAK.

3.12. Bidang ketenagakerjaan;

a. Permasalahan

- Belum tersedianya tenaga Instruktur PNS sehingga standar pelatihan yang berbasis kompetensi kurang bisa dilaksanakan
- Kurangnya prasarana latihan kerja.
- Kurangnya ketrampilan/ keahlian calon tenaga kerja.
- Kesadaran pihak pengguna tenaga kerja untuk menginformasikan lowongan kerja masih kurang.

b. Solusi

- Mengadakan kerjasama dengan lembaga Latihan Swasta untuk melaksanakan pelatihan berbasis masyarakat.
- Meningkatkan program latihan ketrampilan tenaga kerja.
- Mengusulkan pengadaan sarana latihan kerja melalui dana APBD dan Tugas Pembantuan.
- Mensosialisasikan peraturan tentang wajib lapor lowongan kerja dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan lowongan kerja.

3.13. Bidang ketahanan pangan;

Permasalahan

1. Masih banyak kegiatan pokok di bidang Ketahanan Pangan yang tidak terakomodir karena keterbatasan APBD Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Fasilitas kendaraan roda dua penyuluh pertanian dan perkebunan masih kurang memadai
3. Minimnya ketersediaan alat peraga dan kelengkapan penyuluh pertanian.
4. Banyaknya jumlah kelompok tani yang tidak aktif.

5. Masih adanya kecenderungan pembentukan kelompok tani berdasarkan kepentingan (syarat pengajuan kredit) bukan berdasarkan kebutuhan.
6. SDM yang menangani baik kualitas maupun kuantitas sangat terbatas sehingga dalam melaksanakan program / kegiatan mengalami hambatan
7. Sarana dan prasarana sangat terbatas

Solusi

8. Perlunya peningkatan alokasi Dana APBD untuk membiayai program-program ketahanan pangan yang belum terealisasi.
9. Perlunya tambahan/ penggantian fasilitas kendaraan roda dua untuk meningkatkan pelayanan kepada petani.
10. Perlunya ketersediaan anggaran untuk pengadaan alat peraga dan kelengkapan penyuluhan untuk mendukung metode penyuluhan pertanian di lapangan.
11. Perlunya pemberdayaan dan pembinaan secara intensif bagi kelompok tani yang tidak aktif.
12. Perlunya dilakukan pemutakhiran data kelompok tani secara berkala.
13. Perlu peningkatan SDM baik kualitas maupun kuantitas dalam menangani program / kegiatan perkantoran.
14. Perlu penambahan sarana dan prasarana kantor dalam mendukung operasional perkantoran

Secara umum kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kotawaringin Barat dari aspek ketersediaan pangan dalam keadaan mantap terkendali walaupun produksi dalam daerah masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daerah.

Dari aspek distribusi pangan arus pendistribusian pangan (sembako) dari pulau Jawa ke Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Pelabuhan Kumai dan Pangkalan Bun sangat lancar begitu juga dari Pangkalan Bun kesemua daerah wilayah Kecamatan/Desa.

Dari aspek konsumsi dan keamanan pangan bahwa penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mengkonsumsi pangan sudah mencukupi standar kecukupan gizi yaitu 2.500 Kilo Kalori / orang perhari.

Upaya yang telah ditempuh selama ini dalam rangka memantapkan ketahanan pangan daerah adalah :

- a. Melakukan revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan secara terintegrasi dengan instansi terkait dan masyarakat
- b. Mengadakan diversifikasi tanaman dan Percepatan Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan dan Gizi (P2KPG) bagi kelompok wanita dan anak sekolah di Desa Mandiri Pangan dalam mendukung ketahanan pangan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan
- c. Memasyarakatkan makananan 3 B (beragam, bergizi dan berimbang) melalui kegiatan PKK dan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan anak sekolah di Desa Mandiri Pangan serta iklan layanan masyarakat melalui Radio dan pada tahun 2008 mendapat juara favorit I Lomba Cipta Menu Makanan 3 B Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Puncak Hari Pangan Sedunia yang dilaksanakan di Palangka Raya pada tanggal 26 Nopember 2008.
- d. Selain itu dalam rangka pemantapan ketahanan pangan daerah melalui kelompok afinitas (miskin) diberikan bantuan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sebesar Rp.100 Juta untuk masing-masing untuk Desa Mandiri Pangan dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dengan kegiatan On Farm, Off Farm dan Non Farm.

3.14. Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

3.15. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

3.16. Bidang perhubungan;

Permasalahan.

Permasalahan prioritas yang masih belum dapat diatasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain adalah:

- 1). Masih terbatasnya jumlah pegawai/staf pelaksana yang memiliki kualifikasi -keahlian tertentu seperti tenaga Penguji Kendaraan Bermotor (PKB), ahli dibidang transportasi darat, perairan (sungai dan laut), serta bidang komunikasi dan informatika yang merupakan kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2). Belum tersedianya Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- 3). Pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan manual, karena belum memiliki Gedung/Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan belum menggunakan peralatan mekanis dan atau/ komputerisasi, sehingga pelaksanaannya belum optimal.
- 4). Masih belum tersedianya terminal Type B yang melayani angkutan umum antar kota dalam provinsi.

Solusi.

Untuk mengatasi permasalahan prioritas tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit yang antara lain

- 1). Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan rekrutmen pegawai yang memiliki keahlian bidang transportasi, khususnya transportasi darat, transportasi melalui perairan (sungai dan laut) seperti diploma II PKB, D.III LLAJ, D.III LLASDP maupun D.IV atau Strata I (S.I) transportasi darat, serta bidang komunikasi dan informatika.

- 2). Melaksanakan diklat-diklat teknis sesuai prioritas pada tugas pokok dan fungsi.
- 3). Mengusulkan pembuatan/penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) sebagai dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- 4). Mengusulkan pembuatan/penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perhubungan (RIPP) dan Rencana Detail Pengembangan Perhubungan (RDPP) yang merupakan dasar acuan pembangunan dan pengembangan bidang perhubungan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- 5). Mengusulkan pembangunan Gedung/Balai Pengujian Kendaraan Bermotor serta pengadaan peralatan pengujiannya, sehingga pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara optimal.
- 6). Mengusulkan pembangunan terminal Type B beserta perlengkapannya.

3.17. Bidang komunikasi dan informatika;

3.18. Bidang pertanahan;

3.19. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

Permasalahan :

1. Kurang tenaga/sumber daya apratur yang proporsional
2. Kurangnya sarana mobilitas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Kurangnya pelatihan/pembinaan terhadap masyarakat umum untuk penanggulangan bencana
4. Kurangnya pelatihan anggota Hansip/Linmas

Solusi :

1. Pendanaan perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Perlu adanya penambahan tenaga yang profesional di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
4. Perlu adanya peningkatan SDM melalui diklat-diklat dan pelatihan.

3.20. Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

Berdasarkan tingkat capaian kinerja yang ada secara riil masih terdapat kendala – kendala dalam pelaksanaan program kegiatan antara lain meliputi :

1. Keterbatasan personil untuk operator pengelola data kepegawaian
2. Adanya ketentuan peraturan yang sering berubah dan mendadak pemberlakuannya
3. Penjadwalan kegiatan yang terikat dengan petunjuk / ketentuan pusat
4. Adanya peraturan yang sering kali dirasakan bertentangan satu sama lain dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian (kediklatan dan pengembangan karier, UKP dan pengembangan karier)
5. Turunnya motivasi pegawai sebagai akibat adanya ketentuan yang dianggap tidak menguntungkan bagi pegawai sesuai pada point (4)
6. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan bagi pegawai disemua tingkat dalam setiap SKPD yang mengacu pada surat edaran Bupati tentang pelimpahan wewenang penjatuhan sanksi disiplin bagi PNS

Hal lain yang perlu dilaporkan

1. Berdasarkan UU no.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Surat Edaran Menteri PAN No. SE/20/M.PAN/6/2004 tanggal, 17 Juni 2004 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Partisipasi Masyarakat menuju Pemerintahan yang Baik belum bisa terlaksana sepenuhnya yaitu baru pada Bidang Kesehatan (RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun) dan Bidang Perizinan (KPTP) seharusnya dapat diterapkan di semua Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Untuk itu perlu

Diperlukan Anggaran yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan tersebut pada Unit Pelayanan Instansi Pemerintah lainnya seperti Puskesmas, Kecamatan, Kelurahan dll.

2. Adanya pagu anggaran yang dialokasikan kepada SKPD bersifat menurun dan mengikat setiap tahun, hal tersebut sangat membatasi pengembangan penyusunan program kerja SKPD termasuk tidak bisa mengakomodir program yang ditetapkan mengacu pada Renstra dan RPJM.
3. Perlu adanya telaahan dan kajian yang mendalam terhadap usulan kebutuhan anggaran dengan mengacu pada Renstra dan RPJM maupun tupoksi SKPD (konsistensi)
4. Dengan diangkatnya tenaga honor menjadi CPNS belum bisa mengatasi masalah dalam penanganan tenaga honor mengingat masih diusulkan dan diangkatnya tenaga kontrak disetiap SKPD hal ini sangat menyulitkan bagi pengelolaan kepegawaian (Surat Edaran Gubernur melarang pengangkatan tentang tenaga kontrak) hal ini perlu mencari solusi untuk penanganan bidang – bidang yang terkait dengan pekerjaan yang memerlukan tenaga teknis spesifik (sopir, jaga malam, kebersihan kantor)

3.21. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Permasalahan.

- Kualitas sumber daya manusia (SDM) Keluarga di pedesaan yang masih rendah.
- Kelembagaan masyarakat yang ada didesa belum mampu menjalankan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan
- Minimnya permodalan usaha yang dimiliki.
- Sisa anggaran kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, tahun 2009 yg tidak direalisasikan dgn adanya perubahan peraturan Bupati Kobar.
- Ada beberapa kegiatan yg telah dilaksanakan , perubahan melalui ABT namun mengingat waktu pelaksanaan tdk mungkin utk direalisasikan.

- Dana Monitoring, Evaluasi dan pelaporan tdk dapat direalisasikan dikarenakan peraturan Bupati sebagai payung hukum dana bergulir belum terbit.

Solusi.

- Melakukan Pembinaan Kelembagaan Desa dan kelurahan agar dapat menjalankan pembangunan sesuai yang diharapkan.
- Perlu terus diupayakan memotivasi, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan usaha bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
- Mengikut sertakan pengrajin pada gelar/pameran TTG tingkat Nasional.
- Menyalurkan Dana PNPM –MP dan P2SPP kemasyarakat secara bergulir.
- Menyalurkan Dana Bergulir sebagai modal usaha masyarakat.
- Melakukan program Bedah rumah secara bertahab.

3.22. Bidang sosial;

3.23. Bidang kebudayaan;

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- Kelanjutan Pembangunan Balai Budaya di Pasir Panjang tidak dapat direalisasikan dikarenakan belum selesainya masalah tanah.
- Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah No : 2733/m-2006/EK tanggal. Agustus 2006, perihal Pendirian Mesium Budaya Daerah di Kabupaten dan sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, bahwa Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Mesium Budaya dikarenakan belum memiliki lahan untuk membangun.

Solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagi berikut :

- Sudah melakukan Koordinasi dengan pihak BPN melalui surat nomor 640/270/dkp-ii/vii/2009, tanggal 25 Juli 2009 tentang Bangunan Balai Budaya dan mendapatkan jawaban dari BPN dengan Nomor : 324.500.11.62.01/IX/2009, tanggal 7 September 2009 perihal Bangunan Balai Budaya, yang selanjutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan Nota Pertimbangan kepada Bapak Bupati Kotawaringin Barat.dengan nomor : 900/385/DKP-IV/IX/2009, tanggal 9 September 2009 perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah untuk Keperluan Bangunan Balai Budaya.

Sambil menunggu proses penyediaan tanah untuk bangunan Museum Budaya, Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan Pengelola Istana Kuning untuk sementara menggunakan sebagian bangunan Istana Kuning sebagai Mesium Budaya Daerah.

- 3.24. Bidang statistik;
- 3.25. Bidang kearsipan; dan
- 3.26. Bidang perpustakaan

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan

Bidang Kelautan dan perikanan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Urusan Pilihan sesuai dengan tupoksi sebagai berikut :

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas/Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perikanan dan Kelautan, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009.

Dinas Perikanan dan Kelautan pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 10 (*sepuluh*) program dan 35 (*tiga puluh lima*) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Peningkatan Pembangunan Sektor Peratanian Dalam Arti Luas	Fungsi : Ekonomi Sub fungsi : Kelautan dan Perikanan	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				Kantor 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 13. Penyediaan Makanan dan Minuman 14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15. Pembangunan Gedung Kantor 16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 18. Pengadaan Mebeleur 19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
			3. Peningkatan Disiplin Aparatur	23. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			4. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	24. Pendidikan dan Pelatihan Formal
			5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25. Penyusunan laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26. Penyusunan laporan keuangan semesteran 27. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	Fungsi : Ekonomi Sub Fungsi : Perikanan dan Kelautan	6. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	28. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir
			7. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian	29. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub. Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			Sumber daya Kelautan	
			8. Pengembangan Budidaya Perikanan	30. Pengembangan Bibit Ikan Unggul 31. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 32. Pembinaan dan pengembangan perikanan
			9. Pengembangan Perikanan Tangkap	33. Pembangunan tempat pelelangan ikan
			10. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	34. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan 35. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional

1.2. Pertanian;

Dalam rangka merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas yang telah dijabarkan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan, serta berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun 2009.

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2009 melaksanakan 7 (tujuh) program utama dengan 23 (dua puluh tiga) kegiatan, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut ini :

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Pertanian dan Peternakan				
1	Peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura meliputi	Ekonomi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan	1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
	padi, palawija, sayuran dan buah-buahan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.	Kelautan Peningkatan Ketahanan Pangan	Aparatur	3. Pengadaan Meubelair 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2	Peningkatan populasi dan produksi peternakan meliputi peternak besar, ternak kecil dan unggas melalui penyediaan bibit ternak, pengendalian reproduksi dan peningkatan kelahiran.		2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	7. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
3	Pengamanan produksi pengendalian organisme pengganggu tanaman, pertanian dan peternakan antisipasi kekeringan/banjir dan menekan angka kematian ternak dan pemberantasan penyakit ternak/hewan menular		3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	8. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 9. Panganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 10 Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija 11. Pengembangan Perbenihan / Perbibitan 12 Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan 13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
4	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan melalui penanganan pasca panen/ pengolahan hasil dan perbaikan sistem pemasaran	Peningkatan dan Pengembangan Agribisnis	4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	14 Pengembangan dan Pendayagunaan Alat dan Mesin Pertanian 15 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 16 Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian 17 Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
5	Peningkatan kemandirian petani melalui kelembagaan penyuluhan, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pelaku usaha pertanian dan peternakan		6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	18 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 19 Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
6	Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendorong perkembangan agribisnis di pedesaan.	Pengembangan Agribisnis	7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	20 Pembibitan dan Perawatan Ternak 21 Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat 22 Pengembangan Agribisnis Peternakan 23 Penyediaan Sarana Produksi Peternakan
Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan				
1.	Peningkatan Kualiatas SDM Tenaga Penyuluh		1. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 2. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 3. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan

1.3 Bidang Perkebunan

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Misi Dinas Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perkebunan, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 4 (empat) program utama dan 2 (dua) program pendukung. Program Utama meliputi Program Kesejahteraan Petani, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan,

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan, sedangkan program pendukung yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Peningkatan Disiplin Aparatur

No	PROGRAM DANKEGIATAN	SASARAN	DESKRIPSI MANFAAT/KEBERHASILAN PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
Dinas Perkebunan			
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1. Pembangunan gedung kantor 2. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 3. Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Parit Keliling Kantor sepanjang 148 m; - Terbangunnya Skat Ruang Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Perkebunan 2 Ruang; - Terbangunnya tempat parkir seluas 92 m²; - Terlaksananya Pengurukan tanah halaman depan kantor 488,3 m³; - Terpasangnya lampu taman sebanyak 9 titik. - Terlaksananya pengadaan kendaraan R-2 sebanyak 3 unit - Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 1 paket; 	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya halaman kantor yang bebas genangan air seluas 10.000 m²; - Tersedianya Ruangan yang berskat 2 ruang; - Tersedianya tempat parkir kendaraan seluas 92 m²; - Tertatanya tanah halaman depan kantor 3.100 m²; - Terciptanya penerangan taman seluas 10.000 m² - Tersedianya kendaraan operasional R-2 sebanyak 3 unit. - Terciptanya kondisi kantor yang rapi 1 gedung;
2.	Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pengadaan Pakaian PDH 45 stel; - Terlaksananya Pengadaan Pakaian Olah Raga 45 stel. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Pakaian Dinas PDH yang seragam sebanyak 45 stel; - Tersedianya Pengadaan Pakaian Olah Raga 45 stel.
3.	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya peningkatan Sumberdaya Aparatur Dinas Perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sumberdaya Aparatur yang terlatih dan terampil dalam melaksanakan tugas
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya LAKIP, LKPJ, LPPD, dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Kesejahteraan Petani		
	1. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya magang bagi petani/pelaku agribisnis dan petugas 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlatihnya petani/pelaku agribisnis sebanyak 150 orang;

		<ul style="list-style-type: none"> untuk 10 orang; - Terlaksananya pelatihan bagi petani/pelaku agribisnis untuk 150 orang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengetahuan dan pengalaman petani/pelaku agribisnis sebanyak 10 orang.
	2. Penyuluhan dan pendamping petani dan pelaku agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tenaga kontrak pendamping lapangan 10 orang; - Terlaksananya Penyuluhan dan Pendampingan Petani Program Revitalisasi Perkebunan 2 kegiatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya data calon peserta revitalisasi; - Terciptanya program revitalisasi yang sesuai petunjuk
	3. Peningkatan kemampuan lembaga petani	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya temu usaha antar petani perkebunan 40 orang; - Terlaksananya lomba petani tingkat kabupaten 1 kali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjalinnnya hubungan sosial dan kerja antar asosiasi petani perkebunan 40 orang; - Terpilihnya petani dan kelompok tani perkebunan yang berprestasi 1 petani/kelompok.
6.	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan		
	1. Penyusunan data base potensi produk pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Pengumpulan dan Pelaporan Angka Statistik Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar di 6 Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terkumpulnya dan Terlaporkanya Angka Statistik Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Besar yang ada di KOBAR di 6 kecamatan -
	2. Pengembangan diversifikasi tanaman	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pengadaan benih jarak pagar untuk demplot 30 kg; - Terlaksananya pengadaan Bibit Lada 16.000 pokok 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya demplot komoditi jarak pagar 5 ha; - Bertambahnya luas areal lada 10 ha
	3. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya pertemuan Perlindungan Tanaman 50 orang; - Terlaksananya pendataan serangan OPT dan kebakaran lahan 6 kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan hasil produksi perkebunan 5%; - Tersedianya data serangan OPT dan kebakaran lahan 6 kecamatan
	4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya Monitoring Kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 6 kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersusunnya laporan hasil evaluasi 4 kegiatan. -
7.	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan		

	1. Promosi atas hasil produksi pertanian / perkebunan unggul daerah	- Terlaksananya keikutsertaan pameran pembangunan 5 kali.	- Terciptanya jaringan pemasaran produk perkebunan 3 produk
	2. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian / perkebunan	- Terlaksananya pengolahan informasi pasar untuk produk-produk perkebunan melalui PIP 6 kecamatan; - Terlaksananya Penetapan harga TBS setiap bulan - Terlaksananya sosialisasi SNI Bokar Anjuran 3 lokasi	- Tersedianya informasi pasar produk-produk perkebunan masyarakat 7 komoditi; - Meningkatnya pengetahuan petani dalam meningkatkan kualitas produk 40 orang.
8.	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		
	1. Penyuluhan penerapan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna	- Terlaksananya kegiatan demo cara PLTB untuk pencegahan kebakaran lahan 6 lokasi; - Terlaksananya kegiatan demo cara pengendalian OPT dengan menggunakan agensia hayati 6 lokasi.	- Bertambahnya pengetahuan petani dalam kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar 180 peserta; - Bertambahnya pengetahuan petani dalam kegiatan pengendalian OPT dengan agensia hayati 180 orang peserta.
9.	Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan		
	1. Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan	- Terlaksananya Perluasan Areal Karet Rakyat 120 ha; - Terlaksananya Perluasan Areal Karet Kebun Desa 100 ha; - Terlaksananya Perluasan Kelapa Sawit Rakyat 70 ha; - Terlaksananya Perluasan Kelapa Sawit Kebun Desa 25 ha; - Terlaksananya Pengembangan Kelapa Sawit Pekarangan 6 kecamatan - Terlaksananya Perluasan Karet Rakyat dana Sharing APBN 135 ha; - Terlaksananya Perluasan Karet Rakyat dana Sharing APBD I 200 ha.	- Bertambahnya luas areal karet rakyat seluas 455 ha; - Bertambahnya luas areal karet kebun desa 100 ha; - Bertambahnya luas areal kelapa sawit rakyat 70 ha; - Bertambahnya luas areal kelapa sawit kebun desa 25 ha.

1.4. Bidang Kehutanan;

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat dilaksanakan, melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009.

Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 8 (Delapan) program dan 33 (Tiga Puluh Tiga) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Kehutanan				
1.	Peningkatan Pembangunan Sektor Kehutanan dalam rangka menunjang ekspor komoditi non migas.	Ekonomi Kehutanan	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
2.	Peningkatan Pembangunan Sektor perdagangan dan industri yang mengolah hasil kehutanan			2. Penyediaan jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
3.	Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat menjamin peningkatan pendapatan bagi masyarakat dan mengurangi disparitas pendapatan bagi masyarakat.			3. Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor
			4. Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	
			5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	
			6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	
			7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	
			8. Penyediaan Alat Tulis Kantor	
			9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			11. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	
			12. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			14. Penyediaan Makanan dan Minuman	
			15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah.	
			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Pembangunan Gedung Kantor
				2. Pemeliharaan Rutin/Berkala

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			Aparatur :	Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
			3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
			4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :	1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
			6. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan :	1. Perencanaan & Pengembangan Hutan Masyarakat 2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 3. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 4. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 5. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan
			7. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan :	1. Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi & Penghijauan Hutan 2. Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri & Hutan Wisata 3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan & Lahan
			8. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan :	1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan 2. Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan

1.5. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas / Badan yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009.

Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 1 (satu) program dan 1(satu) kegiatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Sekretariat Daerah				
1	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan pertambangan dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pertambangan	Fungsi : Ekonomi Sub Fungsi : Pertambangan	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

1.6. Bidang Pariwisata;

Pada tahun 2009 melaksanakan untuk urusan pilihan yaitu bidang pariwisata mempunyai 9 (sembilan) program dan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel dibawah ini :

Prioritas Pembangunan, Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
1.	Peningkatan Pembangunan Sektor Pariwisata	Pariwisata/ Pengembangan Pariwisata	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12. Penyediaan Makanan dan Minuman 13. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 14. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.			2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	15. Pengadaan Perlengkapan Kantor 16. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 17. Pengadaan Meubeleur 18. Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
3.			3. Peningkatan Disiplin Aparatur	19. Belanja Pakaian Dinas Harian

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
4.			4. Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	20. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
5.			5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
6.			6. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 24. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
7.			7. Pengembangan Pemasaran Wisata	25. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pemasaran Pariwisata 26. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 27. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu
8.			8. Pengembangan Destinasi Pariwisata	28. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 29. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
9.			9. Pengembangan Kemitraan	30. Pengembangan dan penguatan, informasi dan database 31. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 32. Fasilitasi pembentukan 224ndus komunikasi antar pelaku 224ndustria pariwisata dan budaya 33. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

1.7. Bidang Perdagangan

Pada tahun 2009 penyelenggaraan urusan pilihan di bidang perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM dan Pasar, dan Dinas Perindustrian Perdagangan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel dibawah ini :

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Koperasi UKM dan Pasar				
			1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	1. Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
			2. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	2. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan 3. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
			1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 4. operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
			2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	5. Penganbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
				6. Pengembangan data base informasi potensi unggulan
			6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	7. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 8. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

1.8. Bidang Industri;

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat, dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2009.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan 7 (Tujuh) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan, dengan penjelasan rincian terdapat pada tabel sebagai berikut :

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Perindustrian dan Perdagangan				
	Peningkatan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang mengolah hasil pertanian, kehutanan dan pertambangan. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang dapat	Fungsi : Ekonomi Sub Fungsi : Industri dan Perdagangan	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
	menjamin peningkatan disparitas pendapatan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah.			kantor 6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7. Penyediaan alat tulis kantor 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
			2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
			3. Program peningkatan disiplin aparatur	15. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
			4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	16. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
			5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18. Penyusunan laporan keuangan semesteran 19. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
			6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	20. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
			7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	21. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

1.9. Bidang Ketransmigrasian.

Untuk merealisasikan Misi Pemerintah Daerah maupun Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat yang telah disepakati dan berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 melaksanakan program dan kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut :

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Fungsi Sub Fungsi	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5
Dinas Nakertrans				
1.	Mengatasi kemiskinan dan Mendukung Ketahanan Pangan serta memperkecil kesenjangan pertumbuhan antar kawasan.	Peningkatan Produksi Pangan	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	- Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1.1.1. kelautan dan perikanan;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Kelautan dan Perikanan			
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.	1. Terkirimnya surat beserta lampirannya	100

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2. Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon untuk keperluan kantor	100
	4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3. Terbayarnya KIR Mobil Pick Up Kantor, pajak kendaraan roda 4 (mobil), dan roda 2	98,31
	5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4. Tersedianya tenaga administrasi keuangan dan terlaksananya administrasi keuangan	100
	6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	5. Tersedianya peralatan kebersihan kantor	100
	7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6. Terlaksananya perbaikan mesin potong rumput, mesin tik, komputer dan laptop	89,58
	8. Penyediaan Alat Tulis Kantor	7. Tersedianya alat tulis (ATK) untuk kegiatan kantor	100
	9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100
	10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	9. Tersedianya komponen listrik dan elektronik untuk kegiatan kantor	100
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100
	11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11. Tersediannya bendera umbul-umbul, bendera dan Tirai	100
	12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12. Tersediannya bahan bacaan dan acuan dalam bentuk peraturan perundang-undangan	100
	13. Penyediaan Makanan dan Minuman	13. Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat	84,62
	14. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	14. Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	15. Pembangunan Gedung Kantor	15. Tersedianya Plang Kantor dan Dharma Wanita	100
	16. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	16. Tersedianya Tower penyimpan air	100
	17. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	17. Tersediannya almari arsip	100
	18. Pengadaan Mubelair	18. Tersedianya mebeleur untuk perlengkapan kantor	100
	19. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	19. Terpeliharaan gedung kantor, BBI, BBU dan PPI	99,36
	20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan	20. Terpeliharanya motor,	90

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	Dinas/ Operasional	mobil, speed boad dan kelotok inventaris	
	21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	21. Terpeliharaan Peralatan gedung kantor dinas	100
	22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	22. Terpeliharaanya Meja dan Kursi kantor	-
III	Peningkatan Disiplin Aparatur		
	23. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	23. Tersediannya pakaian dinas dan perlengkapannya	100
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
	24. Pendidikan dan Pelatihan Formal	24. Terlatihnya pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan	83,15
V	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
	25. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25. Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	100
	26. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	26. Tersusunnya laporan keuangan semesteran	100
	27. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	27. Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	100
VI	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		
	28. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	28. Tersedianya Tenaga Pendamping Desa, Jaring Telang, Jaring Kantong, Jaring Kepiting, Jaring benang Hijau ukuran 1 inchi dan Kartu Nelayan	100
VII	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan		
	29. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan	29. Tersedianya jaring lingkaran dan pakan ikan untuk pokmaswas, Pengawasan perikanan, pukat/jaring lais, jaring ingsang dan kelotok nelayan sungai	93,61
VII I	Pengembangan Budidaya Perikanan		
	30. Pengembangan bibit unggul	30. Tersedianya induk udang, induk bandeng, induk ikan jelawat, patin gurame, lele, bahan obat-obatan, pakan benih ikan/ udang induk ikan/udang dan pakan pembesaran udang	92,52

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	31. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	31. Tersedianya bibit ikan, unit keramba/jaring apung dan kolam lengkap dengan saprodi, dokumen statistik dan Pembinaan kelompok pembudidaya	89,49
	32. Pembinaan dan pengembangan perikanan	32. Terehabnya kolam air deras, saluran pembuangan, terbangunnya UPR ikan air tawar dan pagar, gapura BBI	100
IX	Pengembangan Perikanan Tangkap 33. Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	33. Tersedianya kapal perikanan lengkap mesin dan alat navigasi, tersedianya klotok 5 GT, alat tangkap ikan gill net 5,5 inch, gill net 4 inchi, fish finder dan sarana dan prasarana pendukung proses pelelangan ikan serta SDM penyelenggaraan pelelangan ikan di PPI kumai	100
X	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 34. Peningkatan sarana dan prasarana rantai dingin produk perikanan 35. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan tradisional	34. Tersedianya unit kios pasar ikan dan unit peralatan kios pasar ikan 35. Tersedianya leaflet hasil-hasil pengolahan perikanan unit oven dan mesin pembuat pakan pengering ikan dan presto serta pengasapan, unit pengolah amplang dan unit penjemuran rumput laut	100 94,82

2.2. Bidang Pertanian;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Pertanian dan Peternakan			
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1. Pembangunan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 3. Pengadaan Meubelair 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terbangunnya gedung kantor Tersedianya peralatan kantor Tersedianya meubelair Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100 100 100 100 100 100
2	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis	100
3	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 3. Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija 4. Pengembangan Perbenihan dan Perbibitan 5. Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanian dan Infrastruktur Pertanian dan Perdesaan 6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan data base potensi produk pangan Terlaksananya penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Terlaksananya pengembangan intensifikasi padi dan palawija Terlaksananya pengembangan perbenihan dan perbibitan Terlaksananya koordinasi penyusunan program/kegiatan Distanak 2009 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	100 85,290 99,417 100 100 100

No	Program/Kegiatan	Sasaran kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
4	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian	Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan alat mesin pertanian	99,890
5	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	Tersedianya sarana produksi pertanian	98,337
6	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK 1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 2. Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah	Terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	94,140
		Terlaksananya pengawasan perdagangan ternak antar daerah	94,940
7	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1. Pembibitan dan Perawatan Ternak 2. Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 3. Pengembangan Agribisnis Peternakan 4. Penyediaan Sarana Produksi Peternakan	Terlaksananya pembibitan dan perawatan ternak	99, 930
		Terlaksananya pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	100
		Terlaksananya pengembangan agribisnis peternakan	100
		Tersedianya sarana produksi peternakan	100
JUMLAH			99,228

2.2. Bidang Perkebunan;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Program	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pencapaian Target (%)
1	2	3
Dinas Perkebunan		
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Surat menyurat	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	100
	3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100

Program	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pencapaian Target (%)
1	2	3
	4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100
	5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100
	6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	100
	7. Penyediaan Alat Tulis Kantor	100
	8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100
	11. Penyediaan peralatan rumah tangga kantor	100
	12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	100
	13. Penyediaan makan dan minuman	100
	14. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor	
	a. Pembuatan Parit	100
	b. Pengurukan Tanah Halaman Kantor	100
	c. Sekat Ruang Kadis dan Sekretaris	100
	d. Tempat Parkir	100
	e. Penanaman Lampu Tanam	
	Rata-rata	100
	2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	100
	Pengadaan alat angkutan darat Roda 2 (dua)	100
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	100
	Rata - rata	100
III. Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakian Dinas dan Perlengkapannya	
	Pengadaan pakaian dinas	100
	Rata - rata	100
IV. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	71,34
	Rata - rata	100
V. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaSKPD	100
	2. Penyusunan laporan keuangan smester	100
	3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	100
	Rata - rata	100
VI. Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	
	2. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	100
	3. PeningkatanKemampuan Kelembagaan	100
	Rata-rata	80
VII. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	1. Penyusunan Data Base Potensi Prod. Pangan	
	Pengumpulan dan pelaporan angka statistik PR dan PBS/N	100
	2. Pengembangan Diversifikasi Tanaman	
	a. Perluasan areal komoditi Lada Tahan Busuk Pangkal Batang 10 Ha	100
	b. Demplot Tanaman Jarak Pagar di 6 Kecamatan	100
	3. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian	

Program	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pencapaian Target (%)
1	2	3
	Pertemuan Pengendalian Perlindungan bagi petugas penyuluh lapangan, Camat dan Perusahaan Perkebunan	100
	4. Monitoring dan Evaluasi	
	Pelaksanaan Monev Program Ketahanan Pangan	100
	Rata-rata	100
VIII. Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian/ Perkebunan	1. Promosi atas hasil produksi pertanian/Perkebunan unggul daerah	
	1) Mengikuti pameran di 5 tempat Penyelenggaraan	100
	2) Rapat penetapan harga TBS	
	Rata-rata	100
IX. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan	
	- Sosialisasi cara-cara pengendalian OPT, Pembukaan lahan tanpa bakar dan pengendalian kebakaran lahan	100
	Rata-rata	100
X. Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/ Perkebunan	
	a. Penyediaan bibit untuk Perluasan Kebun Rakyat Karet 100 Ha beserta Sarana Produksi (pupuk PMLT dan Herbisida) dan bantuan biaya persiapan lahan.	100
	b. Penyediaan bibit untuk Perluasan Kebun Desa Karet 100 Ha beserta Sarana produksi (pupuk PMLT dan Herbisida) dan bantuan biaya persiapan lahan	100
	c. Penyediaan bibit untuk Perluasan Kebun Rakyat Kelapa Sawit 50 Ha beserta Sarana produksi (pupuk PMLT dan Herbisida) dan bantuan biaya persiapan lahan.	100
	d. Penyediaan bibit untuk perluasan Kebun Desa Kelapa Sawit 25 Ha beserta sarana produksi (pupuk PMLT dan Herbisida) dan bantuan biaya Persiapan lahan	100
	e. Penyediaan bibit untuk Penanaman Sawit Pekarangan 25.000 pohon dan Geber MLT 2.500 pohon	100
	f. Bantuan biaya persiapan lahan untuk perluasan karet dari APBD I dan APBN 250 Ha	100
	g. Penyediaan Bantuan Pupuk PMLT dan Herbisida untuk pemeliharaan kebun Desa Karet TA 2006 dan 2007 seluas 145 Ha	100
	h. Penyediaan Bantuan Pupuk PMLT dan Herbisida untuk pemeliharaan kebun Desa Kelapa Sawit TA 2008 seluas 50 Ha	100
	2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	

Program	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Pencapaian Target (%)
1	2	3
	a. Penyediaan Kebun Entrys seluas 7 Ha di dua lokasi	100
	b. Penyediaan Blok Penghasil Tinggi	100
	3. Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan	
	Pembuatan peta sebaran kebun desa di 6 kecamatan sebagai bahan kebijakan pencegahan alih fungsilahan	100
	4. Monitoring dan Evaluasi	
	Pelaksanaan Monev Program Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	100

2.3. Bidang Kehutanan;

Dalam Tahun 2008 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Kehutanan			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :		
1.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	1. Tersedianya prasarana surat menyurat yang mendukung kelancaran surat menyurat yang efektif dan efisien.	36,49
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	2. Terlaksananya kebutuhan komunikasi, listrik, surat kabar dan pengumuman lelang.	47,05
3.	Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	3. Terpeliharanya Peralatan & Perlengkapan Kantor	25,11
4.	Penyediaan Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional	4. Terlaksananya pengurusan/ perijinan kendaraan operasional.	52,85
5.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	5. Terlaksananya administrasi keuangan dalam pelaksanaan DPA-SKPD TA. 2008.	97,23
6.	Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	6. Terlaksananya kegiatan kebersihan halaman, ruang kantor dan sekitarnya serta keamanannya.	81,31
7.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	7. Peralatan kerja yang mengalami kerusakan diservis serta perawatan rutin peralatan yang perlu dirawat.	37,17
8.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	8. Tersedianya alat tulis kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas.	98,93

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9. Tersedianya barang cetak dan jasa pengadaan pada Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat.	90,49
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10. Tersedianya bahan untuk penerangan ruang kantor dan sekitarnya.	98,32
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.	75,00
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12. Tersedianya alat kebersihan dan peralatan dapur.	96,78
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13. Tersedianya bahan bacaan peraturan perundang-undangan.	33,33
14.	Penyediaan Makanan dan Minuman	14. Tersedianya makan dan minum harian pegawai dan rapat.	89,40
15.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah.	15. Terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi & konsultasi baik keluar daerah maupun didalam daerah.	90,67
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana:		
1.	Pembangunan Gedung Kantor	1. Tersedianya parit samping pagar Dishut, Paving, Jalan titian Pos Arut, jalan titian pos Kumai, garasi mobil Roda Empat, tempat Parkir Roda Dua.	100,00
2.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2. Terlaksananya pengecatan rutin gedung kantor	96,87
3.	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	3. Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	81,33
III.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	1. Tersedianya pakaian dinas harian PNS dan POLHUT	99,32
IV.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
1.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	1. Tersedianya SDM yang memiliki keahlian dibidang tertentu yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.	30,90
V.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD	1. Tersedianya pelaporan kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	100,00
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	2. Tersedianya laporan keuangan semesteran	100,00
3.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	100,00

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
VI.	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		
1.	Perencanaan & Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	1. Terpeliharanya HR dari Kegiatan GERHAN (2004 s/d2006)	96,06
2.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan	2. Tercapainya peningkatan pengawasan pengelolaan perusahaan hutan	21,56
3.	Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan	3. Penatausahaan hasil hutan berjalan dengan baik serta penerimaan negara/daerah terkontrol	85,57
4.	Pengembangan, Pengujian dan Pengendalian peredaran Hasil Hutan	4. Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang lestari	53,79
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	5. Tercapainya monitoring dan evaluasi terhadap HTI dan kegiatan DAK-DR tahun 2009	7,00
VII.	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)		
1.	Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi & Penghijauan Hutan	1. Tertunjangnya Kegiatan Reboisasi & Penghijauan	12,16
2.	Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri & Hutan Wisata	2. Terbentuknya Hutan Kota	0,96
3.	Peningkatan Peran serta Masyarakat & Rehabilitasi Hutan & Lahan	3. Terpeliharanya Hutan Rakyat	13,37
VIII.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan		
1.	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.	1. Terkendalinya kebakaran hutan dan lahan melalui upaya pencegahan dan pemadaman	74,44
2.	Penanggulangan Kebakaran hutan & Lahan	2. Tercapainya Penanggulangan Kebakaran Hutan & Lahan	75,18

2.4. Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Realisasi
1	2	3	4
Sekretariat Daerah			
1.	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan		83,34 %
	Kegiatan Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	1. Melaksanakan penyuluhan pertambangan di Desa Sungai Sekonyer Kec.Kumai 2. Melaksanakan Pembinaan dan penertiban pertambangan di 6 kecamatan	83,34 %

2.5. Bidang Pariwisata;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan urusan Pilihan adalah sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Belanja Pengiriman Paket	100 % 0 %
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Belanja Biaya Telepon - Belanja Biaya Air - Belanja Biaya Listrik - Belanja Jasa Pengumuman - Belanja Biaya Langganan Surat Kabar - Belanja Biaya Internet	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
	c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Belanja Pemeliharaan Mesin Tik - Belanja Pemeliharaan AC - Belanja Pemeliharaan Mesin Potong Rumput - Belanja Pemeliharaan Komputer - Belanja Pemeliharaan Meja Kerja - Belanja Pemeliharaan Kursi Kerja - Belanja Pemeliharaan Kursi Tamu	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	d. Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Petugas/ Peguji SPM - Honorarium Bendahara Penerima - Honorarium Bendahara Pengeluaran - Honorarium Staf Pengelola Keuangan - Honorarium Pengguna Anggaran - Honorarium Pemegang Barang - Honorarium Pengurus Barang - Honorarium Pembuat Daftar Gaji - Honorarium Panitia Lelang - Belanja Jasa Transaksi Keuangan : buku cek, jasa bank, materai 6.000, materai 3.000 	<p>100 %</p>
	e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Honorarium Pegawai Honorer/ tidak tetap - Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan pembersih 	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
	f. Penyediaan A T K	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Alat Tulis Kantor 	<p>100 %</p>
	g. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan 	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
	h. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Peningkatan Bangunan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 	<p>100 %</p>
	i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 	<p>100 %</p>
	j. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Pengadaa Buku/ Kepustakaan 	<p>100 %</p>
	k. Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 	<p>100 %</p>
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	a. Pengadaan Perlengkapan Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Pembuatan Umbul-Umbul Bendera beserta tiang 	<p>100 %</p>
	b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Pengadaan White Board - Pembelian Papan Tulis Kegiatan Kantor - Belanja Modal Pengadaan Sound System Istana Kuning 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
	c. Pengadaan Meubeleurn	<ul style="list-style-type: none"> - Belanja Modal Pengadaan Lemari Vitrin - Belanja Modal Pembelian Filling Kabinet 4 laci 	<p>100 %</p> <p>100 %</p>
	d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	<ul style="list-style-type: none"> - Rehab Instalasi Listrik Kantor - Biaya Perbaikan dan Pengecatan Pagar Kantor dan Gedung Kantor - Biaya Perawatan Taman di Halaman Kantor 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
		- Biaya Pemeliharaan &Pengecatan Gedung Kantor	100 %
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Belanja Pakaian Dinas Harian	100 %
4.	Program Fasilitas Pindah/ Purna Tugas PNS/ Pemulangan Pegawai yang Pensiun	- Belanja Pemulangan Pegawai yang Pensiun Luar Daerah	100 %
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - Belanja Kursus-Kursus singkat/ Pelatihan	42,79 % 6,79 %
6.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun c. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	- Uang Lembur PNS - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Cetak - Belanja Penggandaan - Uang Lembur PNS - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Penggandaan - Uang Lembur PNS - Belanja Alat Tulis Kantor - Belanja Penggandaan	50 % 100 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 0 % 100 % 100 %
7.	Program Pengembangan Pemasaran Wisata a. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata b. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata c. Pengembangan Jaringan Kerja sama Promosi Pariwisata	- Pembuatan Laporan/ Buku Penelitian/ Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Pariwisata Kotawaringin Barat - Pembuatan Peta Wisata Kotawaringin Barat - Pembuatan Web Site Pariwisata Kotawaringin Barat - Pembuatan Paket Wisata Kobar kerjasama dengan Pihak/ Asosiasi Kepariwisata di daerah lain	100 % 100 % 100 % 0 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	d. Koordinasi dengan Sektor Pendukung Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Pokja Kepariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 - Lumpsum Perjalanan Dinas Penyuluhan Sadar Wisata/ Sapta Pesona Wisata ke Kec. Kumai, Ktw. Lama, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada dan Arut Utara - Transport Perjalanan Dinas Penyuluhan Sadar Wisata/ Sapta Pesona Wisata ke Kec. Kumai, Ktw. Lama, Pangkalan Banteng, Pangkalan Lada dan Arut Utara - Penyelenggaraan Penyuluhan Sadar Wisata/ Sapta Pesona Wisata di 6 Kecamatan 	<p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p> <p>100 %</p>
	e. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan Famplet dan Leaflet Peta Wisata Kotawaringin Barat sebanyak 1000 lembar - Pembuatan Booklet Pesona dan Potensi Wisata Kotawaringin Barat versi 3 bahasa sebanyak 1000 lembar - Penerbitan Buletin Wisata Kotawaringin Barat sebanyak 100 exemplar - Pembuatan Banner Pariwisata Kotawaringin Barat sebanyak 50 buah - Pembuatan Baliho Pariwisata Kotawaringin Barat sebanyak 1 buah - Pengadaan Lukisan Raja-raja Kutaringin sebanyak 14 buah - Mengikuti Festival/ Pameran/ Expo di Propinsi lain (Mengikuti PRJ, TEI, INVESDA EXPO, dan Pesona Solo Raya) - Mengikuti Rakon WTW di Pontianak - Kalbar. - Sail Indonesia 2009 (Mengikuti Technical Meeting dan Pelepasan Sail Indonesia 2009 di Darwin Australia serta mengadakan pesta penyambutan peserta Sail Indonesia 2009 di Kabupaten Kotawaringin Barat) - Menyelenggarakan Pagelaran Seni/ Gebyar Wisata Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 (tanggal 16 Mei 2009, 9 Juni 2009, 19 Juni 2009, 18-20 Agustus 2009, 22 September 2009, 4 Oktober 2009) - Menyelenggarakan Paket Promosi Wisata (Calender Event of Tourism) HUT Kotawaringin Barat Tahun 2009 - Mengikuti Borneo Extravaganza di Pontianak 	<p>100 %</p>

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	f. Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu	Kalimantan Barat, Travel Mart Pariwisata (di Kuching dan Serawak Malaysia dan Propinsi Bali) - Menyelenggarakan Bimtek dan Standarisasi bagi Pemandu Wisata Kotawaringin Barat - Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Koordinasi dan konsultasi Kegiatan Bimtek Pemandu Wisata	100 % 100 %
8.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan	- Pembuatan SID Potensi Obyek Wisata Kotawaringin Barat - Perjalanan Dinas dalam rangka Inventarisasi, monitoring dan pemungutan PAD Sektor Pariwisata - Pemeliharaan Monumen Palagan Sambi Pangkalan Bun	100 % 100 % 100 %
	b. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	- Pembangunan Kolam Bermain Anak-anak di Obyek Wisata Pantai Kubu (sebelah barat) - Pengadaan Instalasi Listrik dan Penerangan Lampu Hias di sekitar Lokasi Obyek Wisata Pantai Kubu sebelah Barat dan Anjungan Dermaga Wisata - Pembangunan Rumah Meriam di Kubu - Pembangunan Balai Upacara di Obyek Wisata Patih Mambang Desa Keraya - Penimbunan dan Penambahan Timbunan Jalan Lokasi Obyek Wisata Pantai Kubu (sebelah Barat) - Penataan di Lokasi Obyek Wisata Desa Sebuai (2 bh Shelter, 2 bh WC umum dan 1 bh Sumur Gali) - Pembangunan Fasilitas Gedung Dermaga Pariwisata di Kumai Hulu - Pembangunan Rumah Penjaga Type 45 di Lokasi Obyek Wisata Danau Gatal Kec. Ktw. Lama - Pembuatan Pagar di Lokasi Obyek Wisata Pantai Kubu (sebelah Barat) tahap ke-2 - Rehab Pintu Gerbang Masuk Obyek Wisata Bugamraya - Pembangunan Ruang Ganti Pakaian di Obyek Wisata Pantai Kubu Kumai - Perencanaan Teknis - Pengawasan Teknis	100 % 100 % 100 % 100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
9.	Program Pengembangan Kemitraan		
	a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	- Pembuatan Kobong dan Ornamen Kobar bagi Getek Wisata - Pembuatan Ornamen Kobar bagi Kelotok Wisata	100 % 100 %

2.6. Bidang Industri;

Dalam Tahun 2009 Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		86,44
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	1. Tercapainya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan	71,00
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2. Tercapainya prosentase kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor dalam 1 tahun	39,18
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3. Kelancaran tugas operasional dilapangan dapat teratasi dengan baik	94,08
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	4. Tercapainya prosentase administrasi penatusahaan keuangan dalam 1 tahun	99,90
	5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	5. Tercapainya prosentase pegawai yang betah dan bersemangat melaksanakan kerja secara maksimal	90,58
	6. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6. Pekerjaan perkantoran dapat diselesaikan dengan baik dan lancar ditunjang dengan peralatan yang baik.	71,42
	7. Penyediaan alat tulis kantor	7. Kelancaran tugas Kantor dapat berjalan dengan baik	100,00
	8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8. Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk mendukung kelancaran kegiatan kantor	99,96

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9. Tercapainya prosentase pekerjaan yang dapat diselesaikan karena tersedianya penerangan kantor dalam 1 tahun	100,00
	10. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	10. Meningkatnya kinerja aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan kantor	99,22
	11. Penyediaan makanan dan minuman	11. Makanan dan minuman yang tersedia dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pegawai di kantor	82,85
	12. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12. Tercapainya koordinasi yang baik antara daerah dengan propinsi dan antara daerah dengan pusat	99,36
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		99,79
	13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	13. Terpeliharanya/terawatnya gedung kantor dalam 1 tahun sesuai yang direncanakan	100,00
	14. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14. Tersedianya Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas	99,70
	Program peningkatan disiplin aparatur		100
	15. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	15. Semua pegawai dapat memakai pakaian dinas pada setiap hari kerja	100
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		49,69
	16. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	16. Pengetahuan dan kemampuan SDM pegawai meningkat sesuai dengan bidang tugas masing-masing	49,69
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		98,60
	17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	17. Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dapat diselesaikan tepat waktu	97,90
	18. Penyusunan laporan keuangan semesteran	18. Laporan keuangan semesteran dapat diselesaikan tepat waktu	97,90
	19. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	19. Laporan Keuangan akhir tahun dapat diselesaikan tepat waktu	100,00
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		95,47
	1. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	20. Kemampuan menjalin kemitraan usaha meningkat dan mampu menjalin hubungan kontak dagang	95,47

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
		dengan peserta dari daerah lain maupun pengunjung baik dlam negeri maupun manca negara	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		97,67
	2. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	21. Terbentuknya Kelompok Usaha Baru yang mampu memanfaatkan sumber daya alam lokal, bertambahnya keterampilan	97,67

2.7. Bidang perdagangan;

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
Dinas Koperasi UKM dan Pasar			
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		94,36
	1. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	- Terlaksananya penyuluhan perdagangan untuk meningkatkan SDM pelaku usaha perdagangan	94,36
	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan		85,55
	2. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan		89,93
	3. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan		57,18
Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		78,10
	1. Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	1. Kesadaran Konsumen memahami Aturan UU PK meningkat	89,43
	2. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	2. Kesadaran Konsumen dan Pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya meningkat	0,00
	3. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	3. Barang beredar di toko / pusat perbelanjaan sesuai K3LM	85,95
	4. operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgion daerah	4. Tercapainya standarisasi alat UTTP	67,18

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor		87,60
	5. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	5. Meningkatnya pemasaran produk Kotawaringin Barat ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri	91,04
	6. Pengembangan data base informasi potensi unggulan	6. Tersedianya Data Base Sektor Industri dan Perdagangan	76,94
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		99,51
	7. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	7. Ketercapaian Prosentase pedagang yang mampu mengembangkan pemasaran dan distribusi Barang	99,34
	8. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	8. Tersebaranya informasi pasar kepada masyarakat	99,72

2.8. Bidang ketransmigrasian.

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi - Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	- Tersedianya sarana dan prasarana dikawasan transmigrasi (Desa Babual Baboti, Sekonyer dan Penyombaan)	100 %

B.3. Permasalahan dan solusi**3.1. Bidang kelautan dan perikanan;****Permasalahan :**

Perikanan budidaya :

- Produktivitas lahan untuk menghasilkan ikan cenderung menurun
- Menurunnya kualitas perairan untuk budidaya udang
- Masih tingginya biaya produksi

Perikanan Tangkap

- Aktivitas Penangkapan secara ilegal seperti penggunaan Jaring Trawl.
- Konflik antara nelayan dan nelayan lain yang menyalahi jalur Penangkapan.
- Belum optimalnya pengelolaan ekonomi rumah tangga nelayan.

Solusi :

- Peningkatan Kegiatan Pembinaan Dan sarana Pengawasan.
- Pengontrolan Jumlah dan jenis Alat tangkap.
- Penyediaan Sarana penampungan dan pengolahan hasil tangkapan.
- Melakukan pengawasan jalur-jalur penangkapan ikan yang telah ditetapkan.
- Peningkatan Pengawasan Instansi Terkait Terhadap Pengelolaan Usaha Budidaya Perikanan.
- Peningkatan dukungan analisis data ilmiah yang berkaitan dengan Fruktuasi pola arus air laut dan kecenderungan sumber - sumber penyakit dalam budi daya tambak.
- Mengupayakan Sarana Produksi Produk lokal.

3.2. Bidang pertanian;

Permasalahan

1. Produktivitas padi dan palawija belum optimal sehingga sampai tahun 2009 belum mampu swasembada beras
2. Di beberapa wilayah sentra masih rawan terhadap serangan OPT dan terjadinya bencana alam berupa banjir.
3. Rendahnya tingkat pendapatan petani akibat biaya produksi yang tinggi, harga jual tidak kompetitif
4. Populasi dan Produksi ternak khususnya sapi potong belum mampu memenuhi kebutuhan daerah.
5. Kebutuhan ternak untuk konsumsi masyarakat masih tergantung dari luar daerah terutama Kalsel dan pulau Jawa. Tingkat kelahiran / produktivitas ternak masih rendah dengan skala usaha di tingkat peternak masih belum memenuhi skala ekonomis

Solusi

1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran bidang tanaman pangan dan hortikultura, langkah-langkah strategis yang dilaksanakan adalah :

- a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas usahatani melalui peningkatan mutu intensifikasi, penggunaan benih/bibit unggul bermutu, pemanfaatan alsintan, pemasyarakatan paket teknologi mulai pra produksi, proses produksi, pasca panen dan pengolahan hasil.
- b. Perluasan Areal Tanam

Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) 100 – 200 pada kawasan sentra persawahan, mengoptimalkan pemanfaatan sarana irigasi, melakukan gerakan aksi membuka lahan tidur dan pemanfaatan tanaman sela pada areal perkebunan melalui penyuluhan.
- c. Pengamanan Produksi

Antisipasi gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dengan Pengendalian Hama Terpadu (HPT) dan menggerakkan

peran serta masyarakat dalam pengendalian OPT melalui pembentukan regu pengendali hama ditingkat kelompok tani. Antasipasi terhadap perubahan iklim dengan memperkuat antisipasi agar kerusakan tanaman dapat dihindari.

d. **Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran.**

Peningkatan ketrampilan kelompok tani dalam penanganan pasca panen, pengolahan hasil melalui pelatihan dan demonstrasi. Memfasilitasi terlaksananya kemitraan antara petani selaku produsen dengan mitra usaha/swasta dalam menangani pemasaran.

e. **Pembinaan Kelembagaan.**

Meningkatkan peranan Penyuluh dan Kelompok Tani secara optimal dalam pembinaan usahatani. Optimalisasi kelembagaan terkait seperti UPJA, P3A maupun penangkar benih.

2. Bidang Peternakan

- a. Peningkatan populasi ternak dilakukan dengan peningkatan kelahiran melalui IB, peningkatan produksi dan produktivitas, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengendalian reproduksi, dan penyediaan bibit ternak.
- b. Substitusi jenis ternak potong melalui pengembangan jenis ternak potong lain dalam rangka penganeekaragaman sumber ternak potong.
- c. Pembinaan sumberdaya pakan melalui pembinaan mutu pakan, pemanfaatan pakan lokal dan pemanfaatan teknologi pakan ternak.
- d. Melakukan penyebaran ternak dengan pola pengembangan ternak betina.
- e. Pembinaan kelembagaan dan permodalan meliputi pemberdayaan kelembagaan kelompok tani, asosiasi peternak, dan penyediaan modal usaha melalui perbankan maupun lembaga permodalan lainnya.
- f. Pemasyarakatan teknologi tepat guna berbasis sumber daya lokal, spesifik lokal dan berhasil guna.
- g. Pelayanan kesehatan hewan untuk menekan tingkat kematian melalui pengobatan massal dan vaksinasi.

- h. Pencegahan dan pemberantasan penyakit ternak dan hewan menular melalui pengambilan spesimen, vaksinasi anti rabies, eliminasi anjing liar, dan pengawasan lalu lintas ternak.

3.3. Bidang Perkebunan

A. Permasalahan :

1. Belum terakomodirnya semua usulan masyarakat / kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam Pembangunan Perkebunan
2. Masih terbatasnya tenaga teknis perkebunan dan juga Pelatihan / magang khusus petani pekebun

B. Solusi :

1. Usulan masyarakat/kelompok masyarakat secara bertahap dapat diakomodir dan disesuaikan dengan kondisi dan kesesuaian lahan, Pagu Anggaran dan juga skala prioritas yang tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat ;
2. Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, tiap tahunnya telah menganggarkan dana untuk Pegawai Lingkup Dinas dan Petani Pekebun untuk mengikuti Diklat maupun magang dalam upaya peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan ;

3.4. Bidang kehutanan;

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan Tupoksi dan Kebijakan pada Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- a. Belum ditetapkannya peta padu serasi Kalimantan Tengah, sehingga kegiatan yang dananya bersumber dari Dana DAK-DR belum dapat dilaksanakan, karena sesuai aturan DAK- DR disebutkan bahwa kegiatan dilaksanakan di dalam kawasan hutan (60%) dan diluar kawasan hutan (40 %).
- b. Kurangnya data-data mengenai hasil kegiatan pengukuhan kawasan hutan (sementara/definitif) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- c. Kegiatan pembangunan hutan kota yang berlokasi di belakang kebun PKK Kobar belum dapat dilaksanakan karena masalah pembebasan lahan belum selesai.
- d. Kegiatan RHL terutama peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan yang bersumber dari dana DAK - DR belum dapat dilaksanakan karena perencanaan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang harus disusun secara berjenjang yang dimulai dari RTK RHL DAS, RPRHL, RTN RHL, sampai RK RHL belum ada. Adapun perencanaan Dasar berupa RTK RHL yang disusun oleh BP DAS Kahayan di Palangka Raya sampai akhir tahun belum ada, sedangkan perencanaan tersebut merupakan dasar untuk menyusun RPRHL, RTN RHL, sampai RK RHL.

Solusi dari permasalahan di atas antara lain :

- a. Peta Penunjukan Kawasan dan Perairan Propinsi Kalimantan Tengah agar segera disahkan dengan berkoordinasi dengan propinsi maupun pusat.
- b. Perlu penelusuran/pengadaan data - data mengenai kegiatan pengukuran kawasan hutan ke instansi terkait (Dinas Kehutanan Propinsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Departemen Kehutanan).
- c. Perlu segera penyelesaian pembebasan lahan lokasi hutan kota di desa Purbasari yang berada di belakang kebun PKK Kobar agar kegiatan dapat dilaksanakan pada tahun mendatang.
- d. Agar diselesaikannya RTK-RHL oleh BP DAS Kahayan sebagai dasar penyusunan RPRHL, RTN RHL, sampai RK RHL oleh Dishut yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan berupa reboisasi dan penanaman hutan rakyat.

3.5. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;

Permasalahan

1. Terbatasnya jumlah personil pengawasan dan pembinaan di lapangan terhadap pengusaha dan masyarakat penambang.
1. Terbatasnya sumber daya aparatur teknis di bidang pertambangan.
2. Belum tersedianya alat penunjang (peta, data, dan alat) kegiatan pertambangan.

Solusi

1. Melakukan koordinasi dengan Instansi / Badan / Dinas (Kesbangpollinmas, Kepolisian, Bapedalda, BPN, dan Kehutanan) untuk melakukan pengawasan.
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk pembinaan teknis di bidang pertambangan.

3.6. Bidang Pariwisata;

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menjalankan program dan kegiatan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya Perda yang berhubungan dengan Kepariwisata dan Kebudayaan.
- b. Rippda Kabupaten masih menggunakan Rippda tahun 2004 dan belum di Perdakan.
- c. Kualitas sumber daya aparatur belum memadai.
- d. Kegiatan promosi wisata di Kegiatan barang/jasa tidak dapat direalisasikan dikarenakan acuan proses kerjasama dan proses kontrak tidak ada didalam Peraturan Kepres 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan belum adanya agen perjalanan di daerah yang badan hukumnya lengkap sesuai persyaratan.
- e. Pelaksanaan fungsi koordinasi dan komunikasi belum optimal.

- f. Pendapatan Asli Daerah dari Obyek Wisata Taman Nasional Tanjung Puting tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak semua wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Barat menuju Obyek Wisata Taman Nasional Tanjung Puting.
- g. Pendapatan Asli Daerah dari Restribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa tidak dapat terpenuhi dikarenakan tidak semua Tempat Penginapan/Pesanggrahan / Villa melaporkan kembali ijin usaha yang sudah habis.
- h. Pendapatan Asli Daerah dari Restribusi Ijin Usaha Obyek dan Sarana Pariwisata terhadap Agen Perjalanan Wisata (APW) dan Biro Perjalanan Wisata (BPW)/Villa tidak dapat terpenuhi dikarenakan sebagian besar APW dan BPW tidak melaporkan kembali ijin usaha yang sudah habis.
- i. Tidak adanya aturan yang mengatur tentang sangsi hukum terhadap pelaku wisata dan penginapan yang tidak melaporkan dan mengurus ijin usaha yang masa berlakunya sudah habis.

Solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2009 sedang menginventarisasi lebih dahulu terhadap peraturan-peraturan yang ada, baik masa berlakunya sudah habis maupun yang belum ada dan melakukan penyusunan peraturan prosedur, pedoman kerja dan hubungan tata kerja.
- b. Mengalokasikan dana pembuatan RIPPDA pada tahun 2011 dikarenakan alokasi dana pada tahun 2010 belum teranggarkan.
- c. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur melalui diklat.
- d. Untuk Paket Promosi Wisata dengan daerah luar dianggarkan kembali pada tahun 2010 dengan melalui Upah Kerja terhadap Travel Agent di daerah promosi wisata.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas data bahan koordinasi dan komunikasi.
- f. Melakukan promosi terhadap Wisatawan Nusantara dan Manca Negara secara terus menerus setiap tahunnya agar mau berkunjung di TNTP sehingga dapat menambah PAD.

- g. Telah dilakukan penarikan secara jemput bola dan memberikan surat pemberitahuan mengenai masa berlakunya ijin pengelolaan, ternyata banyak penginapan yang sudah tidak beroperasi lagi.
- h. Telah memberikan surat pemberitahuan mengenai masa berlakunya ijin pengelolaan.
- i. Perlunya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati untuk mengatur perijinan bagi Penginapan/Villa/Pesanggrahan, Agen Perjalanan Wisata dan Biro Perjalanan Wisata serta perusahaan obyek, dan daya tarik wisata.

3.7. Bidang Industri;

Permasalahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Terbatasnya sarana transportasi Kendaraan operasional, khususnya roda 2 dan Roda 4
- b. Kurangnya tenaga terampil yang mempunyai keahlian khusus terhadap kinerja Bidang Indag dan ahli dalam pengolahan data base, dan lain – lain.
- c. Kurangnya tenaga Instruktur yang mempunyai keterampilan khusus untuk pembinaan pengusaha/perajin di sektor Indag.
- d. Keterampilan perajin masih terbatas, pengetahuan dalam mengelola usahanya masih dirasa kurang sehingga perlu peningkatan.
- e. Terbatasnya dana dalam rangka Penertiban Usaha Perdagangan terutama dalam Pengawasan Barang dan Jasa Beredar.
- f. Terbatasnya dana untuk membina industri terutama industri kecil dan menengah (IKM) agar lebih mampu bersaing dengan daerah lain.

Upaya untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi guna mencapai kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya maka langkah yang telah dan akan diambil antara lain:

- a. Menambah/mengadakan sarana pendukung yang masih dirasa perlu untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan.

- b. Mengirimkan/mengikutsertakan Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Pendidikan dan pelatihan teknis.
- c. Mengirimkan dan mengikutsertakan pengusaha/perajin dalam kegiatan bimbingan penyuluhan, diklat – diklat keterampilan, dan magang teknis.
- d. Lebih meningkatkan pelayanan kepada dunia usaha, baik dalam bidang perijinan maupun informasi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- e. Penyediaan dana yang memadai, berkesinambungan, dan konsisten sehingga pembinaan kepada dunia usaha dapat dijalankan terus - menerus secara menyeluruh dan bukan bersifat parsial.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2009, terdiri dari 7 (tujuh) Bidang, 15 (lima belas) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 17.769.853.000,-. Gambaran secara lengkap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut ini :

1. Bidang Pertanian dan Peternakan

Tugas Pembantuan yang diterima tahun 2009 pada Satuan Kerja (Satker) Dinas Pertanian dan Peternakan berjumlah 3 (tiga) Program dengan total dana secara keseluruhan berjumlah Rp. 1.459.370.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Dalam pelaksanaannya, realisasi keuangan sebesar Rp. 1.339.902.500,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

1.1. Dasar Hukum

1. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 1777.0/018-03.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2009
2. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Nomor : 1777.0/018-08.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2009 Tanggal 02 Januari 2009
3. a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Nomor : 1777.0/018-07.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2009 Tanggal 02 Januari 2009

1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia.

1.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Dana Tugas Pembantuan

Personil pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2009 pada SKPD- Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

No.	Nama	Jabatan dalam Kegiatan	Jabatan dalam SKPD
1.	Ir. H. Akhmad Yadi	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Dinas
2.	Ir. Abdul Muis	PPK Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (DIPA Ditjen Tanaman Pangan)	Kepala Bidang Pengembangan Produksi Pertanian
3.	Ir. Poncoatmi Kastiyaningrum	PPK Program Peningkatan Ketahanan Pangan (DIPA Ditjen PLA)	Kepala Bidng Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian dan Peternakan
4.	Ir. Dwi Hartono Nugroho	PPK Program Pengembangan Agribisnis (DIPA Ditjen P2HP)	Kepala Bidang Pengembangan Produksi Peternakan
5.	Joise Afitriani, SP	Bendahara Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Kesejahteraan Petani (DIPA Ditjen Tanaman Pangan)	Pelaksana
6.	Agus Rahman	1. Bendahara Program Peningkatan Ketahanan Pangan (DIPA Ditjen PLA) 2. Pengolahan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Pelaksana
7.	Dede Marsus, A.Md	Bendahara Program Pengembangan Agribisnis (DIPA Ditjen P2HP)	Pelaksana

No.	Nama	Jabatan dalam Kegiatan	Jabatan dalam SKPD
8.	M. Natsir	Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan SPM	Kasubbag Keuangan
9.	Ratna Juwita	Petugas Verifikasi	Pelaksana
10.	Suwardiyono, SST	Petugas Verifikasi	Pelaksana
11.	Mulyadi	Petugas Pengolah Data Statistik	Pelaksana

1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan tahun 2009 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

No.	Program	Kegiatan	Lokasi
1.	Peningkatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan Benih/ Bibit Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan - Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen - Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian 	<p>Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan dan Desa Simpang Berambai Kecamatan P. Banteng</p> <p>-</p> <p>Desa Sei Bakau, Pangkalan Satu dan Kumai Hulu Kecamatan Kumai, Desa Kumpai Batu Bawah dan Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan</p>
2.	Peningkatan Kesejahteraan Petani	<ul style="list-style-type: none"> - Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis 	<p>Desa Kumpai Batu Bawah, Kumpai Batu Atas, Natai Baru, Tanjung Putri, Tanjung Terantang, Mendawai dan Baru Kecamatan Arut Selatan; Desa Pangkalan Satu, Sebuai, Kumai Hulu dan Candi Kecamatan Kumai; Desa Palih baru, Ipuh Bangun Jaya, Sagu Sukamulya, Sukajaya, Sumber Mukti, Rungun dan Kotawaringin Hilir</p>

No.	Program	Kegiatan	Lokasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Modal Usaha Kelompok - Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan - Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan 	<p>Kecamatan Kotawaringin Lama; Desa Natai Kerbau, Mulya Jadi dan Sido Mulyo Kecamatan Pangkalan Banteng serta Desa Makarti Jaya, Pangkalan Dewa dan Purbasari Kecamatan Pangkalan Lada.</p> <p>Sama dengan lokasi SL-PTT</p> <p>Kabupaten Kotawaringin Barat</p> <p>Kabupaten Kotawaringin Barat</p>
3.	Pengembangan Agribisnis	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan - Integrasi Tanaman, Ternak, Kompos dan Biogas 	<p>Desa Kumpai Batu Bawah Kecamatan Arut Selatan</p> <p>Desa Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng</p>

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran	Tingkat Capaian %
I.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN		
1.	Bantuan Benih/ Bibit Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan	Penangkaran Benih Padi 25 Ha dan Kedelai 25 Ha	100
2.	Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen	Bantuan Pembelian Tractor Roda 2 sebanyak 6 Unit	0
3.	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	Pengembangan JIUT 200 Ha, Pengembangan TAM 200 Ha dan Perluasan Areal Sawah 50 Ha	100

No.	Program / Kegiatan	Sasaran	Tingkat Capaian %
II.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI		
1.	Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis	Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Pelatihan PL III SL-PTT Padi 1 Kelas)	100
2.	Penguatan Modal Usaha Kelompok	Bantuan Padi Non Hibrida Untuk 100 Kelompok Tani (2.500 Ha)	100
3.	Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan	Pendampingan dan Pengawasan Teknis Kegiatan Selama 1 Tahun	100
4.	Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan	Administrasi Kegiatan dan Pemutakhiran Data Selama 1 Tahun	100
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS		
1.	Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Bantuan Alat Biogas Skala Rumah Tangga dan Sarana Pendukungnya 1 Paket	100
2.	Integrasi Tanaman, Ternak, Kompos dan Biogas	Bantuan Pembuatan Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik 1 Unit	100
	JUMLAH		94,80

1.5 Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dana Tugas Pembantuan (APBN) tahun 2009 sebesar Rp. 1.459.370.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah). Sampai dengan bulan Desember 2009 realisasi keuangan sebesar Rp. 1.339.902.500,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar 91,81% dengan sisa anggaran (saldo) sebesar Rp. 119.467.500,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah). Rekapitulasi realisasi anggaran Tugas Pembantuan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program / Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Realisasi	
			Keuangan (Rp)	%
I.	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	820.350.000,00	748.350.000,00	91,22
1.	Bantuan Benih/Bibit Sarana Produksi Pertanian dan Penguatan Kelembagaan Perbenihan	33.350.000,00	33.350.000,00	100
2.	Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen	72.000.000,00	0	0
3.	Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian	715.000.000,00	715.000.000,00	100
II.	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	354.020.000,00	341.135.000,00	96,36
1.	Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis	35.000.000,00	35.000.000,00	100
2.	Penguatan Modal Usaha Kelompok	264.500.000,00	261.855.000,00	99
3.	Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan	29.520.000,00	19.180.000,00	64,97
4.	Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan	25.000.000,00	25.000.000,00	100
III.	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	285.000.000,00	250.417.500,00	87,87
1.	Pengembangan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	85.000.000,00	85.000.000,00	100
2.	Integrasi Tanaman, Ternak, Kompos dan Biogas	200.000.000,00	165.417.000,00	82,71
	JUMLAH	1.459.370.000,00	1.339.902.500,00	91,81

1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2009 adalah pada pelaksanaan Kegiatan Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen, khususnya pada pembinaan dan

pengembangan alat mesin pertanian (bantuan pembelian tractor roda 2 sebanyak 6 (enam) unit) tidak dapat direalisasikan karena sampai akhir tahun anggaran 2009 tidak ada kelompok tani sasaran kegiatan (sesuai juknis kegiatan) yang dapat menyediakan dana tunai tambahan untuk pembelian tractor roda 2 tersebut. Solusi yang dilakukan adalah pengembalian anggaran dan pada tahun berikutnya pelaksanaan CP/CP secara lebih optimal.

2. Bidang Perikanan dan Kelautan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2009 kepada Dinas Kelautan dan Perikanan berjumlah 2 (dua) program dengan dana keseluruhan berjumlah 2.498.300.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan sebesar Rp. 492.000.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*) dan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) sebesar Rp. 2.006.300.000,- (*Dua Milyar Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).

2.1. Dasar Hukum

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor. 0685.0/032-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 untuk kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor. 0685.0/032-07/-/2009 tanggal 31 Desember 2008, DIPA Revisi Nomor. 0685.1/032-07.4/-/2009 tanggal 21 Mei 2009 dan DIPA Revisi Nomor. S-5716/PB/2009 Tanggal 17 September 2009

untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)

2.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) dan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP).

2.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dari Departemen Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dimana Personil Pelaksana Dana Tuga Pembantuan (TP) terdapat pada tabel sebagai berikut :

Susunan Personil Pelaksana Tugas Pembantuan

No.	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan TP	Jabatan di SKPD
	Kegiatan Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan		
1.	Ir. H. Chairil Anwar	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Ktw. Barat
2.	Ir. Kusmiyatun	Pejabat Pembuat Komitmen	Kabid Pengendalian Mutu dan Pemasaran
3.	John Heriono, S.Pi	Pejabat Penandatanganan SPM	Kasi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
4.	Khamdani Azmi, S.Pi	Bendahara Pengeluaran	Staf Seksi Penelitian, Pembinaan Usaha dan Penyuluhan
5.	Novitawati, S.Pi	Petugas SABMN/SAI	Staf Seksi Pengendalian Mutu Hasil Perikanan

No.	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan TP	Jabatan di SKPD
	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan Dan Masyarakat Pesisir. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.		
1.	Ir. H. Chairil Anwar	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Rudolf Dita, SP, M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen	Kab. Ktw. Barat Kabid Perikanan Tangkap
3.	Nunuk Indrayani, S.Pi	Pejabat Penguji SPP dan	Kasi Pengelolaan Sumberdaya Kelautan,
		Pejabat Penandatanganan SPM	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4.	Harliana, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Staf Subbag Keuangan
5.	Hj. Darhanianti Alba, S.Pi	Sekretariat	Kasi Pembinaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan
6.	Teguh Widi. A, S.Pi	Sekretariat	Kasi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
7.	Deby Setiawati, S.Pi	Sekretariat	Staf Seksi Pembinaan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan
8.	Libertus	Sekretariat	Staf Subbag Keuangan
9.	Bungas Wahyuda	Sekretariat	Staf Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
10.	Gst. Muhammad Sani	Sekretariat	Staf Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

2.4 Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

No	Program	Kegiatan	Lokasi
1.	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengelolaan Hasil Perikanan	TPI Kumai, Kumai Hilir, Sungai Bakau, Sei Kapitan, Kubu, Pasir Panjang dan Kec. Arut Selatan
2.	Pengembangan Sumber Daya Perikanan	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir (PNPM Mandiri KP). Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)	Kumai Hilir, Teluk Bogam, Keraya, Sabuai

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas pembantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2009 ditinjau dari tingkat pencapaian target secara akumulatif dicapai sebesar 97 % (sembilan puluh tujuh persen) dengan rincian pada tabel sebagai berikut :

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
1.	- Program Pengembangan sumberdaya Perikanan	1. Pengadaan alat pengolah data	100

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Tingkat Capaian (%)
2.	- Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan Berbasis Kemitraan dan Masyarakat	2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin	65
		3. Enumerator susut Hasil	100
		4. Pengembangan Produk Nilai Tambah Tinggi	100
		1. Fasilitasi Tenaga Pendamping Desa	100
	- Program Pengembanagn Sumber Daya Perikanan	2. Peningkatan Kapasitas Masyarakat	100
		3. Peningkatan Akses Kredit Mikro	100
	- Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah	100
		5. Sosialisasi Program	100
6. Publikasi Program		100	
7. Lokakarya Program		100	
		8. Bantuan Sosial (Bansos)	100
JUMLAH TINGKAT CAPAIAN			100

2.5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.498.300.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dimana realisasi anggaran sebesar Rp. 2.336.918.700,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) dan sisa anggaran sebesar Rp. 161.381.300,- (*Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh satu Ribu Tiga Ratus Rupiah*) dengan rincian penggunaan anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Selisih Anggaran (Rp)
			Fisik (%)	Keuangan		
				(Rp)	(%)	
1.	Kegiatan Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Pengolahan, Hasil Perikanan					
	a. Belanja Barang dan Jasa	78.150.000	100	73.793.700	94,43	4.356.300
	b. Belanja Modal	413.850.000	88,33	258.625.000	62,49	155.225.000
	JUMLAH	492.000.000	94	332.418.700	67,56	159.581.300
2.	- Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya Pelaku Usaha Perikanan Dan Masyarakat Pesisir					
	- Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM)					
	1. Belanja Barang dan Jasa	505.830.000	100	504.180.000	99,67	1.650.000
	2. Belanja Modal	30.000.000	100	29.850.000	99,5	150.0000
	3. Bantuan Sosial	1.470.470.000	100	1.470.470.000	100	Nihil
	JUMLAH	2.006.300.000	100	2.004.500.000	99,91	1.800.000

2.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan tidak ada permasalahan yang berarti.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat tidak ada permasalahan yang berarti.

3. Bidang Perkebunan

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Provinsi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun anggaran 2009 kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 3 (tiga) Program dengan dana secara keseluruhan berjumlah Rp.1.946.900,000,-

3.1. Dasar Hukum

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) T.A. 2009
- Nomor : 1291.0/018-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 (Ditjenbun)
- Nomor : 1291.0/018-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 (Ditjen PPHP)
- Nomor : 1291.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 (Ditjen PLA)

3.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun instansi yang memberikan alokasi dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Pertanian

3.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tuga Pemantuan dari Departemen Pertanian adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat dimana personil Pelaksana Dana Tugas Pemantuan (TP) terdapat pada tabel berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DLM KEGIATAN TP	JABATAN DLM SKPD
1	Ir. M. ROSIHAN PRIBADI, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	SUTOWO, SP	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA E-1 Ditjen Perkebunan	Kabid Usaha
3	EDY SUGITO, S.PKP	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA E-1 Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air	Kabid Kelembagaan, Sarana dan Prasarana
4	Ir. SUMIYATI	Pejabat Pembuat Komitmen DIPA E-1 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil
5	NORETI, SP	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (untuk DIPA E-1 Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian)	Kasi Pengendalian Mutu Hasil

NO.	NAMA	JABATAN DLM KEGIATAN TP	JABATAN DLM SKPD
6	MULYADI, SP	Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM (untuk DIPA E-1 Ditjen Perkebunan dan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air)	Pelaksana
7	SUPADMI	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana

3.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan yang diterima baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi adalah sebagaimana pada tabel berikut ini

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN
1.	2.	3.	4.
I	Pengembangan Agribisnis	1. Peremajaan tanaman perkebunan	Desa Amin Jaya Desa Riam Durian Desa Sagu Sukamulya
		2. Integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas	Desa Pangkalan Tiga Desa Sulung Kenambui
		3. Pengembangan agroindustri perdesaan	Desa Lada Mandala Jaya Desa Sido Mulyo
II	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Penerapan dan pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam dan daerah tertinggal	Desa Kumpai Batu Atas Desa Riam Durian
III	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian	Desa Sumber Agung Desa Pasir Panjang

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009 ditinjau dari tingkat pencapaian target (tingkat kinerja) tersaji pada tabel sebagai berikut :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TK. CAPAIAN
I.	Pengembangan Agribisnis		
	1. Peremajaan tanaman perkebunan	1. Terlaksananya perluasan kebun karet rakyat non revitalisasi.	100
		2. Terlaksananya CP/CL Program Revitalisasi Perkebunan	25
	2. Integrasi tanaman ternak, kompos dan biogas	Terlaksananya Pengadaan Ternak Sapi, Pembuatan Kandang, Pengadaan Chooper, Pengadaan dan Pemasangan instalasi Biogas, Penanaman Hijauan Makanan Ternak dan Pemeliharaan Sapi	100
	3. Pengembangan agroindustri perdesaan	Pengadaan Peralatan Panen Karet,	100
II.	Peningkatan Kesejahteraan Petani		
	Penerapan dan Pemanapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal, Pulau Terluar dan Perbatasan	Terlaksananya Pemantauan Kebakaran, Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-Undangan	100
III.	Peningkatan Ketahanan Pangan		
	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian	1. Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan 3 Unit	100
		2. Terlaksananya Perluasan Areal Karet 60 Ha	100

3.5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.946.900,000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.852.935.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 93.965.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi		Selisih Anggaran (Rp)	
			Fisik (%)	Keuangan (Rp) (%)		
1	Pengembangan Agribisnis					
	a. Peremajaan Tanaman Perkebunan	333.800.000,-	85	270.075.000,-	80,91	63.725.000,-
	b. Integrasi Tanaman-Ternak, Kompos dan Biogas	910.000.000,-	100	899.572.000,-	98,85	10.428.000,-
	c. Pengembangan Agroindustri Perdesaan	400.000.000,-	98,75	386.100.000,-	96,53	13.900.000,-
2	Peningkatan kesejahteraan petani	48.100.000,-	100	42.188.000,-	87,71	5.912.000,-
3	Peningkatan Ketahanan Pangan	255.000.000,-	100	255.000.000,-	100	0,-
	JUMLAH	1.946.900.000,-		1.825.935.000,-	95,17	93.965.000,-

3.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalami kendala dan permasalahan.

4. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Tugas Pembantuan diterima dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2009 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 4 (empat) Program dengan Dana secara keseluruhan berjumlah Rp.6.003.653.000,-

4.1 Dasar Hukum

Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi bidang Ketenagakerjaan dan bidang Ketransmigrasian antara lain :

a. Bidang Tenaga Kerja

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 4132.0/026-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 4132.0/026-05.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

b. Bidang Transmigrasi

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T)

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 4132.0/026-06.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

2. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT)

- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 4132.0/026-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008

4.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun Instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

4.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan.

Personil Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dana Tugas Pembantuan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut :

1. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

No.	N a m a	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Bambang Purwanto, SST	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	Drs. Edi Rahman	Penanggung Jawab	Kabid. Pentakerja
3	Ir. Rusliansyah, M.si	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Sekretaris
4	Silaturrahmansyah	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
5	Suwardi	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksana

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

No.	N a m a	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Bambang Purwanto, SST	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	Ir. Rusliansyah, M.si	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Sekretaris
3	Maryono	Bendahara Penerimaan	Pelaksana
4	Morlen Manik, SIP	Bendahara Pengeluaran	Kasi Persyaratan dan Norma Kerja
5	Suwardi	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksana

3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT)

No.	N a m a	Jabatan dalam Kegiatan TP	Jabatan dalam SKPD
1	Bambang Purwanto, SST	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Kepala Dinas
2	Ir. Tri Joko, MT	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kabid. Permukiman, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi
3	Ir. Rusliansyah, M.si	Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Sekretaris
4	Silaturrahmansyah	Bendahara Pengeluaran	Pelaksana
5	Suwardi	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksana

4.3. Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan alokasi dana pada tugas pemabtuhan yang diterima dari pemerintah pusat adalah sebagaimana pada tabel berikut ini:

No.	Program	Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1.	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kewirausahaan 2. Administrasi Kegiatan 3. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 	<p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p>
2.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Kegiatan 2. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan 3. Pengembangan Kelembagaan 4. Pemetaan 	<p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p>
3.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Kegiatan 2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis / Program 3. Evaluasi / Laporan Kegiatan 4. Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 5. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi 7. Pembangunan Rumah dan Fasilitas Umum dan Transmigrasi 8. Pembangunan Jalan dan Jembatan Lokal 9. Penyiapan dan Pematangan Lahan 10. Pendaftaran dan Seleksi 11. Perpindahan dan Penempatan 	<p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Kumai Seberang</p> <p>Kumai Seberang</p> <p>Kumai Seberang</p> <p>Kumai Seberang</p> <p>Kumai Seberang</p>
4.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Kegiatan 2. Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis / Program 3. Evaluasi / Laporan Kegiatan 4. Rapat – Rapat Koordinasi 	<p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p> <p>Pangkalan Bun</p>

No.	Program	Kegiatan	Lokasi Kegiatan
		/ kerja / dinas / Pimpinan Kelompok Kerja / Konsultan	
		5. Pengembangan Kelembagaan	Kumai Seberang
		6. Pelayanan Kesehatan / Perbaikan Gizi Ibu / Anak dan KB	Kumai Seberang
		7. Operasional dan Pelayanan Unit Permukiman Transmigrasi	Kumai Seberang
		8. Pelayanan Jaminan Hidup Transmigrasi	Kumai Seberang
		9. Pelayanan Pendidikan dan Pen getahuan	Kumai Seberang
		10. Pengembangan Usaha Ekonomi	Kumai Seberang
		11. Pengembangan Kelembagaan	Kumai Seberang
		12. Pengadaaan Sarana Produksi	Kumai Seberang

Realisasi Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2009 ditinjau dari pencapaian Target (Tingkat Kinerja) secara akumulatif dicapai sebesar 100% dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Capaian (%)
1.	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)	- Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja dengan menempatkan pencari kerja ke Perusahaan sebanyak 200 orang dipekerjakan di 6 (enam) kecamatan - Padat Karya Produktif di Pangkalan Durin sepanjang 3 Km mempekerjakan 67 orang tenaga kerja.	100 100
3.	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK) Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (PPK)	- Pemeriksaan Kasus Kecelakaan kerja & PAK, Analisa Potensi Bahaya dan Data Objek sebanyak 30 kali. - Pemetaan status kerawanan pada 150 perusahaan yang tersebar di 6(enam) Kecamatan	100 100
3.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT)	- Penempatan Transmigran sebanyak 50 KK	100

No.	Program / Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Target Capaian (%)
	Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Rumah Transmigran type 36 jamban keluarga sebanyak 50 unit - Pembuatan SAB (Sumur gali) sebanyak 53 buah - Pembangunan Gorong-gorong kayu 32 m' - Tebas Kumpul Bersih pada lahan pekarangan 22,5 Ha 	<p style="text-align: center;">100</p> <p style="text-align: center;">100</p> <p style="text-align: center;">100</p> <p style="text-align: center;">100</p>
4.	Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Jadup Transmigran 200 KK - Pengadaan Kapur Pertanian 50 KK - Pengadaan Obat-obatan Jenis OSSE, OSE, OE 150 KK - Pengadaan Alat Tulis SD, Buku pelajaran Peralatan, Perlengkapan Rumah Ibadah, Penyediaan Kitab Suci dan Buku2 Agama - 5 Paket Pengadaan Saprotan Paket B 150 Paket 	<p style="text-align: center;">100</p>

4.5. Sumber dan Jumlah Anggaran

4.5.1. Perluasan & Pengembangan Kesempatan Kerja (PPKK)

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 312.507.000,00 (Tiga Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 271.353.200,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan sisa anggaran Rp. 41.153.800,00 (Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran tugas pembantuan terdapat pada tabel sebagai berikut:

Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan PPKK

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/	PAGU ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN		FISIK REALISASI	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
			(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7
I	KONSOLIDASI PROGRAM-PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA Lokasi/Prop : (14) KALIMANTAN TENGAH					
A)	PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN					
1	PENCIPTAAN WIRA USAHA BARU MELALUI TERAPAN TTG DAN PENDAMPING					
	1 Belanja Uang Honor Tidak Tetap (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Pengarah (1 Org x 1 Bln)	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Penanggung Jawab (1 Org x 1 Bln)	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Pelaksana (6 Org x 1 Bln)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	0,00
	Honor Tenaga					
	- Pendamping/LSM/Ordes/Petugas TTG (2 Org x 4 Bln)	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00	0,00
	Honor Penyusun Kurikulum dan Materi (4 Org x 2 Bln)	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Pengajar (8 JPL x 6 Hr)	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Saku Peserta (25 Org x 6 Hr)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	2 Belanja Barang (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- ATK dan Bahan Komputer	5.000.000,00	4.920.500,00	98,41	100,00	79.500,00
	- Perlengkapan Peserta	3.125.000,00	3.125.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Pengadaan Bahan dan Alat Praktek TTG	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Konsumsi Rapat Koordinasi (10 Org x 4 Kl) Surat Menyurat, Laporan, Administrasi dan	3.200.000,00	644.000,00	20,13	100,00	2.556.000,00
	Foto Copy	5.000.000,00	4.999.500,00	99,99	100,00	500,00
	- Identifikasi Potensi dan Jenis TTG	1.820.000,00	1.820.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Akomodasi dan Konsumsi (28 Org x 6 Hr)	42.000.000,00	18.006.000,00	42,87	100,00	23.994.000,00
	- Rekrutmen dan Seleksi	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Pembukaan dan Penutupan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Kesehatan dan Obat-obatan (20 Org x 6Hr)	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Sertifikat dan Tanda Pengenal	875.000,00	875.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Sewa Ruang	9.000.000,00	2.400.000,00	26,67	100,00	6.600.000,00
	- Bantuan Sarana Usaha awal Usaha	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00	0,00

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/	PAGU ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN		FISIK REALISASI	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
			(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7
	- Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	0,00
3	Belanja Perjalanan Lainnya (DN) (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Transport Pembinaan dan Panduan (2 Org x 8 Trp x 4 Bln)	6.400.000,00	6.300.000,00	98,44	100,00	100.000,00
	- Transport Peserta (20 Org x 1 Trp)	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00	1.500.000,00
	- Transport Pengajar / Instruktur (2 Org x 6 Trp)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Transport Penyelenggara (8 Org x 1 Trp)	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Transport Pendampingan / LSM / PL / TTG (2 Org x 8 Trp	6.400.000,00	6.300.000,00	98,44	100,00	100.000,00
II	ADMINISTRASI KEGIATAN					
1	Honor yang terkait dengan Operasional Satuan Kerja (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)	5.280.000,00	5.280.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM (1 Org x 12 Bln)	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Bendahara Pengeluaran/Pemegang (1 Org x 12 Bln)	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Staf Pengelola (2 Org x 12 Bln)	5.280.000,00	5.280.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Penyusun Laporan SAI (2 Org x 12 Bln)	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	100,00	0,00
2	Belanja Bahan (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- ATK dan Bahan Komputer	6.060.000,00	6.052.500,00	99,88	100,00	7.500,00
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Rapat - rapat Persiapan dan Dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Pengandaan, Foto Copy dan Pengiriman	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Penyusunan Laporan dan Evaluasi	3.600.000,00	3.582.000,00	99,50	100,00	18.000,00
4	Belanja Perjalanan Lainnya (DN) (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Biaya Konsultasi (1 Org x 3 Trip)	6.037.000,00	6.027.800,00	99,85	100,00	9.200,00
	- Uang Harian (3 Ot x 3 Hr)	4.050.000,00	4.050.000,00	100,00	100,00	0,00

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/	PAGU ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN		FISIK REALISASI	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
			(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7
	- Biaya Penginapan Hotel (3 Ot x 2 Hr)	3.660.000,00	3.650.000,00	99,73	100,00	10.000,00
	- Transport Lokal	198.000,00	190.000,00	95,96	100,00	8.000,00
	- Transport Rekonsolidasi SAI (1 Org x 12 Kl)	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Transport dalam rangka Rakor (1 Org x 2 Trp)	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90	100,00	5.000,00
	- Transport dalam rangka Konsinyasi SAI (1 Org x 2 Trp)	4.025.000,00	4.024.000,00	99,98	100,00	1.000,00
III	PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI					
A)	PELAYANAN ANTAR KERJA MELALUI PENINGKATAN EFEKTIFITAS IPK DAN BURSA KERJA ONLINE					
1	Belanja Uang Honor Tidak Tetap (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Honor Penanggung Jawab (1 Org x 12 Bln)	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Pengolah Data AK I s/d AK V, IPK dan Bursa Kerja (2 Org x 4 Hr x 12 Bln)	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Penyusun Laporan Bulanan AK I s/d AK V, IPK dan Bursa Kerja (3 Org x 2 Hr x 12 Bln)	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Honor Penyusun Laporan Bulanan AKAD/AKL, TKA, AKSUS (2 Org x 3 Hr x 12 Bln)	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Tim Teknis/Operator Bursa Kerja Online (2 Org x 12 Bln)	4.200.000,00	0,00	0,00	100,00	4.200.000,00
2	Belanja Bahan (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- ATK / Komputer Suplies	12.000.000,00	10.092.500,00	84,10	100,00	1.907.500,00
3	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Percetakan / Penggandaan AK I s/d AK V	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Pengiriman Laporan ke Pusat	1.200.000,00	1.177.000,00	98,08	100,00	23.000,00
	- Rekrutmen dan Seleksi TK, AKAD / AKL	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Penempatan TK, AKAD / AKL	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Orientasi dan Penyuluhan Penempatan TK	2.257.000,00	2.250.000,00	99,69	100,00	7.000,00
	- Pencetakan Leaflet dan Stiker	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	100,00	0,00

No	KEGIATAN/SUB KEGIATAN/JENIS BELANJA/	PAGU ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN		FISIK REALISASI	SELISIH ANGGARAN (Rp.)
			(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7
	- Pencetakan Kuestoner Data Lowongan	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Penggandaan Formulir Pencaker (400 Lbr x 12 Bln)	960.000,00	960.000,00	100,00	100,00	0,00
	- Administrasi, Surat Menyurat, Rapat dll	5.400.000,00	5.422.400,00	100,41	100,00	-22.400,00
4	Belanja Perjalanan Lainnya (DN) (KPPN.102-Pangkalan Bun / 14.05-Kab. Kotawaringin Barat					
	- Transport Pengumpulan Data Lowongan ke Perusahaan (Job Canvasing) (1 Org x 10 Trip x 12 Bln)	6.000.000,00	5.950.000,00	99,17	100,00	50.000,00
	Monev Penempatan (1 Org x 10 Prshn x 4 Trip)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	0,00
	JUMLAH	312.507.000,00	271.353.200,00	86,83	100,00	41.153.800,00

4.5.2 Perlindungan & Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja (PPLTK)

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2008 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.139.239.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 137.653.700,00 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan sisa anggaran Rp. 1.585.300,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran tugas pembantuan terdapat pada tabel sebagai berikut:

Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan PPLTK

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA T.KERJA					
	Lokasi/Prop : (14.05) Kabupaten Kotawaringin Barat					
	Indikator Kegiatan : Menurunnya Angka Kecelakaan Kerja					
1	ADMINISTRASI KEGIATAN	67.239.000	67.049.300			189.700

Belanja Uang Honor Tidak Tetap. (KPPN.102-PANGKALAN BUN / 14.05- Kab.Kotawaringin Barat)	25.254.000	25.254.000			-
- Kuasa Pengguna Anggaran (1 Org x 12 Bln)	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00	-
- Bendahara Pengeluaran (1 Org x 12 Bln)	2.940.000	2.940.000	100,00	100,00	-
- Sekretariat (2 Org x 12 Bln)	4.200.000	4.200.000	100,00	100,00	-
- Pejabat Pembuat Komitmen (1 Org x 12 Bln)	3.564.000	3.564.000	100,00	100,00	-
- Penanggung jawab laporan (2 orang x 12 bln x 1 Kg)	7.200.000	7.200.000	100,00	100,00	-
- Penguji Administrasi (1 org x 12 bln)	3.150.000	3.150.000	100,00	100,00	-
<u>Belanja bahan.</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN / 14.05- Kab.Kotawaringin Barat)	12.000.000	12.000.000			-
- ATK	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-
- Pembuatan dan Pengiriman Laporan	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-
<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN / 14.05- Kab.Kotawaringin Barat)					
PERJALANAN DINAS	29.985.000	29.795.300			189.700
Konsultasi Teknis Pelaksanaan Program I di Pontianak	7.475.000	7.338.000			137.000
- Transport/tiket Balikpapan - Jakarta - Pontianak (1 org x 1 trip)	6.000.000	5.888.000	98,13	100,00	112.000
- Transport/taxi (1 Org x 1 trip)	275.000	250.000	90,91	100,00	25.000
- Uang Harian (1 Org x 4 Hr)	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	-
Konsultasi Regional Program Wilayah Tengah di Bandung	5.245.000	5.245.000			-
- Transport/tiket Balikpapan - Jakarta - Bandung (1 org x 1 trip)	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	-
- Tarif taxi (1 Org x 1 trip)	45.000	45.000	100,00	100,00	-
- Uang Harian (1 Org x 4 Hr)	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	-
Konsultasi Teknis Program II di Manado	7.280.000	7.280.000			-
- Transport/tiket Balikpapan - Jakarta - Manado (1 org x 1 trip)	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-
- Transport taxi (1 Org x 1 trip)	80.000	80.000	100,00	100,00	-
- Uang Harian (1 Org x 4 Hr)	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	-
Sosialisasi SAI Dan SABMN Di Bandung	5.445.000	5.392.300			52.700
- Transport/tiket Balikpapan - Jakarta - Bandung (1 org x 1 trip)	4.000.000	3.947.300	98,68	100,00	52.700
- Transport taxi (1 Org x 1 trip)	45.000	45.000	100,00	100,00	-
- Uang Harian (1 Org x 4 Hr)	1.400.000	1.400.000	100,00	100,00	-
Rakornas Pengawas KK di Jakarta	4.540.000	4.540.000			-
- Transport/tiket Balikpapan - Jakarta (3.000.000	3.000.000		100,00	-

	1 org x 1 trip)					
	- Transport taxi (1 Org x trip)	140.000	140.000		100,00	-
	- Uang Harian (1 Org x 4 Hr)	1.400.000	1.400.000		100,00	-
2	<u>PENYELENGGARAAN DAN PEMERIKSAAN</u> OUTPUT : TERTINGKATKANNYA PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK, ANALISA POTENSI BAHAYA DAN DATA OBJEK DALAM BIDANG K3.	38.300.000	36.915.000			1.385.000
A)	PEMERIKSAAN KASUS KECELAKAAN KERJA & PAK, ANALISA POTENSI BAHAYA DAN DATA OBJEKPENGAWASAN DALAM BIDANG K3 <u>Belanja bahan.</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	17.000.000	17.000.000		0,00	-
	- ATK (1 Pkt x 6 Bln)	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-
	- Fotocopy & Surat Menyurat (1 Pkt x 6 Bln)	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-
	- Penggandaan blanko laporan (1 Pkt x 6 Bln)	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	-
	<u>Honor yang terkait dengan out put kegiatan</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	5.800.000	5.800.000		0,00	-
	- Honor Penanggung jawab (1 Org x 6 Bln)	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	-
	- Honor Pengolah data & dan Pembuat Laporan (2 Org x 6 Bln)	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	-
	- Honor Petugas / Analisator (2 Org x 6 Bln)	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-
	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN / 14.05-Kab.Kotawaringin Barat)	15.500.000	14.115.000			1.385.000
	- Transport Pemeriksaan ke Perusahaan (30 KI x 2 Org)	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00	-
	- Transport P.Pengawas Pendamping dari Propinsi/Kab/Kota terdekat	2.000.000	1.425.000	71,25	100,00	575.000
	- Uang Harian Pendamping dari Propinsi/Kab/Kota terdekat	2.100.000	2.100.000	100,00	100,00	-
	- Tarif Hotel Pendamping dari Propinsi/Kab/Kota terdekat	2.400.000	1.590.000	66,25	100,00	810.000
3	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN Out Put : Pembentukan Komite Aksi Tingkat Kabupaten/Kota	7.750.000	7.750.000			-
A)	PENDATAAN DAN PEMETAAN PEKERJA ANAK <u>Belanja bahan</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	7.750.000	7.750.000			-
	- ATK	1.000.000	1.000.000			-
	- Penggandaan Formulir Pemetaan	750.000	750.000	100,00	100,00	-
		250.000	250.000	100,00	100,00	-

	<u>Honor yang terkait dengan out put kegiatan</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	750.000	750.000			-
	- Honor sekretariat	750.000	750.000	100,00	100,00	-
	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	6.000.000	6.000.000			-
	- Transport pendataan pekerja anak (2 Org x 20 Lokasi)	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	-
4	<u>PEMETAAN</u> Out Put : Terlaksananya Pemetaan Pengawasan Status Kerawanan	25.950.000	25.945.400			4.600
A	Ketenagakerjaan <u>PEMETAAN STATUS KERAWANAN</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	25.950.000	25.945.400			4.600
	<u>Belanja bahan</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	9.000.000	8.995.400			4.600
	- ATK	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-
	- Foto Copi	3.000.000	2.995.400	99,85	100,00	4.600
	- Dokumen dan Pelaporan	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	-
	<u>Honor yang terkait dengan out put kegiatan</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	9.450.000	9.450.000			-
	- Honor Pemeriksaa (1 Org x 150 Pers)	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	-
	- Honor Pengolah Data (3 Org x 6 Bln)	1.350.000	1.350.000	100,00	100,00	-
	- Honor Penanggung Jawab (1 Org x 6 Bln)	600.000	600.000	100,00	100,00	-
	<u>Belanja Perjalanan Lainnya (DN)</u> (KPPN.102-PANGKALAN BUN)	7.500.000	7.500.000	0,00	0,00	-
	- Transport Pemeriksa (1 Org x 150 Pers)	7.500.000	7.500.000	100,00	100,00	-
	JUMLAH	139.239.000	137.659.700	98,87	100,00	1.579.300

4.5.3 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T)

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2008 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.608.947.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 3.507.031.660,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah) dan sisa anggaran Rp. 101.915.340,00 (Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran tugas pembantuan terdapat pada tabel sebagai berikut:

Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan PWSCT Bidang P4T

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	ADMINISTRASI KEGIATAN	<u>128.240.000</u>				
	<u>Belanja Uang Honor Tidak tetap</u>	<u>50.940.000</u>				
	- Insentif Kuasa Pengguna Anggaran	7.800.000	7.800.000	100,000	100,00	0
	- Insentif Pejabat Pembuat Komitmen	6.630.000	6.630.000	100,000	100,00	0
	- Insentif Bendahara	5.460.000	5.460.000	100,000	100,00	0
	- Insentif Staf Pangelola Kegiatan	15.600.000	15.600.000	100,000	100,00	0
	- Insentif Pejabat Penguji	5.850.000	5.850.000	100,000	100,00	0
	- Insentif Panitia Lelang dan Penerima	7.200.000	7.200.000	100,000	100,00	0
	- Insentif Petugas Lapangan Pembangunan Pemukiman	2.400.000	2.400.000	100,000	100,00	0
	2 <u>Belanja Bahan</u>	<u>18.000.000</u>				
	- ATK	4.000.000	3.989.500	99,738	100,00	10.500
	- Komputer Supplies	4.000.000	4.000.000	100,000	100,00	0
	- Foto copy cetak mencetak	4.000.000	4.000.000	100,000	100,00	0
	- Rapat - rapat	2.000.000	1.450.000	72,500	72,50	550.000
	- Distribusi laporan	4.000.000	3.999.500	99,988	100,00	500
	3 <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	<u>28.500.000</u>				
	- Biaya Pelelangan	20.000.000	19.998.610	99,993	100,00	1.390
	- Biaya Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran	6.000.000	5.939.900	98,998	100,00	60.100
	- Penyusunan Program Kerja KPA	2.500.000	2.500.000	100,000	100,00	0
	4 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>30.800.000</u>				
	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat	<u>22.000.000</u>				
	- Uang Harian	7.200.000	6.600.000	91,667	91,67	600.000
	- Biaya Penginapan	4.800.000	4.100.000	85,417	85,42	700.000
	- Tiket	10.000.000	9.169.000	91,690	100,00	831.000
	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi	<u>8.800.000</u>				

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- Uang Harian	4.800.000	4.740.000	98,750	100,00	60.000
	- Biaya Penginapan	2.400.000	2.300.000	95,833	100,00	100.000
	- Tiket	1.600.000	1.600.000	100,000	100,00	0
II	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM	<u>66.600.000</u>				
	1 <u>Belanja Bahan</u>	<u>12.000.000</u>				
	- ATK	3.000.000	2.998.500	99,950	100,00	1.500
	- Komputer Supplies	3.000.000	3.000.000	100,000	100,00	0
	- Foto copy cetak mencetak	3.000.000	3.000.000	100,000	100,00	0
	- Rapat - rapat	1.500.000	0	0,000	0,00	1.500.000
	- Distribusi Program dan Rencana Kerja	1.500.000	1.497.800	99,853	100,00	2.200
	2 <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	<u>15.000.000</u>				
	- Rapat Koordinasi Teknis	15.000.000	9.065.700	60,438	60,44	5.934.300
	3 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>39.600.000</u>				
	Dalam Rangka Penyusunan Program Ke Pusat	22.000.000				
	- Uang Harian	7.200.000	7.200.000	100,000	100,00	0
	- Biaya Penginapan	4.800.000	4.800.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	10.000.000	10.000.000	100,000	100,00	0
	Dalam Rangka Penyusunan RKA-KL Ke Pusat	11.000.000				
	- Uang Harian	3.600.000	3.600.000	100,000	100,00	0
	- Biaya Penginapan	2.400.000	2.400.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	5.000.000	4.984.100	99,682	100,00	15.900
	Dalam Rangka Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi	6.600.000				
	- Uang Harian	3.600.000	3.600.000	100,000	100,00	0
	- Biaya Penginapan	1.800.000	1.790.000	99,444	100,00	10.000
	- Tiket	1.200.000	1.200.000	100,000	100,00	0
III	EVALUASI / PELAPORAN KEGIATAN	<u>31.800.000</u>				
	1 <u>Belanja Bahan</u>	<u>18.000.000</u>				
	- ATK	3.000.000	2.998.000	99,933	100,00	2.000

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- Komputer Supplies	3.000.000	3.000.000	100,000	100,00	0
	- Foto copy cetak mencetak	3.000.000	2.999.600	99,987	100,00	400
	- Distribusi laporan	3.000.000	2.889.200	96,307	100,00	110.800
	- Rapat - rapat	3.000.000	0	0,000	0,00	3.000.000
	- Rapat pengendalian	3.000.000	0	0,000	0,00	3.000.000
	2 <u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>	8.500.000				
	- Penyusunan Laporan Bulanan kemajuan pelaksanaan kegiatan (Kepmen No. 17)	6.000.000	6.000.000	100,000	100,00	0
	- Penyusunan Laporan Tahunan	500.000	500.000	100,000	100,00	0
	- Penyusunan Lakip	2.000.000	2.000.000	100,000	100,00	0
	3 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	5.300.000				
	Dalam Rangka Monev ke Lokasi	2.000.000				
	- Uang Harian	1.200.000	900.000	75,000	75,00	300.000
	- Biaya penginapan	400.000	400.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	400.000	340.000	85,000	100,00	60.000
	Dalam Rangka Rapat Pengendalian ke Propinsi	3.300.000				
	- Uang Harian	1.800.000	1.800.000	100,000	100,00	0
	- Biaya Penginapan	900.000	900.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	600.000	480.000	80,000	80,00	120.000
IV	PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)	23.800.000				
	1 <u>Belanja Uang Honor Tidak tetap</u>	4.800.000				
	- Honor	4.800.000	4.800.000	100,000	100,00	0
	2 <u>Belanja Bahan</u>	6.000.000				
	- ATK/Komputer Supplies	3.000.000	2.996.000	99,867	99,87	4.000
	- Foto copy/Penggandaan	3.000.000	2.998.000	99,933	99,93	2.000
	3 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	13.000.000				
	- Transport Rekonsiliasi Perjalanan Ke Pusat	4.800.000	2.200.000	45,833	45,83	2.600.000
	- Uang Harian	1.800.000	1.800.000	100,000	100,00	0
	- Biaya Penginapan	1.400.000	1.400.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	5.000.000	3.979.600	79,592	79,59	1.020.400

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
V	PENYULUHAN DAN PENYEBARAN INFORMASI	<u>77.600.000</u>				
	1 <u>Belanja barang Non Operasional Lainnya</u>	<u>20.000.000</u>				
	- Pembuatan bahan penyuluhan	5.000.000	5.000.000	100,000	100,00	0
	- Publikasi melalui informasi lokasi	5.000.000	5.000.000	100,000	100,00	0
	- Kerjasama Antar Daerah	10.000.000	5.315.800	53,158	53,16	4.684.200
	2 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>57.600.000</u>				
	Dalam Rangka Promosi dan Informasi ke Daerah Asal	19.200.000				
	- Uang Harian	5.600.000	3.600.000	64,286	64,29	2.000.000
	- Penginapan	3.600.000	998.500	27,736	27,74	2.601.500
	- Tiket	10.000.000	8.427.800	84,278	84,28	1.572.200
	Dalam Rangka Kerjasama Antar Daerah	19.200.000				
	- Uang Harian	5.600.000	4.540.000	81,071	81,07	1.060.000
	- Penginapan	3.600.000	3.600.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	10.000.000	5.198.700	51,987	51,99	4.801.300
	Dalam Rangka Promosi dan Investasi	19.200.000				
	- Uang Harian	5.600.000	5.600.000	100,000	100,00	0
	- Penginapan	3.600.000	3.600.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	10.000.000	5.826.000	58,260	58,26	4.174.000
VI	PENGAWASAN / SUVERVISI KONTRUKSI	<u>57.195.000</u>				
	1 <u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>	<u>45.675.000</u>				
	- Suvervisi Gedung dan Bangunan	45.675.000	45.100.000	98,741	100,00	575.000
	2 <u>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</u>	<u>11.520.000</u>				
	- Suvervisi Jalan dan Jembatan	11.520.000	10.700.000	92,882	100,00	820.000
VII.	PEMBANGUNAN RUMAH DAN FASILITAS UMUM TRANSMIGRASI	<u>2.284.844.000</u>				
	1 <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.000.000</u>				

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- ATK	500.000	499.500	99,900	100,00	500
	- Komputer Supplies	750.000	1.259.200	167,893	167,89	-509.200
	- Komputer Supplies	750.000	190.800	25,440	25,44	559.200
	2 <u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>	1.726.350.000				
	Lokasi Kumai Seberang (SDT) 50 KK	1.618.175.000				
	- Pembangunan RTJK T.36	1.450.000.000	1.440.850.000	99,369	100,00	9.150.000
	- Gentong Plastik untuk FU	55.000.000	54.700.000	99,455	100,00	300.000
	- SAB (sumur gali) untuk trans	108.175.000	105.300.000	97,342	100,00	2.875.000
	- Penyemprotan rumah/penilaian layak huni/STP	5.000.000	5.000.000	100,000	100,00	0
	Pemenuhan Paket	108.175.000				
	- SAB (sumur gali) untuk trans	108.175.000	105.300.000	2,918	100,00	2.875.000
	3 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	17.000.000				
	Dalam Rangka Penilaian Layak Huni / STP	17.000.000				
	- Uang Harian	7.200.000	6.950.000	96,528	96,53	250.000
	- Biaya Penginapan	3.200.000	3.200.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	1.600.000	1.450.000	90,625	90,63	150.000
	- Uang Harian	1.400.000	0	0,000	0,00	1.400.000
	- Biaya Penginapan	600.000	0	0,000	0,00	600.000
	- Tiket	3.000.000	1.000.000	33,333	33,33	2.000.000
	4 <u>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</u>	539.494.000				
	Lokasi Kumai Seberang					
	- Rumah KUPT	139.240.000	137.650.000	98,858	100,00	1.590.000
	- Rumah Ibadah	125.000.000	122.975.000	98,380	100,00	2.025.000
	- Gudang Unit	90.000.000	88.413.000	98,237	100,00	1.587.000
	- Gentong Plastik Untuk FU	1.650.000	1.641.000	99,455	100,00	9.000
	- SAB (sumur gali) untuk trans dan FU	12.981.000	12.636.000	97,342	100,00	345.000
	- Pustu	170.623.000	168.600.000	98,814	100,00	2.023.000
VIII	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN LOKAL	807.418.000				
	1 <u>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</u>	807.418.000				
	Lokasi Kumai Seberang (SDT) 50 KK	126.500.000				
	- Jembatan Kayu	126.500.000	125.410.500	99,139	100,00	1.089.500
	Pemenuhan Paket	680.918.000				
	- Timbunan Jalan Poros	497.700.000	496.900.000	99,839	100,00	800.000

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- Pembangunan Jembatan Kayu	125.468.000	125.410.500	99,954	100,00	57.500
	- Gorong - gorong bentang 1 m panjang 4 m	57.750.000	56.928.000	98,577	100,00	822.000
IX	PENYIAPAN DAN PEMATANGAN LAHAN	<u>56.625.000</u>				
	1 <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	<u>25.000.000</u>				
	Pembukaan lahan untuk Transmigrasi Lokasi Kumai Seberang (SDT) 50 KK					
	- Pembersihan akhir lahan (padat karya)	25.000.000	0	0,000	0,00	25.000.000
	1 <u>Belanja Modal Tanah</u>	<u>31.625.000</u>				
	Pembukaan Lahan Untuk FU Pemenuhan Paket	31.625.000				
	- Pilah Kumpul Bersih	31.625.000	29.904.750	94,560	100,00	1.720.250
X.	<u>PENDAFTARAN DAN SELEKSI</u>	<u>29.425.000</u>				
	1 <u>Belanja Bahan</u>	<u>4.000.000</u>				
	- ATK, Komputer Supplies	1.500.000	1.500.000	100,000	100,00	0
	- Foto copy, cetak mencetak	2.500.000	2.500.000	100,000	100,00	0
	2 <u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>	<u>2.250.000</u>				
	- Honorarium Petugas Pendafsi	750.000	740.000	98,667	100,00	10.000
	- Honorarium Aparat Desa	750.000	740.000	98,667	100,00	10.000
	- Honorarium Petugas Kecamatan	750.000	730.000	97,333	97,33	20.000
	3 <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	<u>8.175.000</u>				
	- Bahan Kelengkapan Administrasi	750.000	500.000	66,667	66,67	250.000
	- Pengurusan administrasi calon transmigran (SKKB, Pas photo)	750.000	750.000	100,000	100,00	0
	- Pemeriksaan calon transmigran	500.000	500.000	100,000	100,00	0
	- Penyelenggaraan Pendafsi	250.000	250.000	100,000	100,00	0
	- Pembuatan Buku Induk	375.000	375.000	100,000	100,00	0
	- Sosialisasi Prosedur Peserta Calon TPS	2.750.000	2.070.000	75,273	75,27	680.000
	- Inventarisasi dan Pelayanan Pendaftaran Calon TPS	2.000.000	1.688.600	84,430	100,00	311.400
	- Entry data kesiapan calon trans	800.000	800.000	100,000	100,00	0

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	4 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>15.000.000</u>				
	Dalam Rangka Pendafsi	11.200.000				
	- Uang Harian	9.600.000	9.600.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	1.600.000	1.550.000	96,875	100,00	50.000
	Dalam Rangka sosialisasi Prosedur Peserta Calon TPS	1.600.000				
	- Uang Harian	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	400.000	400.000	100,00	100,00	0
	Dalam Rangka Inventarisasi Pelayanan Pendaftaran Calon TPS	2.200.000				
	- Uang Harian	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	400.000	400.000	100,00	100,00	0
XI	<u>PERPINDAHAN DAN PENEMPATAN</u>	<u>45.400.000</u>				
	1 <u>Belanja Uang Honor Tidak tetap</u>	<u>1.500.000</u>				
	- Honorarium dokter	875.000	875.000	100,00	100,00	0
	- Honorarium paramedis	625.000	625.000	100,00	100,00	0
	2 <u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u>	<u>37.500.000</u>				
	- Biaya Pelaporan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	Layanan Angkutan	7.500.000				
	- Angkutan transmigran dan barang bawaannya dari desa asal ke lokasi (TPS)	7.500.000	7.100.000	94,667	100,00	400.000
	Penyediaan makanan transmigran (di perjalanan dan lokasi)	27.000.000				
	- TPS	13.500.000	13.260.000	98,222	98,22	240.000
	- TPA	13.500.000	13.260.000	98,222	98,22	240.000
	Layanan Penempatan	2.500.000				
	- Pengadaan Obat Bekal Transmigran (TPS)	1.250.000	1.250.000	100,00	100,00	0
	- Pelayanan Kebersihan di penampungan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	- Bimbingan Mental di Penampungan	750.000	750.000	100,00	100,00	0
						0
	3 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>6.400.000</u>				
	Dalam Rangka Pengawasan (TPS)	3.200.000				
	- Uang Harian	2.400.000	2.300.000	95,833	100,00	

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
	- Tiket	800.000	800.000	100,000	100,00	0
	Dalam Rangka Pengawalan (TPA)	3.200.000				0
	- Uang Harian	2.400.000	2.400.000	100,000	100,00	0
	- Tiket	800.000	800.000	100,000	100,00	0
		3.608.947.000	3.507.031.660	97,176	98,06	101.815.340

4.5.4 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh (PWSCT) Bidang Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT)

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.942.960.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 1.916.689.080,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah) dan sisa anggaran Rp. 26.090.920,00 (Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) dengan rincian penggunaan anggaran tugas pembantuan terdapat pada tabel sebagai berikut:

Rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan PWSCT Bidang P2MKT

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	SELISIH ANGGARAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
i.	<u>ADMINISTRASI KEGIATAN</u>	<u>85.549.000</u>				
	1. <u>Honor yang terkait dengan operasional Satuan Kerja</u>	<u>39.270.000</u>				
	- Honor Pejabat Pembuat Komitmen	5.940.000	5.940.000	100,00	100,00	0
	- Honor Bendahara	4.620.000	4.620.000	100,00	100,00	0
	- Honor Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM	5.280.000	5.280.000	100,00	100,00	0

	- Honor Staf Pangelola Kegiatan	13.200.000	13.200.000	100,00	100,00	0
	- Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	8.250.000	8.250.000	100,00	100,00	0
	- Honor Panitia Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa	1.980.000	1.980.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Belanja Bahan</u>	<u>18.000.000</u>				
	- ATK dan Komputer Supplies	6.000.000	5.994.500	99,90	100,00	5.500
	- Foto copy, penggandaan, penjilidan dan pengiriman laporan	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	0
	- Biaya Pelelangan	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	0
	3 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>28.279.000</u>				
	Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi ke Pusat	21.479.000				
	- Uang Harian	7.200.000	7.200.000	100,00	100,00	0
	- Penginapan	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	9.479.000	9.469.300	99,89	100,00	9.700
	Dalam Rangka Koordinasi/Konsultasi ke Provinsi	6.800.000				
	- Uang Harian	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	0
	- Penginapan	2.000.000	1.750.000	87,50	100,00	250.000
	- Tiket	1.200.000	1.010.000	84,16	100,00	190.000
II.	PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA/TEKNIS/PROGRAM	<u>381.629.000</u>				
A)	Penyusunan Kerja Satker	2.000.000				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.000.000</u>				
	- ATK	750.000	750.000	100,00	100,00	0
	- Komputer Supplies	750.000	750.000	100,00	100,00	0
	- Foto copy,Penggandaan,penjilidan ,pelaporan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
B)	Penyusunan Rancangan Program P2MKT Thn. 2010	26.879.000				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.000.000</u>				
	- ATK	750.000	750.000	100,00	100,00	0
	- Komputer Supplies	750.000	750.000	100,00	100,00	0
	- Foto copy,Penggandaan,penjilidan ,pelaporan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>24.879.000</u>				
	Dalam Rangka Penyusunan Program dan Anggaran ke Pusat	21.479.000				
	- Uang Harian	7.200.000	7.200.000	100,00	100,00	0
	- Uang Penginapan	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	9.479.000	8.671.200	91,47	100,00	807.800

	Dalam Rangka Koordinasi dan Kosultasi Sungram dan Anggaran ke Provinsi	3.400.000				
	- Uang Harian	1.800.000	1.600.000	88,88	100,00	200.000
	- Uang Penginapan	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	0
	- Transport	600.000	600.000	100,00	100,00	0
C)	Perencanaan Peningkatan Jalan	200.000.000				
	Belanja Jasa Konsultan	<u>200.000.000</u>				
	- Perencanaan peningkatan jalan poros penghubung / poros	200.000.000	197.700.000	98,85	100,00	2.300.000
D)	Penyusunan Rencana Teknis Pembinaan	152.750.000				
	Belanja Jasa Konsultan	<u>152.750.000</u>				
	- Penyusunan Rencana Teknis Pembinaan	152.750.000	150.200.000	98,33	100,00	2.550.000
III.	EVALUASI / LAPORAN KEGIATAN	<u>56.678.000</u>				56.678.000
A)	Evaluasi, Pengendalian Pelaksanaan Program dan Laporan Pelaksanaan	29.400.000				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>16.000.000</u>				
	- ATK dan Komputer supplies	3.000.000	2.998.800	99,96	100,00	1.200
	- Foto copy,cetak mencetak,penjilidan	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
	- Penyusunan Laporan Bulanan dan Pengiriman	6.000.000	5.998.200	99,97	100,00	1.800
	- Penyusunan Laporan Tahunan dan pengiriman	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	0
	- Pengiriman Laporan	3.000.000	2.945.200	98,17	100,00	54.800
	-	-	-			
	2. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>13.400.000</u>				
	Dalam Rangka Rapat Pengendalian ke Provinsi	9.000.000				
	- Uang Harian	4.800.000	4.280.000	89,16	100,00	520.000
	- Penginapan	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
	- Transport	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	0
	Dalam Rangka Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksana ke Lokasi	4.400.000				
	- Uang Harian	3.600.000	0	0,00	100,00	3.600.000
	- Transport	800.000	400.000	50,00	100,00	400.000
B)	Penyusunan Laporan SAI	27.278.000				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>6.000.000</u>				
	- ATK/Komputer Supplies	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
	- Foto copy/Penggandaan	3.000.000	2.995.400	99,84	100,00	4.600
	2. <u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>	<u>3.600.000</u>				

	- Penyusunan Laporan SAI	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	0
	3. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>17.678.000</u>				
	Transport Rekonsiliasi	2.400.000	2.200.000	91,66	100,00	200.000
	Perjalanan ke Pusat	7.939.000				
	- Uang Harian	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0
	- Penginapan	1.400.000	1.400.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	4.739.000	4.567.800	96,38	100,00	171.200
	Sosialisasi SAI di Provinsi	7.339.000				
	- Uang Harian	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0
	- Penginapan	800.000	792.000	99,00	100,00	8.000
	- Tiket	4.739.000	4.720.000	99,59	100,00	19.000
IV.	RAPAT - RAPAT KOORDINASI / KERJA / DINAS / PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI	<u>24.979.000</u>				
		-				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.500.000</u>				
	- ATK dan Komputer supplies	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	0
	- Penyiapan bahan rapat, foto copy, penggandaan, penjilidan	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>22.479.000</u>				
	Dalam Rangka Rapat Koordinasi ke Pusat	21.479.000				
	- Uang Harian	7.200.000	7.200.000	100,00	100,00	0
	- Uang Penginapan	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	9.479.000	9.021.800	95,17	100,00	457.200
	Dalam Rangka Forkasi Wilayah Kalimantan	1.000.000				
	- Transport	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	0
V.	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	<u>28.500.000</u>				
A.	Pengembangan Kelembagaan Pemukiman Transmigrasi dan Masyarakat	28.500.000				
		-				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.500.000</u>				
	- ATK dan Komputer supplies	1.500.000	1.499.500	99,96	100,00	500
	- Penyiapan bahan rapat, foto copy, penggandaan, penjilidan	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>	<u>18.000.000</u>				
	- Insentif Perangkat Desa	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00	0
	- Insentif Tripika Kecamatan	5.400.000	5.400.000	100,00	100,00	0
	- Insentif Petugas Keamanan Desa	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	0

	3. <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	6.400.000				
	Pelayanan Pemerintah Desa	6.400.000				
	- Rembug Desa	1.000.000	935.000	93,50	100,00	65.000
	- Perlengkapan Desa	1.000.000	975.000	97,50	100,00	25.000
	- Bantuan Operasional Pemerintahan Desa	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	0
	- Pembentukan dan pembinaan kader Posyandu	400.000	400.000	100,00	100,00	0
	4. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	1.600.000				
	Dalam Rangka Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Permukiman Transmigrasi	1.600.000				
	- Uang Harian	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	400.000	300.000	75,00	100,00	100.000
VI.	PELAYANAN KESEHATAN / PERBAIKAN GIZI IBU / ANAK & KB	<u>82.900.000</u>				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	2.000.000				
	- ATK dan Komputer supplies	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	0
	- Foto copy, penggandaan, penjiilidan, pelaporan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>	19.200.000				
	- Insentif Dokter	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	0
	- Insentif Paramedis, Pembantu Paramedis, Bidan	9.000.000	9.000.000	100,00	100,00	0
	- Insentif Petugas Sanitarian	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
	- Insentif Petugas GFK	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	0
	3. <u>Belanja Lembaga Sosial Lainnya</u>	60.100.000				
	Penyediaan Obat-obatan Kesehatan dan KB	9.000.000				
	- Pengadaan Obat-obatan Jenis OSSE, OSE dan OE	9.000.000	8.950.000	99,44	100,00	50.000
	- Angkutan Obat-obatan Jenis OSSE, OSE dan OE	-	0	0,00	0,00	0
	Operasional Pelayanan Kesehatan dan KB	51.100.000				
	- Pengadaan alat kontrasepsi	-	0	0,00	0,00	0
	- Pengadaan peralatan kesehatan / bidan	17.500.000	16.836.000	96,20	100,00	664.000
	- Pengadaan perlengkapan pustu	3.000.000	2.965.000	98,83	100,00	35.000
	- Biaya Operasional Pustu	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	0
	- Perawatan Rujukan Pasien Tingkat Kabupaten	24.600.000	24.558.930	99,83	100,00	41.070
	4. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	1.600.000				
	Dalam Rangka Pembinaan pengendalian pelayanan kesehatan ke lokasi	1.600.000				
	- Uang Harian	1.200.000	1.050.000	87,50	100,00	150.000
	- Tiket	400.000	400.000	100,00	100,00	0
						0

VII.	OPERASIONAL & PELAYANAN UNIT PERMUKIMAN TRANSMIGRASI	<u>51.650.000</u>				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>20.400.000</u>				
	- ATK dan Komputer supplies	3.800.000	3.800.000	100,00	100,00	0
	- Penggandaan, laporan monografi UPT	6.000.000	5.997.100	99,95	100,00	2.900
	- Penyusunan monografi UPT	4.000.000	3.999.750	99,99	100,00	250
	- Pengadaan Peralatan / perlengk. kantor UPT	-	0	0,00	0,00	0
	- Biaya eksploitasi kendaraan roda 2 operasional	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
	- Biaya operasional TKPMP	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>	<u>16.200.000</u>				
	- Insentif Petugas UPT / PNS	7.200.000	7.200.000	100,00	100,00	0
	- Insentif Petugas UPT / Non PNS / PSM	3.000.000	3.000.000	100,00	100,00	0
	- Insentif TKPMP	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00	0
	3. <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	<u>12.750.000</u>				
	- Biaya asuransi TKPMP	250.000	0	0,00	100,00	250.000
	- Biaya pemondokan TKPMP	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	0
	- Perlengkapan Petugas UPT	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	- Biaya lauk pauk petugas UPT	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00	0
	4. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>2.300.000</u>				
	Dalam Rangka Koordinasi / Konsultasi Petugas UPT ke Provinsi / Kabupaten	2.300.000				
	- Uang Harian	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	0
	- Uang Penginapan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	- Tiket	600.000	600.000	100,00	100,00	0
VIII.	PELAYANAN JAMINAN HIDUP TRANSMIGRASI	<u>865.400.000</u>				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.000.000</u>				
	- ATK dan Komputer supplies	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	0
	- Foto copy, penggandaan, penjiilidan, pelaporan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>8.400.000</u>				
	Dalam Rangka Koordinasi / Konsultasi Pelayanan JADUP ke Provinsi	6.800.000				
	- Uang Harian	3.600.000	3.600.000	100,00	100,00	0
	- Uang Penginapan	2.000.000	1.900.000	95,00	100,00	100.000
	- Transport	1.200.000	920.000	76,66	100,00	280.000
	Dalam Rangka Monev dan Pengendalian Pelayanan Jadup ke Lokasi	1.600.000				
	- Uang Harian	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	0

	- Transport	400.000	300.000	75,00	100,00	100.000
	3 <u>Belanja Lembaga Sosial Lainnya</u>	<u>855.000.000</u>				
	- Pemberian Jadup Non Beras TULB	855.000.000	848.100.000	99,19	100,00	6.900.000
IX.	PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN	<u>64.100.000</u>				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.000.000</u>				
	- ATK dan Komputer supplies	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	0
	- Foto copy, penggandaan, penjilidan, pelaporan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>	<u>14.400.000</u>				
	A. PELAYANAN PENDIDIKAN					
	- Insentif Guru SD	10.800.000	10.800.000	100,00	100,00	0
	- Insentif Petugas Perpustakaan	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0
	B. PELAYANAN KEAGAMAAN					
	- Insentif Rohaniawan	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	0
	3. <u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u>	<u>9.500.000</u>				
	A. PELAYANAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH					
	- Pembentukan Perpustakaan di LPT	5.000.000	4.995.850	99,92	100,00	4.150
	- Biaya Operasional Pengelolaan Perpustakaan	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	0
	B. PELAYANAN KEAGAMAAN					
	- Pembinaan Mental Spiritual Warga Trans	2.000.000	1.990.000	99,50	100,00	10.000
	4. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>2.200.000</u>				
	Dalam rangka pembinaan pelayanan pendidikan/penilaian UPT ke lokasi	2.200.000				
	- Uang Harian	1.800.000	1.700.000	94,44	100,00	100.000
	- Transport	400.000	400.000	100,00	100,00	
	5 <u>Belanja Lembaga Sosial Lainnya</u>	<u>36.000.000</u>				
	PELAYANAN PENDIDIKAN					
	- Alat Tulis SD	3.000.000	2.994.000	99,80	100,00	6.000
	- Pengadaan Buku Pelajaran SD	5.000.000	4.999.000	99,98	100,00	1.000
	- Pengadaan Dukungan Alat Peraga SD	5.000.000	4.524.000	90,48	100,00	476.000
	- Pengadaan Alat Olah Raga SD	3.000.000	2.991.000	99,70	100,00	9.000
	- Pengadaan Peralt./Perlengk. Pendidikan SD	20.000.000	19.628.000	98,14	100,00	372.000
X.	PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI	<u>9.200.000</u>				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.000.000</u>				

	- ATK dan Komputer supplies	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	0
	- Foto copy, penggandaan, penjiilidan, pelaporan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	2. <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>2.200.000</u>				
	Dalam rangka pembinaan pengembangan usaha ekonomi ke lokasi	2.200.000				
	- Uang Harian	1.800.000	400.000	22,22	100,00	1.400.000
	- Transport	400.000	400.000	100,00	100,00	0
	3 <u>Belanja Lembaga Sosial Lainnya</u>	<u>5.000.000</u>				
	- Pemasarakatan ILP / Demplot	5.000.000	4.855.000	97,10	100,00	145.000
XI	PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	<u>28.300.000</u>				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>11.000.000</u>				
	- Fasilitas Pembinaan Kelompok Tani UPT Kumai Seberang	1.000.000	1.000.000	100,00	100,00	0
	- Fasilitas Pembentukan Koperasi	2.500.000	2.495.500	99,82	100,00	4.500
	- Pembentukan Regu Pemberantasan Hama	7.500.000	7.495.000	99,93	100,00	5.000
	2. <u>Honor yang terkait dengan output kegiatan</u>	<u>4.800.000</u>				
	- Insentif Pengelola / Pengurus Koperasi	4.800.000	4.800.000	100,00	100,00	0
	3. <u>Belanja Lembaga Sosial Lainnya</u>	<u>12.500.000</u>				
	- Bantuan Stimulan Kelompok Tani	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	0
	- Bantuan Sarana dan Prasarana Kantor Koperasi (Meja,Kursi, Mesin Tik dll)	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	0
	- Bantuan Kelengkapan Administrasi dan Buku-buku Koperasi	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00	0
XII.	PENGADAAN SARANA PPRODUKSI	<u>264.075.000</u>				
	1. <u>Belanja Bahan</u>	<u>2.000.000</u>				
	- ATK dan Komputer supplies	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00	0
	- Foto copy, penggandaan, penjiilidan, pelaporan	500.000	500.000	100,00	100,00	0
	2 <u>Belanja Perjalanan Lainnya</u>	<u>2.200.000</u>				
	Dalam Rangka Pengendalian Distribusi Saprotan	2.200.000				
	- Uang Harian	1.800.000	1.600.000	88,89	100,00	200.000
	- Transport	400.000	400.000	100,00	100,00	0
	3. <u>Belanja Lembaga Sosial Lainnya</u>	<u>259.875.000</u>				
	- Pengadaan Saprotan Paket B	236.250.000	234.506.250	99,26	100,00	1.743.750
	- Pengadaan Kapur pertanian lahan pekarangan	23.625.000	22.525.000	95,34	100,00	1.100.000
		1.942.960.000	1.916.869.080	98,65	100,00	26.090.920

4.4. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Program Kegiatan yang bersumber dari Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengalami kendala dan permasalahan yang berarti.

5. Bidang Ketahanan Pangan

Tugas Pembantuan diterima dari Pemerintah Pusat di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun Anggaran 2009 kepada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan berjumlah 2 (dua) Program dengan Dana secara keseluruhan berjumlah Rp.707.600.000,00

5.1 Dasar Hukum

Kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi Program Peningkatan Ketahanan Pangan dan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani yang ditetapkan dengan dasar hukum sebagai berikut :

- a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 4387.0/018-11.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008
- b. Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2009 Tanggal 02 Januari 2009

5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Departemen Pertanian Republik Indonesia

5.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Personil pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2009 pada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Susunan Personil Pelaksana Tugas Pembantuan

No.	Nama	Jabatan Dalam Kegiatan TP	Jabatan di SKPD
	Kegiatan Pengembangan Demapan, penanganan daerah rawan pangan dan diversifikasi pangan Kegiatan Diversifikasi Pangan Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan		
1.	Ir. Abet Nego, M.Si	Kuasa Pengguna Anggaran	Kepala Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
2.	-	Pejabat Pembuat Komitmen	-
3.	Syahrini, S.Hut	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	Kasi SDM Perkebunan Kehutanan
4.	-	Bendahara Penerimaan	-
5.	Amrul Hasani, A.Md	Bendahara Pengeluaran	Pelaksanaan KP2KP
6.	Mustafa	Pelaksanaan Administrasi Barang Inventaris Milik Negara	Pelaksanaan KP2KP

5.4 Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan tahun 2009 adalah sebagaimana tersaji tabel pada berikut ini :

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan a. Pengembangan Demapan, penanganan daerah rawan pangan dan diversifikasi pangan	Meningkatnya ketahanan pangan didaerah khususnya di 6 Demapan (Kumpai Batu Bawah, Sulung K, Sebuai, Natai Baru, P. Satu dan P. Banteng	- Berkembangnya kelembagaan masyarakat di pedesaan (kelembagaan ketahanan pangan di tingkat desa - Menguatnya sistem ketahanan Pangan

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kelembagaan operasional Demapan - Penguatan modal usaha kelompok 	Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi (P2KPG) di 5 Demapan (Kumpai Batu Bawah, Sulung Kenambui Sebuai, Natai Baru, Pangkalan Satu)	<ul style="list-style-type: none"> untuk meningkatkan akses fisik dan ekonomi - Meningkatnya konsumsi pangan, meningkatnya konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman, terlaksananya koordinasi pangan kebijakan ketahanan pangan.
	<p>b. Diversifikasi pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pameran / visualisasi / publikasi dan promosi b. Penguatan kelembagaan 	Spot iklan layanan masyarakat melalui Radio	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pengetahuan masyarakat - Meningkatnya penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat didesa mandiri pangan
2.	<p>Program Peningkatan Kesejahteraan Petani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanganan daerah rawan pangan 	Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan : 1 Paket	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas penanganan daerah rawan pangan dan semakin berfungsinya kelembagaan ketahanan pangan

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan pada Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	682.600.000	90,00
	a. Pengembangan Demapan, penanganan daerah rawan pangan dan diversifikasi pangan	517.600.000	90,00

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	- Pengembangan kelembagaan operasional Demapan	317.600.000	90,00
	- Penguatan modal usaha kelompok	200.000.000	100,00
	b. Diversifikasi pangan		
	- Pameran / visualisasi / publikasi dan promosi	165.000.000	100,00
	- Penguatan kelembagaan	25.000.000	100,00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	140.000.000	100,00
2.	- Penanganan daerah rawan pangan	25.000.000	10,00
		25.000.000	10,00
	J U M L A H	707.600.000	90

5.5 Sumber Dan Jumlah Anggaran

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 707.600.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 610.130.000,- (Enam Ratus Sepuluh Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 97.470.000,- (Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Selisih Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	682.600.000	610.130.000	89,38	72.470.000
	Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penanganan Daerah Rawan Pangan dan Diversifikasi Pangan	517.600.000	445.130.000	85,99	72.470.000

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Selisih Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)	
	- Pengembangan kelembagaan operasional Demapan	317.600.000	245.130.000	77,18	72.470.000
	- Penguatan modal usaha kelompok	200.000.000	200.000.000	100	0
	Kegiatan Diversifikasi Pangan	165.000.000	165.000.000	100	0
	- Pameran / visualisasi / publikasi dan promosi	25.000.000	25.000.000	100	0
	- Penguatan kelembagaan	140.000.000	140.000.000	100	0
2.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	25.000.000	0	0	25.000.000
	- Penanganan daerah rawan pangan	25.000.000	0	0	25.000.000
	JUMLAH	707.600.000	610.130.000	89.38	97.470.000

5.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Bagi Kabupaten yang bidang ketahanan pangannya masih ditangani oleh kelembagaan setingkat Kantor (eselonering III) maka program dan kegiatan yang diusulkan melalui pembiayaan dari dana tugas pembantuan, untuk tahun 2010 tidak mendapatkan alokasi dana karena di anggap Pemerintah Daerah mampu untuk membiayai program dan kegiatan tersebut

Solusi

Segera dibentuk Badan Ketahanan Kabupaten sesuai dengan :

- Surat Gubernur Nomor 420/42/BKP Januari 2010
- PP Nomor 41 Tahun 2007
- PP Nomor 38 Tahun 2007
- Perpres RI Nomor 83 Tahun 2006

6. Bidang Koperasi Dan UKM

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat selama Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 1 (satu) Program dengan jumlah pagu dana sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah)

6.1 Dasar Hukum

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Nomor: 0589.0.ST/044-01.4/-/2009 Tanggal 23 Maret 2009

6.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Adapun instansi yang memberikan alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia

6.3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Satuan Perangkat Keja yang melaksanakan adalah Dinas Koperasi UKM dan Pasar Kabupaten Kotawaringin Barat.

6.4 Program dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan alokasi dana pada Tugas Pembantuan tahun 2009 adalah sebagaimana tersaji tabel pada berikut ini :

No	Program dan Kegiatan	Sasaran	Deskripsi Manfaat/Keberhasilan Program/Kegiatan
1	2	3	4
1.	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro Kegiatan Fasilitasi Pasar Tradisional	Meningkatnya Kepastian Usaha Dan Perlindungan Hukum Meningkatkan Pendapatan Pedagang, Menyerap Tenaga Kerja, Pemberdayaan Koperasi	Meningkatkan pendapatan para pedagang Terbangunnya Pasar Tradisional

Realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini :

No	Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	1.000.000.000	100
	Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional	1.000.000.000	100
	J U M L A H	1.000.000.000	100

6.5 Sumber Dan Jumlah Anggaran

Dana yang diterima bersumber dari DIPA Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dimana Realisasi Anggaran sebesar Rp. 770.000.000,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan sisa anggaran sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan rincian Penggunaan Anggaran Tugas Pembantuan terdapat pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Selisih Anggaran (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro	1.000.000.000	770.000.000	77	230.000.000
	Kegiatan Fasilitas Pasar Tradisional	1.000.000.000	770.000.000	77	230.000.000
	JUMLAH	1.000.000.000	770.000.000	77	230.000.000

6.6 Permasalahan dan Solusi

- a. Keterlambatan dalam hal Penerimaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Surat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sehingga pelaksanaan Kegiatan di lapangan juga mengalami keterlambatan.

- b. Melakukan percepatan untuk penyelesaian kegiatan fisik dilapangan dengan tetap menjaga kualitas pekerjaan.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan Kepada Desa

1. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1.1 Dasar Hukum

- a. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2009 Nomor : 27351.1 / 010-05.4/-/2009. bersumber dari APBN TA. 2009.
- b. Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) Nomor NPK : 414.2/20-1/PNPM-MP/PMD 2009, bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat dan APBN TA.2009.

1.2 Urusan Pemerintahan yang di tugas pembantuankan kepada Desa untuk Kabupaten / Kota

Urusan Pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada SKPD dan Desa/Kelurahan untuk Kabupaten merupakan Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, Sub Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, dan Kegiatan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan, yang dialokasikan untuk :

- Operasional Satuan Kerja (non-BLM) merupakan dana yang dialokasikan kepada SKPD (Satker PNPM Mandiri Perdesaan) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Aparat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana Tugas Pembantuan dengan Sub Kegiatan : a) Administrasi Kegiatan, b) Pembudayaan Masyarakat, dan c) Pengadaan Peralatan/Inventaris Kantor; dan
- Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) merupakan dana stimulan yang diberikan kepada masyarakat dengan tujuan mendorong keswadayaan masyarakat dalam membangun modal sosial dalam menanggulangi persoalan kemiskinan di perdesaan, dengan Sub Kegiatan : Bantuan Langsung Masyarakat, yang terdiri dari :

- ✓ BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan, yaitu BLM yang diperuntukan mendanai kegiatan operasional masyarakat dalam melakukan perencanaan kegiatan di Desa dan Kecamatan;
- ✓ BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan Masyarakat, yaitu BLM yang diperuntukan mendanai kegiatan pelatihan pelaku-pelaku masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan program;
- ✓ BLM Dana Kegiatan, yaitu dana BLM yang diperuntukan mendanai usulan/proposal kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat ini direncanakan dan dikelola secara langsung oleh masyarakat desa baik sebagai biaya pembangunan sarana/prasarana fisik di perdesaan, kegiatan pendidikan dan kesehatan, serta modal dana bergulir bagi biaya simpan pinjam (perguliran atau revolving) untuk kelompok perempuan dengan sasaran utama adalah Desa/Kelurahan dengan kelompok masyarakat miskin dan perempuan dengan pendekatan pola partisipatif dalam arti partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

1.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Alokasi Dana Tugas Pembantuan BLM dan Non BLM bersumber dari :

1. APBN (DIPA Kementerian Dalam Negeri, Unit Organisasi Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Propinsi Kalimantan Tengah, Kode>Nama Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor : 2735.1/010-05.4/-/2009) sebesar Rp.4.154.030.000,- (Empat Milyar Seratus Lima Puluh Empat Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah), terdiri dari :
 - a. Rupiah murni sebesar Rp.1.004.030.000,- (Satu Milyar Empat Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian :
 - 1) Dana operasional Satker (Non BLM) sebesar Rp.108.415.000,- (Seratus Delapan Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) yang diperuntukan bagi :

- a) Administrasi Kegiatan Rp.38.250.000,- dipergunakan untuk belanja bahan ATK dan Penggandaan serta belanja bahan operasional lainnya berupa biaya konsumsi rapat, pengiriman dokumen dan penyusunan laporan keuangan, realisasi keuangan sebesar Rp.30.375.000,- (79,41%) dan realisasi fisik 100%;
 - b) Pembudayaan dan Pemasyarakatan Rp.60.000.000,- dipergunakan untuk penyelenggaraan Semiloka SKPD dan Semiloka DPRD, realisasi keuangan Rp.46.700.000,- (77,83%) dan realisasi fisik 100%; dan
 - c) Pengadaan Peralatan/Inventaris Kantor Rp.10.165.000,- berupa pengadaan 1 (satu) unit Komputer Desktop untuk Fasilitator PNPM-MPd Kabupaten, realisasi keuangan Rp.9.880.000,- dan realisasi fisik 100%.
- 2) BLM Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan dan Pelatihan Masyarakat sebesar Rp.595.615.000,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) untuk 6 (Enam) Kecamatan, terdiri dari:
- a) BLM DOK Perencanaan sebesar Rp.358.800.000,- , realisasi penyaluran keuangan kepada masyarakat Rp.358.800.000,- (100%) dan realisasi fisik oleh masyarakat 100%; dan
 - b) BLM DOK Pelatihan Masyarakat sebesar Rp.236.815.000,- , realisasi penyaluran keuangan kepada masyarakat Rp. 236.815.000,- (100%), realisasi penggunaan oleh masyarakat Rp.139.681.600,- (58,99%). Saldo dana DOK Pelatihan Masyarakat tetap berada pada Rekening Bersama Masyarakat tersebar pada masing-masing 6 Kecamatan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan pada masing-masing Kecamatan. Saldo dana DOK Pelatihan Masyarakat dimaksud tetap diperuntukan dalam mendukung kegiatan-kegiatan pelatihan bagi

masyarakat pelaku PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan secara kontinyu.

- 3) BLM Dana Kegiatan Pemulihan sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), yaitu dana APBN bagi empat kecamatan untuk melengkapi kekurangan alokasi kewajiban Pemerintah Pusat berdasarkan Naskah Perjanjian Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun sebelumnya (2008), yaitu : Kecamatan Kotawaringin Lama Rp.90.000.000,-, Kecamatan Arut Utara Rp.90.000.000,-, Kecamatan Arut Selatan Rp.60.000.000,- dan Kecamatan Kumai Rp.660.000.000,- dengan ralisasi fisik dan anggaran 100% dengan perincian sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :
 - b. Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp.3.150.000.000,- (Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Dana APBD Kabupaten Kotawaringin Barat TA.2009 (DPA SKPD 910/30/ V/DPKD/2009 tanggal 2 Februari 2009 perihal Pengesahan DPA-SKPD TA.2009) sebesar Rp. 2.450.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

1.4 Sarana dan Prasarana

Alokasi dana sebagaimana poin 1.b dan 2 di atas merupakan dana BLM Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) antara Pemerintah Pusat melalui Ditjen PMD Depdagri dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor NPK : 414.2/20-1/PNPM-MP/PMD 2009, yang diperuntukkan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana fisik dengan perincian sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**a. ALOKASI DANA BLM KEGIATAN PNPM-MPd TA.2009
(KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA)**

No.	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Lalang	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	74.626.300	1.492.500	2.238.800	70.895.000
Sub Total 1				74.626.300	1.492.500	2.238.800	70.895.000
2.	Sumber Mukti	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	69.566.800	1.391.300	2.087.000	66.088.500
Sub Total 2				69.566.800	1.391.300	2.087.000	66.088.500
3.	Sagu Suka Mulya	- Pembuatan Gorong-gorong	1,3 x 6 M' (4 Unit)	29.648.400	593.000	889.400	28.166.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	9 Orang	18.947.500	379.000	568.500	18.000.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	8 Orang	23.157.800	463.100	694.700	22.000.000
Sub Total 3				71.753.700	1.435.100	2.152.600	68.166.000
4.	Rungun	- Pembangunan Gedung Madrasah	6 x 18 M' (1 Unit)	96.612.000	1.932.200	2.898.300	91.781.500
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	12 Orang	42.105.400	842.200	1.263.200	40.000.000
Sub Total 4				138.717.400	2.774.400	4.161.500	131.781.500
5.	Kinjil	- Pemb. Tempat Cuci Mandi Umum	4 x 8 M' (3 Unit)	26.380.000	527.600	791.400	25.061.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	26 Orang	73.684.100	1.473.600	2.210.500	70.000.000
Sub Total 5				100.064.100	2.001.200	3.001.900	95.061.000
6.	Kotawaringin Hulu	- Pembuatan Proteksi Jalan	66 M' (1 Unit)	55.237.800	1.104.700	1.657.100	52.476.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	15 Orang	49.473.700	989.500	1.484.200	47.000.000
Sub Total 6				104.711.500	2.094.200	3.141.300	99.476.000
7.	Ipuh Bangun Jaya	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	71.597.900	1.432.000	2.147.900	68.018.000
Sub Total 7				71.597.900	1.432.000	2.147.900	68.018.000
8.	Palih Baru	- Pembuatan Gorong-gorong	1,3 x 6 M' (5 Unit)	41.247.300	824.900	1.237.400	39.185.000
Sub Total 8				41.247.300	824.900	1.237.400	39.185.000

No.	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Sakabulin	- Pemb. Tempat Cuci Mandi Umum	2 x 6 M' (2 Unit)	10.899.000	218.000	327.000	10.354.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	25 Orang	78.947.500	1.579.000	2.368.500	75.000.000
Sub Total 9				89.846.500	1.797.000	2.695.500	85.354.000
10.	Kotawaringin Hilir	- Pembangunan MCK	2 x 3 M' (3 Unit)	35.553.800	711.100	1.066.700	33.776.000
Sub Total 10				35.553.800	711.100	1.066.700	33.776.000
11.	Tempayung	- Listrik Desa	1 Unit	45.069.500	901.400	1.352.100	42.816.000
Sub Total 11				45.069.500	901.400	1.352.100	42.816.000
12.	Suka Makmur	- Listrik Desa	1 Unit	23.721.100	474.400	711.700	22.535.000
		- Pembangunan Gedung TPA	6 x 16 M' (1 Unit)	95.442.100	1.908.900	2.863.200	90.670.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	8 Orang	21.052.500	421.000	631.500	20.000.000
Sub Total 12				140.215.700	2.804.300	4.206.400	133.205.000
13.	Kondang	- Pembuatan Tambatan Perahu	4 x 12 M' (1 Unit)	31.105.300	622.100	933.200	29.550.000
Sub Total 13				31.105.300	622.100	933.200	29.550.000
14.	Baboal Baboti	- Pembuatan Sumur Gali + MCK	2 x 3 M' (2 Unit)	35.397.900	708.000	1.061.900	33.628.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	16 Orang	50.526.300	1.010.500	1.516.000	47.999.800
Sub Total 14				85.924.200	1.718.500	2.577.900	81.627.800
Total				1.100.000.000	22.000.000	33.000.200	1.044.999.800

**b. ALOKASI DANA BLM KEGIATAN PNPM-MPd TA.2009
(KECAMATAN ARUT SELATAN)**

No.	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tanjung Terantang	- Pemb. Jembatan Ulin	2 x 8 M' (8 Unit)	65.198.800	1.303.900	1.955.900	61.939.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	8 Orang	16.842.000	336.800	505.200	16.000.000
Sub Total 1				82.040.800	1.640.700	2.461.100	77.939.000

No.	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Sulung Kenambui	- Pemb. Jembatan Titian	2 x 90 M' (1 Unit)	69.379.200	1.387.700	2.081.500	65.910.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	9 Orang	18.947.300	378.900	568.400	18.000.000
Sub Total 2				88.326.500	1.766.600	2.649.900	83.910.000
3.	Kumpai Batu Bawah	- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	131.954.800	2.639.250	3.958.550	125.357.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	8 Orang	16.842.000	336.800	505.200	16.000.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	12 Orang	20.000.000	400.000	600.000	19.000.000
Sub Total 3				168.796.800	3.376.050	5.063.750	160.357.000
4.	Mendawai	- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	94.367.800	1.887.300	2.831.500	89.649.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	21.052.500	421.000	631.500	20.000.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	21.052.500	421.000	631.500	20.000.000
Sub Total 4				136.472.800	2.729.300	4.094.500	129.649.000
5.	Rangda	- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	90.136.900	1.802.700	2.704.200	85.630.000
Sub Total 5				90.136.900	1.802.700	2.704.200	85.630.000
6.	Mendawai Seberang	- Pemb. Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	85.658.100	1.713.250	2.569.850	81.375.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	21.052.500	421.000	631.500	20.000.000
Sub Total 6				106.710.600	2.134.250	3.201.350	101.375.000
7.	Pasir Panjang	- Pemb. MCK	1 Unit	71.432.900	1.428.800	2.143.100	67.861.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	7 Orang	10.526.200	210.500	315.700	10.000.000
Sub Total 7				81.959.100	1.639.300	2.458.800	77.861.000
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Natai Raya	- Pemb. Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	67.662.300	1.353.400	2.029.900	64.279.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	5 Orang	10.526.200	210.500	315.700	10.000.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	7 Orang	14.736.800	294.700	442.100	14.000.000
Sub Total 8				92.925.300	1.858.600	2.787.700	88.279.000
9.	Natai Baru	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	21.052.500	421.000	631.500	20.000.000

No.	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
Sub Total 9				21.052.500	421.000	631.500	20.000.000
10.	Madurejo	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	21.052.500	421.000	631.500	20.000.000
Sub Total 10				21.052.500	421.000	631.500	20.000.000
11.	Medang Sari	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	5 Orang	10.526.200	210.500	315.700	10.000.000
Sub Total 11				10.526.200	210.500	315.700	10.000.000
Total				900.000.000	18.000.000	27.000.000	855.000.000

**c. ALOKASI DANA BLM KEGIATAN PNPM-MPd TA.2009
(KECAMATAN ARUT UTARA)**

No	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyombaan	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	16 Orang	76.840.000	1.536.000	2.304.000	73.000.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	12 Orang				
		- Sarana Air Bersih	3 x 6 M' (1 Unit)	49.572.500	992.000	1.487.000	47.093.500
Sub Total 1				126.412.500	2.528.000	3.791.000	120.093.500
2.	Nanga Mua	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	16 Orang	31.578.000	631.000	947.000	30.000.000
		- Pembuatan Saluran Drainase	180 M' (2 Unit)	44.285.000	886.000	1.329.000	42.070.000
Sub Total 2				75.863.000	1.517.000	2.276.000	72.070.000
3.	Sei Dau	- Listrik Desa	2 Unit	121.813.500	2.436.000	3.655.000	115.722.500
		- Pembangunan MCK + Sumur Gali	4 Unit	102.466.000	2.050.000	3.074.000	97.342.000
Sub Total 3				224.279.500	4.486.000	6.729.000	213.064.500
4.	Sambi	- Pembangunan Gedung TK	9 x 9 M' (1 Unit)	120.538.500	2.411.000	3.616.000	114.511.500
Sub Total 4				120.538.500	2.411.000	3.616.000	114.511.500
5.	Gandis	- Pembangunan Gedung TK	7 x 8 M' (1 Unit)	119.363.500	2.387.000	3.581.000	113.395.500
Sub Total 5							

No	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
				119.363.500	2.387.000	3.581.000	113.395.500
6.	Panahan	- Rehab Jembatan Kayu Ulin	3 x 10 M'(1 Unit)	25.800.000	516.000	774.000	24.510.000
		- Pembuatan Sumur Gali	3 Unit	76.848.000	1.537.000	2.306.000	73.005.000
Sub Total 6				102.648.000	2.053.000	3.080.000	97.515.000
7.	Kerabu	- Pembangunan. Pasar Desa	6 x 24 M'(1 Unit)	83.368.000	1.667.000	2.501.000	79.200.000
		- Pembuatan Sumur Gali	7 Unit	47.527.000	951.000	1.426.000	45.150.000
Sub Total 7				130.895.000	2.618.000	3.927.000	124.350.000
Total				900.000.000	18.000.000	27.000.000	855.000.000

**d. ALOKASI DANA BLM KEGIATAN PNPM-MP_d TA.2009
(KECAMATAN KUMAI)**

No	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sungai Cabang	- Pembangunan Gedung TK	6 x 15 M' (1 Unit)	137.037.900	2.740.800	4.111.100	130.186.000
		- Meublair	1 Paket				
Sub Total 1				137.037.900	2.740.800	4.111.100	130.186.000
2.	Teluk Bogam	- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	122.773.600	2.455.400	3.683.200	116.635.000
		- Meublair	1 Paket				
Sub Total 2				122.773.600	2.455.400	3.683.200	116.635.000
3.	Kubu	- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	119.763.100	2.395.200	3.592.900	113.775.000
		- Meublair	1 Paket				
Sub Total 3				119.763.100	2.395.200	3.592.900	113.775.000
4.	Sungai Bedaun	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	70.850.500	1.417.000	2.125.500	67.308.000
Sub Total 4				70.850.500	1.417.000	2.125.500	67.308.000
5.	Sungai Kapitan	- Pembangunan Gedung Madrasah	7 x 32 M' (1 Unit)	165.231.700	3.304.700	4.957.000	156.970.000
Sub Total 5							

No	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
				165.231.700	3.304.700	4.957.000	156.970.000
6.	Pangkalan Satu	- Pembgn. Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	68.553.500	1.371.000	2.056.500	65.126.000
		- Meublair	1 Paket				
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	30 Orang	78.947.400	1.579.000	2.368.400	75.000.000
Sub Total 6				147.500.900	2.950.000	4.424.900	140.126.000
7.	Kumai Hilir	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	15 Orang	63.158.000	1.263.200	1.894.800	60.000.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang				
Sub Total 7				63.158.000	1.263.200	1.894.800	60.000.000
8.	Keraya	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	25 orang	52.631.700	1.052.700	1.579.000	50.000.000
Sub Total 8				52.631.700	1.052.700	1.579.000	50.000.000
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Candi	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	9 Orang	21.052.600	421.000	631.600	20.000.000
Sub Total 9				21.052.600	421.000	631.600	20.000.000
Total				900.000.000	18.000.000	27.000.000	855.000.000

**e. ALOKASI DANA BLM KEGIATAN PNPM-MPd TA.2009
(KECAMATAN PANGKALAN LADA)**

No	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sungai Rangit Jaya	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	29 Orang	63.157.800	1.263.100	1.894.700	60.000.000
		- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	76.693.700	1.533.900	2.300.800	72.859.000
Sub Total 1				139.851.500	2.797.000	4.195.500	132.859.000
2.	Lada Mandala Jaya	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	42.105.200	842.100	1.263.100	40.000.000
		- Penimbunan Jalan	3 x 700 M' (1 Unit)	69.147.300	1.382.900	2.074.400	65.690.000
Sub Total 2							

No	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
				111.252.500	2.225.000	3.337.500	105.690.000
3.	Purbasari	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	105.263.000	2.105.200	3.157.800	100.000.000
		- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang				
Sub Total 3				105.263.000	2.105.200	3.157.800	100.000.000
4.	Kadipi Atas	- Pembangunan Gedung TK	6 x 14 M' (1 Unit)	115.487.500	2.309.800	3.464.700	109.713.000
Sub Total 4				115.487.500	2.309.800	3.464.700	109.713.000
5.	Sumber Agung	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	66.772.700	1.335.500	2.003.200	63.434.000
Sub Total 5				66.772.700	1.335.500	2.003.200	63.434.000
6.	Pangkalan Tiga	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	75.475.800	1.509.500	2.264.300	71.702.000
Sub Total 6				75.475.800	1.509.500	2.264.300	71.702.000
7.	Sungai Melawen	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	71.738.000	1.434.800	2.152.200	68.151.000
Sub Total 7				71.738.000	1.434.800	2.152.200	68.151.000
8.	Makarti Jaya	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	77.191.500	1.543.800	2.315.700	73.332.000
Sub Total 8				77.191.500	1.543.800	2.315.700	73.332.000
9.	Pangkalan Durin	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	63.706.500	1.274.200	1.911.300	60.521.000
Sub Total 9				63.706.500	1.274.200	1.911.300	60.521.000
10.	Pangkalan Dewa	- Pembangunan Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	73.261.000	1.465.200	2.197.800	69.598.000
Sub Total 10				73.261.000	1.465.200	2.197.800	69.598.000
Total				900.000.000	18.000.000	27.000.000	855.000.000

f. ALOKASI DANA BLM KEGIATAN PNPM-MPd TA.2009
(KECAMATAN PANGKALAN BANTENG)

No.	Desa / Kelurahan	Nama Kegiatan	Volume Kegiatan	Alokasi Dana (Rp.)			
				PNPM	UPK 2%	TPK 3%	Kegiatan 95%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sidomulyo	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	13 Orang	42.105.100	842.100	1.263.000	40.000.000
		- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	88.452.800	1.769.100	2.653.700	84.030.000
Sub Total 1				130.557.900	2.611.200	3.916.700	124.030.000
2.	Arga Mulya	- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	97.242.200	1.944.900	2.917.300	92.380.000
Sub Total 2				97.242.200	1.944.900	2.917.300	92.380.000
3.	Sungai Kuning	- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	84.684.300	1.693.700	2.540.600	80.450.000
Sub Total 3				84.684.300	1.693.700	2.540.600	80.450.000
4.	Mulya Jadi	- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	94.894.800	1.897.900	2.846.900	90.150.000
Sub Total 4				94.894.800	1.897.900	2.846.900	90.150.000
5.	Karang Mulya	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	73.684.100	1.473.600	2.210.500	70.000.000
		- Pembangunan Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	98.799.300	1.976.100	2.964.200	93.859.000
Sub Total 5				172.483.400	3.449.700	5.174.700	163.859.000
6.	Natai Kerbau	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	31.578.800	631.500	947.300	30.000.000
		- Pembngnan. Gedung Posyandu	6 x 8 M' (1 Unit)	60.026.300	1.200.500	1.800.800	57.025.000
Sub Total 6				91.605.100	1.832.000	2.748.100	87.025.000
7.	Sungai Hijau	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	10 Orang	42.105.100	842.100	1.263.000	40.000.000
		- Pembngnan. Gedung TK	6 x 16 M' (1 Unit)	94.052.500	1.881.000	2.821.500	89.350.000
Sub Total 7				136.157.600	2.723.100	4.084.500	129.350.000
8.	Sungai Bengkuang	- Pembangunan Gedung TK	6 x 9 M' (1 Unit)	56.795.900	1.136.000	1.703.900	53.956.000
Sub Total 8				56.795.900	1.136.000	1.703.900	53.956.000
9.	Amin Jaya	- Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	13 Orang	35.578.800	711.500	1.067.300	33.800.000
Sub Total 9				35.578.800	711.500	1.067.300	33.800.000
Total				900.000.000	18.000.000	27.000.000	855.000.000

2. Bidang Tata Pemerintahan.

Tugas pembantuan yang diberikan kepada desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 2009 bersifat pemberian tugas kepada desa untuk melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan rencana dan kebutuhan desa masing-masing. Sesuai dengan amanat pasal 212 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah No. 72 tentang Desa.

Sejak tahun anggaran 2007 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menyediakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten untuk membiaya penyelenggaraan pembangunan di tingkat desa sekaligus sebagai pendanaan bagi desa dalam melaksanakan tugas-tugas pembantuan. Dengan ditetapkannya Alokasi Dana Desa tersebut, maka bantuan pembangunan sebelumnya dalam bentuk Bantuan Pembangunan Desa (Bangdes) ditiadakan dan diakomodir langsung dalam Alokasi Dana Desa tersebut.

Melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 49 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang penetapan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 17.857.583.010,- (tujuh belas milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sepuluh rupiah) untuk 75 desa dengan perincian sebagai berikut :

NO	KECAMATAN DESA	BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)
1	2	3	4	5	6
	I. ARUT SELATAN				
1	Pasir Panjang	0.0197	272,348,812	204,261,608	75.00
2	Kumpai Batu Bawah	0.0114	212,508,030	212,508,029	100.00
3	Kumpai Batu Atas	0.0147	233,073,323	233,073,323	100.00
4	Tanjung Putri	0.0079	208,515,188	208,515,179	100.00
5	Sulung Kenambui	0.0183	261,179,224	78,353,767	30.00
6	Rangda	0.0068	204,687,776	204,687,775	100.00
7	Umpang	0.0241	287,914,105	287,914,104	100.00
8	Runtu	0.0211	274,203,910	274,203,911	100.00
9	Natai Raya	0.0073	205,087,639	205,087,639	100.00
10	Medang Sari	0.0111	221,137,010	221,137,010	100.00
11	Tanjung Terantang	0.0108	209,080,481	208,980,480	99.95
12	Natai Baru	0.0070	202,345,600	202,345,600	100.00
	JUMLAH		2,792,081,098	2,541,068,425	91.01
	II. ARUT UTARA				
1	Nanga Mua	0.0172	251,582,087	188,686,527	75.00
2	Sukarami	0.0115	243,879,050	243,879,015	100.00
3	Gandis	0.0158	244,041,480	244,041,480	100.00
4	Kerabu	0.0158	244,726,990	73,418,097	30.00
5	Sambi	0.0186	262,550,244	262,550,244	100.00
6	Penyombaan	0.0159	239,928,120	239,928,120	100.00
7	Pandau	0.0195	229,405,341	172,054,005	75.00
8	Riam	0.0143	233,758,833	233,758,833	100.00
9	Panahan	0.0243	280,938,791	210,704,093	75.00
10	Sungai Dau		240,264,385	180,198,288	75.00
	JUMLAH		2,471,075,321	2,049,218,702	82.93

NO	KECAMATAN DESA	BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)
1	2	3	4	5	6
	III. KUMAI				
1	Sungai Kapitan	0.0193	275,977,893	275,977,893	100.00
2	Sungai Tendang	0.0126	230,734,147	230,734,147	100.00
3	Batu Belaman	0.0074	211,868,945	211,868,945	100.00
4	Kubu	0.0189	273,921,263	273,921,263	100.00
5	Sungai Bedaun	0.0181	253,638,617	253,638,617	100.00
6	Sungai Sekonyer	0.0255	308,479,399	308,479,399	100.00
7	Teluk Pulai	0.0204	274,889,420	274,889,420	100.00
8	Sei Cabang	0.0199	267,348,812	267,348,812	100.00
9	Sungai Bakau	0.0123	217,306,598	217,306,598	100.00
10	Teluk Bogam	0.0099	211,539,874	211,539,873	100.00
11	Keraya	0.0079	199,866,207	199,772,552	99.95
12	Sebuai	0.0091	208,112,325	208,112,325	100.00
13	Pangkalan Satu	0.0107	218,394,971	218,394,969	100.00
14	Bumi Harjo	0.0173	262,953,107	262,953,107	100.00
	JUMLAH		3,415,031,578	3,414,937,920	99.997
	IV. KTW. LAMA				
1	Babual/Baboti	0.0118	220,451,501	220,451,501	100.00
2	Tempayang	0.0095	208,797,834	208,797,834	100.00
3	Sakabulin	0.0087	206,941,305	206,941,305	100.00
4	Kinjil	0.0081	199,886,207	149,914,656	75.00
5	Dawak	0.0077	195,087,639	146,315,728	75.00
6	Lalang	0.0069	188,232,541	188,232,541	100.00
7	Riam Durian	0.0106	227,023,842	227,023,889	100.00
8	Rungun	0.0113	232,508,030	232,508,030	100.00
9	Kondang	0.0085	201,942,737	201,942,737	100.00
10	Palih Baru	0.0141	229,645,774	229,645,773	100.00
11	Sukajaya	0.0083	200,571,717	200,571,717	100.00
12	Suka Makmur	0.0142	231,016,794	231,016,794	100.00
13	Sumber Mukti	0.0127	224,564,559	224,564,559	100.00
14	Ipuh Bangun Jaya	0.0131	232,790,677	232,790,677	100.00
15	Sagu Suka Mulya	0.0098	219,080,481	219,080,481	100.00
	JUMLAH		3,218,541,638	3,119,798,222	96.93

NO	KECAMATAN DESA	BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			PAGU	REALISASI	PENYERAPAN (%)
1	2	3	4	5	6
V. PANGKALAN LADA					
1	Purbasari	0.0163	266,289,520	266,289,520	100.00
2	Sumber Agung	0.0143	281,210,845	281,210,845	100.00
3	Sungai Rangit Jaya	0.0110	223,294,920	223,294,920	100.00
4	Pandu Sanjaya	0.0169	271,587,433	271,587,433	100.00
5	Lada Mandala Jaya	0.0120	270,976,135	270,976,133	100.00
6	Pangkalan Tiga	0.0126	236,539,702	236,539,702	100.00
7	Makarti Jaya	0.0105	218,608,305	218,608,305	100.00
8	Pangkalan Durin	0.0113	226,147,642	226,147,642	100.00
9	Pangkalan Dewa	0.0124	236,335,936	236,335,936	100.00
10	Kadipi Atas	0.0095	208,012,479	208,012,479	100.00
11	Sungai Melawen	0.0124	227,354,765	227,354,765	100.00
JUMLAH			2,666,357,682	2,666,357,680	100.00
VI. PKLN. BANTENG					
1	Pangkalan Banteng	0.0365	281,744,517	281,744,517	100.00
2	Karang Mulya	0.0146	257,025,909	257,025,909	100.00
3	Mulya Jadi	0.0148	255,897,460	255,897,460	100.00
4	Marga Mulya	0.0113	228,389,067	228,389,067	100.00
5	Kebun Agung	0.0107	226,080,581	226,080,581	100.00
6	Sido Mulyo	0.0185	264,493,714	264,493,714	100.00
7	Amin Jaya	0.0241	331,902,132	331,902,131	100.00
8	Arga Mulya	0.0139	246,727,996	246,727,996	100.00
9	Natai Kerbau	0.0148	256,712,524	256,712,523	100.00
10	Simpang Berambai	0.0119	231,445,555	231,445,553	100.00
11	Sungai Hijau	0.0121	234,502,043	234,502,043	100.00
12	Sungai Kuning		219,080,481	219,080,481	100.00
13	Sungai Bengkuang		260,493,714	260,493,714	100.00
JUMLAH			3,294,495,693	3,294,495,689	100.00
JUMLAH KESELURUHAN			17,857,583,010	17,085,876,638	95.68

5	Rangda	0.0068	174,042,083	59,425,646	233,467,729
6	Sulung Kenambui	0.0183	174,042,083	158,609,746	332,651,829
7	Umpang	0.0241	174,042,083	209,032,318	383,074,401
8	Tanjung Putri	0.0079	174,042,083	68,497,266	242,539,349
9	Runtu	0.0211	174,042,083	183,274,255	357,316,338
10	Medang Sari	0.0111	174,042,083	96,130,491	270,172,574
11	Natai Baru	0.0070	174,042,083	60,539,103	234,581,186
12	Tanjung Terantang	0.0108	174,042,083	93,430,437	267,472,520
	JUMLAH		2,088,504,996	1,391,140,127	3,479,645,123
	II. ARUT UTARA				
1	Nanga Mua	0.0172	174,042,083	149,533,273	323,575,356
2	Sukarami	0.0115	174,042,083	99,934,666	273,976,749
3	Gandis	0.0158	174,042,083	136,840,634	310,882,717
4	Kerabu	0.0158	174,042,083	137,140,222	311,182,305
5	Sambi	0.0186	174,042,083	161,403,676	335,445,759
6	Penyombaan	0.0159	174,042,083	138,555,447	312,597,530

NO	KECAMATAN DESA	BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			ADDM	ADDP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
II. ARUT UTARA					
1	Nanga Mua	0.0172	174,042,083	149,533,273	323,575,356
2	Sukarami	0.0115	174,042,083	99,934,666	273,976,749
3	Gandis	0.0158	174,042,083	136,840,634	310,882,717
4	Kerabu	0.0158	174,042,083	137,140,222	311,182,305
5	Sambi	0.0186	174,042,083	161,403,676	335,445,759
6	Penyombaan	0.0159	174,042,083	138,555,447	312,597,530
7	Pandau	0.0195	174,042,083	169,267,916	343,309,999
8	Riam	0.0143	174,042,083	124,124,999	298,167,082
9	Panahan	0.0243	174,042,083	210,987,802	385,029,885
10	Sungai Dau	-	-	-	-
JUMLAH			1,566,378,747	1,327,788,635	2,894,167,382
III. KUMAI					
1	Sungai Tendang	0.0126	174,042,083	109,148,082	283,190,165
2	Batu Belaman	0.0074	174,042,083	64,265,887	238,307,970
3	Sungai Kapitan	0.0193	174,042,083	167,762,197	341,804,280
4	Kubu	0.0189	174,042,083	164,114,420	338,156,503
5	Sungai Bakau	0.0123	174,042,083	106,532,707	280,574,790
6	Teluk Bogam	0.0099	174,042,083	85,656,017	259,698,100
7	Keraya	0.0079	174,042,083	69,050,058	243,092,141
8	Sebuai	0.0091	174,042,083	79,220,617	253,262,700
9	Teluk Pulai	0.0204	174,042,083	177,285,600	351,327,683
10	Sungai Cabang	0.0199	174,042,083	172,654,606	346,696,689
11	Sungai Sekonyer	0.0255	174,042,083	221,450,908	395,492,991
12	Sungai Bedaun	0.0181	174,042,083	157,589,218	331,631,301
13	Bumi Harjo	0.0173	174,042,083	149,887,605	323,929,688
14	Pangkalan Satu	0.0107	174,042,083	93,045,599	267,087,682
JUMLAH			2,436,589,162	1,817,663,521	4,254,252,683
IV. KTW. LAMA					
1	Lalang	0.0069	174,042,083	59,900,193	233,942,276
2	Rungun	0.0113	174,042,083	98,434,587	272,476,670
3	Kondang	0.0085	174,042,083	73,847,660	247,889,743
4	Riam Durian	0.0106	174,042,083	92,178,507	266,220,590
5	Dawak	0.0077	174,042,083	66,634,975	240,677,058
6	Sukajaya	0.0083	174,042,083	72,503,576	246,545,659
7	Kinjil	0.0081	174,042,083	70,493,200	244,535,283
8	Sakabulin	0.0087	174,042,083	75,585,252	249,627,335
9	Tempayang	0.0095	174,042,083	82,796,259	256,838,342
10	Babual Baboti	0.0118	174,042,083	102,083,530	276,125,613
11	Sumber Mukti	0.0127	174,042,083	109,902,694	283,944,777
12	Suka Makmur	0.0142	174,042,083	123,577,567	297,619,650
13	Ipuh Bangun Jaya	0.0131	174,042,083	113,979,586	288,021,669
14	Palih Baru	0.0141	174,042,083	122,733,622	296,775,705
15	Sagu Suka Mulya	0.0098	174,042,083	84,881,369	258,923,452
JUMLAH			2,610,631,245	1,349,532,576	3,960,163,821

NO	KECAMATAN DESA	BOBOT DESA	ALOKASI DANA DESA (ADD)		
			ADDM	ADDP	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	V. PANGKALAN LADA				
1	Pandu Sanjaya	0.0169	174,042,083	146,860,682	320,902,765
2	Pangkalan Tiga	0.0126	174,042,083	109,605,717	283,647,800
3	Lada Mandala Jaya	0.0120	174,042,083	104,380,154	278,422,237
4	Makarta Jaya	0.0105	174,042,083	91,054,439	265,096,522
5	Sumber Agung	0.0143	174,042,083	123,923,832	297,965,915
6	Purbasari	0.0163	174,042,083	141,381,874	315,423,957
7	Sungai Rangit Jaya	0.0110	174,042,083	95,757,825	269,799,908
8	Pangkalan Dewa	0.0124	174,042,083	107,823,627	281,865,710
9	Kadipi Atas	0.0095	174,042,083	82,376,277	256,418,360
10	Pangkalan Durin	0.0113	174,042,083	98,197,466	272,239,549
11	Sungai Melawen	0.0124	174,042,083	107,711,223	281,753,306
	JUMLAH		1,914,462,913	1,209,073,116	3,123,536,029
	VI. PKLN. BANTENG				
1	Pangkalan Banteng	0.0365	174,042,083	317,097,387	491,139,470
2	Karang Mulya	0.0146	174,042,083	127,126,770	301,168,853
3	Kebon Agung	0.0107	174,042,083	92,781,546	266,823,629
4	Sido Mulya	0.0185	174,042,083	161,078,376	335,120,459
5	Marga Mulya	0.0113	174,042,083	98,261,229	272,303,312
6	Amin Jaya	0.0241	174,042,083	209,786,087	383,828,170
7	Arga Mulya	0.0139	174,042,083	121,049,082	295,091,165
8	Mulya Jadi	0.0148	174,042,083	128,737,313	302,779,396
9	Natai Kerbau	0.0148	174,042,083	128,886,758	302,928,841
10	Simpang Berambai	0.0119	174,042,083	103,012,765	277,054,848
11	Sungai Hijau	0.0121	174,042,083	104,765,667	278,807,750
12	Sungai Bengkuang	-	-	-	-
13	Sungai Kuning	-	-	-	-
	JUMLAH		1,914,462,913	1,592,582,981	3,507,045,894
	JUMLAH KESELURUHAN		12,531,029,976	8,687,960,000	21,218,990,000

BAB VI

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Bidang Statistik

1.1. Kebijakan dan Kegiatan.

1.1.1 Kebijakan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan kerjasama statistik dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah.

Pembangunan statistik merupakan salah satu usaha untuk mencapai sasaran pembangunan nasional jangka panjang dalam kebijaksanaan pembangunan statistik diarahkan guna pemenuhan data statistik bagi kepentingan pemerintah, swasta sebagai kajian dan penelaahan hasil pembangunan yang telah dicapai yang selanjutnya sebagai bahan acuan dalam melaksanakan pembangunan dimasa depan sehingga sasarnya lebih tepat dan akurat.

Forum Koordinasi yang dilaksanakan adalah untuk melakukan penyusunan data statistik dalam berbagai bidang antara lain : ekonomi, sosial, kependudukan, pendidikan, pemerintahan dan lain sebagainya.

1.1.2. Kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan dan penerbitan buku Publikasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam tahun anggaran 2009 terdiri dari :

1. Data Pokok Pembangunan Daerah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2008
2. Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2008
3. Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008
4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab. Kotawaringin Barat T. 2008
5. Distribusi Pendapatan Penduduk Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2008
6. Potensi Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008

Dapat dijelaskan bahwa data yang ditampilkan dalam buku Publikasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2009 merupakan data kondisi akhir tahun 2008 mengingat pendataannya dilakukan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir sehingga data untuk tahun anggaran 2009 akan ditampilkan pada buku Publikasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun anggaran 2010 .

1.2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Hasil dari Kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat dalam peyiapan data statistik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2009, dapat dipakai dan dipergunakan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat dan umumnya Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Buku Data Pokok Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 berisikan data hasil pembangunan, sebagai bahan perbandingan untuk melihat sampai sejauh mana tujuan pembangunan telah dicapai, sebagai acuan guna menentukan langkah pembangunan tahap berikutnya.
2. Buku Publikasi Kabupaten Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2008 dengan tujuan dan sasaran untuk dapat memberikan gambaran / informasi dari hasil yang telah dicapai dalam tahun 2008 dari berbagai sektor pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Buku Publikasi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 hasil survey penduduk yang dikumpulkan oleh petugas statistik dengan sasaran 6 kecamatan 83 desa, dengan tujuan dan sasaran :
 - a. Sebagai data / informasi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data akhir Desember 2008 merupakan data *up to date*, benar dan terpercaya merupakan suatu input menuju tercapainya suatu sistim perencanaan yang terarah dan sistimatis dalam penyebaran penduduk, ekonomi, pendidikan, pemerintahan dan lainnya pada masyarakat kota dan pedesaan.
 - b. Memudahkan bagi semua pihak, baik aparatur pemerintah, swasta untuk memberikan bimbingan baik terhadap pemerintah / masyarakat perkotaan maupun pedesaan, untuk secara bersama-sama mengarahkan kehidupan yang dinamis dan seimbang antara kehidupan

di kota maupun di pedesaan, dengan demikian pemerataan pembangunan cepat terwujud.

- c. Mengembangkan sistim perstatistikan yang lebih lengkap guna memudahkan pelayanan kepada pemerintah, masyarakat khususnya data kependudukan, merupakan modal dasar pembangunan dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 yang kita cita-citakan.

4. Buku Publikasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008.

Tujuan dan sasarannya adalah untuk menggali, mengumpulkan data statistik Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2008 yang disusun dalam bentuk buku publikasi yang merupakan hasil Survei Khusus Pendapatan Regional Kotawaringin Barat Tahun 2008 yang akhirnya dapat dipakai dan dipergunakan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah dalam melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap pembangunan bidang ekonomi antara lain :

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Pendapatan Perkapita
- c. Perkembangan PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita
- d. Perkembangan PDRB menurut lapangan usaha / sektor ekonomi.

5. Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2008, merupakan hasil pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik secara sampel pada rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mendapatkan data / informasi tentang besarnya pendapatan penduduk dan tingkat pemerataannya, baik dibedakan menurut golongan pendapatannya, daerah perkotaan dan daerah pedesaan maupun menurut jenis kelamin dan pendidikan pada tahun 2008 dng tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Apakah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang selama ini cukup tinggi, dapat mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa pengamat ekonomi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dibarengi kenaikan atau membesarnya tingkat ketimpangan pendapatan (semakin tidak merata). Sedangkan para pakar pembangunan juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan saja membawa ketimpangan pendapatan yang tinggi akan juga menimbulkan kemiskinan penduduk tingkat bawah.

- b. Untuk mengukur distribusi pendapatan penduduk serta tingkat ketimpangan pendapatan penduduk dengan ukuran/kriteria Bank Dunia. Proses pembangunan sering diikuti oleh distribusi pendapatan yang tidak merata dan meningkatnya jumlah pengangguran. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan, lebih besar bagi suatu wilayah yang pembangunannya dari tingkat keterbelakangan yang rendah. Semakin rendah tingkat keterbelakangan ini semakin besar kemungkinan bahwa proses pembangunan akan menimbulkan ketimpangan pembagian pendapatan yang lebih besar.

6. Publikasi Potensi Desa Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 yang berisi berbagai data yang dirinci sampai ke tingkat desa, dengan tujuan sasaran yaitu :
 - a. Untuk dapat digunakan sebagai informasi tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum menurut desa.
 - b. Untuk mendapatkan gambaran adanya desa tertinggal.
 - c. Untuk menentukan desa kota / pedesaan bagi perencanaan lokasi dan jenis investasi usaha tingkat desa.

1.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Berkenaan dengan Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan berupa Penyusunan dan Penerbitan Buku Publikasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009, hasil kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat permasalahan yaitu data yang tersedia merupakan data kondisi tahun 2008 mengingat pendataannya baru dilakukan setelah tahun anggaran bersangkutan berakhir sehingga terdapat time lag 1 tahun dalam hal ketersediaan data terkini.

Solusi :

Melakukan upaya-upaya percepatan dalam rangka mendorong penyediaan data-data informasi pembangunan terkini diantaranya dengan melakukan rapat-rapat koordinasi pemutakhiran data dengan SKPD dan BPS Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Bidang Keamanan

2.1. Kebijakan dan Kegiatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan terkait (Polres, Kodim, Lanud, Kompi, POM)

2.1.1 Kebijakan

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah (Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat) dengan instansi vertikal di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah berkaitan dengan Bidang Intelijen (KOMINDA) dan kerjasama Bidang Keamanan.

2.1.2. Kegiatan yang dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Penanganan permasalahan yang berhubungan dengan isu yang berkembang / bergejolak dimasyarakat bernuansa konflik SARA, anarkhisme, separatisme dll.
- Penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pelaksanaan fungsi sosial masyarakat akibat terjadinya bencana dan pemberlakuan kebijakan Kepala Daerah.
- Penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan penyakit masyarakat seperti Minuman Keras, Penyalah gunaan Narkoba, Prostitusi, Gepeng dsb.

Kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan maksud agar ada pembagian peran, tugas dan tanggung-jawab serta untuk memudahkan didalam pengendalian, terutama menyangkut stabilitas keamanan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi Pelaksanaan Kegiatan adalah :

- Melakukan Koordinasi dengan Aparat Keamanan terkait untuk mengetahui sedini mungkin terhadap perkembangan situasi dan kondisi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari berbagai Ancaman, Tantangan,

Hambatan Dan Gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar daerah / Asing.

- Melakukan Koordinasi dalam hal mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban akibat terjadinya bencana banjir yang meluas dan meresahkan kehidupan masyarakat Kab. Ktw Barat yang tinggal di pinggiran DAS Arut dan Lamandau yang telah ditindak lanjuti dengan Penanganan oleh Pemerintah Daerah (lintas sektor).
- Melakukan Koordinasi dalam hal mengatasi terhadap gangguan pengerusakan ekosistem lingkungan akibat beroperasinya Penambangan liar pasir zirkon (puya) dan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) oleh masyarakat di areal Kawasan Konservasi dan Daerah Aliran Sungai Arut dalam bentuk Razia / Penertiban oleh Tim / aparat Keamanan.

2.3 Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi

Permasalahan :

- Keterbatasan pengetahuan personil Badan Kesbangpolinmas dalam hal menangani ketentraman dan ketertiban.
- Keterbatasan anggaran untuk mendukung kerjasama dengan instansi terkait bidang keamanan dan ketertiban.

Solusi :

- Mengikutsertakan personil dalam kegiatan pelatihan dan bimtek bidang keamanan dan ketertiban.
- Tersedianya anggaran yang memadai untuk menunjang kerjasama dengan instansi terkait bidang keamanan dan ketertiban.

B. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Sejalan dengan penyebaran penduduk, pemekaran wilayah desa dan kecamatan serta pertumbuhan investasi di bidang perkebunan yang sangat besar di Kabupaten Kotawaringin Barat, membawa konsekuensi terhadap munculnya konflik yang menyangkut masalah perbatasan, baik antar desa/kelurahan, kecamatan dan antar Kabupaten.

Penanganan sengketa batas wilayah antar desa dan kelurahan terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Antar Desa, sedangkan penanganan masalah perbatasan antar daerah terakhir mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai kondisi geografisnya berbatasan dengan 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan. Hasil kesepakatan batas sementara yang telah dicapai dengan ketiga kabupaten tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Tata Batas Wilayah Dengan	Jenis Kesepakatan	Yang Menetapkan	No. Surat Penetapan / Lampiran
1	Kab. Seruyan	BA.Kesepakatan Bersama	Tim Tata Batas Kobar – Seruyan	- No.- tgl 9 Okt 2004 - No.- tgl 10 Sept 2006
		Peta Acuan Batas Kobar – Seruyan	Tim Tata Batas Provinsi	-
		Nota Kesepakatan	Bupati Kobar, Seruyan, Lamandau dan Sukamara	Tanpa No. tanggal 5 Juli 2007 di Palangka raya
		Penegasan Gubernur	Gubernur Kalteng	130/1838/Tapra, tgl 1 Desember 2007
2.	Kab. Lamandau	Penetapan Peta Batas Sementara	Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat	BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006
3.	Kab. Sukamara	Penetapan Peta Batas Sementara	Bupati Lamandau, Sukamara dan Ktw. Barat	BA Tgl 18 Pebruari 2006 dan Nota Kesepahaman tgl 28 Sept 2006

Selanjutnya kesepakatan yang telah dicapai tersebut masih perlu ditindaklanjuti dalam beberapa tahapan hingga pada dituangkan kedalam peta batas definitif dan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini difasilitasi oleh Gubernur Kalteng.

Masalah Penanganan Pembinaan Batas wilayah dituangkan melalui Program Pengembangan Wilayah Perbatasan pada Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah dan Fasilitasi Penyelesaian konflik-konflik pertanahan dengan sasaran program ketegasan dan ketepatan serta akurasi tentang tata batas antar kabupaten pemekaran.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dalam Tahun 2009 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

No.	Program dan Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Manfaat Keberhasilan	Tingkat Capaian (%)
1	2	3		4
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	ketegasan dan ketepatan serta akurasi tentang tata batas antar kabupaten pemekaran	Pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan potensi konflik dapat dikerjakan secara optimal	36,24
	Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah	tercapainya Kesepakatan tata batas antar kabupaten, kecamatan, desa	Semakin jelas dan tegas batas administrasi antar wilayah sehingga dapat mengurangi perselisihan sengketa batas & tanah	48,35
	Kegiatan Fasilitasi Peyelesaian konflik-konflik pertanahan	tercapainya kesepakatan antara pihak yang bersengketa	Pemerintah dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai fasilitator & mediator dalam sengketa tanah melalui mekanisme musyawarah mufakat	20,69

3. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

Permasalahan :

-) Kegiatan koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah adalah kegiatan yang memerlukan keterkaitan dan sinergitas antar wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Sukamara. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut belum mencapai target yang diharapkan mengingat di beberapa titik batas yang diprioritaskan untuk penegasan pada Tahun Anggaran 2009 belum mencapai kesepakatan dengan tiga kabupaten

dimaksud, selain itu jadwal koordinasi pembahasan antar tim tata batas kabupaten belum padu sehingga menghambat proses lebih lanjut.

- J) Perbedaan peta dasar yang digunakan sebagai acuan oleh masing-masing tim tata batas kabupaten menjadikan hambatan dalam proses kesepakatan batas tersebut.
- J) Masih kurangnya kualitas sumber daya aparatur dan teknologi pendukung pemetaan dalam percepatan penegasan batas antar kabupaten menjadikan hambatan tersendiri dalam proses pelaksanaan dilapangan, khususnya dalam hal ketepatan dan akurasi tata batas tersebut.

Solusi :

- J) Melalui peningkatan kerjasama antar daerah, kegiatan ini dapat lebih diintensifkan dan difokuskan, baik dalam penjadwalan pertemuan koordinasi antar tim tata batas kabupaten, kesepakatan penggunaan peta dasar acuan, serta pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
- J) Pendidikan dan latihan yang intensif serta berkelanjutan terhadap aparatur yang membidangi tugas penegasan batas antar wilayah.

Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

Permasalahan :

- J) Kewenangan tim fasilitasi sengketa tanah Pemkab. Kobar terbatas dan hanya bersifat sebagai mediator.
- J) Penyelesaian konflik pertanahan di Bagian Administrasi Pemerintahan bersifat menunggu dari laporan/permohonan masyarakat atau pihak yang bersengketa untuk difasiltasi penyelesaiannya.
- J) Adanya unit kegiatan yang sama di kantor Pertanahan Pangkalan Bun yang menangani sengketa pertanahan sehingga tidak semua permohonan fasilitasi sengketa tanah masuk ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin.
- J) Masih kurangnya kualitas sumber daya aparatur yang menangani proses tersebut khususnya masalah teknis penyelesaian.

Solusi :

- J) Harus dilakukan pengkajian lebih mendalam menyangkut persoalan kewenangan dan koordinasi dengan kantor pertanahan berkaitan dengan penanganan kegiatan dimaksud.

- J Pendidikan dan latihan yang intensif serta berkelanjutan terhadap aparatur yang membidangi tugas fasilitasi sengketa pertanahan.

C. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya

Bencana yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2009 berupa :

- a. Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan (mulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2009).

Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan, Lahan dan Pekarangan berpedoman dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 21 Tahun 2009 yang berlaku efektif mulai tanggal 10 Agustus 2009 yaitu tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, disamping itu untuk mengantisipasi berkembangnya kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat membentuk Tim Serbu Api yang melibatkan lintas instansi terkait dan masyarakat.

- b. Bencana Banjir Musiman / Air Pasang (mulai bulan April sampai dengan Mei 2009 dan bulan Desember 2009 sampai dengan awal Januari 2010).

Penanggulangan Bencana Banjir Musiman / Air Pasang hanya bersifat pendataan korban dan pemberian bantuan bahan makanan (beras dan mie instan) kepada kepala keluarga yang rumahnya tersendam air disepanjang bantaran aliran sungai Arut dan Lamandau.

Banjir musiman/air pasang terjadi apabila curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama sehingga mengakibatkan naiknya permukaan air.

2. Status Bencana yang terjadi di kabupaten Kotawaringin Barat termasuk klasifikasi Bencana Lokal, dan bencana yang terjadi merupakan Bencana Klimatologis (bencana alam yang disebabkan oleh cuaca yang berubah).

3. Sumber dan jumlah anggaran SKPD yang dialokasikan

Anggaran yang digunakan untuk lingkup Badan KESBANG, POL dan LINMAS Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menangani Pencegahan dan Penanggulangan

Bencana, bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 91.920.000,- dengan rincian peruntukannya sebagai berikut :

- a. Untuk kegiatan Informasi potensi bencana dilaksanakan Penyuluhan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Bencana di 6 Kecamatan sebesar Rp. 62.800.000,-
- b. Honorarium dan Upah Kerja Petugas Posko dan Petugas Piket Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 17.720.000,-
- c. Lain-lain untuk biaya Koordinasi, Konsultasi dan Monitoring/Pemantauan ke wilayah terjadinya bencana sebesar Rp. 11.400.000,-

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Badan KESBANG,POL dan LINMAS Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan antisipasi dalam menghadapi kemungkinan bencana tahun 2009 antara lain berupa kegiatan :

- a. Melaksanakan penyuluhan Kewaspadaan terhadap Gangguan Bencana yang pelaksanaannya tersebar pada wilayah desa di 6 (enam) kecamatan se Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Mensosialisasikan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 sebagaimana telah diganti dengan Nomor 21 Tahun 2009 yang berlaku efektif mulai tanggal 10 Agustus 2009 yaitu tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah.

5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

- a. Terjadinya bencana banjir di pinggiran DAS Arut dan Lamandau yang terjadi setiap tahun pada saat musim penghujan tiba.
- b. Terjadinya kebakaran di kawasan hutan, perkebunan maupun pemukiman penduduk pada saat musim kemarau tiba.
- c. Berpotensi terjadinya angin puting beliung pada saat perubahan musim dari musim kemarau ke musim penghujan maupun sebaliknya.

D. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi

Sepanjang tahun 2009 situasi keamanan dan ketertiban cukup kondusif dan terkendali dalam arti tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang cukup berarti.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum.

SKPD yang menangani kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Satpol PP.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Pegawai Badan Kesbangpolinmas Kab. Ktw. Barat yang dilibatkan dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebanyak 6 (enam) orang dengan kualifikasi sbb :

No.	Nama	Pendidikan	Pangkat/Gol.Ruang
1.	Latip, SH.	S.1 (Hukum)	Pembina Tk. I (IV/b)
2.	Drs. Sandin	S.1	Pembina Tk. I (IV/b)
3.	Ganepodinur, SH.	S.1 (Hukum)	Pembina (IV/a)
4.	Majerum Purni, SH	S.1 (Hukum)	Pembina (IV/a)
5.	Marwoto, S.Ip	S.1 (Sospol)	Pembina (IV/a)
6.	H. Syamsul E, S.Ip.	S.1 (Sospol).	Penata (III/d).
7.	Damanhuri	SLTA	Penata (III/c).
8.	Gusti Madin	SLTA	Penata (III/a).
9.	Sugriwo	SLTA	Penata (III/a).

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum berasal dari dana APBD Kabupaten sebesar Rp. 2.141.669.000,- yang diwujudkan melalui Program Peningkatan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal..

5. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan / penanganan dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah dibentuknya berbagai Tim yang ditetapkan dengan SK. Bupati Kotawaringin Barat .

Kendala :

- Keterbatasan pengetahuan personil dalam hal menangani ketentraman dan ketertiban.
 - Keterbatasan anggaran untuk mendukung kerjasama dengan instansi terkait bidang keamanan dan ketertiban.
6. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban umum, yaitu dengan dilibatkannya unsur-unsur :
- Polres Kobar.
 - Kodim 1014 PBn.
 - Lanud Iskandar
 - Sub Denpom Vi / 3-2.
 - Kompi B / 631 Antang.

BAB VII P E N U T U P

Demikian laporan ini dibuat dan disampaikan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Selain berfungsi sebagai pertanggungjawaban administratif, laporan ini juga diharapkan menjadi Tolok Ukur Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah oleh masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai pemberi mandat.

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2009

Kode	Uraian Urusan, Organisasi Program dan Kegiatan	%
1	2	12
1	URUSAN WAJIB	94,79
1.01	Pendidikan	95,04
1.01.1.01.01	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	95,04
1.01.1.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,93
1.01.1.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	87,41
1.01.1.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	81,00
1.01.1.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	80,21
1.01.1.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96,92
1.01.1.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	83,15
1.01.1.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	87,52
1.01.1.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,06
1.01.1.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	96,70
1.01.1.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	93,40
1.01.1.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	96,47
1.01.1.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.01.1.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00
1.01.1.01.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	94,82
1.01.1.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	87,98
1.01.1.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79,51

1.01.1.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	76,91
1.01.1.01.01.02.02	Pembangunan rumah dinas	70,68
1.01.1.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91,04
1.01.1.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99,07
1.01.1.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	41,00
1.01.1.01.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	46,26
1.01.1.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	33,70
1.01.1.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	94,32
1.01.1.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00
1.01.1.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	84,70
1.01.1.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
1.01.1.01.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	99,60
1.01.1.01.01.15.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	99,60
1.01.1.01.01.16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	98,31
1.01.1.01.01.16.02	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	99,07
1.01.1.01.01.16.03	Penambahan ruang kelas sekolah	98,31
1.01.1.01.01.16.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	99,52
1.01.1.01.01.16.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	98,96
1.01.1.01.01.16.19	Pengadaan mebeluer sekolah	99,30
1.01.1.01.01.16.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	95,40

1.01.1.01.01.16.25	Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah	100,00
1.01.1.01.01.16.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	99,88
1.01.1.01.01.16.54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	99,49
1.01.1.01.01.16.61	Membina SMP Terbuka	58,57
1.01.1.01.01.16.63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	98,23
1.01.1.01.01.16.67	Penyelenggaraan Paket A Setara SD	69,86
1.01.1.01.01.16.68	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	78,53
1.01.1.01.01.16.70	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa	62,58
1.01.1.01.01.16.73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	99,00
1.01.1.01.01.17	Program Pendidikan Menengah	90,02
1.01.1.01.01.17.01	Pembangunan gedung sekolah	100,00
1.01.1.01.01.17.03	Penambahan ruang kelas sekolah	99,33
1.01.1.01.01.17.05	Pembangunan laboratorium dsan ruang praktikum sekolah (laboratorium bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)	100,00
1.01.1.01.01.17.09	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	99,12
1.01.1.01.01.17.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	100,00
1.01.1.01.01.17.13	Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya	99,60
1.01.1.01.01.17.18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	99,62
1.01.1.01.01.17.19	Pengadaan mebeluer sekolah	99,64
1.01.1.01.01.17.21	Pengadaan alat rumah tangga sekolah	66,64
1.01.1.01.01.17.41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	99,21
1.01.1.01.01.17.61	Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)	87,48
1.01.1.01.01.17.63	Penyelenggraan paket C setara SMU	71,27

1.01.1.01.01.17.66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan industri	89,50
1.01.1.01.01.18	Program Pendidikan Non Formal	71,54
1.01.1.01.01.18.05	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	69,48
1.01.1.01.01.18.06	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	95,86
1.01.1.01.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	77,57
1.01.1.01.01.20.04	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	63,71
1.01.1.01.01.20.07	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	73,78
1.01.1.01.01.20.08	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	78,45
1.01.1.01.01.20.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	99,86
1.01.1.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	55,43
1.01.1.01.01.22.01	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	34,02
1.01.1.01.01.22.02	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	100,00
1.01.1.01.01.22.05	Pembinaan dewan pendidikan	57,27
1.01.1.01.01.22.07	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	70,18
1.02	Kesehatan	94,69
1.02.1.02.01	Dinas Kesehatan	95,05
1.02.1.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,78
1.02.1.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	90,97
1.02.1.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	74,92
1.02.1.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	95,35

1.02.1.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	93,14
1.02.1.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.02.1.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.02.1.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,99
1.02.1.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	39,68
1.02.1.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,46
1.02.1.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	98,00
1.02.1.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,64
1.02.1.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98,39
1.02.1.02.01.02.02	Pembangunan rumah dinas	98,43
1.02.1.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	93,33
1.02.1.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	98,18
1.02.1.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	99,63
1.02.1.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96,33
1.02.1.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,00
1.02.1.02.01.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	99,50
1.02.1.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	99,00
1.02.1.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99,00
1.02.1.02.01.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	100,00
1.02.1.02.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	100,00
1.02.1.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85,32
1.02.1.02.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	85,32

1.02.1.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98,26
1.02.1.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	97,40
1.02.1.02.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100,00
1.02.1.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	97,40
1.02.1.02.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	99,61
1.02.1.02.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	99,77
1.02.1.02.01.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	69,13
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	93,05
1.02.1.02.01.16.01	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	91,63
1.02.1.02.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	87,82
1.02.1.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	91,09
1.02.1.02.01.16.13	penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	96,83
1.02.1.02.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	90,51
1.02.1.02.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	97,63
1.02.1.02.01.19.02	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	74,61
1.02.1.02.01.19.04	Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan	93,39
1.02.1.02.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	94,39
1.02.1.02.01.20.02	Pemberian tambahan makanan dan vitamin	95,39
1.02.1.02.01.20.03	Peanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang	87,23

	vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	
1.02.1.02.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	73,25
1.02.1.02.01.21.01	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	73,25
1.02.1.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	91,42
1.02.1.02.01.22.01	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	97,34
1.02.1.02.01.22.02	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	99,03
1.02.1.02.01.22.05	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	94,04
1.02.1.02.01.22.08	Peningkatan Imunisasi	73,41
1.02.1.02.01.22.09	Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah	83,42
1.02.1.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	93,98
1.02.1.02.01.23.03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	91,07
1.02.1.02.01.23.05	Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan	94,51
1.02.1.02.01.23.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	94,68
1.02.1.02.01.25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	92,74
1.02.1.02.01.25.04	Pengadaaan puskesmas keliling	97,40
1.02.1.02.01.25.11	Pengadaaan sarana dan prasarana posyandu	98,77
1.02.1.02.01.25.13	Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas	86,64
1.02.1.02.01.25.21	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	92,91

1.02.1.02.01.29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	96,94
1.02.1.02.01.29.01	Penyuluhan kesehatan anak balita	96,94
1.02.1.02.01.30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	99,52
1.02.1.02.01.30.01	Pelayanan pemeliharaan kesehatan	99,52
1.02.1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	94,43
1.02.1.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	97,09
1.02.1.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	84,09
1.02.1.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93,19
1.02.1.02.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	98,85
1.02.1.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	93,61
1.02.1.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	97,37
1.02.1.02.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	98,06
1.02.1.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,58
1.02.1.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	93,86
1.02.1.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	99,54
1.02.1.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99,60
1.02.1.02.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	99,49
1.02.1.02.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	94,93
1.02.1.02.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98,36
1.02.1.02.02.02.02	Pembangunan rumah dinas	99,03
1.02.1.02.02.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	99,20
1.02.1.02.02.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	99,48
1.02.1.02.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	94,44
1.02.1.02.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	100,00

	kantor	
1.02.1.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99,91
1.02.1.02.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	99,86
1.02.1.02.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	99,91
1.02.1.02.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99,91
1.02.1.02.02.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	0,00
1.02.1.02.02.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	0,00
1.02.1.02.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85,11
1.02.1.02.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	85,11
1.02.1.02.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,13
1.02.1.02.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99,40
1.02.1.02.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99,00
1.02.1.02.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	99,00
1.02.1.02.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	99,98
1.02.1.02.02.23.01	Penyusunan standar kesehatan	99,98
1.02.1.02.02.26	"Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata"	91,84
1.02.1.02.02.26.01	Pembangunan rumah sakit	85,44
1.02.1.02.02.26.18	Pengadaan alat-alat rumah sakit	93,55
1.02.1.02.02.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	99,92
1.02.1.02.02.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	98,99

1.02.1.02.02.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	99,57
1.02.1.02.02.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	99,08
1.02.1.02.02.26.24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	91,34
1.02.1.02.02.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	99,38
1.02.1.02.02.27.02	Pemeliharaan rutin/berkala ruang poliklinik rumah sakit	100,00
1.02.1.02.02.27.03	Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik	98,90
1.02.1.02.02.27.04	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)	100,00
1.02.1.02.02.27.06	Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU	100,00
1.02.1.02.02.27.07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi	99,72
1.02.1.02.02.27.08	Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi	100,00
1.02.1.02.02.27.13	Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen	100,00
1.02.1.02.02.27.14	Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rumah sakit	99,56
1.02.1.02.02.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	100,00
1.02.1.02.02.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	100,00
1.02.1.02.02.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	98,78
1.02.1.02.02.27.19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit	100,00
1.02.1.02.02.27.20	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	99,60
1.02.1.02.02.28	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	98,52
1.02.1.02.02.28.03	kemitraan pengolahan limbah rumah	99,50

	sakit	
1.02.1.02.02.28.05	kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	0,00
1.02.1.02.02.28.07	kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	98,85
1.03	Pekerjaan Umum	98,90
1.03.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	98,89
1.03.1.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,92
1.03.1.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	34,50
1.03.1.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71,95
1.03.1.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100,00
1.03.1.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	67,52
1.03.1.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	84,30
1.03.1.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	91,53
1.03.1.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.03.1.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,80
1.03.1.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.03.1.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	98,80
1.03.1.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.03.1.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	41,14
1.03.1.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	88,47
1.03.1.03.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,65
1.03.1.03.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,38
1.03.1.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	99,49
1.03.1.03.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	99,64
1.03.1.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	100,00
1.03.1.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung	97,61

	kantor	
1.03.1.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00
1.03.1.03.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	99,69
1.03.1.03.01.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	99,00
1.03.1.03.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.03.1.03.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	45,05
1.03.1.03.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45,05
1.03.1.03.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98,66
1.03.1.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99,20
1.03.1.03.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99,20
1.03.1.03.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	97,99
1.03.1.03.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	99,40
1.03.1.03.01.15.03	Pembangunan jalan	99,38
1.03.1.03.01.15.05	Pembangunan jembatan	99,48
1.03.1.03.01.16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	98,31
1.03.1.03.01.16.03	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	98,31
1.03.1.03.01.17	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	99,30
1.03.1.03.01.17.03	Pembangunan turap/talud/bronjong	99,30
1.03.1.03.01.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	99,24
1.03.1.03.01.18.03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	99,28

1.03.1.03.01.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	98,66
1.03.1.03.01.22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	99,27
1.03.1.03.01.22.01	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	99,18
1.03.1.03.01.22.02	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	99,72
1.03.1.03.01.23	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	97,34
1.03.1.03.01.23.04	Pengadaan alat-alat berat	99,73
1.03.1.03.01.23.06	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	99,00
1.03.1.03.01.23.10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	91,09
1.03.1.03.01.23.12	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	99,84
1.03.1.03.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	96,03
1.03.1.03.01.24.08	Pembangunan pintu air	98,70
1.03.1.03.01.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	97,72
1.03.1.03.01.24.14	Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai	97,67
1.03.1.03.01.24.15	Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	63,95
1.03.1.03.01.24.16	Pemberdayaan Petani Pemakai Air	3,36
1.03.1.03.01.25	Program penyediaan dan pengolahan air baku	98,72
1.03.1.03.01.25.01	Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	98,72
1.03.1.03.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	98,73
1.03.1.03.01.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	98,89

1.03.1.03.01.27.06	Pengembangan distribusi air minum	98,62
1.03.1.03.01.28	Program pengendalian banjir	99,09
1.03.1.03.01.28.06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	98,75
1.03.1.03.01.28.10	Pembangunan tanggul pemecah ombak	99,51
1.03.1.03.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	96,47
1.03.1.03.01.29.01	Perencanaan pengembangan infrastruktur	96,47
1.03.1.03.01.30	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	99,04
1.03.1.03.01.30.02	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaaan	99,21
1.03.1.03.01.30.03	Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan	98,48
1.03.1.03.01.30.05	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaaan	97,98
1.03.1.20.03	Sekretariat Daerah	99,39
1.03.1.20.03.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	99,39
1.03.1.20.03.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	99,39
1.04	Perumahan	96,36
1.04.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	95,00
1.04.1.03.01.20	Program pengelolaan areal pemakaman	95,00
1.04.1.03.01.20.06	Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman	95,00
1.04.1.20.03	Sekretariat Daerah	97,17
1.04.1.20.03.20	Program pengelolaan areal pemakaman	97,17
1.04.1.20.03.20.07	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	97,17

1.05	Penataan Ruang	97,89
1.05.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	97,89
1.05.1.03.01.15	Program Perencanaan Tata Ruang	97,89
1.05.1.03.01.15.06	Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	97,89
1.06	Perencanaan Pembangunan	78,10
1.06.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	85,46
1.06.1.06.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,33
1.06.1.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00
1.06.1.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	69,03
1.06.1.06.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	86,43
1.06.1.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16,55
1.06.1.06.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92,39
1.06.1.06.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.06.1.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.06.1.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00
1.06.1.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7,54
1.06.1.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00
1.06.1.06.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.06.1.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00
1.06.1.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	85,61
1.06.1.06.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	93,59
1.06.1.06.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	81,99
1.06.1.06.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	77,62
1.06.1.06.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	99,75

1.06.1.06.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99,16
1.06.1.06.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	0,00
1.06.1.06.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0,00
1.06.1.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,75
1.06.1.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00
1.06.1.06.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100,00
1.06.1.06.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	88,88
1.06.1.06.01.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	88,88
1.06.1.06.01.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	0,00
1.06.1.06.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	0,00
1.06.1.06.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	70,87
1.06.1.06.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	70,87
1.06.1.06.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00
1.06.1.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00
1.06.1.06.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100,00
1.06.1.06.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
1.06.1.06.01.15	Program Pengembangan data/informasi	86,53
1.06.1.06.01.15.02	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	86,53
1.06.1.06.01.18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis	97,56

	dan cepat tumbuh	
1.06.1.06.01.18.02	Koordinasi penetapan rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	97,56
1.06.1.06.01.20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	69,23
1.06.1.06.01.20.01	peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	58,77
1.06.1.06.01.20.03	Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	88,14
1.06.1.06.01.21	Program perencanaan pembangunan daerah	79,97
1.06.1.06.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	99,71
1.06.1.06.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	81,70
1.06.1.06.01.21.10	Penetapan RKPD	85,00
1.06.1.06.01.21.11	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Tahun 2009	0,00
1.06.1.06.01.21.12	Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	93,49
1.06.1.06.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	85,20
1.06.1.06.01.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	59,93
1.06.1.06.01.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	59,93
1.06.1.06.01.23	Program perencanaan sosial budaya	89,78
1.06.1.06.01.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	91,94
1.06.1.06.01.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	81,39
1.06.1.20.03	Sekretariat Daerah	32,54
1.06.1.20.03.17	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	28,14

1.06.1.20.03.17.01	Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah	45,50
1.06.1.20.03.17.06	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	5,85
1.06.1.20.03.21	Program perencanaan pembangunan daerah	34,84
1.06.1.20.03.21.11	Kordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	58,33
1.06.1.20.03.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	29,90
1.07	Perhubungan	94,63
1.07.1.07.01	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	94,63
1.07.1.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,97
1.07.1.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	56,96
1.07.1.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35,88
1.07.1.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	90,98
1.07.1.07.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	97,89
1.07.1.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,57
1.07.1.07.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.07.1.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	87,44
1.07.1.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	97,47
1.07.1.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	70,75
1.07.1.07.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,58
1.07.1.07.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	28,89
1.07.1.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	94,96
1.07.1.07.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,79
1.07.1.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97,66

1.07.1.07.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99,50
1.07.1.07.01.02.10	Pengadaan mebeleur	98,87
1.07.1.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,22
1.07.1.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	91,74
1.07.1.07.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	67,50
1.07.1.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.07.1.07.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.07.1.07.01.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	50,00
1.07.1.07.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	50,00
1.07.1.07.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	60,34
1.07.1.07.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60,34
1.07.1.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	97,90
1.07.1.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	97,50
1.07.1.07.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99,60
1.07.1.07.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	96,60
1.07.1.07.01.16	Program Pembangunan dan Rehabilitasi / Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLASDP	99,14
1.07.1.07.01.16.01	Pembangunan Dermaga/ Gedung Kantor LLASDP	99,14
1.07.1.07.01.17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	97,66
1.07.1.07.01.17.02	Kegiatan peningkatan disiplin	97,18

	masyarakat menggunakan angkutan	
1.07.1.07.01.17.12	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan	98,89
1.07.1.07.01.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	99,69
1.07.1.07.01.19.01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	99,69
1.07.1.07.01.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	99,33
1.07.1.07.01.20.01	Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor	99,34
1.07.1.07.01.20.02	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	99,25
1.08	Lingkungan Hidup	95,46
1.08.1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	95,80
1.08.1.03.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	93,14
1.08.1.03.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	98,64
1.08.1.03.01.15.04	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	90,41
1.08.1.03.01.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	99,14
1.08.1.03.01.24.05	Penataan RTH	99,26
1.08.1.03.01.24.06	Pemeliharaan RTH	98,87
1.08.1.08.02	Badan Lingkungan Hidup	93,34
1.08.1.08.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	92,46
1.08.1.08.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00
1.08.1.08.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	68,00
1.08.1.08.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	93,82
1.08.1.08.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	91,61

1.08.1.08.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	99,69
1.08.1.08.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.08.1.08.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,40
1.08.1.08.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00
1.08.1.08.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.08.1.08.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,70
1.08.1.08.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.08.1.08.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,57
1.08.1.08.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	95,25
1.08.1.08.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,71
1.08.1.08.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97,64
1.08.1.08.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	92,81
1.08.1.08.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99,86
1.08.1.08.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	97,81
1.08.1.08.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.08.1.08.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.08.1.08.02.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	99,50
1.08.1.08.02.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	99,50
1.08.1.08.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	71,60
1.08.1.08.02.05.01	Bimbingan Tehnik dan Pelatihan	71,60
1.08.1.08.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00
1.08.1.08.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja	100,00

	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
1.08.1.08.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100,00
1.08.1.08.02.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	94,42
1.08.1.08.02.16.01	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	99,89
1.08.1.08.02.16.05	Penanganan Kasus Perusakan dan Pencemaran Lingkungan	65,77
1.08.1.08.02.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	94,18
1.08.1.08.02.16.08	Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan	100,00
1.08.1.08.02.16.13	Koordinasi penyusunan AMDAL	99,88
1.08.1.08.02.16.14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	94,26
1.08.1.08.02.16.16	Monitoring dan Pelaporan	100,00
1.08.1.08.02.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	96,31
1.08.1.08.02.17.01	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	87,58
1.08.1.08.02.17.13	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	97,15
1.08.1.08.02.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100,00
1.08.1.08.02.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	100,00
1.08.1.08.02.20	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	35,06
1.08.1.08.02.20.02	Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	0,00
1.08.1.08.02.20.03	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	61,83
1.08.1.08.02.20.05	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	34,62

1.08.1.08.02.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	98,97
1.08.1.08.02.24.01	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	98,97
1.09	Pertanahan	29,63
1.09.1.20.03	Sekretariat Daerah	29,63
1.09.1.20.03.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	29,63
1.09.1.20.03.16.01	Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah	29,63
1.10	Kependudukan dan Catatan Sipil	84,17
1.10.1.10.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,17
1.10.1.10.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,79
1.10.1.10.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	87,22
1.10.1.10.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43,07
1.10.1.10.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	98,32
1.10.1.10.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	89,77
1.10.1.10.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.10.1.10.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	98,49
1.10.1.10.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.10.1.10.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	92,96
1.10.1.10.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	60,91
1.10.1.10.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	98,92
1.10.1.10.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,98
1.10.1.10.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	83,17
1.10.1.10.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	55,71
1.10.1.10.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85,38

1.10.1.10.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.10.1.10.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.10.1.10.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	0,00
1.10.1.10.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00
1.10.1.10.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,60
1.10.1.10.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99,60
1.10.1.10.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99,60
1.10.1.10.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	99,60
1.10.1.10.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	85,95
1.10.1.10.01.15.01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	88,70
1.10.1.10.01.15.02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	100,00
1.10.1.10.01.15.03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)	36,66
1.10.1.10.01.15.06	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	76,13
1.10.1.10.01.15.09	Pengembangan data base kependudukan	0,00
1.10.1.10.01.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	99,81
1.11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87,43
1.11.1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	87,43
1.11.1.11.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	88,63
1.11.1.11.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1,50
1.11.1.11.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	75,88

	daya air dan listrik	
1.11.1.11.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65,60
1.11.1.11.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89,18
1.11.1.11.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	96,45
1.11.1.11.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	67,71
1.11.1.11.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,99
1.11.1.11.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,80
1.11.1.11.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	54,30
1.11.1.11.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,50
1.11.1.11.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	88,55
1.11.1.11.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	35,71
1.11.1.11.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	84,04
1.11.1.11.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	94,36
1.11.1.11.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90,41
1.11.1.11.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00
1.11.1.11.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	89,55
1.11.1.11.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.11.1.11.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.11.1.11.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	96,33
1.11.1.11.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	96,33
1.11.1.11.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88,40

1.11.1.11.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	89,60
1.11.1.11.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	88,80
1.11.1.11.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	86,80
1.11.1.11.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	68,70
1.11.1.11.01.16.02	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	52,74
1.11.1.11.01.16.03	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	87,26
1.11.1.11.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	97,11
1.11.1.11.01.17.06	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	98,58
1.11.1.11.01.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	95,84
1.11.1.11.01.18	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	90,49
1.11.1.11.01.18.01	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	96,77
1.11.1.11.01.18.03	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	86,47
1.11.1.11.01.19	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	75,78
1.11.1.11.01.19.02	Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender	75,78
1.12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	83,41

1.12.1.11.01	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	83,41
1.12.1.11.01.17	Program pelayanan kontrasepsi	83,58
1.12.1.11.01.17.01	Pelayanan konseling KB	88,44
1.12.1.11.01.17.02	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	79,64
1.12.1.11.01.21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	80,95
1.12.1.11.01.21.01	Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	80,95
1.13	Sosial	90,98
1.13.1.13.01	Dinas Sosial	90,74
1.13.1.13.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,52
1.13.1.13.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	42,14
1.13.1.13.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	40,54
1.13.1.13.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	37,42
1.13.1.13.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	90,23
1.13.1.13.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	97,88
1.13.1.13.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.13.1.13.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.13.1.13.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00
1.13.1.13.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.13.1.13.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	95,25
1.13.1.13.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.13.1.13.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0,00
1.13.1.13.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	82,90
1.13.1.13.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,74

1.13.1.13.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	96,41
1.13.1.13.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional	99,66
1.13.1.13.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,78
1.13.1.13.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59,45
1.13.1.13.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,00
1.13.1.13.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	80,00
1.13.1.13.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	80,00
1.13.1.13.01.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	39,19
1.13.1.13.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	39,19
1.13.1.13.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	81,87
1.13.1.13.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	81,87
1.13.1.13.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00
1.13.1.13.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00
1.13.1.13.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100,00
1.13.1.13.01.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	100,00
1.13.1.13.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
1.13.1.13.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	99,61
1.13.1.13.01.15.04	Pengadaan sarana dan prasarana	99,61

	pendukung usaha bagi keluarga miskin	
1.13.1.13.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	71,29
1.13.1.13.01.16.07	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	99,77
1.13.1.13.01.16.10	penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	63,22
1.13.1.13.01.18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	97,89
1.13.1.13.01.18.03	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	97,89
1.13.1.13.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	88,28
1.13.1.13.01.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	88,33
1.13.1.13.01.21.05	Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	88,21
1.13.1.20.03	Sekretariat Daerah	99,26
1.13.1.20.03.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	99,26
1.13.1.20.03.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	99,26
1.14	Ketenagakerjaan	94,95
1.14.1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94,95
1.14.1.14.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,38
1.14.1.14.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	80,08
1.14.1.14.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	73,65
1.14.1.14.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan	97,23

	perizinan kendaraan dinas/operasional	
1.14.1.14.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96,75
1.14.1.14.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	70,02
1.14.1.14.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	94,23
1.14.1.14.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,49
1.14.1.14.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,94
1.14.1.14.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.14.1.14.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,35
1.14.1.14.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	99,67
1.14.1.14.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	61,60
1.14.1.14.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	76,58
1.14.1.14.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,91
1.14.1.14.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	96,61
1.14.1.14.01.02.10	Pengadaan mebeleur	99,47
1.14.1.14.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	97,90
1.14.1.14.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	95,69
1.14.1.14.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	97,75
1.14.1.14.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	97,75
1.14.1.14.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	91,16
1.14.1.14.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	91,16
1.14.1.14.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,03
1.14.1.14.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja	98,60

	dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
1.14.1.14.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	98,50
1.14.1.14.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
1.14.1.14.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	97,68
1.14.1.14.01.15.06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	97,63
1.14.1.14.01.15.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK	100,00
1.14.1.14.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	98,94
1.14.1.14.01.16.01	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	99,58
1.14.1.14.01.16.04	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	98,79
1.14.1.14.01.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	93,65
1.14.1.14.01.17.03	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	98,93
1.14.1.14.01.17.04	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	92,69
1.15	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	92,47
1.15.1.15.01	Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	92,47
1.15.1.15.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,77
1.15.1.15.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	81,25
1.15.1.15.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	88,42
1.15.1.15.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100,00
1.15.1.15.01.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100,00
1.15.1.15.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	98,20

	dinas/operasional	
1.15.1.15.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,80
1.15.1.15.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98,34
1.15.1.15.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	94,00
1.15.1.15.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,79
1.15.1.15.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	96,63
1.15.1.15.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	86,54
1.15.1.15.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,44
1.15.1.15.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	96,60
1.15.1.15.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00
1.15.1.15.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	95,71
1.15.1.15.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,95
1.15.1.15.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97,10
1.15.1.15.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99,38
1.15.1.15.01.02.10	Pengadaan mebeleur	99,61
1.15.1.15.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00
1.15.1.15.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	92,11
1.15.1.15.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.15.1.15.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.15.1.15.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	87,08
1.15.1.15.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	87,08
1.15.1.15.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,50

1.15.1.15.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99,30
1.15.1.15.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99,20
1.15.1.15.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
1.15.1.15.01.15	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	96,46
1.15.1.15.01.15.02	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	95,56
1.15.1.15.01.15.06	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	97,08
1.15.1.15.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	97,18
1.15.1.15.01.16.05	Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi	98,23
1.15.1.15.01.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	93,18
1.15.1.15.01.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	54,21
1.15.1.15.01.17.05	Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	54,21
1.15.1.15.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	83,12
1.15.1.15.01.18.02	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian	100,00
1.15.1.15.01.18.03	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian	96,60
1.15.1.15.01.18.04	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	99,85
1.15.1.15.01.18.05	Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	39,42
1.15.1.15.01.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	77,29

1.15.1.15.01.18.07	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	80,12
1.15.1.15.01.18.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	83,46
1.16	Penanaman Modal	84,32
1.16.1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70,11
1.16.1.06.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	70,11
1.16.1.06.01.15.05	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	70,11
1.16.2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	88,29
1.16.2.07.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	88,29
1.16.2.07.01.15.04	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/ PMA	80,16
1.16.2.07.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	96,66
1.17	Kebudayaan	91,13
1.17.2.04.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	91,13
1.17.2.04.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	79,31
1.17.2.04.01.16.02	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno	98,50
1.17.2.04.01.16.11	Pendukung pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	1,92
1.17.2.04.01.16.12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	98,77
1.17.2.04.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	99,30
1.17.2.04.01.17.01	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	98,53
1.17.2.04.01.17.05	Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah	100,00
1.18	Kepemudaan dan Olah Raga	96,05

1.18.1.20.03	Sekretariat Daerah	96,05
1.18.1.20.03.18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	81,45
1.18.1.20.03.18.01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	81,45
1.18.1.20.03.20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	95,82
1.18.1.20.03.20.04	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	99,77
1.18.1.20.03.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	91,27
1.18.1.20.03.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	97,74
1.18.1.20.03.21.02	Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga	99,07
1.18.1.20.03.21.07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga	94,31
1.19	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	86,59
1.19.1.19.02	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	83,10
1.19.1.19.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85,47
1.19.1.19.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00
1.19.1.19.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53,98
1.19.1.19.02.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00
1.19.1.19.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	56,85
1.19.1.19.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,56
1.19.1.19.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	69,98
1.19.1.19.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	93,20
1.19.1.19.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,99
1.19.1.19.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	98,69
1.19.1.19.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	33,55

1.19.1.19.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	99,78
1.19.1.19.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	98,43
1.19.1.19.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	84,98
1.19.1.19.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100,00
1.19.1.19.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	86,75
1.19.1.19.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	93,33
1.19.1.19.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	98,84
1.19.1.19.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0,00
1.19.1.19.02.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	43,80
1.19.1.19.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	77,46
1.19.1.19.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	91,07
1.19.1.19.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	94,65
1.19.1.19.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	81,25
1.19.1.19.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81,25
1.19.1.19.02.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	0,00
1.19.1.19.02.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	0,00
1.19.1.19.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	58,90
1.19.1.19.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	58,90
1.19.1.19.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95,33
1.19.1.19.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00

1.19.1.19.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	92,00
1.19.1.19.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	94,00
1.19.1.19.02.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	71,52
1.19.1.19.02.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	71,46
1.19.1.19.02.15.02	Pembangunan pos jaga/ ronda	70,43
1.19.1.19.02.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	99,80
1.19.1.19.02.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	98,01
1.19.1.19.02.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	98,01
1.19.1.19.02.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	94,96
1.19.1.19.02.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	94,96
1.19.1.19.02.20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	86,48
1.19.1.19.02.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	82,39
1.19.1.19.02.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	94,13
1.19.1.19.02.21	Program pendidikan politik masyarakat	93,38
1.19.1.19.02.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	88,47
1.19.1.19.02.21.03	koordinasi forum-forum diskusi politik	100,00
1.19.1.19.02.21.04	Penyusunan data base partai politik	100,00
1.19.1.19.02.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	99,79
1.19.1.19.02.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	86,70

	alam	
1.19.1.19.02.22.01	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	86,70
1.19.1.19.03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	94,97
1.19.1.19.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87,48
1.19.1.19.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00
1.19.1.19.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	52,65
1.19.1.19.03.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	5,88
1.19.1.19.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	70,05
1.19.1.19.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,31
1.19.1.19.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.19.1.19.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.19.1.19.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,12
1.19.1.19.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.19.1.19.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,43
1.19.1.19.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	99,37
1.19.1.19.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	97,50
1.19.1.19.03.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	100,00
1.19.1.19.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	94,40
1.19.1.19.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	84,15
1.19.1.19.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95,60
1.19.1.19.03.02.10	Pengadaan mebeleur	95,95
1.19.1.19.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99,78
1.19.1.19.03.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	78,57
1.19.1.19.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	58,39

1.19.1.19.03.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	97,62
1.19.1.19.03.03	Program peningkatan disiplin aparat	100,00
1.19.1.19.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.19.1.19.03.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	100,00
1.19.1.19.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	72,86
1.19.1.19.03.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	72,86
1.19.1.19.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,61
1.19.1.19.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99,50
1.19.1.19.03.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99,45
1.19.1.19.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	99,90
1.19.1.19.03.15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	81,48
1.19.1.19.03.15.04	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	81,48
1.19.1.19.03.16	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	98,38
1.19.1.19.03.16.01	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	99,03
1.19.1.19.03.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	89,77
1.19.1.19.03.16.03	Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan	81,11
1.19.1.19.03.20	Program peningkatan	99,84

	pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	
1.19.1.19.03.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	99,78
1.19.1.19.03.20.02	Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi	100,00
1.19.1.19.03.20.04	Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme	100,00
1.19.1.19.03.20.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	99,49
1.19.1.20.03	Sekretariat Daerah	12,00
1.19.1.20.03.21	Program pendidikan politik masyarakat	12,00
1.19.1.20.03.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12,00
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	83,68
1.20.1.20.03	Sekretariat Daerah	85,48
1.20.1.20.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,42
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	22,60
1.20.1.20.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	94,93
1.20.1.20.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	71,51
1.20.1.20.03.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	0,00
1.20.1.20.03.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	59,41
1.20.1.20.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	53,93
1.20.1.20.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	98,44
1.20.1.20.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98,33
1.20.1.20.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	85,69
1.20.1.20.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	67,53
1.20.1.20.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan	92,31

	penggandaan	
1.20.1.20.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	95,29
1.20.1.20.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	88,24
1.20.1.20.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	62,69
1.20.1.20.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	79,37
1.20.1.20.03.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,81
1.20.1.20.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	86,96
1.20.1.20.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	89,39
1.20.1.20.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	98,53
1.20.1.20.03.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	87,65
1.20.1.20.03.02.11	Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Sarana Komunikasi	92,00
1.20.1.20.03.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	90,47
1.20.1.20.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	90,21
1.20.1.20.03.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	65,87
1.20.1.20.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	67,46
1.20.1.20.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	95,14
1.20.1.20.03.03	Program peningkatan disiplin aparatur	91,54
1.20.1.20.03.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	89,78
1.20.1.20.03.03.03	Pengadaan pakaian kerja lapangan	99,44
1.20.1.20.03.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	92,31
1.20.1.20.03.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	0,00
1.20.1.20.03.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	0,00

1.20.1.20.03.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	76,71
1.20.1.20.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	76,71
1.20.1.20.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66,02
1.20.1.20.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00
1.20.1.20.03.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	98,06
1.20.1.20.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
1.20.1.20.03.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	83,25
1.20.1.20.03.16.01	Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat	77,68
1.20.1.20.03.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	87,74
1.20.1.20.03.16.05	Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah	73,18
1.20.1.20.03.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	73,01
1.20.1.20.03.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	52,18
1.20.1.20.03.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	65,76
1.20.1.20.03.19.02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	85,06
1.20.1.20.03.19.03	Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	23,11
1.20.1.20.03.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	92,78
1.20.1.20.03.20.03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	92,78

1.20.1.20.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	84,10
1.20.1.20.03.26.01	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	70,87
1.20.1.20.03.26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan	86,72
1.20.1.20.03.26.06	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	82,98
1.20.1.20.04	Sekretariat DPRD	71,84
1.20.1.20.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83,59
1.20.1.20.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	0,00
1.20.1.20.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79,61
1.20.1.20.04.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	79,28
1.20.1.20.04.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	100,00
1.20.1.20.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26,85
1.20.1.20.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	80,81
1.20.1.20.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	99,49
1.20.1.20.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	94,78
1.20.1.20.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	80,14
1.20.1.20.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	80,00
1.20.1.20.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	90,03
1.20.1.20.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	63,37
1.20.1.20.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	96,70
1.20.1.20.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	84,53
1.20.1.20.04.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	91,81

1.20.1.20.04.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	64,61
1.20.1.20.04.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	99,76
1.20.1.20.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	43,38
1.20.1.20.04.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	82,77
1.20.1.20.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	84,99
1.20.1.20.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	58,30
1.20.1.20.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	50,00
1.20.1.20.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	96,99
1.20.1.20.04.03	Program peningkatan disiplin aparatur	51,48
1.20.1.20.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	51,48
1.20.1.20.04.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	71,92
1.20.1.20.04.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	71,92
1.20.1.20.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00
1.20.1.20.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00
1.20.1.20.04.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00
1.20.1.20.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00
1.20.1.20.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	65,40
1.20.1.20.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	72,60
1.20.1.20.04.15.02	Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah	59,20

	dan tokoh masyarakat/ tokoh agama	
1.20.1.20.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	99,07
1.20.1.20.04.15.04	Rapat-rapat paripurna	99,94
1.20.1.20.04.15.05	Kegiatan Reses	40,09
1.20.1.20.04.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	32,10
1.20.1.20.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	68,01
1.20.1.20.05	Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah	83,45
1.20.1.20.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,01
1.20.1.20.05.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14,41
1.20.1.20.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79,07
1.20.1.20.05.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	52,57
1.20.1.20.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	85,33
1.20.1.20.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98,05
1.20.1.20.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	87,62
1.20.1.20.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	94,52
1.20.1.20.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	86,31
1.20.1.20.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	96,18
1.20.1.20.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	96,71
1.20.1.20.05.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.20.1.20.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,15
1.20.1.20.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	74,19
1.20.1.20.05.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97,26
1.20.1.20.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	95,06
1.20.1.20.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	98,40
1.20.1.20.05.02.05	Pengadaan kendaraan	92,40

	dinas/operasional	
1.20.1.20.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14,96
1.20.1.20.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	92,98
1.20.1.20.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	78,41
1.20.1.20.05.03	Program peningkatan disiplin aparatur	90,31
1.20.1.20.05.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	90,72
1.20.1.20.05.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	89,98
1.20.1.20.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	48,39
1.20.1.20.05.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	48,39
1.20.1.20.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	24,39
1.20.1.20.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00
1.20.1.20.05.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	25,55
1.20.1.20.05.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	0,00
1.20.1.20.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00
1.20.1.20.05.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	78,52
1.20.1.20.05.17.01	Penyusunan analisa standar belanja	98,00
1.20.1.20.05.17.06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	88,79
1.20.1.20.05.17.07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	42,83
1.20.1.20.05.17.08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	59,16
1.20.1.20.05.17.09	Penyusunan rancangan peraturan	88,53

	KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	
1.20.1.20.05.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	72,54
1.20.1.20.05.17.11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	87,90
1.20.1.20.05.17.13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	97,92
1.20.1.20.05.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	72,73
1.20.1.20.05.17.15	Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	45,60
1.20.1.20.05.17.19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah	85,84
1.20.1.20.06	Badan Kepegawaian	79,52
1.20.1.20.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	91,24
1.20.1.20.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	11,70
1.20.1.20.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67,81
1.20.1.20.06.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	92,14
1.20.1.20.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92,22
1.20.1.20.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	88,19
1.20.1.20.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	93,51
1.20.1.20.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.20.1.20.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	94,97
1.20.1.20.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.20.1.20.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	97,15
1.20.1.20.06.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.20.1.20.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99,60

1.20.1.20.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	73,99
1.20.1.20.06.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	97,58
1.20.1.20.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92,08
1.20.1.20.06.02.10	Pengadaan mebeleur	98,63
1.20.1.20.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	97,52
1.20.1.20.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	79,93
1.20.1.20.06.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100,00
1.20.1.20.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	97,90
1.20.1.20.06.03	Program peningkatan disiplin aparatur	97,36
1.20.1.20.06.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	97,36
1.20.1.20.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	61,32
1.20.1.20.06.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	61,32
1.20.1.20.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	88,16
1.20.1.20.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00
1.20.1.20.06.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	90,00
1.20.1.20.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	74,50
1.20.1.20.06.29	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	94,99
1.20.1.20.06.29.01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	97,37
1.20.1.20.06.29.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	94,20
1.20.1.20.06.30	Program Pembinaan dan	71,44

	Pengembangan Aparatur	
1.20.1.20.06.30.01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	43,84
1.20.1.20.06.30.02	Seleksi penerimaan calon PNS	66,79
1.20.1.20.06.30.03	Penempatan PNS	94,81
1.20.1.20.06.30.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	63,99
1.20.1.20.06.30.05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	88,62
1.20.1.20.06.30.07	Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar	58,41
1.20.1.20.06.30.09	<i>Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS</i>	40,78
1.20.1.20.06.30.11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	86,76
1.20.1.20.06.30.12	Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN	61,12
1.20.1.20.07	Inspektorat Kabupaten	93,22
1.20.1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98,11
1.20.1.20.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	96,71
1.20.1.20.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	87,10
1.20.1.20.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	90,92
1.20.1.20.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,78
1.20.1.20.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	99,66
1.20.1.20.07.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	99,61
1.20.1.20.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,95
1.20.1.20.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,78
1.20.1.20.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	99,40
1.20.1.20.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	98,42
1.20.1.20.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00
1.20.1.20.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	99,68

1.20.1.20.07.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,97
1.20.1.20.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,94
1.20.1.20.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,87
1.20.1.20.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00
1.20.1.20.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	99,78
1.20.1.20.07.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.20.1.20.07.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.20.1.20.07.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	99,93
1.20.1.20.07.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	99,93
1.20.1.20.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	95,60
1.20.1.20.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	94,30
1.20.1.20.07.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	98,20
1.20.1.20.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	94,30
1.20.1.20.07.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	98,94
1.20.1.20.07.20.01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	99,54
1.20.1.20.07.20.02	Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	93,58
1.20.1.20.07.20.06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	99,92
1.20.1.20.07.21	Program Peningkatan	56,10

	Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	
1.20.1.20.07.21.01	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	56,10
1.20.1.20.08	Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan	91,06
1.20.1.20.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	93,03
1.20.1.20.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00
1.20.1.20.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,13
1.20.1.20.08.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	98,75
1.20.1.20.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	100,00
1.20.1.20.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100,00
1.20.1.20.08.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	87,50
1.20.1.20.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.20.1.20.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	96,19
1.20.1.20.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.20.1.20.08.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.20.1.20.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00
1.20.1.20.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	90,21
1.20.1.20.08.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,69
1.20.1.20.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98,00
1.20.1.20.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	97,99
1.20.1.20.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	98,01
1.20.1.20.08.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.20.1.20.08.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00

1.20.1.20.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	76,21
1.20.1.20.08.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	83,75
1.20.1.20.08.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	51,68
1.20.1.20.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00
1.20.1.20.08.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00
1.20.1.20.08.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00
1.20.1.20.08.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00
1.20.1.20.12	Kecamatan Arut Selatan	89,94
1.20.1.20.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	78,92
1.20.1.20.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	77,17
1.20.1.20.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49,31
1.20.1.20.12.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	40,62
1.20.1.20.12.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	93,26
1.20.1.20.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	92,75
1.20.1.20.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,80
1.20.1.20.12.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	66,32
1.20.1.20.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	62,26
1.20.1.20.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72,44
1.20.1.20.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.20.1.20.12.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,76
1.20.1.20.12.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
1.20.1.20.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	83,45
1.20.1.20.12.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58,45

1.20.1.20.12.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93,76
1.20.1.20.12.02.03	Pembangunan gedung kantor	97,82
1.20.1.20.12.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	99,68
1.20.1.20.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00
1.20.1.20.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	60,83
1.20.1.20.12.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100,00
1.20.1.20.12.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	90,89
1.20.1.20.12.03	Program peningkatan disiplin aparatur	97,44
1.20.1.20.12.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	97,44
1.20.1.20.12.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	0,00
1.20.1.20.12.04.03	Pemindahan tugas PNS	0,00
1.20.1.20.12.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85,83
1.20.1.20.12.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	92,68
1.20.1.20.12.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	64,26
1.20.1.20.12.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	31,77
1.20.1.20.12.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00
1.20.1.20.12.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	95,32
1.20.1.20.12.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00
1.20.1.20.12.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100,00
1.20.1.20.12.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa	100,00

	tentang APB Desa	
1.20.1.20.13	Kecamatan Arut Utara	64,49
1.20.1.20.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	54,29
1.20.1.20.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	21,82
1.20.1.20.13.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	86,76
1.20.1.20.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	16,19
1.20.1.20.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	24,65
1.20.1.20.13.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	0,00
1.20.1.20.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	25,00
1.20.1.20.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	21,49
1.20.1.20.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	35,09
1.20.1.20.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	98,27
1.20.1.20.13.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	42,48
1.20.1.20.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	30,77
1.20.1.20.13.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	58,42
1.20.1.20.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	77,91
1.20.1.20.13.02.02	Pembangunan rumah dinas	90,63
1.20.1.20.13.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	99,99
1.20.1.20.13.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	15,31
1.20.1.20.13.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	12,18
1.20.1.20.13.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19,47
1.20.1.20.13.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	25,00
1.20.1.20.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25,00

1.20.1.20.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.20.1.20.13.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.20.1.20.13.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	59,29
1.20.1.20.13.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	70,44
1.20.1.20.13.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	0,00
1.20.1.20.13.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00
1.20.1.20.13.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00
1.20.1.20.13.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00
1.20.1.20.13.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00
1.20.1.20.14	Kecamatan Kumai	83,74
1.20.1.20.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75,85
1.20.1.20.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	79,80
1.20.1.20.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48,39
1.20.1.20.14.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	55,75
1.20.1.20.14.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	72,37
1.20.1.20.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	71,00
1.20.1.20.14.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	70,92
1.20.1.20.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	97,44
1.20.1.20.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75,13
1.20.1.20.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	61,53
1.20.1.20.14.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	90,80

1.20.1.20.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	85,71
1.20.1.20.14.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	78,14
1.20.1.20.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	98,61
1.20.1.20.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00
1.20.1.20.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	96,49
1.20.1.20.14.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	65,09
1.20.1.20.14.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	98,89
1.20.1.20.14.03	Program peningkatan disiplin aparatur	99,59
1.20.1.20.14.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99,59
1.20.1.20.14.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	59,30
1.20.1.20.14.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	83,60
1.20.1.20.14.04.03	Pemindahan tugas PNS	0,00
1.20.1.20.14.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	7,21
1.20.1.20.14.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	4,21
1.20.1.20.14.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	14,28
1.20.1.20.14.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	95,36
1.20.1.20.14.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	64,44
1.20.1.20.14.19.02	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang pendapatan desa	100,00
1.20.1.20.15	Kecamatan Kotawaringin Lama	87,23
1.20.1.20.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	73,97
1.20.1.20.15.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00

1.20.1.20.15.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	61,50
1.20.1.20.15.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	46,40
1.20.1.20.15.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	60,71
1.20.1.20.15.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	72,82
1.20.1.20.15.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.20.1.20.15.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	69,15
1.20.1.20.15.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	79,26
1.20.1.20.15.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,72
1.20.1.20.15.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	97,25
1.20.1.20.15.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	45,40
1.20.1.20.15.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	92,84
1.20.1.20.15.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	71,01
1.20.1.20.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	97,58
1.20.1.20.15.02.01	Pembangunan rumah jabatan	97,60
1.20.1.20.15.02.02	Pembangunan rumah dinas	98,78
1.20.1.20.15.02.03	Pembangunan gedung kantor	97,99
1.20.1.20.15.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99,67
1.20.1.20.15.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,46
1.20.1.20.15.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	69,76
1.20.1.20.15.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	98,65
1.20.1.20.15.03	Program peningkatan disiplin aparatur	96,66
1.20.1.20.15.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	96,66
1.20.1.20.15.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	28,71

1.20.1.20.15.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	40,20
1.20.1.20.15.04.03	Pemindahan tugas PNS	0,00
1.20.1.20.15.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	98,25
1.20.1.20.15.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	96,30
1.20.1.20.15.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	98,88
1.20.1.20.15.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0,00
1.20.1.20.15.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00
1.20.1.20.15.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	0,00
1.20.1.20.15.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00
1.20.1.20.15.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100,00
1.20.1.20.15.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	100,00
1.20.1.20.16	Kecamatan Pangkalan Lada	96,25
1.20.1.20.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	96,65
1.20.1.20.16.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00
1.20.1.20.16.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	88,14
1.20.1.20.16.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	92,92
1.20.1.20.16.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,55
1.20.1.20.16.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	97,34
1.20.1.20.16.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	76,53
1.20.1.20.16.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.20.1.20.16.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00
1.20.1.20.16.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00

1.20.1.20.16.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,79
1.20.1.20.16.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	98,34
1.20.1.20.16.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	75,00
1.20.1.20.16.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	97,09
1.20.1.20.16.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90,75
1.20.1.20.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	96,44
1.20.1.20.16.02.02	Pembangunan rumah dinas	95,12
1.20.1.20.16.02.03	Pembangunan gedung kantor	99,57
1.20.1.20.16.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	99,83
1.20.1.20.16.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	99,98
1.20.1.20.16.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	64,25
1.20.1.20.16.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	74,13
1.20.1.20.16.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	97,74
1.20.1.20.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur	99,88
1.20.1.20.16.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99,88
1.20.1.20.16.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	94,70
1.20.1.20.16.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	99,92
1.20.1.20.16.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	76,24
1.20.1.20.16.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66,56
1.20.1.20.16.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0,00
1.20.1.20.16.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100,00

1.20.1.20.16.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	99,70
1.20.1.20.16.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	95,50
1.20.1.20.16.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	95,50
1.20.1.20.17	Kecamatan Pangkalan Banteng	94,23
1.20.1.20.17.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,48
1.20.1.20.17.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00
1.20.1.20.17.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	82,18
1.20.1.20.17.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	33,64
1.20.1.20.17.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96,75
1.20.1.20.17.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	98,00
1.20.1.20.17.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	11,20
1.20.1.20.17.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,19
1.20.1.20.17.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	75,73
1.20.1.20.17.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	71,14
1.20.1.20.17.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	85,79
1.20.1.20.17.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	34,15
1.20.1.20.17.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	59,81
1.20.1.20.17.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,96
1.20.1.20.17.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,39
1.20.1.20.17.02.02	Pembangunan rumah dinas	99,72
1.20.1.20.17.02.03	Pembangunan gedung kantor	99,62
1.20.1.20.17.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	94,44
1.20.1.20.17.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	87,74

1.20.1.20.17.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	76,39
1.20.1.20.17.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	87,84
1.20.1.20.17.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	98,12
1.20.1.20.17.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
1.20.1.20.17.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
1.20.1.20.17.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	80,75
1.20.1.20.17.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	99,10
1.20.1.20.17.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	74,27
1.20.1.20.17.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	32,23
1.20.1.20.17.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	39,40
1.20.1.20.17.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	39,40
1.20.1.20.17.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	17,90
1.20.1.20.17.19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100,00
1.20.1.20.17.19.01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	100,00
1.21	Ketahanan Pangan	84,11
1.21.1.21.01	Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan	84,11
1.21.1.21.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	77,21
1.21.1.21.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	10,91
1.21.1.21.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29,62
1.21.1.21.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	88,44

1.21.1.21.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	93,58
1.21.1.21.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.21.1.21.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	64,10
1.21.1.21.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	97,10
1.21.1.21.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	95,09
1.21.1.21.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	81,52
1.21.1.21.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	84,76
1.21.1.21.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16,59
1.21.1.21.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	85,30
1.21.1.21.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	79,97
1.21.1.21.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93,95
1.21.1.21.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	92,30
1.21.1.21.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	98,94
1.21.1.21.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	89,99
1.21.1.21.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,00
1.21.1.21.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	94,88
1.21.1.21.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	94,88
1.21.1.21.01.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	89,36
1.21.1.21.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	89,36
1.21.1.21.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	92,86
1.21.1.21.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	92,86

1.21.1.21.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00
1.21.1.21.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100,00
1.21.1.21.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	87,09
1.21.1.21.01.16.02	Penyusunan data base potensi produk pangan	87,09
1.22	Pemberdayaan Masyarakat Desa	85,17
1.22.1.20.03	Sekretariat Daerah	79,29
1.22.1.20.03.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	79,29
1.22.1.20.03.18.02	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	63,56
1.22.1.20.03.18.03	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	90,20
1.22.1.22.01	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	85,66
1.22.1.22.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,35
1.22.1.22.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00
1.22.1.22.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	49,63
1.22.1.22.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	91,87
1.22.1.22.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	98,91
1.22.1.22.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	78,88
1.22.1.22.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	99,91
1.22.1.22.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	98,42
1.22.1.22.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	99,71
1.22.1.22.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	92,94
1.22.1.22.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan	0,00

	peraturan perundang-undangan	
1.22.1.22.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	85,94
1.22.1.22.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	96,73
1.22.1.22.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	84,62
1.22.1.22.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	75,66
1.22.1.22.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	98,97
1.22.1.22.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	99,22
1.22.1.22.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00
1.22.1.22.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00
1.22.1.22.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	72,82
1.22.1.22.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	99,57
1.22.1.22.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99,57
1.22.1.22.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	50,64
1.22.1.22.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50,64
1.22.1.22.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	65,66
1.22.1.22.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	98,50
1.22.1.22.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	98,50
1.22.1.22.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	0,00
1.22.1.22.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	79,04
1.22.1.22.01.15.01	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	87,46
1.22.1.22.01.15.02	Penyelenggaraan Pendidikan dan	84,49

	Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	
1.22.1.22.01.15.03	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	77,23
1.22.1.22.01.16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	99,01
1.22.1.22.01.16.05	Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan	99,53
1.22.1.22.01.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	83,60
1.22.1.22.01.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	71,66
1.22.1.22.01.17.01	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	81,45
1.22.1.22.01.17.03	Pemberian stimulan pembangunan desa	69,93
1.22.1.22.01.17.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	0,00
1.24	Kearsipan	95,83
1.24.1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	95,83
1.24.1.24.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,43
1.24.1.24.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	91,58
1.24.1.24.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	45,68
1.24.1.24.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	95,21
1.24.1.24.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	88,54
1.24.1.24.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
1.24.1.24.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
1.24.1.24.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	91,18
1.24.1.24.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
1.24.1.24.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00
1.24.1.24.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	78,24

1.24.1.24.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,37
1.24.1.24.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,26
1.24.1.24.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	99,56
1.24.1.24.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,00
1.24.1.24.01.02.10	Pengadaan mebeleur	99,31
1.24.1.24.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	98,96
1.24.1.24.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	90,30
1.24.1.24.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	99,67
1.24.1.24.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	86,66
1.24.1.24.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	86,66
1.24.1.24.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	55,10
1.24.1.24.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55,10
1.24.1.24.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,53
1.24.1.24.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	99,60
1.24.1.24.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99,60
1.24.1.24.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	99,40
1.24.1.24.01.15	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	96,91
1.24.1.24.01.15.02	Pengumpulan data	99,18
1.24.1.24.01.15.03	Pengklasifikasikan data	90,99
1.24.1.24.01.15.04	Penyusunan sistem katalog data	99,65

1.24.1.24.01.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	99,93
1.24.1.24.01.16.01	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	99,93
1.24.1.24.01.18	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	95,03
1.24.1.24.01.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	95,03
1.25	Komunikasi dan Informatika	92,21
1.25.1.20.03	Sekretariat Daerah	92,21
1.25.1.20.03.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	85,43
1.25.1.20.03.15.03	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	85,43
1.25.1.20.03.18	Program kerjasama informasi dan media massa	93,54
1.25.1.20.03.18.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	94,79
1.25.1.20.03.18.03	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	61,16
1.26	Perpustakaan	97,68
1.26.1.24.01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah	97,68
1.26.1.24.01.09	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	97,68
1.26.1.24.01.09.04	Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	99,57
1.26.1.24.01.09.05	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	92,24
1.26.1.24.01.09.06	Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	97,18

1.26.1.24.01.09.12	Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	97,97
1.26.1.24.01.09.13	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	93,07
1.26.1.24.01.09.15	Pengklasifikasian Bahan Pustaka	98,87
1.26.1.24.01.09.16	Penyusunan Sistem Katalogisasi	98,41
2	URUSAN PILIHAN	55,36
2.01	Pertanian	92,26
2.01.1.21.01	Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan	77,46
2.01.1.21.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	77,46
2.01.1.21.01.20.01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	62,32
2.01.1.21.01.20.02	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	84,30
2.01.1.21.01.20.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	87,95
2.01.2.01.01	Dinas Pertanian dan Peternakan	96,81
2.01.2.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	94,18
2.01.2.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	98,81
2.01.2.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60,75
2.01.2.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	94,23
2.01.2.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	97,32
2.01.2.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	93,48
2.01.2.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
2.01.2.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
2.01.2.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00
2.01.2.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	99,93
2.01.2.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,53
2.01.2.01.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	99,96
2.01.2.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan	100,00

	peraturan perundang-undangan	
2.01.2.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	96,22
2.01.2.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,83
2.01.2.01.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	92,16
2.01.2.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	89,37
2.01.2.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	74,16
2.01.2.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	99,59
2.01.2.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,86
2.01.2.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100,00
2.01.2.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	100,00
2.01.2.01.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	99,55
2.01.2.01.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	99,55
2.01.2.01.01.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	0,00
2.01.2.01.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	0,00
2.01.2.01.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	85,75
2.01.2.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	85,75
2.01.2.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00
2.01.2.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00
2.01.2.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100,00
2.01.2.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
2.01.2.01.01.15	Program Peningkatan	92,95

	Kesejahteraan Petani	
2.01.2.01.01.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	92,95
2.01.2.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	98,73
2.01.2.01.01.16.02	Penyusunan data base potensi produk pangan	98,91
2.01.2.01.01.16.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	73,39
2.01.2.01.01.16.15	Pengembangan Intensifikasi Padi dan Palawija	99,42
2.01.2.01.01.16.20	Pengembangan perbibihan/perbibitan	99,04
2.01.2.01.01.16.24	Koordinasi perumusan kebijakan pertanahan dan infrastruktur pertanian dan perdesaan	91,86
2.01.2.01.01.16.31	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	98,40
2.01.2.01.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	88,59
2.01.2.01.01.18.08	Pengembangan dan Pendayagunaan Alat Mesin Pertanian	88,59
2.01.2.01.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	97,89
2.01.2.01.01.19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	95,77
2.01.2.01.01.19.07	Perlindungan dan Pengamanan Produksi Pertanian	93,24
2.01.2.01.01.19.08	Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air Pertanian	98,21
2.01.2.01.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	94,23
2.01.2.01.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	93,91
2.01.2.01.01.21.04	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	94,94
2.01.2.01.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	95,94
2.01.2.01.01.22.02	Pembibitan dan perawatan ternak	94,68
2.01.2.01.01.22.03	Pendistribusian bibit ternak kepada	97,25

	masyarakat	
2.01.2.01.01.22.08	Pengembangan agribisnis pertenakan	93,79
2.01.2.01.01.22.10	Penyediaan Sarana Produksi Peternakan	96,96
2.01.2.01.02	Dinas Perkebunan	85,06
2.01.2.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	89,05
2.01.2.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	76,00
2.01.2.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36,22
2.01.2.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	96,92
2.01.2.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	86,00
2.01.2.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	74,70
2.01.2.01.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	100,00
2.01.2.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
2.01.2.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00
2.01.2.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	98,35
2.01.2.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	98,62
2.01.2.01.02.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	93,69
2.01.2.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	49,58
2.01.2.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	90,75
2.01.2.01.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	95,58
2.01.2.01.02.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,12
2.01.2.01.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	99,61
2.01.2.01.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	97,04
2.01.2.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,09

2.01.2.01.02.03	Program peningkatan disiplin aparatur	83,40
2.01.2.01.02.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	83,40
2.01.2.01.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	71,34
2.01.2.01.02.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	71,34
2.01.2.01.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100,00
2.01.2.01.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00
2.01.2.01.02.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	100,00
2.01.2.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
2.01.2.01.02.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	34,49
2.01.2.01.02.15.01	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	83,95
2.01.2.01.02.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	10,91
2.01.2.01.02.15.03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	84,17
2.01.2.01.02.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	92,61
2.01.2.01.02.16.02	Penyusunan data base potensi produk pangan	90,04
2.01.2.01.02.16.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	95,62
2.01.2.01.02.16.29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	91,89
2.01.2.01.02.16.31	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	85,28
2.01.2.01.02.17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	87,14

2.01.2.01.02.17.07	Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggul Daerah	97,01
2.01.2.01.02.17.10	pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	81,50
2.01.2.01.02.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	30,30
2.01.2.01.02.18.04	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	30,30
2.01.2.01.02.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	94,50
2.01.2.01.02.19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	95,61
2.01.2.01.02.19.03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	76,15
2.01.2.01.02.19.05	Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	67,21
2.01.2.01.02.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	95,10
2.02	Kehutanan	12,78
2.02.1.21.01	Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan	82,16
2.02.1.21.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	82,16
2.02.1.21.01.17.05	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	82,16
2.02.2.02.01	Dinas Kehutanan	12,67
2.02.2.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	79,53
2.02.2.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	36,46
2.02.2.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	47,04
2.02.2.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25,11
2.02.2.02.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	52,85
2.02.2.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi	97,23

	keuangan	
2.02.2.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	81,31
2.02.2.02.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	37,17
2.02.2.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	98,93
2.02.2.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90,49
2.02.2.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	98,31
2.02.2.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	74,99
2.02.2.02.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	96,78
2.02.2.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	33,33
2.02.2.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	89,40
2.02.2.02.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90,66
2.02.2.02.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	86,64
2.02.2.02.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	86,95
2.02.2.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	96,87
2.02.2.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	81,33
2.02.2.02.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	96,77
2.02.2.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	96,77
2.02.2.02.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	30,90
2.02.2.02.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	30,90
2.02.2.02.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	99,73
2.02.2.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100,00
2.02.2.02.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	99,20

2.02.2.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
2.02.2.02.01.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	38,14
2.02.2.02.01.15.04	Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan	93,79
2.02.2.02.01.15.06	Pengelolaan dan pemanfaatan hutan	17,76
2.02.2.02.01.15.07	Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan	82,89
2.02.2.02.01.15.08	Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan	53,79
2.02.2.02.01.15.09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	4,97
2.02.2.02.01.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan	6,13
2.02.2.02.01.16.01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	12,16
2.02.2.02.01.16.04	Pemeliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata	0,74
2.02.2.02.01.16.06	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan	10,52
2.02.2.02.01.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	64,62
2.02.2.02.01.17.01	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	45,11
2.02.2.02.01.17.04	Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	68,12
2.03	Energi dan Sumber Daya Mineral	83,34
2.03.1.20.03	Sekretariat Daerah	83,34
2.03.1.20.03.16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	83,34
2.03.1.20.03.16.01	Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat	83,34
2.04	Pariwisata	92,03
2.04.2.04.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	92,03
2.04.2.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	84,73

2.04.2.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	13,04
2.04.2.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44,53
2.04.2.04.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	95,20
2.04.2.04.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	70,44
2.04.2.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,82
2.04.2.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	85,80
2.04.2.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
2.04.2.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,99
2.04.2.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	65,37
2.04.2.04.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	44,88
2.04.2.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00
2.04.2.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	78,15
2.04.2.04.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,45
2.04.2.04.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,08
2.04.2.04.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,00
2.04.2.04.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	98,81
2.04.2.04.01.02.10	Pengadaan mebeleur	99,09
2.04.2.04.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	99,59
2.04.2.04.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	88,23
2.04.2.04.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	88,23
2.04.2.04.01.04	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	70,14
2.04.2.04.01.04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	70,14
2.04.2.04.01.05	Program peningkatan kapasitas	23,63

	sumber daya aparatur	
2.04.2.04.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	23,63
2.04.2.04.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	58,16
2.04.2.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72,50
2.04.2.04.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	40,00
2.04.2.04.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	62,00
2.04.2.04.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	88,99
2.04.2.04.01.15.01	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	99,66
2.04.2.04.01.15.02	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	99,66
2.04.2.04.01.15.03	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	0,00
2.04.2.04.01.15.04	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	88,96
2.04.2.04.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	99,55
2.04.2.04.01.15.08	Pelatihan pemandu wisata terpadu	99,51
2.04.2.04.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	98,85
2.04.2.04.01.16.01	Pengembangan objek pariwisata unggulan	98,96
2.04.2.04.01.16.02	Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	98,82
2.04.2.04.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	99,64
2.04.2.04.01.17.08	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	99,64
2.05	Kelautan dan Perikanan	92,75

2.05.2.05.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	92,75
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	90,25
2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	100,00
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	80,03
2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	82,77
2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,80
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	85,59
2.05.2.05.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	89,58
2.05.2.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
2.05.2.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100,00
2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
2.05.2.05.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100,00
2.05.2.05.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	100,00
2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	99,60
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	79,51
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	89,74
2.05.2.05.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	93,91
2.05.2.05.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	90,66
2.05.2.05.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100,00
2.05.2.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	100,00
2.05.2.05.01.02.10	Pengadaan mebeleur	100,00
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	99,35
2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	85,05
2.05.2.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	66,66
2.05.2.05.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	0,00

2.05.2.05.01.03	Program peningkatan disiplin aparat	90,00
2.05.2.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	90,00
2.05.2.05.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	83,15
2.05.2.05.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	83,15
2.05.2.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98,33
2.05.2.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	97,50
2.05.2.05.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	98,75
2.05.2.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	98,75
2.05.2.05.01.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	97,42
2.05.2.05.01.15.01	Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	97,42
2.05.2.05.01.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	92,39
2.05.2.05.01.16.01	Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	92,39
2.05.2.05.01.20	Program pengembangan budidaya perikanan	97,42
2.05.2.05.01.20.01	Pengembangan bibit ikan unggul	92,60
2.05.2.05.01.20.02	Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	98,63
2.05.2.05.01.20.03	Pembinaan dan pengembangan perikanan	98,61
2.05.2.05.01.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	98,14

2.05.2.05.01.21.02	Pembangunan tempat pelelangan ikan	98,14
2.05.2.05.01.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	64,26
2.05.2.05.01.23.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin Produk Perikanan	86,37
2.05.2.05.01.23.03	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan Tradisional	47,50
2.06	Perdagangan	92,39
2.06.1.15.01	Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	93,83
2.06.1.15.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	94,36
2.06.1.15.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	94,36
2.06.1.15.01.19	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	85,55
2.06.1.15.01.19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	89,93
2.06.1.15.01.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	57,18
2.06.2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	85,64
2.06.2.07.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	78,10
2.06.2.07.01.15.01	Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	89,43
2.06.2.07.01.15.02	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	0,00
2.06.2.07.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	85,95
2.06.2.07.01.15.04	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolgian daerah	67,18
2.06.2.07.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	87,60

2.06.2.07.01.17.02	Pengenbangan informasi peluang pasar perdagangan luar negri	91,04
2.06.2.07.01.17.04	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	76,94
2.06.2.07.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	99,51
2.06.2.07.01.18.03	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	99,34
2.06.2.07.01.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	99,72
2.07	Perindustrian	89,61
2.07.2.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	89,61
2.07.2.07.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	86,44
2.07.2.07.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	71,00
2.07.2.07.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	39,18
2.07.2.07.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	94,08
2.07.2.07.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	99,90
2.07.2.07.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90,58
2.07.2.07.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	71,42
2.07.2.07.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	100,00
2.07.2.07.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	99,96
2.07.2.07.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100,00
2.07.2.07.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	99,22
2.07.2.07.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	82,85
2.07.2.07.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	99,36
2.07.2.07.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	99,79
2.07.2.07.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100,00

2.07.2.07.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	99,70
2.07.2.07.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	100,00
2.07.2.07.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100,00
2.07.2.07.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	49,69
2.07.2.07.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	49,69
2.07.2.07.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	98,60
2.07.2.07.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	97,90
2.07.2.07.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	97,90
2.07.2.07.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	100,00
2.07.2.07.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	95,47
2.07.2.07.01.16.06	Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta	95,47
2.07.2.07.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	97,67
2.07.2.07.01.17.02	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	97,67
2.08	Ketransmigrasian	97,45
2.08.1.14.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	97,45
2.08.1.14.01.15	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	97,45
2.08.1.14.01.15.03	Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi	97,45

Jumlah	88,60
--------	-------

Pangkalan Bun,
Bupati Kotawaringin Barat

H. UJANG ISKANDAR, ST,M.Si